



**BerAKHLAK**  **bangga**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**  
**bangsa**

# RANCANGAN AWAL

# RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

## KABUPATEN BANGGAI

### TAHUN 2025–2029





BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai;
- b. perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7063);

dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025-2029.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banggai
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025-2045, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012 – 2032 yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Daerah adalah Kabupaten Banggai
10. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Bupati adalah Bupati Banggai.
13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
14. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah serta Program Perangkat

Daerah yang di sertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang di susun berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

#### Pasal 3

RPJMD sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. Pedoman bagi PD dalam menyusun Renstra PD;
- b. Pedoman pemerintah daerah dalam menyusun RKPD.

### BAB III

#### SISTEMATIKA RPJMD

#### Pasal 4

- (1) Dokumen RPJMD disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Gambaran Umum Daerah;

Bab III : Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;

Bab IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Bab V : Penutup;

- (2) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB IV

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD yang dilaksanakan oleh Kepala Bappeda.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengendalian terhadap perumusan kebijakan RPJMD;
  - b. pelaksanaan RPJMD; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil RPJMD.

- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PERUBAHAN RPJMD

### Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan / atau
  - d. merugikan kepentingan Nasional / Masyarakat luas.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 7

- (1) RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada RPJPD pada tahapan lima tahun kedua yaitu tahun 2030-2034, serta mengacu pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal ...  
BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal ...

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

RAMLI TONGKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ... NOMOR ...  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI, PROVINSI  
SULAWESI TENGAH : ...

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025-2029

I. PENJELASAN UMUM

Perencanaan pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan Pembangunan nasional. Sistem ini mencakup arah, tujuan, kebijakan, sasaran, dan prioritas sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam RPJPN kemudian dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN bertujuan memberikan Gambaran tentang wujud masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Selanjutnya, RPJMN diterjemahkan menjadi rencana operasional tahunan yang konkret, spesifik, dan terukur.

Selain mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh masyarakat, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memberikan arah dan tujuan dalam mencapai cita-cita pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi kepala daerah, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen ini disusun dengan mengacu pada tata cara evaluasi dan mekanisme perubahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah untuk kurun waktu lima tahun. Penyusunan RPJMD dilakukan dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN. RPJMD memuat:

- a. Arah kebijakan keuangan daerah,
- b. Strategi pembangunan daerah,
- c. Kebijakan umum pembangunan,
- d. Program pembangunan daerah,
- e. Program kewilayahan, serta
- f. Rencana kerja yang dilengkapi dengan kerangka regulasi dan pendanaan bersifat indikatif.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RPJMD berfungsi sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun anggaran, serta Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Melalui RPJMD, pemerintah daerah memiliki arah yang jelas untuk merealisasikan tujuan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR ...

# *Kata Pengantar*

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Periode 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029, serta selaras dengan arah kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen ini akan menjadi pedoman strategis dalam pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Visi pembangunan daerah yang menjadi dasar penyusunan RPJMD ini adalah: “Bergerak Bersama Berkelanjutan Menuju Gerbang Timur Sulawesi Tengah (GERBANG: GERakan BANGgai Terdepan, Inovatif, MajU dan sejahteRa)”. Visi ini mencerminkan semangat kolaborasi, keberlanjutan, inovasi, serta komitmen kuat untuk menjadikan Kabupaten Banggai sebagai wilayah yang strategis, unggul, dan berdaya saing di kawasan timur Sulawesi Tengah. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, RPJMD ini tidak hanya menetapkan arah pembangunan, tetapi juga menyajikan strategi, kebijakan, sasaran, indikator kinerja, serta proyeksi pembiayaan pembangunan secara menyeluruh dan terukur. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif melalui berbagai forum konsultasi publik, koordinasi antarperangkat daerah, dan penyelarasan lintas sektor agar dapat menjawab tantangan pembangunan masa kini dan masa depan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik dari unsur legislatif, jajaran perangkat daerah, akademisi, pelaku usaha, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat Kabupaten Banggai.

Harapan kami, dokumen RPJMD ini dapat dijadikan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Banggai secara merata. Semoga sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dapat mengantarkan Kabupaten Banggai menjadi daerah yang lebih maju, inovatif, dan sejahtera. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam mengemban tugas membangun Kabupaten Banggai tercinta.

Luwuk, ... Juli 2025

**BUPATI BANGGAI**

**Ir. H. AMIRUDIN, M.M**

# *Daftar Isi*

	<b>Hal.</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-4
1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	I-7
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-8
1.4.1. Maksud.....	I-9
1.4.2. Tujuan.....	I-9
1.5. Sistematika Penulisan.....	I-9
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH.....</b>	<b>II-1</b>
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-48
2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah.....	II-74
2.1.4. Aspek Pelayanan Umum.....	II-83
2.1.5. Standar Pelayanan Minimal.....	II-114
2.2. Gambaran Keuangan Daerah.....	II-121
2.2.1. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020- 2024.....	II-121
2.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah TA. 2026- 2030.....	II-142
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis.....	II-147

	<b>Hal.</b>
2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-147
2.3.2. Isu Straegis Daerah.....	II-184
<b>BAB III : VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS</b>	
<b>PEMBANGUNAN DAERAH.....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029.....	III-4
3.1.1. Visi dan Misi.....	III-4
3.1.2. Tujuan dan Sasaran.....	III-22
3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	III-43
3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029.....	III-44
3.2.2. Program – Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029.....	III-103
<b>BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>IV-1</b>
4.1. Program Perangkat Daerah.....	IV-1
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	IV-88
4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	IV-88
4.2.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD).....	IV-92
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>V-1</b>

# *Daftar Tabel*

			<b>Hal.</b>
Tabel	2.1	Produksi Tanaman Pertanian (Ton) di Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-5
Tabel	2.2	Produksi Tanaman Perkebunan (Ton) di Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-7
Tabel	2.3	Potensi Ketersediaan Pangan Kabupaten Banggai.....	II-17
Tabel	2.4	Rekapitulasi Dinamika Lingkungan di Kabupaten Banggai Terkait Perbandingan Status Daya Dukung Lingkungan Penyedia Pangan Pada Tahun 2025 dan Tahun 2029.....	II-25
Tabel	2.5	Potensi Ketersediaan Air di Kabupaten Banggai yang Bersumber Dari 71 DAS di Kabupaten Banggai.....	II-26
Tabel	2.6	Rekapitulasi Dinamika Lingkungan di Kabupaten Banggai Terkait Perbandingan Status Daya Dukung Lingkungan Penyedia Air Pada Tahun 2025 dan Tahun 2029.....	II-35
Tabel	2.7	Data Pembangkit EBT Eksisting Kabupaten Banggai.....	II-37
Tabel	2.8	Komponen Pembentuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2021-2024.....	II-40
Tabel	2.9	Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Banggai ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024.....	II-49
Tabel	2.10	PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024.....	II-51
Tabel	2.11	PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024.....	II-52
Tabel	2.12	PDRB Perkapita Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-53

			<b>Hal.</b>
Tabel	2.13	Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Banggai Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024.....	II-55
Tabel	2.14	Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-63
Tabel	2.15	Peta Universal Coverage Jamsostek Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah sampai Tahun 2025.....	II-71
Tabel	2.16	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019-2023.....	II-77
Tabel	2.17	Status Perkembangan Desa di Kabupaten Banggai Tahun 2024.....	II-82
Tabel	2.18	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-84
Tabel	2.19	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-84
Tabel	2.20	Indeks SPBE Kabupaten Banggai Tahun 2022-2024..	II-85
Tabel	2.21	Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-88
Tabel	2.22	Realisasi SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024.....	II-116
Tabel	2.23	Realisasi SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024.....	II-117
Tabel	2.24	Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024.....	II-118
Tabel	2.25	Realisasi SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024.....	II-119
Tabel	2.26	Realisasi SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 Kategori Indeks Pencapaian SPM Trantibumlinmas.....	II-119

			<b>Hal.</b>
Tabel	2.27	Realisasi SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024.....	II-120
Tabel	2.28	Realisasi SPM Bidang Sosial Tahun 2024.....	II-120
Tabel	2.29	Rata – Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024.....	II-124
Tabel	2.30	Pertumbuhan Realisasi Masing-Masing Unsur Pendapatan Tahun 2021-2024.....	II-126
Tabel	2.31	Pertumbuhan Masing-Masing Unsur PAD Tahun 2020-2024.....	II-128
Tabel	2.32	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-130
Tabel	2.33	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024 (Rupiah).....	II-135
Tabel	2.34	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Banggai.....	II-137
Tabel	2.35	Proyeksi APBD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029.....	II-144
Tabel	2.36	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II-152
Tabel	2.37	Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Terkait Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	II-177
Tabel	2.38	Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Terkait Urusan Pemerintahan Pilihan.....	II-181
Tabel	2.39	Keselarasan Isu Strategis Nasional, Sulawesi Tengah dan Kabupaten Banggai.....	II-241
Tabel	2.40	Keterkaitan Isu Strategis Jangka Panjang dengan Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Banggai 2025-2029.....	II-243

			<b>Hal.</b>
Tabel	3.1	Sasaran Visi RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029.....	III-7
Tabel	3.2	Keterkaitan Visi Nasional, Provinsi dan Kabupaten Banggai.....	III-8
Tabel	3.3	Keselarasan Misi RPJPD 2025-2045 dengan Misi RPJMD 2025-2029 .....	III-17
Tabel	3.4	Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Banggai 2025-2029 dengan Misi RPJMD Sulawesi Tengah 2025-2029.....	III-19
Tabel	3.5	Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Banggai 2025-2029 dengan Misi RPJM Nasional 2025-2029.....	III-20
Tabel	3.6	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	III-23
Tabel	3.7	Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 1 RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029.....	III-27
Tabel	3.8	Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 2 RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029.....	III-30
Tabel	3.9	Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 3 RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029.....	III-32
Tabel	3.10	Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 4 RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029.....	III-34
Tabel	3.11	Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 5 RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029.....	III-36
Tabel	3.12	Keterkaitan Visi Misi Tujuan Sasaran dan Indikator RPJMD Kabupaten Banggai 2025-2045.....	III-38
Tabel	3.13	Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029.....	III-45
Tabel	3.14	Tahapan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2026-2030.....	III-68
Tabel	3.15	Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045.....	III-102
Tabel	4.1	Program Perangkat Daerah.....	IV-3

			<b>Hal.</b>
Tabel	4.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Banggai Tahun 2025-2030.....	IV-89
Tabel	4.3	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Banggai Tahun 2025-2030.....	IV-93

# *Daftar Gambar*

		<b>Hal.</b>
Gambar 1.1	Penyusunan RPJMD Kabupaten Banggai.....	I-3
Gambar 1.2	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya.....	I-8
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Banggai.....	II-2
Gambar 2.2	Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap dan Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-4
Gambar 2.3	Kunjungan Wisatawan (Orang) di Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-7
Gambar 2.4	Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Banggai Tahun 2025.....	II-18
Gambar 2.5	Grafik Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Status Daya Dukung Penyedia Pangan di Kabupaten Banggai Tahun 2025.....	II-19
Gambar 2.6	Grafik Sebaran Luas Daya Dukung Penyedia Pangan Perwilayah Kecamatan di Kabupaten Banggai Tahun 2025.....	II-20
Gambar 2.7	Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Banggai Tahun 2029.....	II-21
Gambar 2.8	Grafik Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Status Daya Dukung Penyedia di Kabupaten Banggai Tahun 2029.....	II-22
Gambar 2.9	Grafik Sebaran Luasan Daya Dukung Penyedia Pangan Perwilayah Kecamatan di Kabupaten Banggai Tahun 2029.....	II-23

		<b>Hal.</b>
Gambar 2.10	Peta Daya Dukung Lingkungan Untuk Penyediaan Air di Kabupaten Banggai Tahun 2025.....	II-29
Gambar 2.11	Grafik Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Status Daya Dukung Penyedia Air di Kabupaten Banggai Tahun 2025.....	II-30
Gambar 2.12	Grafik Status Daya Dukung Daya Tampung Penyediaan Air di Kabupaten Banggai Tahun 2025.....	II-31
Gambar 2.13	Peta Daya Dukung Lingkungan Untuk Penyediaan Air di Kabupaten Banggai Tahun 2029.....	II-32
Gambar 2.14	Grafik Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Daya Dukung Penyedia Air di Kabupaten Banggai Tahun 2029.....	II-33
Gambar 2.15	Perkembangan Capaian Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum di Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-37
Gambar 2.16	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-38
Gambar 2.17	Perkembangan PoU (Prevalence of Undernourishment) Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-39
Gambar 2.18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Banggai Tahun 2019-2023.....	II-40
Gambar 2.19	Perkembangan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-41
Gambar 2.20	Perkembangan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....	II-42

			<b>Hal.</b>
Gambar 2.21	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....		II-43
Gambar 2.22	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....		II-43
Gambar 2.23	Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....		II-44
Gambar 2.24	Kepadatan Penduduk Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....		II-45
Gambar 2.25	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Banggai Tahun 2025-2030.....		II-45
Gambar 2.26	Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk (Jiwa) Kabupaten Banggai Tahun 2025-2030.....		II-46
Gambar 2.27	Proyeksi Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Kabupaten Banggai Tahun 2025-2030.....		II-47
Gambar 2.28	Proyeksi Kepadatan Penduduk (orang/km <sup>2</sup> ) Kabupaten Banggai Tahun 2025-2030.....		II-47
Gambar 2.29	PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....		II-48
Gambar 2.30	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....		II-54
Gambar 2.31	Angka Kemiskinan Kabupaten Banggai Tahun 2019-2024.....		II-56
Gambar 2.32	Angka Kemiskinan Ekstrim Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....		II-57
Gambar 2.33	Gini Rasio Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....		II-58
Gambar 2.34	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....		II-59
Gambar 2.35	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....		II-59

			<b>Hal.</b>
Gambar 2.36	Usia Harapan Hidup Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024 .....		II-60
Gambar 2.37	Perkembangan Capaian Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....		II-61
Gambar 2.38	Angka Prevalensi Stunting Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....		II-62
Gambar 2.39	Angka Kematian Bayi Per 1.000 KH Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....		II-64
Gambar 2.40	Angka Kematian Balita Per 1.000 KH Kabupaten Banggai Tahun 2019-2023.....		II-65
Gambar 2.41	Prevalensi Balita Gizi Kurang Tahun 2020-2024.....		II-66
Gambar 2.42	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....		II-66
Gambar 2.43	Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....		II-67
Gambar 2.44	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....		II-68
Gambar 2.45	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....		II-68
Gambar 2.46	Angka Literasi dan Numerasi Kabupaten Banggai Tahun 2024.....		II-69
Gambar 2.47	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....		II-71
Gambar 2.48	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....		II-73
Gambar 2.49	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....		II-73
Gambar 2.50	Angka Ketergantungan Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....		II-74

			<b>Hal.</b>
Gambar 2.51	Rasio PDRB ADHB Industri Pengolahan Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....		II-75
Gambar 2.52	Rasio PDRB ADHB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....		II-75
Gambar 2.53	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....		II-76
Gambar 2.54	Nilai PDRB ADHB Komponen PMTB Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....		II-78
Gambar 2.55	Proporsi Komponen PMTB Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....		II-78
Gambar 2.56	Nilai PDRB ADHB Komponen Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....		II-79
Gambar 2.57	Proporsi Komponen Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....		II-79
Gambar 2.58	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....		II-80
Gambar 2.59	Persentase Desa Mandiri Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....		II-81
Gambar 2.60	Inflasi Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....		II-83
Gambar 2.61	Capaian Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Banggai Tahun 2023-2024.....		II-86
Gambar 2.62	Persentase Penegakan Perda di Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....		II-87
Gambar 2.63	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....		II-123
Gambar 2.64	Perbandingan Realisasi Pendapatan Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.....		II-125
Gambar 2.65	Proporsi Masing-masing Unsur PAD Tahun 2020-2024		II-127
Gambar 2.66	Proporsi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer Tahun 2020-2024.....		II-132

			<b>Hal.</b>
Gambar 2.67	Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Belanja Operasi Tahun 2020-2024.....		II-133
Gambar 2.68	Kerangka Logis Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah.....		II-149
Gambar 2.69	Megatrend Global 2045.....		II-186
Gambar 2.70	Rata-rata Pertumbuhan Total Factor Productivity Index		II-195
Gambar 3.1	Kerangka Perumusan Visi Kabupaten Banggai Tahun 2025-2045.....		III-2
Gambar 3.2	Rumusan Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banggai Tahun 2025-2045.....		III-3
Gambar 3.3	Cascading Kinerja Tujuan dan Sasaran Misi 1 RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029.....		III-28
Gambar 3.4	Cascading Kinerja Tujuan dan Sasaran Misi 2 RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029.....		III-30
Gambar 3.5	Cascading Kinerja Tujuan dan Sasaran Misi 3 RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029.....		III-33
Gambar 3.6	Cascading Kinerja Tujuan dan Sasaran Misi 4 RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029.....		III-36
Gambar 3.7	Cascading Kinerja Tujuan dan Sasaran Misi 5 RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029.....		III-37
Gambar 3.8	Tahapan Implementasi RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029.....		III-67
Gambar 3.9	Wilayah Pengembangan dan Pusat-Pusat Kegiatan di Kabupaten Banggai.....		III-95
Gambar 3.10	Peta Kawasan Strategis Kabupaten Banggai.....		III-100
Gambar 3.11	Upaya Transformatif Super Prioritas ( <i>Game Changers</i> ) Banggai Emas 2045.....		III-125



**BerAKHLAK** **#** bangga melayani bangsa  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



# BAB-I

# PENDAHULUAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta pasal 65 dan pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu tugas Kepala Daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 yang mengamanatkan penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada RPJPD dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJM Nasional Tahun 2025-2029 yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai Misi Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan semangat Otonomi Daerah, potensi daerah, kearifan lokal serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Selanjutnya dalam Pasal 264 ayat (4) disebutkan bahwa Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Sehubungan dengan telah di lantik dan ditetapkannya Ir. H. Amirudin Tamoreka, MM. sebagai Bupati Banggai dan Drs. H. Furqanudin Masulili, MM sebagai Wakil Bupati Banggai pada tanggal 2 Juni 2025, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.1.3-2303 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Banggain Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 Provinsi Sulawesi Tengah, maka Pemerintah Kabupaten Banggai berkewajiban menyusun RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029.

Periodesasi RPJMD Kabupaten Banggai adalah mengacu kepada Periodesasi RPJM Nasional 2025-2029, sebagaimana di sebutkan dalam penjelasan pasal 10 ayat (3) Undang \_ Undang No. 50 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045, bahwa periode RPJM Daerah mengikuti periode RPJM Nasional. Dengan demikian periodesasi RPJMD Kabupaten Banggai adalah 2025-2029, walaupun periodesasi jabatan Bupati dan Wakil Bupati Banggai 2025-2030.

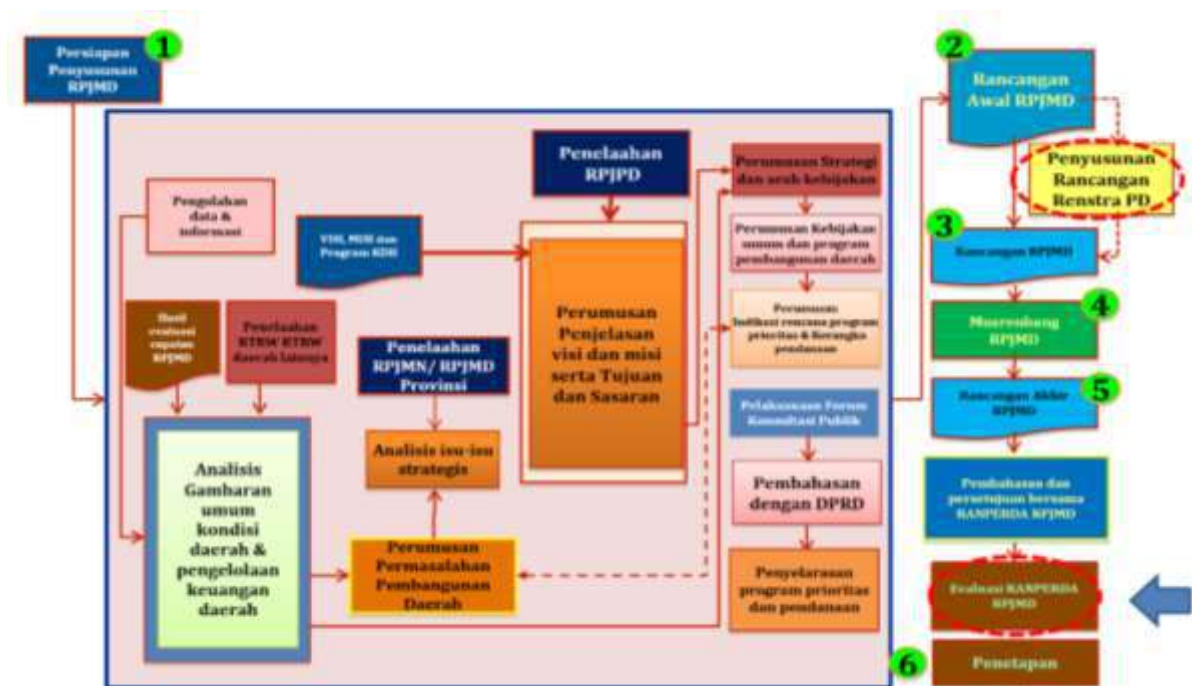
RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 di susun berdasarkan beberapa pendekatan sebagai berikut :

1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.

3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4. Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah-Atas (bottom-up), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2021–2026 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan pemangku kepentingan. Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada gambar 1.1.

**Gambar 1.1**  
**Penyusunan RPJMD Kabupaten Banggai**



Berdasarkan tahapan penyusunan RPJMD tersebut serta merujuk pada ketentuan-ketentuan tentang perencanaan

pembangunan daerah, secara jelas menunjukkan bahwa RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 memiliki nilai-nilai strategis dan politis, yaitu :

1. Merupakan RPJMD pertama dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Banggai Tahun 2025–2045.
2. Merupakan media untuk mengimplementasikan janji kepala daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat.
3. Merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk merumuskan dan menyusun Rencana Strategisnya masing-masing, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
4. Merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

Berdasarkan hal di atas, RPJMD akan menjadi kerangka acuan untuk mengetahui arah pembangunan daerah yang ingin diwujudkan kepala daerah terpilih bersama seluruh komponen masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya daerah. Selain itu, sebagai bagian dari elemen pemerintah yang bertautan dalam fungsi pemerintahan dan koneksitasnya, dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada level pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah serta akselerasi pemerintahan dari Pemerintah Pusat.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum yang di gunakan dala penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 21 Nomor 1419);
  18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
  19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor ... Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor ...);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai

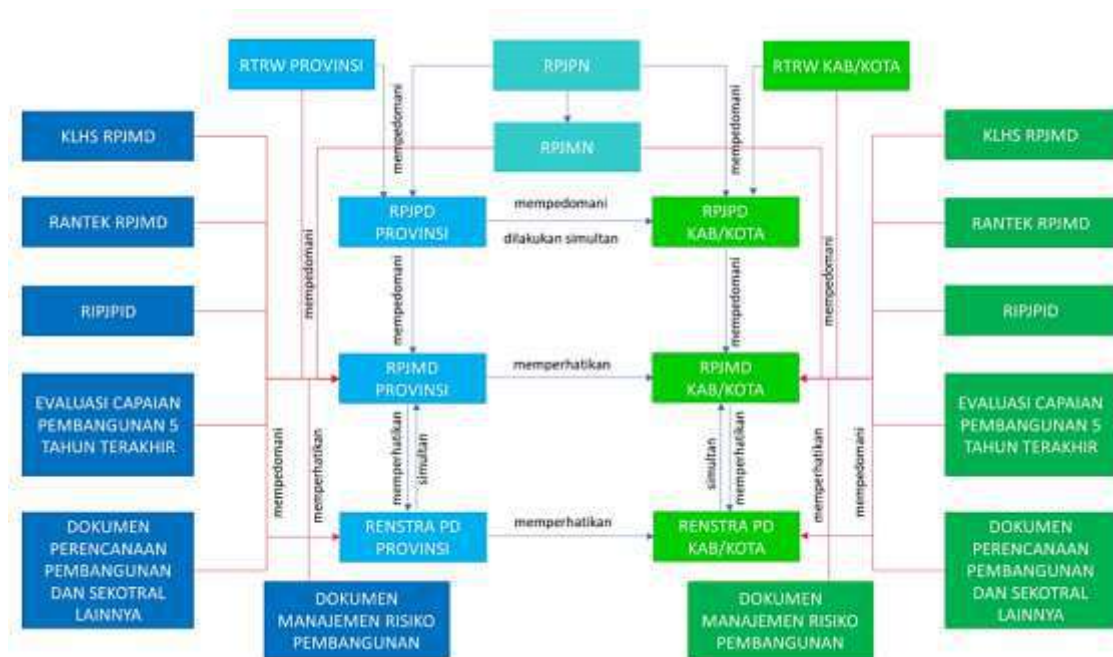
Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 164);

### 1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 di susun dengan mempedomanai RPJPD Kabupaten Banggai Tahun 2025–2045, RTRW Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 dan RPJMN Tahun 2025-2029 yang di dalamnya telah memuat prioritas Pembangunan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, serta memperhatikan RPJMD Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, Dimana proses penyusunannya di lakukan secara simultan dan terkoordinasi.

**Gambar 1.2**  
**Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya**



Selain itu penyusunan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 juga memperhatikan dokumen perencanaan lainnya yaitu antara lain KLHS RPJMD, Rancangan Teknokratik RPJMD 2025-2029, Evaluasi capaian Pembangunan 5 tahun terakhir sebagai dasar proyeksi target capaian Pembangunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta memperhatikan dokumen perencanaan sektoral lainnya.

RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, yang di susun secara terkoordinir dan simultan. RPJMD selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Manajemen Resiko Level Kabupaten, sedangkan Renstra akan menjadi acuan dalam penyusunan manajemen resiko level Perangkat Daerah.

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

##### **1.4.1 Maksud**

RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah (pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Banggai sesuai dengan dengan visi, misi, dan program pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati Banggai periode 2025-2030, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

##### **1.4.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Menerjemahkan secara teknokratik Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Banggai periode 2025-2030 ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029, yang disertai dengan rancangan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah.
2. Menjamin keterkaitan dan keselarasan prioritas Pembangunan Daerah dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) Asta Cita, 17 Program Prioritas dan 8 (delapan) proyek hasil terbaik cepat (Quick Wins) Presiden dan Wakil Presiden RI, sebagai perwujudan bagian integral dari Pembangunan nasional.
3. Menetapkan indikator kinerja Utama (IKU) Kabupaten dan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2025–2029.
4. Merupakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan daerah.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 di susun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan, yang memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan antar dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- BAB II : Gambaran Umum Daerah, yang memuat data, informasi dan analisis kondisi daerah terhadap Aspek geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah. Juga menggambarkan tentang Keuangan Daerah serta Permasalahan dan Isu Strategis Daerah.

- BAB III : Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah, yang menyajikan gambaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 serta Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.
- BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang memuat bahasan tentang Program, Target Kinerja dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD melalui IKU dan target penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) Tahun 2025-2029.
- BAB V : Penutup, yang berisi kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.



**BerAKHLAK** **#** bangga  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten melayani  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif bangsa



# BAB-II

## GAMBARAN UMUM DAERAH

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DAERAH**

#### **2.1        Gambaran Umum Kondisi Daerah**

##### **2.1.1     Aspek Geografi dan Demografi**

##### **2.1.1.1   Posisi dan Peran Strategis Daerah**

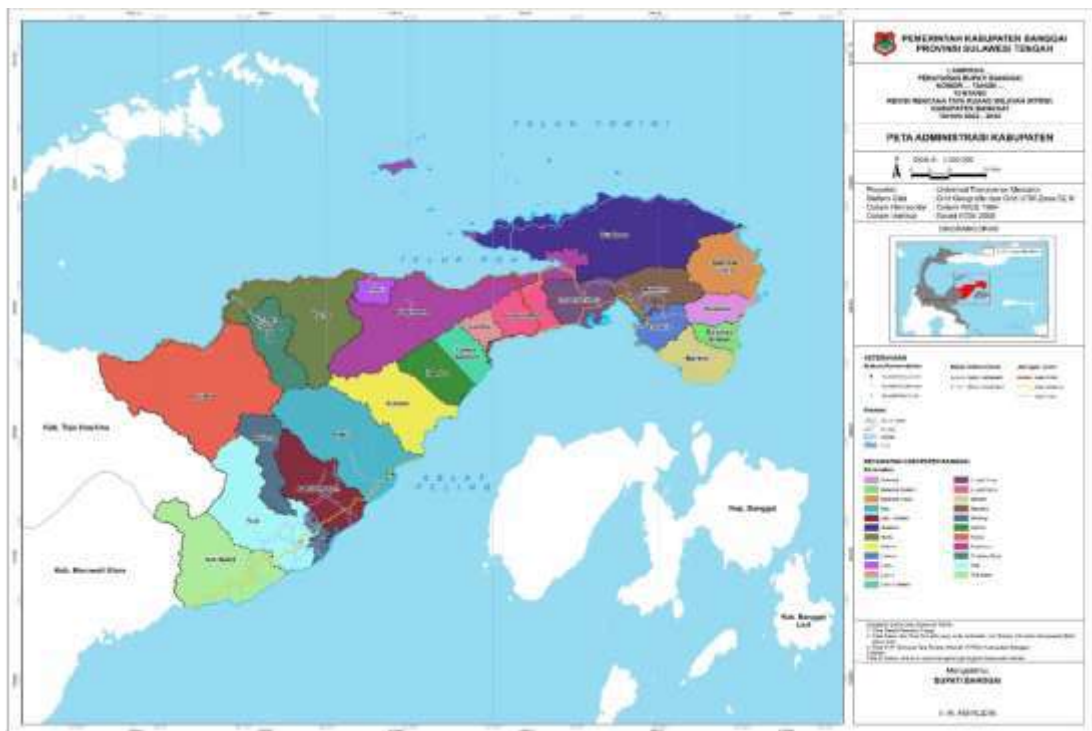
Secara geografis Kabupaten Banggai Kabupaten Banggai merupakan salah satu daerah otonom dan masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah beribukota di Luwuk, terletak pada titik koordinat antara 122<sup>0</sup>23' dan 124<sup>0</sup>20' Bujur Timur, serta 0030' dan 2020' Lintang Selatan, memiliki Luas wilayah daratan ± 8.232,47 Km<sup>2</sup> atau sekitar 13,36 % dari luas Provinsi Sulawesi Tengah, dan luas laut ± 20.309,68 Km<sup>2</sup> dengan garis pantai sepanjang 809,24,25 Km. Wilayah Kabupaten Banggai berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Tomini
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku dan Kabupaten Banggai Kepulauan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Peling dan Kabupaten Banggai Kepulauan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tojo Una-una dan Kabupaten Morowali Utara

Secara administrasi Kabupaten Banggai terdiri dari 24 kecamatan. Kecamatan Nuhon adalah kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas yaitu 1.107,00 Km<sup>2</sup> atau 11,45 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Banggai. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah yang paling sempit adalah Kecamatan Luwuk dengan luas 72,82 Km<sup>2</sup> atau hanya 0,75 persen dari luas Kabupaten Banggai.

Selain itu, wilayah Kabupaten Banggai juga terbagi atas 291 desa dan 46 kelurahan, Kecamatan dengan jumlah desa, paling banyak adalah Kecamatan Pagimana. Kecamatan dengan desa paling sedikit adalah Kecamatan Luwuk Selatan.

**Gambar 2.1**  
**Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Banggai**



Sumber : RTRW Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032

### 2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

#### A. Potensi Perikanan

Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan empat pilar pembangunan, yaitu pro-poor (pengentasan kemiskinan), pro-job (penyerapan tenaga kerja), pro-growth (pertumbuhan), dan pro-environment (pemulihan dan pelestarian lingkungan).

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan.

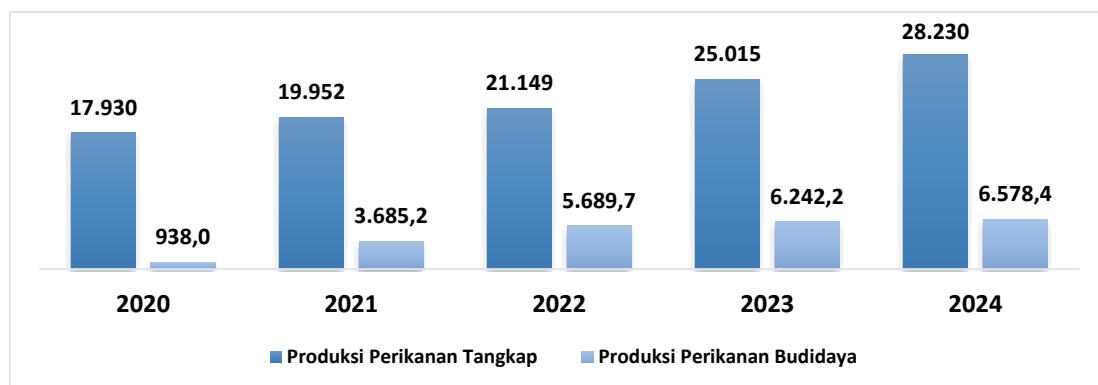
Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam

rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan pendapatan pembudidaya dan nelayan serta memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Subsektor Kelautan dan perikanan merupakan salah satu potensi sumber daya yang akan memberikan dampak signifikan pada perekonomian Kabupaten Banggai. Potensi tersebut harus dioptimalkan secara baik dengan tetap mengindahkan aspek berkelanjutan bagi generasi mendatang. Sebagai wilayah kabupaten yang memiliki perairan yang sangat luas, Kabupaten Banggai banyak menghasilkan produk perikanan yang melimpah, seperti ikan, udang dan kepiting, sehingga memiliki nilai jual di pasar internasional. Untuk menembus pasar dunia, Kabupaten Banggai melakukan ekspor perdana ikan menuju Hongkong. Ekspor ini adalah Upaya menumbuhkan kembali unggulan perikanan yang diterbangkan langsung dari Luwuk menuju Hongkong. Dengan pengiriman langsung ke negara tujuan diharapkan bisa langsung berdampak positif terhadap harga beli hasil perikanan dari Masyarakat nelayan. Disisi lain, daerah diuntungkan dengan kontribusi pendapatan daerah dari hasil pajak ekspor. Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Banggai meliputi kawasan peruntukan perikanan tangkap, budidaya perikanan, dan pengolahan hasil perikanan. Kawasan peruntukan perikanan tangkap tersebar di seluruh wilayah perairan laut yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Kawasan peruntukan budidaya perikanan yang dapat dikembangkan di wilayah pesisir Kabupaten Banggai (sesuai hasil Dinas Kelautan dan Perikanan) adalah sebagai berikut: Usaha Budidaya Air Payau 8.435,0 Ha; Usaha Budidaya Air Tawar 260,0 Ha dan Usaha Budidaya Laut 6.396,0 Ha. Pengolahan hasil perikanan dialokasikan berupa sentra pengolahan ikan, seperti pengasinan ikan, pengemasan ikan, dan lain-lain yang tersebar di Kecamatan Luwuk, Nuhon, Bunta dan Pagimana.

Berikut adalah perkembangan produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya di Kabupaten Banggai pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

**Gambar 2.2**  
**Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap**  
**dan Produksi Perikanan Budidaya (Ton)**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024**



*Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Banggai, 2025*

## **B. Potensi Pertanian**

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumberdaya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam serta pembesaran hewan ternak, meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, seperti pembuatan keju dan tempe, atau sekadar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan. Bagian terbesar penduduk dunia bermata pencaharian dalam bidang-bidang dilingkup pertanian, namun pertanian hanya menyumbang 4% dari PDB dunia.

Kelompok ilmu-ilmu pertanian mengkaji pertanian dengan dukungan ilmu-ilmu pendukungnya. Karena pertanian selalu terikat dengan ruang dan waktu, ilmu-ilmu pendukung, seperti ilmu tanah,

meteorologi, teknik pertanian, biokimia, dan statistika juga dipelajari dalam pertanian. Usaha tani adalah bagian inti dari pertanian karena menyangkut sekumpulan kegiatan yang dilakukan dalam budidaya. "Petani" adalah sebutan bagi mereka yang menyelenggarakan usaha tani, sebagai contoh "petani tembakau" atau "petani ikan". Pelaku budidaya hewan ternak secara khusus disebut sebagai peternak Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional menetapkan Kabupaten Banggai kawasan pertanian nasional untuk komoditas prioritas tanaman pangan, padi, jagung, kedelai. Lokasi Kawasan pertanian nasional komoditas prioritas Hortikultura berupa bawang putih, berada di Lokasi pengembangan kawasan pertanian nasional di Kabupaten Banggai berupa hortikultura dengan komoditas prioritas cabai dan bawang merah.

Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem. Untuk memenuhi fungsi dari Kawasan perkotaan, maka wilayah cakupan perkotaan tidak diarahkan sebagai lahan pertanian (sawah) terutama Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.

Hasil produksi tanaman pertanian di Kabupaten Banggai pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada 2.1 berikut.

**Tabel 2.1**  
**Produksi Tanaman Pertanian (Ton)**  
**Di Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024**

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tanaman Pangan						
1.	Padi (Ton)	253.368,6	163,827,0	143.013,2	235.581,7	259.753,4

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
2.	Jagung (Ton)	98.583,2	28.880,2	87.114,3	58.976,5	42.350,2
3.	Ubi Kayu (Ton)	9.685,9	2.482,9	2.917,4	1.382,5	765,0
4.	Kedelai (Ton)	2.958,6	1.029,5	3.557,6	6.076,6	2.200,8
5.	Kacang Tanah (Ton)	331,9	390,6	235,3	315,8	101,6
6.	Kacang Hijau (Ton)	108,9	105,0	43,0	203,9	156,1
<b>Hortikultura</b>						
1.	Sayur-sayuran (Kw)	1.255,2	10.517,7	5.642,7	6.660,8	6.568,8
2.	Buah-Buahan (Kw)	13.997,5	90.702,9	6.698,7	83.186,7	4.895,3
3.	Bawang Merah (Kw)	281,0	4.246,6	837,5	814,0	2.559,8
4.	Cabai Rawit (Kw)	978,2	6.271,1	4.805,2	6.180,8	4.520,6

*Sumber : BPS, Dinas TPHP Kabupaten Banggai, 2025*

### C. Potensi Perkebunan

Komoditas tanaman perkebunan adalah merupakan tanaman perdagangan yang cukup strategis di Kabupaten Banggai, karena tidak saja merupakan sumber penghasilan devisa disektor pertanian, tetapi lebih penting lagi adalah rangkaia kegiatan produksinya termasuk perusahaan dan pemasarannya dapat menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. Tanaman Perkebunan yang ada di Kabupaten Banggai didominasi oleh kelapa sawit, kelapa, cengkeh, kopi, kakao, jambu mente, kapuk, tembakau, kemiri, sagu, pala, dan lada. Jika melihat dari luas dan produksinya, umumnya tanaman tersebut mengalami peningkatan, walaupun ada beberapa jenis tanaman perkebunan mengalami penurunan baik dari segi luas areal maupun produksinya. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman-tanaman lain tersebut telah mulai diperhatikan oleh para petani.

Hasil produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Banggai pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut.

**Tabel 2.2**  
**Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)**  
**Di Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024**

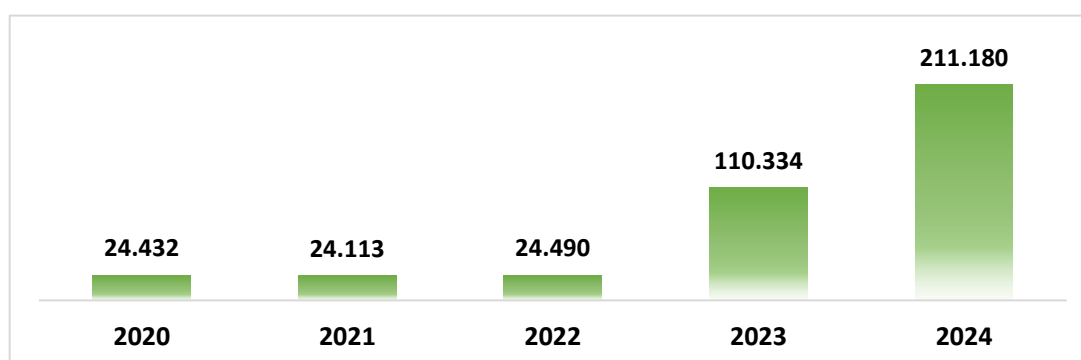
No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kelapa (Ton)	49.116,3	49.192,8	550.760,0	51.940,0	53.421,7
2.	Kakao (Ton)	15.534,0	15.551,9	15.877,6	17.083,1	16.300,2
3.	Cengkeh (Ton)	986,3	1.252,4	1.252,3	1.330,5	1.451,9
4.	Kopi (Ton)	361,4	361,4	361,4	372,5	396,0
5.	Pala (Ton)	81,7	136,5	111,3	189,8	239,3
6.	Lada (Ton)	3,1	3,1	4,0	9,2	11,8

*Sumber : BPS, Dinas TPHP Kabupaten Banggai, 2025*

#### **D. Potensi Pariwisata**

Kabupaten Banggai memiliki potensi pariwisata alam dan pariwisata budaya beragam yang dapat dikembangkan untuk memberikan nilai tambah ekonomi masyarakat dan memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah Kabupaten Banggai.

**Gambar 2.3**  
**Kunjungan Wisatawan (Orang)**  
**di Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024**



*Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai, 2025*

Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Banggai dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan

peningkatan yang cukup signifikan, dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut.

### **1. Pariwisata Alam**

Kawasan Pariwisata Alam di Kabupaten Banggai adalah: Pantai Kilo Lima, air terjun Salodik, gua Salodik, gua Wira, Pantai Pandan Wangi, Bangkiriang, Pantai Taima, permandian Sandakan, air terjun Hanga-hanga, air terjun Nambo, Danau Makapa, permandian Dondo, permandian Ampata, permandian Tontouan, permandian Mantawa, Pantai Towu, Pantai Uwedikan, Pantai Hek, Pantai Tangeban, Pulau Dua, air panas Pulau Dalagan, air panas Uwedaka dan Pantai Boli'i. Pengembangan ini berintegrasi dengan kabupaten sekitarnya untuk menghasilkan kegiatan wisata yang lebih banyak.

### **2. Pariwisata Budaya**

Kawasan Pariwisata Budaya, meliputi:

- Obyek wisata Suku Saluan berupa: Tumpe, Monsawe, Pandanga;
- Obyek wisata Suku Ta' berupa: Mera';
- Obyek wisata Suku Saluan dan Balantak berupa : Mombuat; dan
- Obyek wisata Suku Balantak berupa : Saleian.

Kabupaten Banggai, memiliki adat-istiadat leluhur dari suku Loinang (Saluan), Lo'on (Balantak dan Andio), serta Lobo (Banggai, Peling dan Labobo), dan juga mempunyai nama-nama yang dipakai dalam pemerintahan zaman dulu yaitu ditingkat kabupaten dinamakan Tomundo ada yang dinamakan "sangaji" atau "bosanyo", lalu ada "kapitan" setingkat camat, dan "tonggon" setingkat kepala desa. Kepala desa atau yang biasa disebut tonggon dibantu oleh seorang juru tulis setingkat sekretaris desa, lalu ada kepala jaga. Di Pagimana ada 3 Kapitan yaitu Kapitan

Lambangan, Kapitan Bualemo dan Kapitan Lingketeng, di wilayah Bunta ada 2 kapitan yaitu Kapitan Duhian dan Kapitan Bugis Mangantjo, kemudian di wilayah Lamala ada Kapitan Lasompoh. Dengan bahasa yang telah diteliti oleh Pusat Bahasa Indonesia Jakarta tahun 1986, 1996 dan 2001. Bahasa Saluan, Balantak, Andio dan Banggai sudah masuk dalam ISO 193-3, Registren Outhorrity, edisi 16 tahun 2012. Salah satu desa yang memiliki budaya kental adalah Ondorneming Tobelombang, yang terletak di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai sekitar 425 km dari kota Palu. Menurut tetua adat Tobelombang, Bapak Drs. Abino Lumbun, Tobelombang dikenal sebagai Perkebunan Kelapa pada zaman Belanda tahun 1915. Tempat ini telah dikunjungi wisatawan asing yang senang akan wisata sejarah pada masa lampau. Pengunjung dapat menyaksikan sisa Peninggalan bersejarah di tempat ini dan disekitar objek wisata terbentang pula pemandangan alam yang indah disekitarnya. Kembali pada tradisi Banggai, banyak tradisi menarik yang melekat dalam masyarakat, seperti musik; batongan, kanjar, libul dan lain sebagainya, juga ada beberapa tarian menarik yaitu Onsulen, Balatindak, Ridan. Selain itu ada cerita rakyat atau legenda yang sangat banyak dikenal dengan nama Banunut, lagu atau puisi yaitu Baode, Paupe dan masih banyak lagi kesenian tradisional lainnya, beberapa dari tradisi ini masih dipegang secara menyeluruh oleh suku Banggai, misalnya pada saat perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad saw, masyarakat suku Banggai akan membuat sejenis kue yang di beri nama Kala-kalas, atau disebut kaakaras. Kue ini terbuat dari tepung beras yang digoreng, dan kue ini sangat unik, karena hanya akan dijumpai pada perayaan Maulid Nabi saw. Selanjutnya masih banyak tradisi seperti, Upacara Ada misalnya, upacara pelantikan Tomundo, upacara pelantikan Basalo, dan lain sebagainya. Tradisi-tradisi

dalam masyarakat beragam, masyarakat yang tinggal di tepi pantai dengan masyarakat yang tinggal di pedalaman akan memiliki kehidupan yang jauh berbeda, kesenian, upacara adat, contohnya, ada sebuah upacara adat atau perayaan ketika para nelayan telah menangkap ikan, yang cara menangkapnya di kenal dengan nama sero, sedangkan di pedalaman akan ada penanaman sejenis umbi yang memang satu-satunya di dunia ini hanya terdapat dan berasal dari Banggai, sehingga di kenal dengan nama Ubi Banggai, ini akan memberikan suatu cerita tersendiri. Banggai memiliki beberapa sisi-sisi kehidupan tradisi yang memberikan gaya artistik yang sangat berharga. Keunikan budaya dan tradisi di Kabupaten Banggai dapat dijadikan sebagai daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Aktifitas kebudayaan yang ada di Desa Ondorneming Tobelombang dapat menjadi wisata minat khusus atau termasuk dalam kategori niche market.

#### **E. Potensi Energi dan Sumber Daya Mineral**

Kabupaten Banggai memiliki potensi pertambangan yang cukup melimpah terdiri dari bahan tambang Minyak dan Gas Bumi, Bahan Tambang Mineral Logam, seperti Nikel dan emas dan bahan tambang mineral non logam atau bahan galian non logam (galian C). Uraianannya adalah sebagai berikut:

##### **1. Minyak dan Gas Bumi**

Kabupaten Banggai memiliki Potensi minyak dan gas bumi yang terdapat di Blok Senoro seluas  $\pm 6.100$  Ha, dengan cadangan gas alam terbukti 1,532 TCF (Triliun Kaki Kubik), cadangan Kemungkinan 1.051 TCF, cadangan harapan 1.083 TCF, dan Blok Matindok yang memiliki 6 lapangan Gas yaitu Maleo Raja, Sukamaju, Donggi, Mentawa dan lapangan Gas Minahaki. Blok senoro di kelola oleh JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi (PMTS) dan Blok Matindok yang di kelola oleh Pertamina Pengembangan Gas Matindok (PPGM). Saat ini sedang di bangun

Kilang Gas Alam Cair DS-LNG di Desa Uso Kecamatan Batui, yang di rancang berkapasitas 2 juta ton pertahun dan mulai berproduksi 2014, dan akan merupakan kilang LNG Keempat di Indonesia.

## **2. Bahan Galian**

Kandungan mineral diperut bumi Kabupaten Banggai, menyimpan potensi untuk bisa dimanfaatkan secara optimal. Kekayaan alam yang terserak di beberapa titik itu terdiri dari potensi kekayaan alam yang strategis dan vital, termasuk juga yang mengandung potensi energi. Beberapa bentuk potensi kekayaan mineral yang terkandung diperut bumi Kabupaten Banggai, antara lain adalah :

- 1) Emas; terdapat di Kecamatan Toili, Bunta, Pagimana dan Nuhon
- 2) Nikel; Tersebar di Kecamatan Luwuk Timur, Kecamatan Pagimana, Kecamatan Bunta, Kecamatan Bualemo dan Kecamatan Toili, dengan potensi :
  - Blok Siuna Kecamatan pagimana luas areal prospek ± 3.400 Ha
  - Blok Pagimana Bunta luas areal prospek ± 2.000 Ha
  - Blok Balingara luas areal prospek ± 2000 Ha
  - Blok Toili luas areal prospek ± 2.800 Ha.
- 3) Besi; lokasi Kecamatan Kintom, namun sementara keberadaan galian ini belum di inventarisasi baik penyebaran wilayah, lokasi cebakan maupun jumlah cadangan.
- 4) Granit; Terdapat di kecamatan Pagimana
- 5) Pasir dan Batu; terdapat di hamper semua sungai di wilayah Kabupaten Banggai yang tersebar di beberapa Kecamatan.
- 6) Batu Gamping; Hampir seluruh wilayah di Kabupaten Banggai didominasi oleh jenis bebatuan ini. Pada beberapa wilayah telah diolah secara tradisional untuk keperluan lokal.

- 7) Marmer; terdapat di Desa Salodik, Desa Lauwon, Desa Bantayan dan Desa Minangandala.
- 8) Gabro; Desa Siuna Kecamatan Pagimana, Desa Bantayan Kecamatan Luwuk Timur, dan Desa Nanganangaon Kecamatan Bunta.
- 9) Tanah urug; tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Banggai.

### **3. Energi**

Beberapa sumber daya energi yang tersedia di Kabupaten Banggai yang belum dimanfaatkan secara optimal dan sangat potensial untuk dikembangkan menjadi salah satu sumber daya energi yang berdaya guna tinggi adalah sebagai berikut :

- 1) Energi Surya. Berdasarkan data yang diperoleh dari stasiun meteorologi Bubung Luwuk, penyinaran matahari di Kabupaten Banggai memiliki intensitas rata-rata sebesar 53-96%. Dengan demikian potensi energi surya di Kabupaten Banggai memiliki prospek untuk dikembangkan.
- 2) Energi Air. Di daerah Kabupaten Banggai terdapat jenis pasang surut prevailing diurnal, yaitu terjadi dua kali pasang dan dua kali surut dengan tinggi permukaan yang berbeda. Kecepatan arus rata-rata 2,0 knot ke arah utara pada bulan Januari, Maret, Juli dan Oktober. Sementara angin yang berhembus kearah Selatan terjadi di bulan April, Juni, November dan Desember. Dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,1-1,2 M (Dishidros, 1997).
- 3) Energi Angin. Kekuatan angin yang cukup stabil dengan arah yang tetap memungkinkan untuk dikembangkannya Pembangkit Listrik Tenaga Angin. Angin bertiup dari Philipina dengan kecepatan angin rata-rata di Kabupaten Banggai yang berkisar 3-6 knot dengan arah angin terbanyak beradius 2700, memungkinkan digunakannya kincir angin sebagai alat pendukung Energi Listrik Tenaga Angin. Dengan didukung

perbedaan suhu maksimum antara siang dan malam sehingga terjadi tiupan angin yang silih berganti dari daratan dan lautan memungkinkan daerah Kabupaten Banggai berpotensi untuk dikembangkan sebagai daerah perkembangan listrik dengan tenaga angin.

#### **F. Potensi Perindustrian**

Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah. Sesuai arahan RTRW Kabupaten Banggai 2012-2032, Kawasan peruntukan industri meliputi :

##### **1. Industri Besar dan Sedang**

Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Banggai diutamakan bagi industri pengolahan gas alam (LNG plant). Kawasan peruntukan industri ini dikembangkan di Kecamatan Batui. Untuk mendukung pengembangan kawasan industri ini, akan dikembangkan pengembangan kawasan industri sedang di sekitarnya, seperti: Kecamatan Bunta, Nuhon, Luwuk, Kintom dan Batui berupa pengolahan minyak sawit (CPO), kopra, kayu dan hasil hutan, pertanian, perkebunan dan perikanan.

##### **2. Industri Rumah Tangga**

Industri Rumah Tangga tidak diatur dalam kawasan dan zona industri, namun pengembangannya diarahkan pada kawasan-kawasan permukiman yang ada, seperti industri hasil-hasil pertanian dan perikanan. Untuk industri polutif berupa industri pengolahan hasil perikanan, dibuatkan sentra industri hasil perikanan di wilayah yang dekat dengan bahan baku dan tidak mengganggu permukiman disekitarnya. Sentra industri ini direncanakan di dekat Tempat Pendaratan Ikan (TPI) dan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Luwuk. Sentra industri pada skala kecil direncanakan berlokasi di Kecamatan Luwuk,

Pagimana, Toili dan Bunta yaitu di pusat-pusat produksi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.

#### **2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan**

Kajian tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan pendekatan jasa ekosistem atau jasa lingkungan hidup, menggunakan asumsi dasar bahwa semakin tinggi jasa lingkungan hidup suatu wilayah, maka semakin tinggi keberlanjutan dari proses dan fungsi dari lingkungan hidup itu sendiri dan pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas lingkungan yang akan berdampak pada keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan manusia. Sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang PPLH, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sedangkan, daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Jika dilihat dari definisinya, daya dukung maupun daya tampung dapat diartikan sebagai kemampuan dari suatu lingkungan dalam menyediakan jasa atau layanan untuk menopang kehidupan manusia. Dengan kata lain, definisi tersebut melihat daya dukung dan daya tampung dari aspek ketersediaan (supply) atau dari sisi ekosistem atau lingkungan hidup secara alami.

Identifikasi terhadap kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan antara lain didasarkan pada pemahaman bahwa kemampuan ekosistem menyediakan jasa lingkungan hidup (supply side) adalah terbatas, sementara kebutuhan jasa lingkungan hidup (demand side) bisa tidak terbatas. Agar tidak mengganggu struktur, proses maupun fungsi ekosistem, maka pemanfaatan jasa lingkungan hidup seharusnya tidak melebihi kemampuan tersebut. Jika aspek

ketersediaan (supply) dipertemukan/diperbandingkan dengan aspek kebutuhan (demand) akan dihasilkan apa yang disebut status daya dukung daya tampung lingkungan hidup (Direktorat PDLKWS-KLHK, 2019). Untuk itu status daya dukung daya tampung lingkungan hidup sebagai informasi tentang status atau kondisi daya dukung daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Banggai, dikaji dengan mempertemukan data dan informasi daya dukung daya tampung lingkungan hidup dari aspek ketersediaan dan kebutuhan. Sehingga dari hasil kajian status tersebut dapat diketahui apakah daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Banggai telah terlampaui atau belum terlampaui. Status daya dukung daya tampung dikatakan terlampaui apabila supply lebih kecil dari demand. Demikian pula sebaliknya.

Kajian terhadap status daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Banggai terdiri dari status daya dukung penyediaan pangan dan daya dukung penyediaan air dengan menggunakan data yang bersumber dari dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung (D3TLH) Kabupaten Banggai. Analisis status daya dukung lingkungan hidup pada Daya Dukung dan Daya Tampung (D3TLH) Kabupaten Banggai didasarkan pada data dan informasi terkait dengan jasa ekosistem penyedia air dan jasa ekosistem pangan yang data dan informasi spasialnya telah paparkan pada bagian sebelumnya. Dimana Dalam kajian tersebut menggunakan asumsi bahwa status daya dukung lingkungan hidup hanya didasarkan pada potensi sumber daya yang ada di wilayah Kabupaten Banggai tanpa memperhatikan adanya aliran materi.

Secara operasional, penentuan status daya dukung daya tampung penyediaan pangan dan air, didasarkan pada data sebaran kepadatan penduduk dalam system grid, serta berdasarkan pada variabel penutupan lahan dan jaringan jalan yang telah diboboti. Kemudian data input jumlah penduduk Kabupaten Banggai adalah

sesuai data BPS untuk kecamatan dalam angka di kabupaten Banggai Tahun 2019 sebagai data dasar untuk proyeksi data penduduk untuk tahun 2023 dan 2029. Adapun perbandingan sebaran dan jumlah penduduk dari data input analisis dengan hasil sistem grid memiliki nilai rata-rata tingkat akurasi mencapai 99,98% yang berarti sangat representatif untuk menggambarkan distribusi penduduk secara spasial di Kabupaten Banggai.

#### **A. Daya Dukung Pangan**

Perhitungan ketersediaan pangan dilakukan dengan mengidentifikasi potensi pangan di Kabupaten Banggai dari berbagai sektor penyedia pangan. Nilai potensi pangan dalam satuan produksi komoditi pangan utama dari tiap kecamatan dan juga didasarkan pada nilai rata-rata konsumsi kalori perkapita penduduk Kabupaten Banggai Tahun 2022, yang mencapai nilai rata-rata sebesar 2.057,8 Kkal per Kapita, sehingga dengan mengacu pada data tersebut maka dapat dihitung potensi pangan di Kabupaten Banggai adalah sebesar 2.057,8 Kkal dikalikan dengan jumlah penduduk Kabupaten Banggai pada tahun 2019 sebagai tahun dasar analisis, sehingga didapatkan total potensi pangan sebesar 283,061,419,808 Kkal. Dan untuk mendapat data sebaran nilai potensi pangan tiap kecamatan, maka total potensi pangan tersebut disebar secara proposional berdasarkan kapasitas produksi pangan dalam satuan Kkal pada tiap kecamatan sesuai data produksi komoditi pangan per kecamatan, seperti yang disajikan pada tabel 2.3 berikut.

**Tabel 2.3**  
**Potensi Ketersediaan Pangan Kabupaten Banggai**

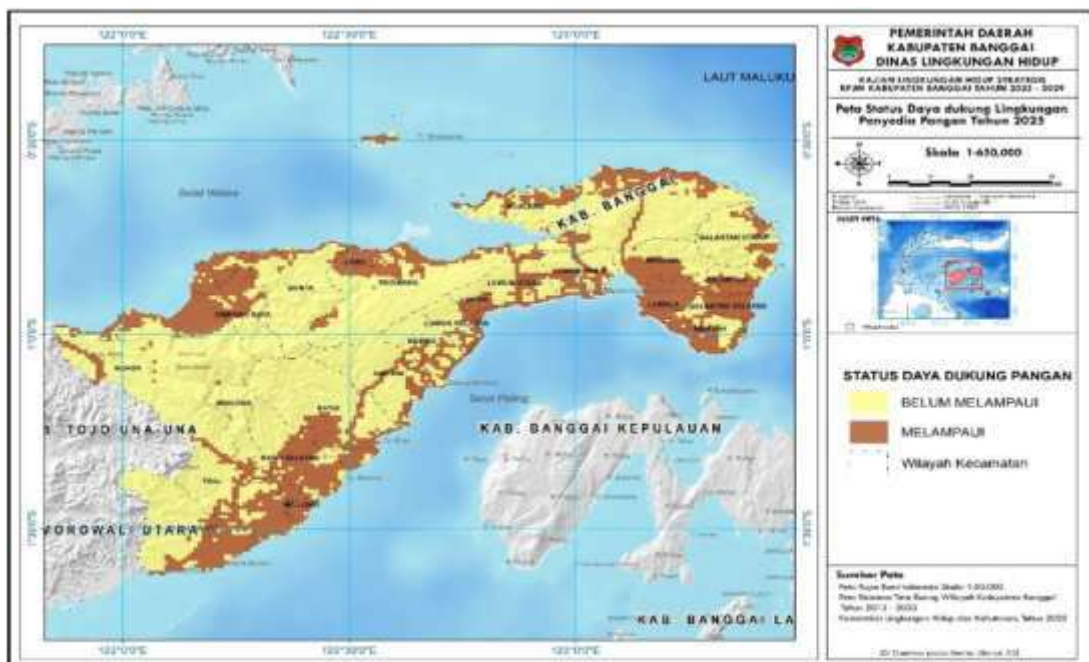
Potensi Ketersediaan Pangan				
No	Kecamatan	Berdasarkan Data Produksi Per Kecamatan		Konsumsi Kalori per Kapita (Kkal/Thn)*
		(Kkal/Thn)	(%)	
1	Toili	210,957,913	9.65	27,318,647,238
2	Toili Barat	212,027,789	6.41	18,134,938,379
3	Moilong	131,139,298	5.50	15,582,315,226
4	Batui	79,568,667	4.55	12,885,554,882
5	Batui Selatan	145,036,141	3.97	11,238,051,293
6	Bunta	68,372,554	5.65	16,003,877,762
7	Nuhon	133,783,891	5.53	15,661,358,201
8	Simpang Raya	103,831,139	4.20	11,889,768,376
9	Kintom	8,246,735	2.92	8,263,090,673
10	Luwuk	9,258,850	10.49	29,689,161,574
11	Luwuk Timur	54,624,559	3.26	9,227,879,934
12	Luwuk Utara	8,546,541	4.76	13,475,277,475
13	Luwuk Selatan	12,019,293	6.37	18,032,647,469
14	Nambo	4,372,256	2.35	6,650,458,985
15	Pagimana	46,272,462	6.70	18,971,089,071
16	Bualemo	194,603,101	5.33	15,083,259,576
17	Lobu	18,752,214	1.02	2,880,419,022
18	Lamala	39,451,105	1.85	5,247,058,703
19	Masama	139,023,934	3.25	9,194,557,895
20	Mantoh	40,183,547	2.00	5,663,971,652
21	Balantak	27,375,112	1.64	4,630,988,452
22	Balantak Selatan	43,892,516	1.37	3,873,880,735
23	Balantak Utara	17,691,431	1.22	3,463,167,234
Total				283,061,419,808

Sumber : Daya Dukung dan Daya Tampung (D3TLH) Kabupaten Banggai

Nilai kebutuhan pangan di Kabupaten Banggai dikaji berdasarkan hasil distribusi penduduk di Kabupaten Banggai pada setiap grid, yang kemudian digunakan untuk menghitung kebutuhan penduduk terhadap pangan menggunakan standar angka kecukupan energi (AKE) yaitu 2.150/hari/kapita. Dalam dokumen KLHS ini, nilai kebutuhan pangan pada kajian daya dukung untuk penyedia pangan, didasarkan pada populasi penduduk di awal dan akhir periode waktu implementasi RPJMD, yaitu dengan berdasarkan hasil analisis laju pertumbuhan populasi penduduk tahun 2019-2021 sebagai tahun dasar analisis, maka didapatkan data proyeksi populasi penduduk

tahun 2025 sebagai tahun awal implementasi RPJMD kabupaten Banggai, kemudian populasi penduduk tahun 2029 sebagai hasil proyeksi populasi pada akhir periode implementasi RPJMD kabupaten Banggai 2025-2029. Dengan mempertimbangkan dinamika dan tekanan jumlah penduduk, ketersediaan pangan serta kebutuhan pangan, estimasi status indikatif daya dukung penyedia pangan dilakukan dengan asumsi bahwa dalam pendekatan ini, komponen ketersediaan pangan berdasarkan kondisi bentang alam, penutupan lahan dan sebaran vegetasi asli, yang mana telah direpresentasikan dalam bentuk indeks jasa ekosistem penyedia pangan, tidak mengalami perubahan.

**Gambar 2.4**  
**Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Banggai**  
**Tahun 2025**



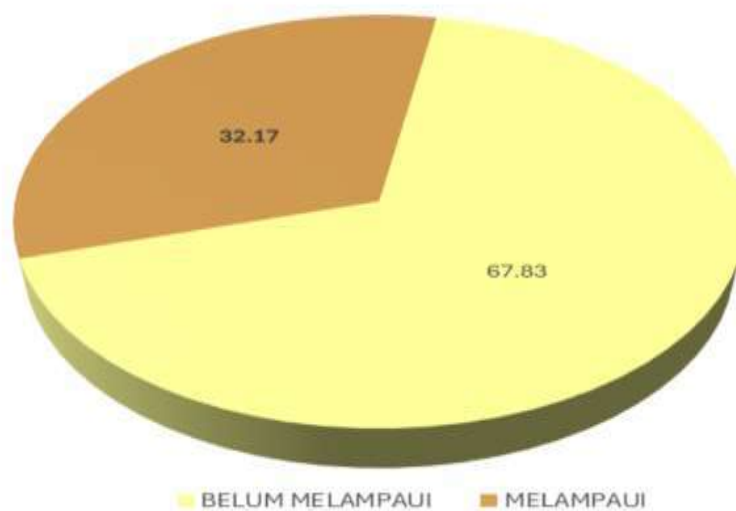
Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029

Hasil perhitungan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan di Kabupaten Banggai, kemudian digunakan untuk menghitung status daya dukung daya tampung penyediaan pangan dalam rangka mengetahui apakah tingkat penyediaan bahan pangan di Kabupaten

Banggai sudah terlampaui atau belum terlampaui. Hasil perhitungan status daya dukung penyedia pangan di Kabupaten Banggai pada tahun 2025 disajikan pada gambar 2.4 di atas dan gambar 2.5 berikut.

**Gambar 2.5**  
**Grafik Persentase**  
**Luas Wilayah Berdasarkan Status Daya Dukung**  
**Penyedia Pangan Di Kabupaten Banggai Tahun 2025**

Persentase Luas Wilayah Kabupaten Banggai Berdasarkan Status  
Daya Dukung Pangan Pada Tahun 2025

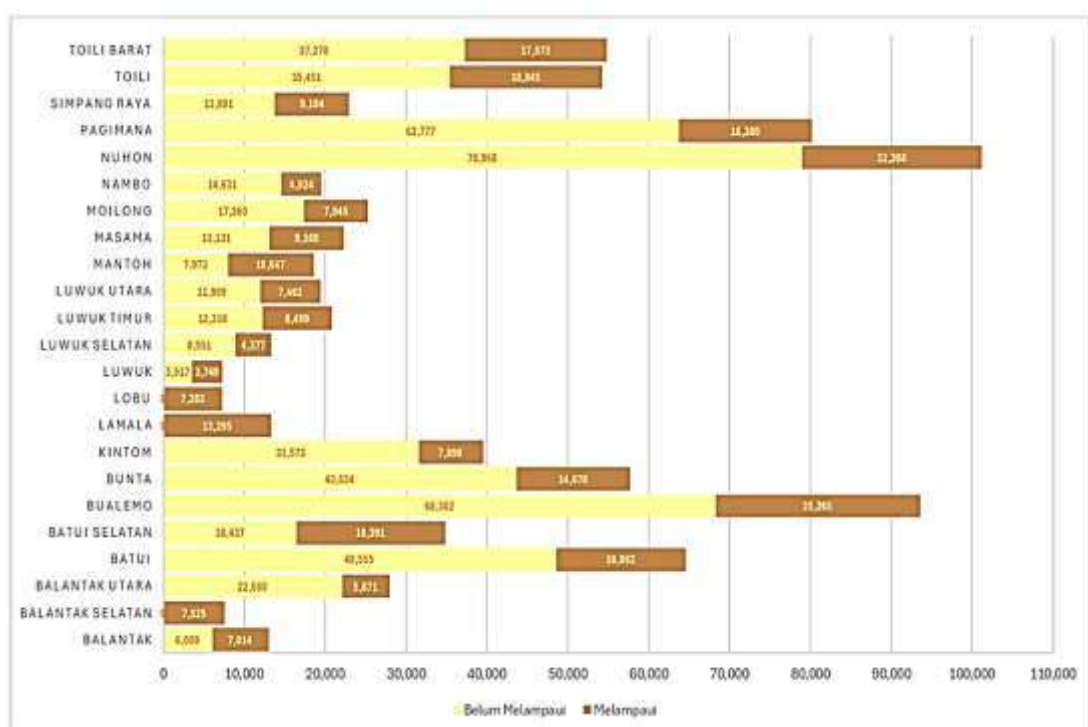


Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029

Dari tampilan peta dan diperjelas dengan grafik di atas, pada kondisi lingkungan tahun 2025, terlihat bahwa luas wilayah Kabupaten Banggai dengan status daya dukung penyedia pangan yang telah melampaui adalah sebesar 32,17% dari total luas wilayah Kabupaten Banggai, yang berarti lebih kecil dibanding dengan luas wilayah yang memiliki status daya dukung penyedia pangan belum terlampaui, yaitu 67,83% dari total wilayah Kabupaten Banggai. Dan jika dicermati bahwa daerah atau wilayah kabupaten Banggai yang memiliki daya dukung penyedia pangan telah terlampaui, umumnya berada pada wilayah yang memiliki tekanan penduduk yang relatif tinggi akibat pertambahan populasi, dan juga dipicu oleh

pertumbuhan ekonomi pada wilayah yang mengalami perkembangan di tingkat kecamatan, khususnya terkait dengan pengembangan wilayah pertanian dan permukiman. Gambaran mengenai status daya dukung penyedia pangan pada tahun 2025 di setiap wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai, dapat dilihat pada gambar 2.6 di bawah ini.

**Gambar 2.6**  
**Grafik Sebaran Luasan Daya Dukung Penyedia Pangan Perwilayah Kecamatan Di Kabupaten Banggai Tahun 2025**

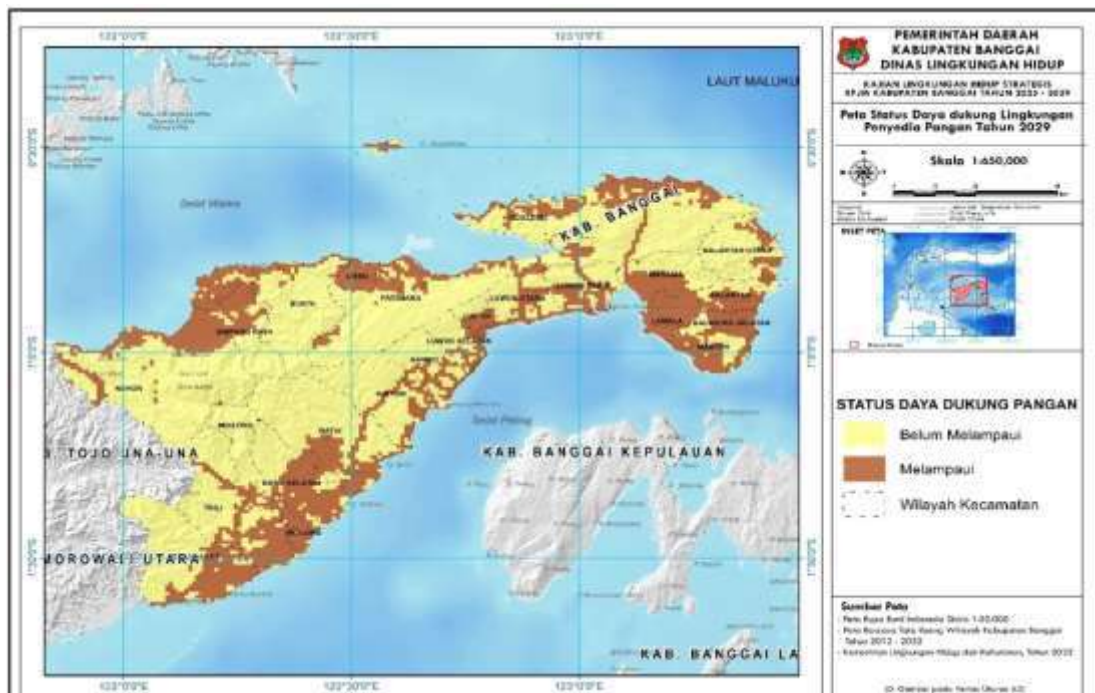


Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029

Berdasarkan gambar grafik diatas status daya dukung penyedia pangan pada tahun 2025 di setiap wilayah kecamatan di atas, dapat diketahui bahwa kecamatan Nuhoan, kecamatan Bualemo dan kecamatan Pagimana merupakan wilayah kecamatan yang relatif lebih luas dibanding wilayah kecamatan yang lain, dan juga pada tiga kecamatan tersebut, memiliki potensi wilayah yang masih relatif luas dengan status daya dukung lingkungan belum terlampaui dalam hal penyediaan pangan. Sementara kecamatan Lobu, kecamatan Balantak

Selatan dan Kecamatan Lamala, adalah tiga wilayah kecamatan yang luas wilayahnya relatif lebih kecil, dan terlihat kondisi lingkungannya tidak lagi memiliki wilayah yang dapat mendukung penyediaan pangan secara mandiri, atau ketiga wilayah kecamatan ini memiliki status daya dukung lingkungan untuk penyedia pangan telah melampaui ambang batas. Sementara kecamatan Luwuk, kecamatan Mantoh dan kecamatan Balantak, terlihat daya dukung lingkungan di wilayahnya, hampir sebagian atau sekitar 50% wilayahnya telah berstatus melampaui ambang batas untuk daya dukung penyediaan pangan. Dan untuk kecamatan lainnya terlihat bahwa luasan lingkungan dengan daya dukung yang telah melampaui ambang batas dalam penyediaan pangan, adalah kurang dari 40% persen luas wilayahnya. Dan berikut untuk hasil analisis prediksi kondisi daya dukung penyedia pangan Kabupaten Banggai pada tahun 2029 dapat dilihat pada gambar 2.7 dan gambar 2.8 di bawah ini.

**Gambar 2.7**  
**Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Banggai**  
**Tahun 2029**



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029

**Gambar 2.8**  
**Grafik Persentase Luas Wilayah**  
**Berdasarkan Status Daya Dukung Penyedia Pangan**  
**Di Kabupaten Banggai Tahun 2029**



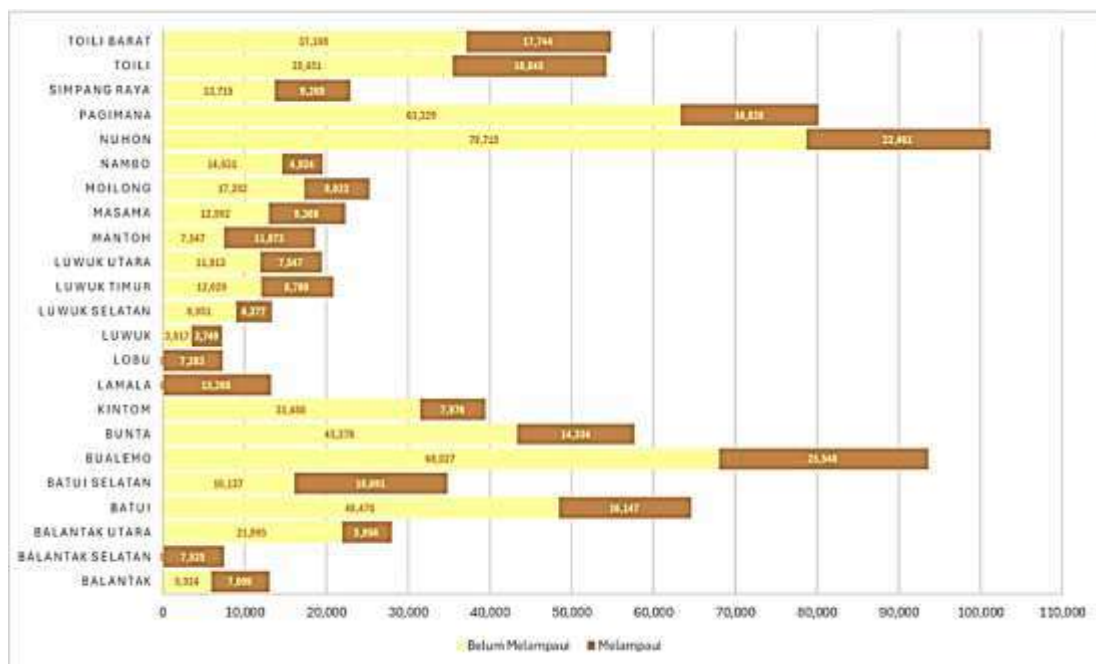
Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029

Dari tampilan peta dan grafik di atas, kondisi lingkungan tahun 2029 terlihat bahwa luas wilayah Kabupaten Banggai dengan status daya dukung penyedia pangan yang telah melampaui adalah sebesar 32,56 % dari total luas wilayah Kabupaten Banggai, yang berarti telah terjadi peningkatan sebesar 0,39% dibanding kondisi daya dukung lingkungan pada tahun 2025. Dan sebaliknya bahwa luas wilayah dengan daya dukung lingkungan yang belum melampaui ambang batas pada tahun 2025, dalam tahun 2029 luasan wilayah yang terindikasi belum melampaui ambang batas daya dukung lingkungan untuk penyediaan pangan, luasannya berkurang sebesar 0,39% sehingga berubah menjadi 67,44% dari total luas wilayah kabupaten Banggai. Dari data tersebut juga terlihat bahwa luasan wilayah kabupaten Banggai berdasarkan sebaran status daya dukung lingkungan untuk penyediaan pangan, pada tahun 2029 masih

didominasi Kawasan dengan status daya dukung lingkungan yang belum melampaui ambang batas. Demikian pula pola sebarannya, masih serupa dengan pola penyebaran yang dipicu dan didorong oleh tekanan penduduk dan perkembangan wilayah yang ada.

Selanjutnya untuk gambaran mengenai prediksi status daya dukung penyedia pangan pada tahun 2029 di setiap wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai, dapat dilihat pada gambar 2.9 di bawah ini.

**Gambar 2.9**  
**Grafik Sebaran Luasan Daya Dukung Penyedia Pangan Perwilayah Kecamatan di Kabupaten Banggai Tahun 2029**



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029

Berdasarkan grafik status daya dukung penyedia pangan pada tahun 2029 di setiap wilayah kecamatan di atas, pola distribusi yang hampir serupa dengan tahun 2025. Akan tetapi juga diketahui bahwa umumnya pada wilayah kecamatan yang masih terdapat kawasan dengan daya dukung lingkungan penyedia pangan yang belum terlampaui, maka luasan cenderung mengalami penurunan, dan ini berarti kawasan dengan daya dukung lingkungan yang telah

melampaui ambang batas untuk penyediaan pangan di kecamatan-kecamatan tersebut, luasannya cenderung mengalami peningkatan, kecuali untuk wilayah kecamatan Lobu, kecamatan Balantak Selatan dan Kecamatan Lamala, adalah tiga wilayah kecamatan yang teridentifikasi memiliki luas wilayahnya relatif kecil dan pada tahun 2029 kondisi atau status daya dukung lingkungannya tidak berubah, karena seluruh wilayahnya pada tahun 2025 terindikasi telah melampaui ambang batas daya dukung untuk penyediaan pangan, sehingga kondisinya pada tahun 2029, wilayah masih tetap didominasi kawasan dengan status daya dukung lingkungan yang telah melampaui ambang batas. Dan jika memperhatikan data ketersediaan bahan pangan secara alami di kabupaten Banggai pada tahun 2022, adalah sebesar 241.489.049.974,19 Kkal, sehingga ambang batas atau jumlah populasi penduduk maksimal yang dapat didukung ketersediaan pangan dalam jumlah tersebut adalah 307.359 jiwa. Sehingga dengan mengacu standar kelayakan konsumsi energi pangan sebesar 2.150 Kkal/kapita/tahun maka status daya dukung lingkungan untuk penyediaan pangan di kabupaten Banggai sejak tahun 2025, secara umum telah berstatus melampaui ambang batas daya dukung, karena jumlah penduduk pada tahun 2025 telah mencapai 409.392 jiwa, yang mana jumlah tersebut lebih besar dari pada ambang batas yang telah disebutkan sebelumnya, yakni dengan selisih mencapai 102.033 jiwa.

Untuk melihat dinamika status daya dukung lingkungan di Kabupaten Banggai untuk penyediaan pangan selama periode implementasi RPJMD tahun 2025-2029, maka berikut disusun suatu ringkasan atau rekapitulasi gambaran perbandingan kondisi lingkungan pada tahun 2025 dan tahun 2029 terkait dengan status daya dukung penyediaan pangan di kabupaten Banggai, yang disajikan dalam tabel 2.4 berikut ini.

**Tabel 2.4**  
**Rekapitulasi Dinamika Lingkungan di Kabupaten Banggai Terkait**  
**Perbandingan Status Daya Dukung Lingkungan Penyedia Pangan**  
**Pada Tahun 2025 dan Tahun 2029**

Kecamatan	Proyeksi Populasi Penduduk (Jiwa)		Ketersediaan Pangan	Proyeksi Kebutuhan Pangan (Kkal)		Ambang batas	Persentase Luas wilayah berdasarkan status daya dukung air (% Luas)			
							2025		2029	
	2025	2029		(Kkal)	2025		2029	(Jiwa)	BELUM MELAMPAUI	MELAMPAUI
BALANTAK	6,624	6,988	4.630.988,453.2	5.198.214,916.1	5.483.833.000.0	5873	46.14	53.86	45.49	54.51
BALANTAK SELATAN	5,551	5,860	13,545,037.5	4,355,839,204.3	4,598,635.000.0	0	0.00	100.00	0.00	100.00
BALANTAK UTARA	4,991	5,273	3,463,167,235.4	3,916,437,523.2	4,137,986,750.0	4380	79.00	21.00	78.69	21.31
BATUI	19,215	20,368	12,885,554,861.9	15,078,831,229.2	15,983,788.000.0	16424	75.14	24.86	75.01	24.99
BATUI SELATAN	16,438	17,441	11,238,051,296.4	12,899,895,763.8	13,686,824,750.0	14421	47.19	52.81	46.33	53.67
BUALEMO	20,592	21,421	15,083,259,577.2	16,159,833,818.7	16,810,129,750.0	19151	73.00	27.00	72.70	27.30
BUNTA	22,906	24,344	16,003,877,764.3	17,988,706,289.9	19,103,954,000.0	20169	75.61	24.39	75.16	24.84
KINTOM	12,066	12,786	8,263,090,675.2	9,461,180,322.9	10,033,813,500.0	10392	80.01	19.99	79.79	20.21
LAMALA	7,627	8,062	9,771,059.0	5,985,156,408.7	6,326,654,500.0	0	0.00	100.00	0.00	100.00
LOBU	4,104	4,320	7,255,463.5	3,220,501,995.5	3,390,120,000.0	0	0.00	100.00	0.00	100.00
LUNYUK	42,150	44,763	87,578,647.6	33,077,362,967.5	35,127,764,250.0	113	48.40	51.60	48.40	51.60
LUNYUK SELATAN	26,465	28,083	18,032,647,459.1	20,768,561,674.2	22,038,134,250.0	22981	67.16	32.84	67.16	32.84
LUNYUK TIMUR	13,326	14,117	9,227,879,951.3	10,457,962,344.8	11,078,315,750.0	11742	58.17	40.83	57.76	42.22
LUNYUK UTARA	20,035	21,243	13,475,277,466.9	15,722,444,644.3	16,670,444,250.0	17125	61.66	38.34	61.22	38.78
MANTOH	7,976	8,430	5,663,971,654.9	6,259,421,864.7	6,615,442,500.0	7182	42.82	57.18	40.53	59.47
MASAMA	13,172	13,955	9,194,567,892.8	10,337,047,462.7	10,951,186,250.0	11707	58.88	41.12	58.26	41.74
MOILONG	22,181	23,538	15,582,315,223.1	17,406,760,483.7	18,471,445,500.0	19783	66.60	33.40	66.30	33.70
NAMBO	9,562	10,119	6,650,458,986.1	7,503,548,543.4	7,940,885,250.0	8514	74.82	25.18	74.82	25.18
NUHON	22,368	23,740	15,661,368,199.7	17,553,474,367.8	18,629,965,000.0	19835	78.05	21.95	77.80	22.20
PAGIMANA	29,251	32,612	18,971,089,073.7	22,954,981,597.2	25,592,267,000.0	24303	79.57	20.43	79.01	20.99
SIMPANG RAYA	16,912	17,905	11,869,768,374.6	13,271,890,539.8	14,067,428,500.0	15159	60.04	39.96	59.67	40.33
TOILI	39,790	42,573	27,318,647,241.9	31,225,095,117.0	33,409,161,750.0	34886	65.29	34.71	65.29	34.71
TOILI BARAT	26,068	27,686	18,134,938,378.3	20,456,880,420.0	21,710,893,500.0	23219	67.96	32.04	67.65	32.35
Jumlah	409,392	435,628	241,489,049,974.2	321,270,029,499.4	341,859,073,000.0	307359	67.83	32.17	67.44	32.56

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029

Dari data tabel 2.4 tersebut, diketahui bahwa berdasarkan nilai ambang batas jumlah penduduk yang dapat didukung oleh ketersediaan pangan di masing-masing wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai, terlihat adalah nilai ambang batas lebih kecil dibanding jumlah penduduk pada tahun 2025, dan demikian pula halnya pada tahun 2029, karena berdasarkan hasil estimiasi proyeksi penduduk tahun 2029 diketahui penduduk Kabupaten Banggai mengalami pertambahan populasi yang tersebar merata disemua wilayah kecamatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa status daya dukung pangan di kabupaten Banggai tidak mengalami perubahan

atau perbaikan, karena statusnya masih sama dengan kondisi pada tahun 2025, yaitu telah melampaui ambang batas daya dukung penyediaan pangan. Sementara dari pola dinamika spasialnya, terlihat ada perubahan secara merata, yaitu terjadi kecenderungan peningkatan luas kawasan lingkungan yang telah melampaui ambang batas terkait daya dukung lingkungan dalam penyediaan pangan. Tentunya kondisi ini perlu mendapat perhatian dari semua pihak, dan perlu ada upaya dan intervensi dari pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengendalikannya.

## **B. Daya Dukung Air**

Data ketersediaan air di Kabupaten Banggai mengacu pada hasil identifikasi nilai potensi air di Kabupaten Banggai pada setiap sumber-sumber air yang dilaporkan dalam dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung (D3TLH) Kabupaten Banggai. Dari laporan tersebut diketahui bahwa perhitungan ketersediaan air di Kabupaten Banggai merupakan hasil identifikasi potensi debit air berdasarkan perhitungan limpasan tertimbang dari 71 daerah aliran sungai (DAS). Nilai potensi pada setiap sumber-sumber air tersebut kemudian digabung dengan sistem grid dan indeks jasa lingkungan penyediaan air sehingga terdistribusikan sebagai potensi air pada setiap grid. Adapun ketersediaan air yang bersumber dari debit air limpasan permukaan pada lokasi 71 DAS Kabupaten Banggai disajikan pada tabel 2.5 berikut.

**Tabel 2.5**  
**Potensi Ketersediaan Air di Kabupaten Banggai**  
**Yang Bersumber Dari 71 DAS Di Kabupaten Banggai**

<b>No</b>	<b>Nama Das</b>	<b>Luas (Ha)</b>	<b>Koefisien Limpasan Tertimbang</b>	<b>Curah Hujan (mm/tahun)*</b>	<b>Ketersediaan Air (m<sup>3</sup>/tahun)</b>
1	DAS TOKU	19,424.28	0.12	1,246.41	29,555,914.92
2	DAS AUK/HEK	11,942.62	0.08	1,865.37	17,732,733.82
3	DAS BAKUNG	15,647.17	0.07	2,081.16	22,446,939.45
4	DAS BALANTAK	6,886.63	0.09	1,444.74	8,496,865.64
5	DAS BALINGARA	67,868.86	0.05	2,374.07	87,927,369.08

No	Nama Das	Luas (Ha)	Koefisien Limpasan Tertimbang	Curah Hujan (mm/tahun)*	Ketersediaan Air (m <sup>3</sup> /tahun)
6	DAS BANGKETA	41,963.30	0.06	1,865.37	46,608,230.64
7	DAS BANTAYAN	15,851.42	0.18	1,556.60	44,197,895.59
8	DAS BATUI	51,486.32	0.06	1,871.19	59,382,024.81
9	DAS BELA	9,850.66	0.08	1,811.29	14,150,271.29
10	DAS BIAK	9,100.61	0.11	1,170.35	11,721,368.09
11	DAS BOALEMO	15,751.22	0.05	1,479.35	11,212,328.83
12	DAS BOLAANG	8,951.21	0.08	1,865.37	13,236,686.34
13	DAS BONGKA	332,733.76	0.10	2,169.75	700,095,368.55
14	DAS BUNTA	26,206.69	0.07	1,672.69	30,014,034.57
15	DAS DOLIAN	8,759.08	0.10	1,700.06	14,299,570.19
16	DAS DONGIN	10,661.06	0.11	2,733.20	33,421,599.45
17	DAS HUNDUHON	12,876.18	0.15	1,556.60	30,266,305.41
18	DAS KALAKA	2,172.50	0.28	1,672.69	10,017,060.58
19	DAS KALUMBANGAN	8,385.03	0.21	1,672.69	30,007,850.71
20	DAS KAUHUNGKANG	9,929.08	0.04	2,374.07	9,119,814.06
21	DAS KAUNYO SIUNA	12,688.74	0.13	1,507.62	24,992,450.44
22	DAS KAYOWA	14,899.60	0.08	2,081.16	25,740,682.24
23	DAS KINTOM DAS	12,385.52	0.11	1,411.20	19,278,615.09
24	LAMBANGAN	16,100.92	0.04	1,227.10	7,758,021.34
25	DAS LIALIATONGO	650.51	0.13	1,811.29	1,522,127.74
26	DAS LOBU	35,218.33	0.04	1,502.18	22,944,567.43
27	DAS LOMBA	16,572.74	0.09	1,580.38	22,679,184.98
28	DAS LONGKONGA	3,945.21	0.12	1,479.35	7,182,009.09
29	DAS LUK	2,084.93	0.20	2,081.16	8,557,499.39
30	DAS LUOK	968.34	0.14	1,246.41	1,714,050.58
31	DAS MAAHAS	8,565.38	0.04	1,334.73	4,088,779.20
32	DAS MALIK	31,620.91	0.07	1,508.39	32,440,498.56
33	DAS MANSANDAK	3,329.86	0.30	1,556.60	15,538,889.02
34	DAS MANTAWA	17,092.08	0.11	2,755.14	52,049,331.33
35	DAS MATINDUK	5,747.25	0.16	2,324.66	21,656,376.28
36	DAS MAYAYAP	7,203.82	0.08	1,506.22	9,128,085.35
37	DAS MENDONO	16,258.36	0.06	1,411.20	13,801,570.73
38	DAS MONTU	7,701.26	0.15	1,490.47	17,682,022.39
39	DAS NAMBO	14,646.71	0.24	1,377.15	48,724,841.02
40	DAS NIPA	6,293.54	0.21	1,551.11	20,544,849.91
41	DAS ODOLIA	531.08	0.23	2,906.03	3,495,738.15
42	DAS OMA	3,637.96	0.14	1,479.35	7,338,869.48
43	DAS OMOLU	3,227.78	0.16	1,871.19	9,931,159.18
44	DAS OWAN	15,742.42	0.11	1,700.06	29,842,064.82
45	DAS P. BUAYO	17.85	0.15	1,506.22	40,869.77
46	DAS P. POAT	2,189.50	0.08	1,813.23	3,002,595.14
47	DAS PAGIMANA	3,687.28	0.10	1,506.22	5,530,694.47

No	Nama Das	Luas (Ha)	Koefisien Limpasan Tertimbang	Curah Hujan (mm/tahun)*	Ketersediaan Air (m <sup>3</sup> /tahun)
48	DAS PAKOWA	12,443.11	0.09	1,227.10	13,984,151.46
49	DAS PAREOTI	7,963.98	0.07	2,872.65	16,981,632.23
50	DAS PATIPATI	6,261.47	0.10	1,506.22	9,327,723.75
51	DAS PETAK	1,355.58	0.16	1,811.29	4,000,503.82
52	DAS POH	11,997.40	0.17	1,170.35	23,666,107.43
53	DAS RATA	4,571.76	0.20	2,912.60	26,662,385.31
54	DAS SABO	16,485.71	0.04	2,188.22	14,301,126.61
55	DAS SALIPI	1,908.80	0.10	1,506.22	2,878,897.84
56	DAS SAMAKU	6,157.09	0.15	999.12	9,238,642.34
57	DAS SAMBUANG	6,428.75	0.11	1,506.22	10,634,654.01
58	DAS SANDIMAK	3,295.51	0.29	1,556.60	15,021,300.44
59	DAS SIMPONG	3,816.65	0.19	1,334.73	9,646,946.07
60	DAS SINORANG	29,261.29	0.10	2,324.66	65,513,846.04
61	DAS SOHO	5,872.08	0.21	1,334.73	16,374,564.37
62	DAS SUKON	4,698.53	0.11	1,580.38	8,462,363.04
63	DAS TANASUMPU	8,290.69	0.09	2,871.96	20,465,587.81
64	DAS TANGKIANG	4,573.28	0.09	1,871.19	7,719,337.54
65	DAS TOIBA	3,062.78	0.10	1,506.22	4,397,063.88
66	DAS TOILI	69,531.71	0.14	2,364.66	227,503,726.67
67	DAS TOIMA	28,175.51	0.04	1,492.71	16,774,191.86
68	DAS TOMEANG	1,658.06	0.17	1,811.29	5,113,029.55
69	DAS TOPO	11,237.61	0.25	2,755.33	78,657,398.81
70	DAS USO	1,965.36	0.16	2,081.16	6,389,633.38
71	DAS WARU	9,382.58	0.10	1,580.38	14,145,813.06

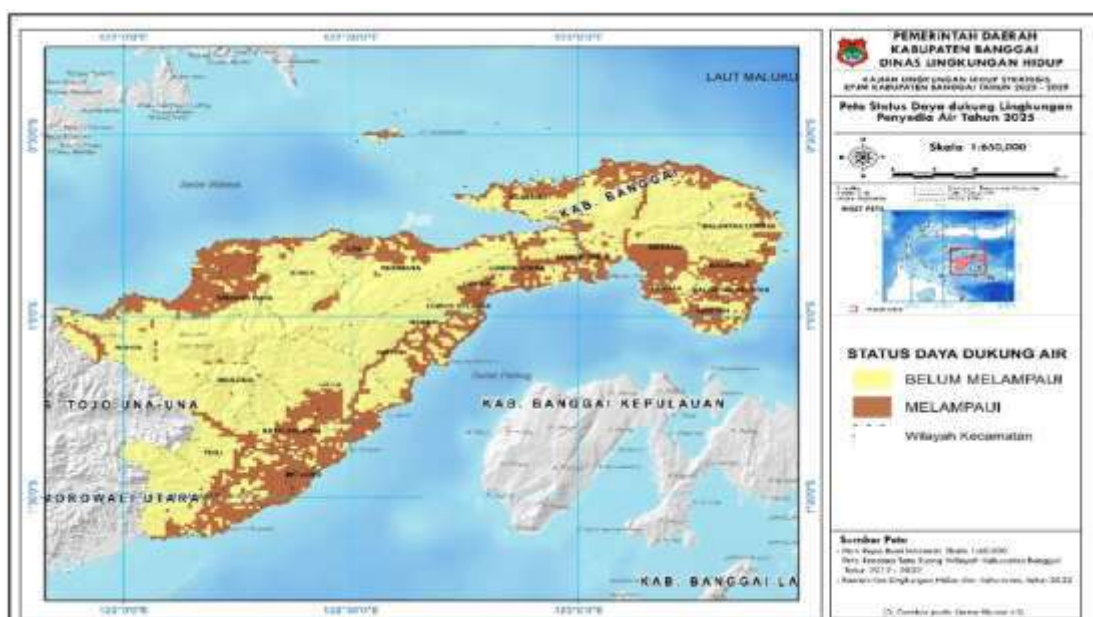
Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029

Sementara nilai kebutuhan air di Kabupaten Banggai juga dinilai pada setiap grid berdasarkan hasil distribusi penduduk di Kabupaten Banggai pada setiap grid, yang kemudian digunakan untuk menghitung kebutuhan penduduk terhadap air menggunakan standar kebutuhan air domestic sebesar 1.600 m<sup>3</sup>/tahun/kapita. Dalam kajian daya dukung penyedia air, nilai kebutuhan pangan juga didasarkan pada 2 waktu yang berbeda, yaitu berdasarkan populasi penduduk tahun 2023 sebagai tahun dasar analisis, dan populasi penduduk tahun 2029 sebagai hasil proyeksi populasi pada akhir periode implementasi RPJMD kabupaten Banggai 2024-2029. Juga mempertimbangkan dinamika dan tekanan jumlah penduduk,

ketersediaan air serta kebutuhan air domestik, estimasi status indikatif daya dukung penyedia pangan dilakukan dengan asumsi bahwa dalam pendekatan ini, komponen ketersediaan air berdasarkan kondisi bentang alam, penutupan lahan dan sebaran vegetasi asli, yang mana telah direpresentasikan dalam bentuk indeks jasa ekosistem penyedia air, tidak mengalami perubahan.

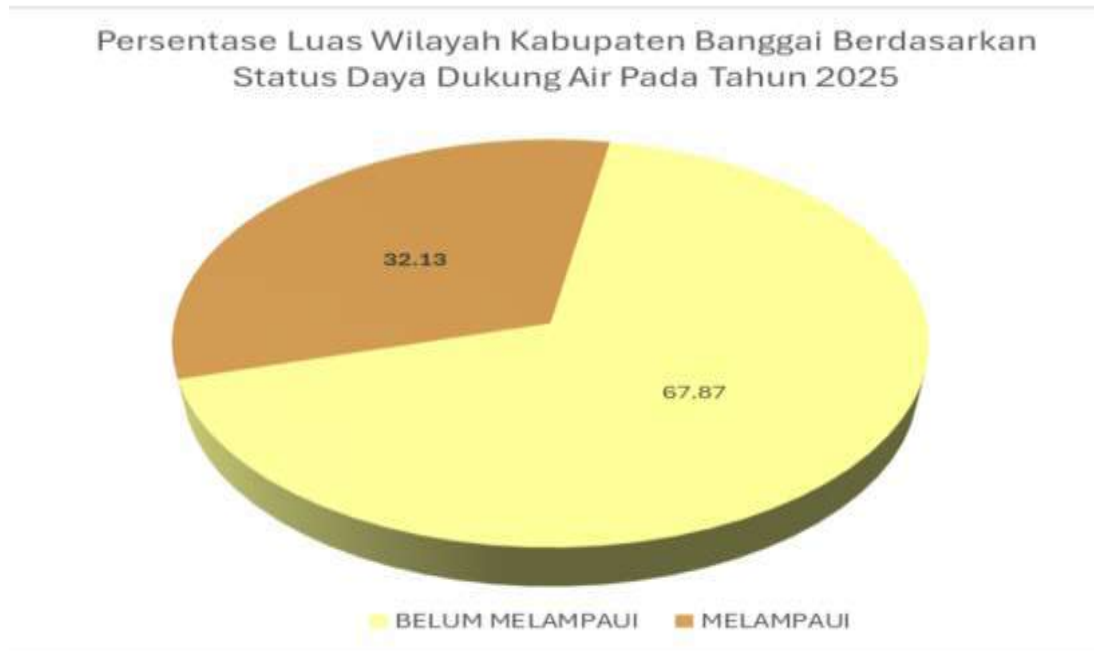
Hasil perhitungan antara ketersediaan dan kebutuhan air di Kabupaten Banggai, selanjutnya digunakan untuk menghitung status daya dukung daya tampung penyediaan air untuk mengidentifikasi apakah tingkat penyediaan bahan air di Kabupaten Banggai sudah terlampaui atau belum terlampaui. Perhitungan status daya dukung daya tampung juga dilakukan untuk mengetahui jumlah populasi penduduk maksimal yang dapat didukung kebutuhan airnya secara alamiah oleh karakteristik wilayah Kabupaten Banggai (Ambang Batas Populasi). Hasil perhitungan status daya dukung daya tampung air di Kabupaten Banggai Pada tahun 2025 disajikan pada gambar 2.10 dan gambar 2.11 berikut.

**Gambar 2.10**  
**Peta Daya Dukung Lingkungan Untuk Penyediaan Air**  
**Di Kabupaten Banggai Tahun 2025**



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029

**Gambar 2.11**  
**Grafik Persentase Luas Wilayah**  
**Berdasarkan Status Daya Dukung Penyedia Air**  
**Di Kabupaten Banggai Tahun 2025**

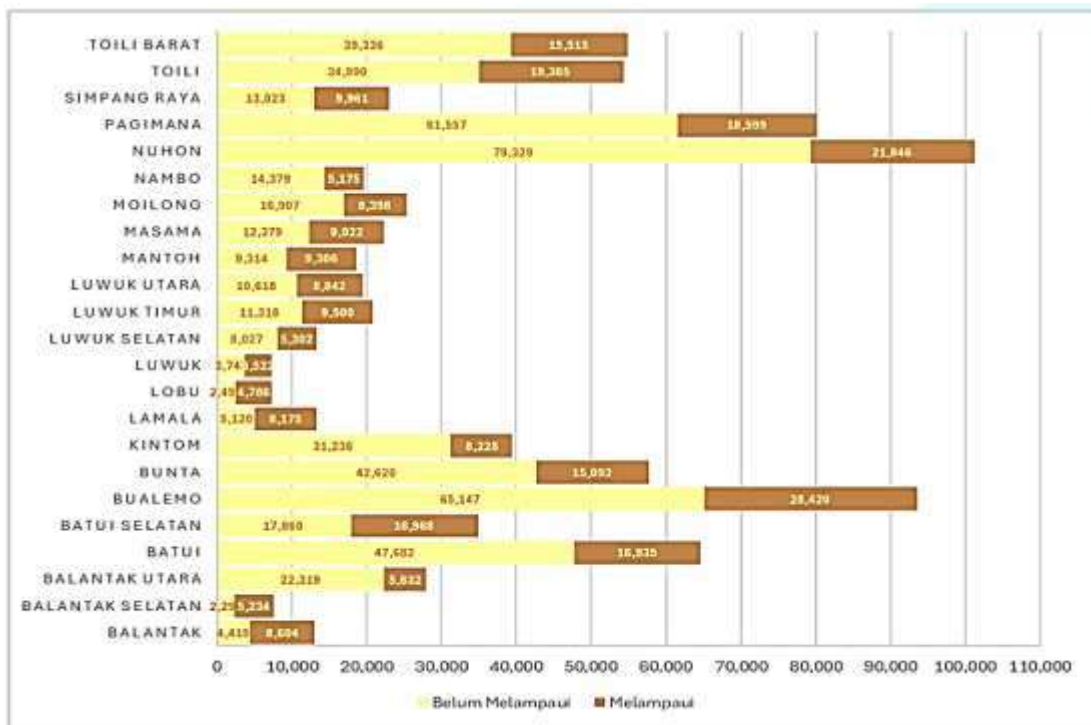


Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029

Dari tampilan peta dan grafik di atas, kondisi lingkungan tahun pada 2025 terlihat bahwa luas wilayah Kabupaten Banggai dengan status daya dukung penyedia air yang telah melampaui adalah sebesar 32,13 % dari total luas wilayah Kabupaten Banggai, yang berarti lebih kecil dibanding dengan luas wilayah yang memiliki status daya dukung penyedia air belum terlmapau, yaitu 67,87% dari total wilayah Kabupaten Banggai. Pola spasial ini hampir sama dengan pola spasial daya daya dukung pangan yang telah dibahas sebelumnya, karena jika dicermati bahwa daerah atau wilayah kabupaten Banggai yang memiliki daya dukung penyedia air telah terlampaui, umumnya berada pada wilayah yang memiliki tekanan penduduk yang relatif tinggi akibat pertambahan populasi, dan juga dipicu oleh pertumbuhan ekonomi pada wilayah yang mengalami perkembangan ditingkat kecamatan, khususnya terkait dengan pengembangan

wilayah pertanian dan permukiman. Gambaran mengenai status daya dukung penyedia air pada tahun 2025 di setiap wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai, dapat dilihat pada Gambar 2.12 di bawah ini.

**Gambar 2.12**  
**Grafik Status Daya Dukung Daya Tampung**  
**Penyediaan Air Di Kabupaten Banggai Tahun 2025**

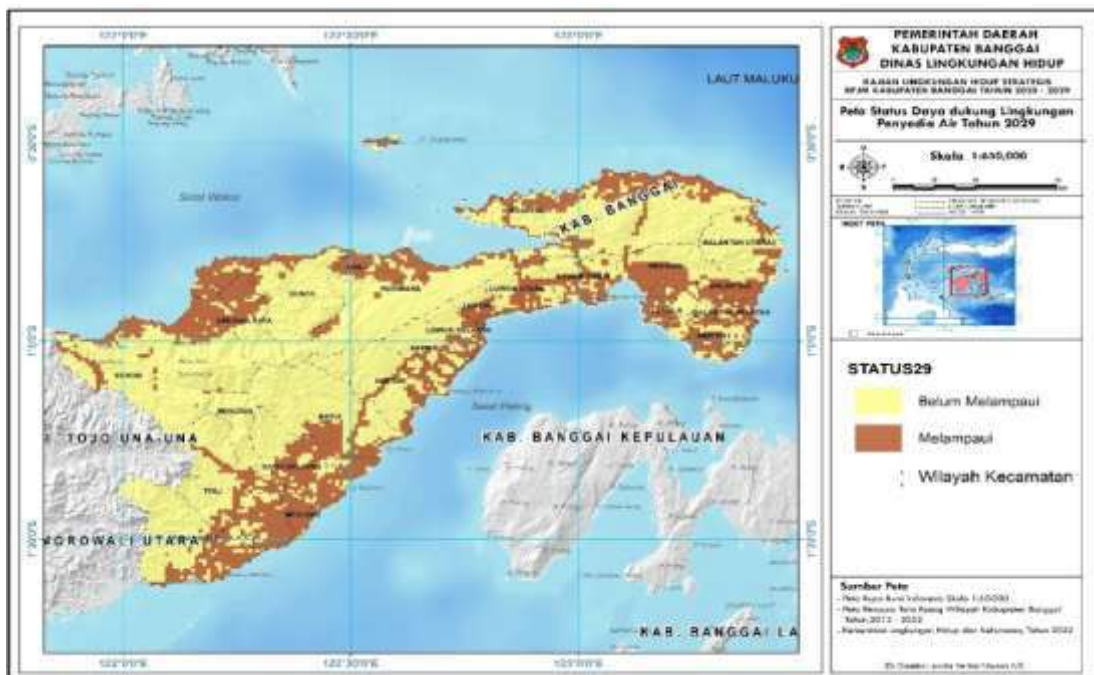


Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029

Berdasarkan grafik status daya dukung penyedia air pada tahun 2025 di setiap wilayah kecamatan di atas, dapat diketahui bahwa kecamatan Nuhoan, kecamatan Bualemo dan kecamatan Pagimana merupakan wilayah kecamatan yang relatif lebih luas dibanding wilayah kecamatan yang lain, dan juga pada tiga kecamatan tersebut, memiliki potensi wilayah yang masih relatif luas untuk kawasan dengan status daya dukung lingkungan belum terlampaui dalam hal penyediaan air. Sementara kecamatan Lobu, kecamatan Balantak Selatan, kecamatan Balantak dan Kecamatan Lamala, adalah empat wilayah kecamatan yang luas wilayahnya relatif lebih kecil, dan

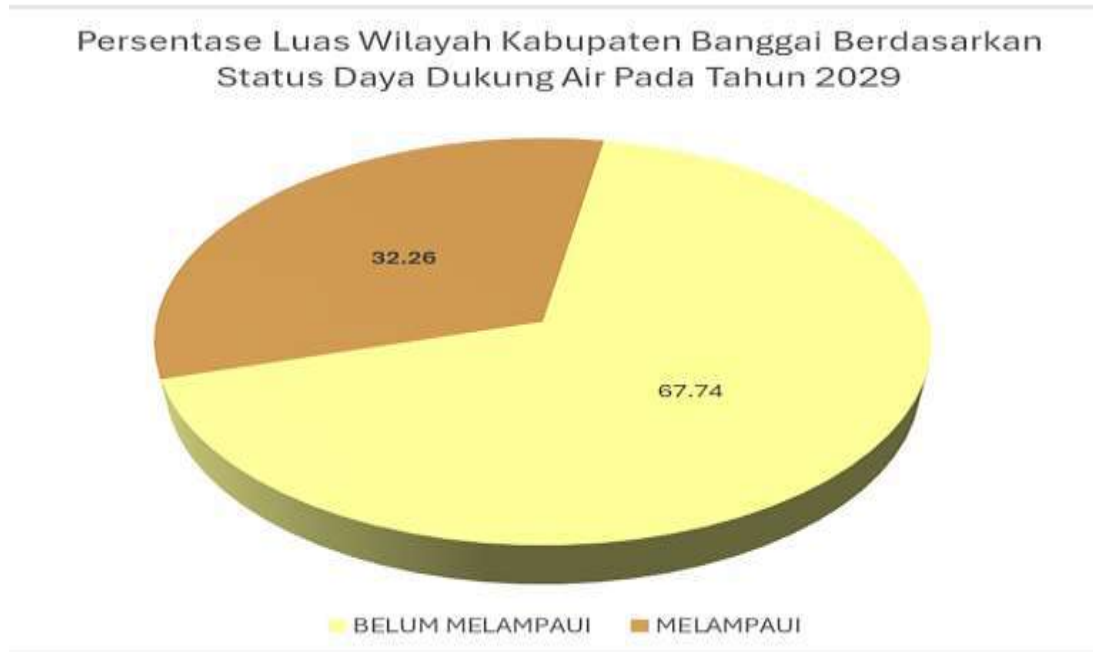
terlihat kondisi lingkungannya, hampir sebagian atau lebih dari 50% luasan wilayahnya telah berstatus melampaui ambang batas untuk daya dukung penyediaan air. Dan untuk kecamatan lainnya, terlihat bahwa luasan lingkungan dengan daya dukung yang telah melampaui ambang batas dalam penyediaan air, yakni rata-rata kurang dari 40% persen luas wilayahnya. Dan berikut untuk hasil analisis prediksi kondisi daya dukung penyedia air Kabupaten Banggai pada tahun 2029 dapat dilihat pada Gambar 2.13 dan Gambar 2.14 di bawah ini.

**Gambar 2.13**  
**Peta Daya Dukung Lingkungan Untuk Penyediaan Air**  
**Di Kabupaten Banggai Tahun 2029**



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029

**Gambar 2.14**  
**Grafik Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Daya Dukung**  
**Penyedia Air Di Kabupaten Banggai Tahun 2029**



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029

Berdasarkan grafik pada gambar 2.14 daya dukung penyedia air pada tahun 2029 di setiap wilayah kecamatan di atas, pola distribusi spasial yang hampir serupa dengan tahun 2025. Juga diketahui bahwa selain kecamatan Balantak Selatan, Batui Selatan, Bualemo, Lobu, Luwuk Timur, Mantoh dan Kecamatan Masama luasan kawasan berdasarkan status daya dukung air itu tidak berubah, sementara kecamatan lain umumnya pada kawasan dengan daya dukung lingkungan penyedia air yang belum terlampaui, luasannya cenderung mengalami penurunan, dan ini berarti kawasan dengan daya dukung lingkungan yang telah melampaui ambang batas untuk penyediaan air di kecamatan-kecamatan tersebut, luasannya cenderung mengalami peningkatan, kecuali untuk tujuh wilayah kecamatan yang disebutkan sebelumnya. Dan jika memperhatikan ketersediaan air secara alami di Kabupaten Banggai adalah sebesar 879.079.213,38 m, dimana ambang batas populasi atau jumlah populasi penduduk

maksimal yang dapat didukung ketersediaan airnya secara alamiah oleh Kabupaten Banggai adalah 549.277 jiwa. Sehingga berdasarkan jumlah penduduk pada Tahun 2025 sebesar 409.392 jiwa (versi data grid), daya dukung daya tampung penyediaan air Kabupaten Banggai pada tahun 2025, statusnya belum melampaui ambang batas atau jumlah populasi penduduk maksimal yang dapat didukung oleh ketersediaan air. Demikian pula pada tahun 2029, dapat disimpulkan secara umum wilayah kabupaten Banggai berdasarkan proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2029, yakni sebesar statusnya belum melampaui daya dukung penyediaan air 435.628 jiwa karena belum melampaui ambang batas populasi atau melampaui jumlah populasi penduduk maksimal yang dapat didukung oleh ketersediaan air di Kabupaten Banggai.

Untuk melihat dinamika status daya dukung lingkungan di Kabupaten Banggai untuk penyediaan air selama periode implementasi RPJMD tahun 2025 -2029, maka berikut disusun suatu ringkasan atau rekapitulasi gambaran perbandingan kondisi lingkungan pada tahun 2025 dan tahun 2029 terkait dengan status daya dukung penyediaan air di kabupaten Banggai, yang disajikan dalam tabel 2.6 berikut ini.

**Tabel 2.6**  
**Rekapitulasi Dinamika Lingkungan Di Kabupaten Banggai Terkait**  
**Perbandingan Status Daya Dukung Lingkungan Penyedia Air Pada**  
**Tahun 2025 dan Tahun 2029**

Kecamatan	Proyeksi Populasi Penduduk (Jiwa)		Ketersediaan Air	Proyeksi Kebutuhan Air Domestik (m <sup>3</sup> )		Ambang batas (Jiwa)	Persentase Luas wilayah berdasarkan status daya dukung air (% Luas)			
	2025	2029	(m <sup>3</sup> )	2025	2029		2025		2029	
							BELUM MELAMPAUI	MELAMPAUI	BELUM MELAMPAUI	MELAMPAUI
BALANTAK	6.624	6.988	6.810,887.5	10,598,463.0	11,180,800.0	4267	33.93	66.07	33.90	66.10
BALANTAK SELATAN	5.551	5.860	4,503,444.0	8,880,971.9	9,376,000.0	2815	30.44	69.56	30.44	69.56
BALANTAK UTARA	4.991	5.273	15,125,290.7	7,985,090.8	8,436,800.0	9443	79.85	20.15	79.55	20.45
BATUI	19.215	20.368	38,609,960.9	30,743,714.5	32,588,800.0	24102	73.79	26.21	73.80	26.20
BATUI SELATAN	16.438	17.441	25,790,043.8	26,301,157.3	27,905,600.0	16110	51.28	48.72	51.16	48.84
BUALEMO	20,592	21,421	43,016,373.6	32,947,733.8	34,273,600.0	26832	69.63	30.37	69.63	30.37
BUNTA	22,936	24,344	20,659,246.1	36,696,948.2	38,950,400.0	12918	73.85	26.15	73.86	26.14
KINTOM	12,056	12,786	27,353,120.8	19,290,077.8	20,457,600.0	17110	79.15	20.85	78.94	21.06
LAMALA	7.627	8.062	6,553,289.5	12,202,931.2	12,899,200.0	4091	38.51	61.49	38.87	61.13
LOBU	4.104	4.320	1,468,898.5	6,566,171.6	6,912,000.0	919	34.29	65.71	31.95	68.05
LUWUK	42.150	44.763	4,811,178.2	67,440,306.8	71,620,800.0	3004	51.52	48.48	51.52	48.48
LUWUK SELATAN	26.465	28.083	7,199,047.5	42,344,311.8	44,932,800.0	4494	60.22	39.78	60.81	39.19
LUWUK TIMUR	13.326	14.117	15,335,124.4	21,322,382.6	22,587,200.0	9583	54.37	45.63	54.77	45.23
LUWUK UTARA	20,035	21,243	14,003,914.1	32,055,965.9	33,988,800.0	8742	54.56	45.44	54.56	45.44
MANTOH	7.976	8.430	13,174,734.9	12,762,121.7	13,488,000.0	8231	50.02	49.98	48.19	51.81
MASAMA	13.172	13.955	10,949,294.0	21,075,853.4	22,328,000.0	6836	55.51	44.49	55.51	44.49
MOILONG	22.181	23.538	26,279,734.6	35,490,050.0	37,660,800.0	16409	66.81	33.19	66.81	33.19
NAMBO	9.562	10.119	13,567,099.8	15,298,729.1	16,190,400.0	8492	73.53	26.47	73.10	26.90
NUHON	22.368	23.740	62,577,103.8	35,789,180.0	37,984,000.0	39095	78.41	21.59	78.15	21.85
PAGIMANA	29.251	32.612	33,357,933.1	46,802,128.8	52,179,200.0	20829	76.80	23.20	76.54	23.46
SIMPANG RAYA	16.912	17.926	12,578,021.9	27,059,604.8	28,681,600.0	7858	56.66	43.34	56.53	43.47
TOILI	39.790	42.573	77,564,276.9	63,663,781.1	68,116,800.0	48485	64.44	35.56	64.51	35.49
TOILI BARAT	26.068	27.666	397,791,194.8	41,708,835.5	44,265,600.0	248612	71.71	28.29	71.67	28.33
Jumlah	409,392	435,628	879,079,213.4	655,026,501.7	697,004,800.0	549277	67.87	32.13	67.74	32.26

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029

Dari data tabel 2.6 tersebut, diketahui bahwa berdasarkan nilai ambang batas jumlah penduduk yang dapat didukung oleh ketersediaan air dimasing-masing wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai, terlihat bahwa dari 23 wilayah kecamatan di Kabupaten Banggai, 15 kecamatan diantaranya, yaitu terdiri dari kecamatan Balantak, Balantak Selatan, Batui Selatan, Bunta, Lamala, Lobu, Luwuk, Luwuk Selatan, Luwuk Timur, Luwuk Utara, Masam, Moiling, Nambo, Pagimana dan Kecamatan Simpang Raya, jumlah penduduknya pada tahun 2025 itu telah melampaui jumlah ambang batas populasi yang dapat didukung oleh ketersediaan air atau telah

melampaui jumlah populasi penduduk maksimal yang dapat didukung oleh ketersediaan air pada masing-masing wilayah kecamatan tersebut. Dan yang perlu mendapat perhatian, bahwa pada tahun 2029 terlihat bahwa wilayah kecamatan yang telah melampaui ambang batas populasi, bertambah satu kecamatan, yaitu kecamatan Mantoh, sehingga total wilayah kecamatan di Kabupaten Banggai yang statusnya telah melampaui daya dukung penyedia air berjumlah 16 kecamatan pada tahun 2029. Ini memberi indikasi bahwa daya dukung penyediaan air di Kabupaten Banggai, cenderung menurun seiring dengan pertambahan waktu. Sekalipun jika memperhatikan total ambang batas populasi mencakup seluruh wilayah kabupaten Banggai, terlihat bahwa total jumlah penduduk pada tahun 2025 dan jumlah penduduk tahun 2029, belum melampaui total jumlah ambang batas di Kabupaten Banggai, yakni dapat mendukung penyediaan air untuk populasi sebesar 549.277 Jiwa. Tentunya kondisi ini perlu mendapat perhatian dari semua pihak, dan perlu ada upaya dan intervensi dari pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengendalikan penurunan daya dukung lingkungan untuk penyediaan air di Kabupaten Banggai.

#### **2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan**

##### **A. Ketahanan Energi**

Ketahanan energi ini meliputi peningkatan akses dan ketersediaan energi bersih yang terus didorong untuk optimalisasi sumber energi terbarukan (EBT) untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Data pembangkit EBT eksisting Kabupaten Banggai tercantum pada tabel 2.7 berikut.

**Tabel 2.7**  
**Data Pembangkit EBT Eksisting Kabupaten Banggai (On Grid)**

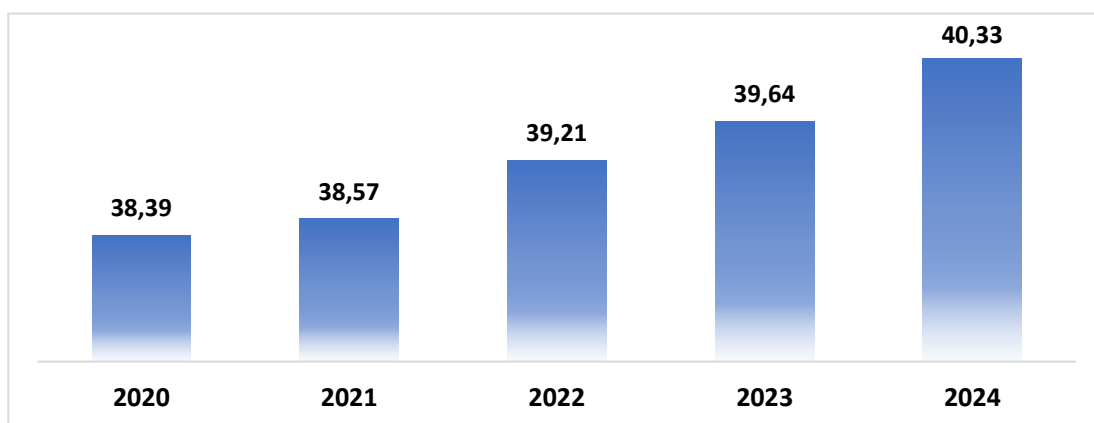
No.	Pemilik	Jenis	Nama Pembangkit	Bahan Bakar	Jumlah Unit	Kapasitas Terpasang	DMN	DMP Tertinggi	Tahun COD
1.	PLN	PLTM	PLTM Hanga-hanga	Air	1	1600 KW	1040 KW	1040 KW	1935
2.	PT. Buminata Cita Banggai Energi	PLTM	PLTM Kalumpang	Air	1	1200 KW	1000 KW	1000 KW	2025
3.	PT. Buminata Cita Banggai Energi	PLTM	PLTM Hanga-hanga II	Air	1	2552 KW	2200 KW	1840 KW	2005
4.	PT. Lambangan Energi Utama	PLTM	PLTM Lambangan	Air	2	3000 KW	2000 KW	2000 KW	2016
5.	PT. Adis Putra Pratama	PLTM	PLTM IPP HEK	Air	1	2500 KW	2350 KW	2000 KW	2010
6.	PLN	PLTMG	PLTMG Luwuk	Gas	1	40 MW	40 MW	40 MW	2018

Sumber : Buku Data dan Statistik DESDM, 2024

## B. Ketahanan Air

Ketahanan air merujuk pada kemampuan suatu daerah untuk menjamin ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keberlanjutan sumber daya air bagi kebutuhan domestik, ekonomi, dan lingkungan. Salah satu indikator yang menggambarkan kondisi ini adalah akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum. Di Kabupaten Banggai, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.15 berikut.

**Gambar 2.15**  
**Perkembangan Capaian Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum Di Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024**

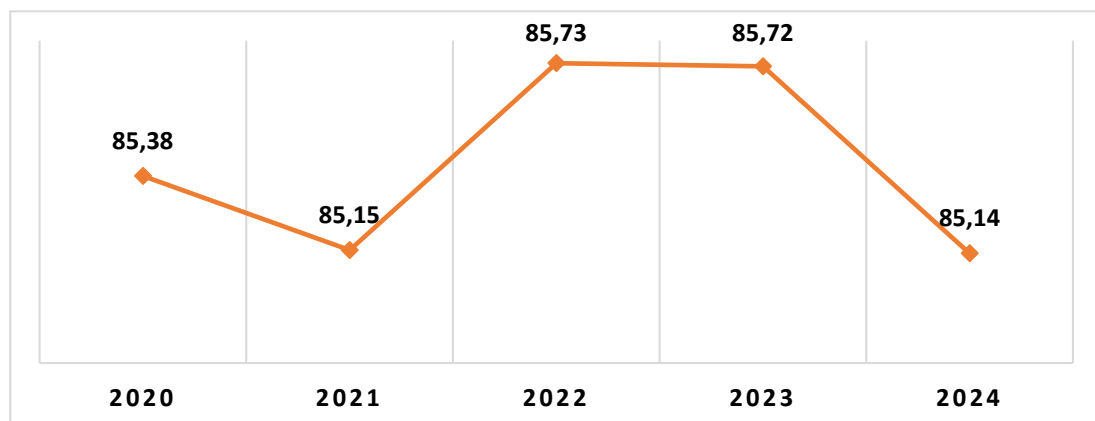


Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Banggai, 2025

### C. Kemandirian Pangan

Kemandirian pangan merujuk pada kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan, baik melalui produksi lokal maupun distribusi yang stabil. Indikator utama kemandirian pangan adalah indeks ketahanan pangan. Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu system penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi. Indeks ketahanan pangan berbagai kabupaten dan kota di provinsi Sulawesi Tengah tercantum pada gambar 2.16 berikut.

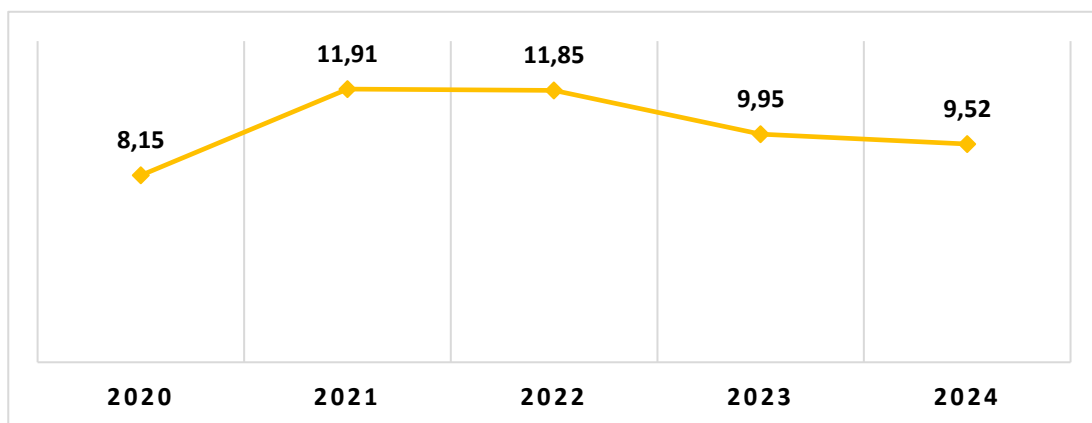
**Gambar 2.16**  
**Indeks Ketahanan Pangan (%)**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024**



*Sumber : Badan Pangan Nasional, 2025*

Indikator lainnya adalah prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU). Angka PoU Kabupaten Banggai selama kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada gambar 2.17 berikut.

**Gambar 2.17**  
**Perkembangan PoU (Prevalence of Undernourishment)**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024**



Sumber : Badan Pangan Nasional, 2025

#### **2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas**

Lingkungan hidup yang berkualitas meliputi kondisi pengendalian pencemaran dan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktifitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kondisi pengendalian pencemaran lingkungan di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan adanya berbagai tantangan, khususnya terkait pengelolaan sampah dan pertambangan yang dapat berdampak negative terhadap lingkungan. Berbagai upaya dan kebijakan pemerintah dan instansi terkait telah dilakukan dalam rangka pengendalian pencemaran tersebut, namun demikian implementasi kebijakan dan regulasi masih perlu ditingkatkan, dan kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penting. Kualitas lingkungan hidup merupakan kondisi lingkungan yang memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Kondisi Ini mencakup kualitas udara, air, tanah, dan juga

aspek sosial seperti kebersihan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) salah satu indikator refresentatif yang dapat memberikan gambaran komprehensif tentang kualitas lingkungan suatu wilayah, membantu pengambilan keputusan, dan menjadi dasar bagi perencanaan kebijakan lingkungan yang efektif. Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Banggai dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada gambar 2.18 berikut.

**Gambar 2.18**  
**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2021-2024**



*Sumber: Kabupaten Banggai Dalam Angka 2025*

Adapun komponen pembentuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Banggai dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut.

**Tabel 2.8**  
**Komponen Pembentuk**  
**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**  
**Tahun 2021-2024**

Capaian Pembangunan	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air	70	68,33	66,57	65,56
Indeks Kualitas Udara	84,87	87,56	86,14	95,60
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	82,46	82,4	81,42	81,26

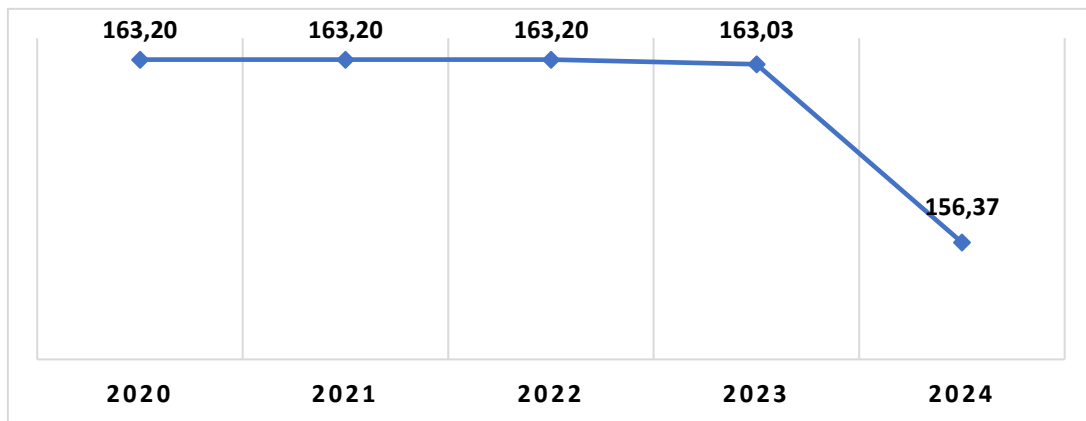
*Sumber: Kabupaten Banggai Dalam Angka 2025*

#### 2.1.1.6 Reliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

##### A. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana adalah indikator yang digunakan untuk menilai kemungkinan dampak yang diperkirakan akan terjadi jika suatu ancaman menjadi bencana disuatu wilayah. Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Banggai pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.19 berikut.

**Gambar 2.19**  
**Perkembangan Indeks Risiko Bencana (IRB)**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024**

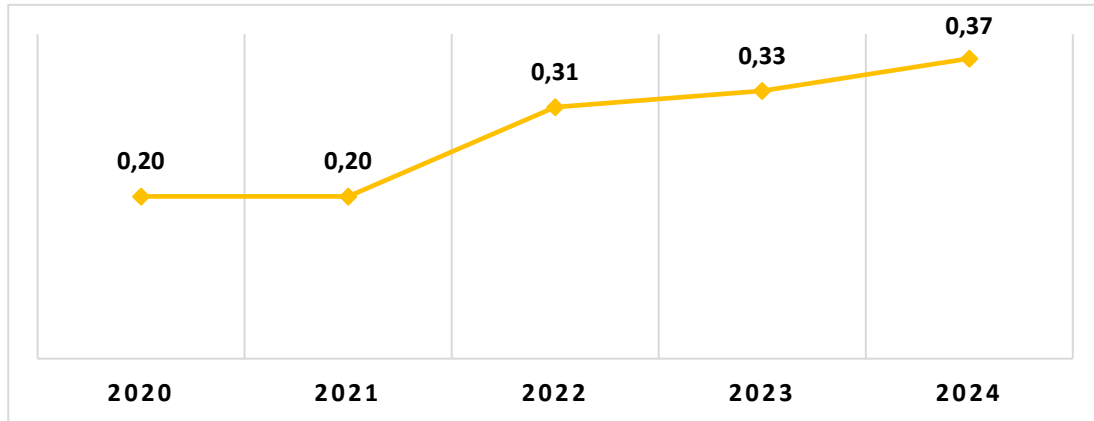


*Sumber : BPBD Kabupaten Banggai, 2025*

##### B. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana disuatu wilayah. Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Banggai pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.20 berikut.

**Gambar 2.20**  
**Perkembangan Indeks Ketahanan Daerah (IKD)**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024**



*Sumber : BPBD Kabupaten Banggai, 2025*

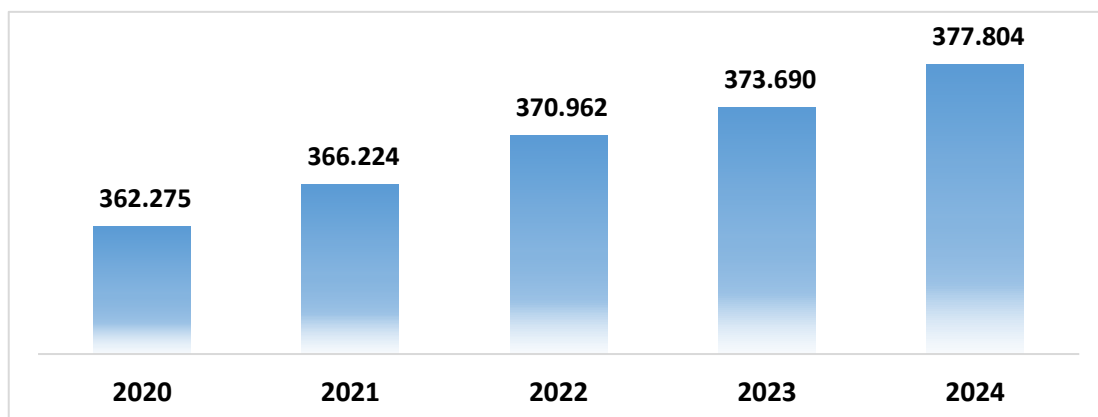
#### **2.1.1.7 Demografi**

Penduduk merupakan faktor penting dalam proses Pembangunan karena bukan hanya berperan sebagai pelaksana pembangunan, namun juga menjadi sasaran pembangunan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk, pembangunan harus diarahkan pada pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas, serta pengerahan mobilitas sehingga mempunyai ciri dan karakteristik yang bersinergi dengan tujuan pembangunan.

##### **A. Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk Kabupaten Banggai pada tahun 2024 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai sebesar 377.804 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 191.889 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 185.915 jiwa dengan rasio jenis kelamin 103,21 persen. Perkembangan Jumlah penduduk Kabupaten Banggai pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.21 berikut.

**Gambar 2.21**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk (Jiwa)**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024**

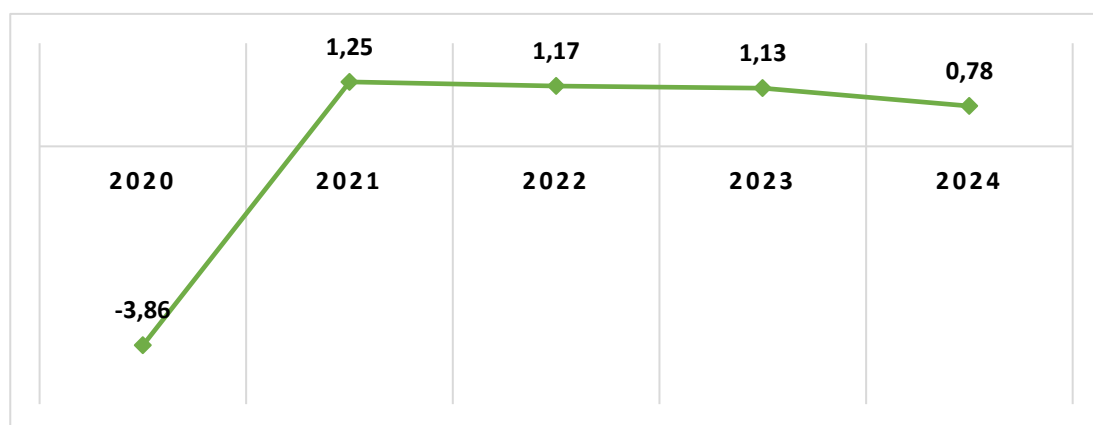


*Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025*

#### **B. Laju Pertumbuhan Penduduk**

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata Tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Laju Pertumbuhan penduduk Kabupaten Banggai pada kurun waktu tahun tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.22 berikut.

**Gambar 2.22**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk (%)**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024**

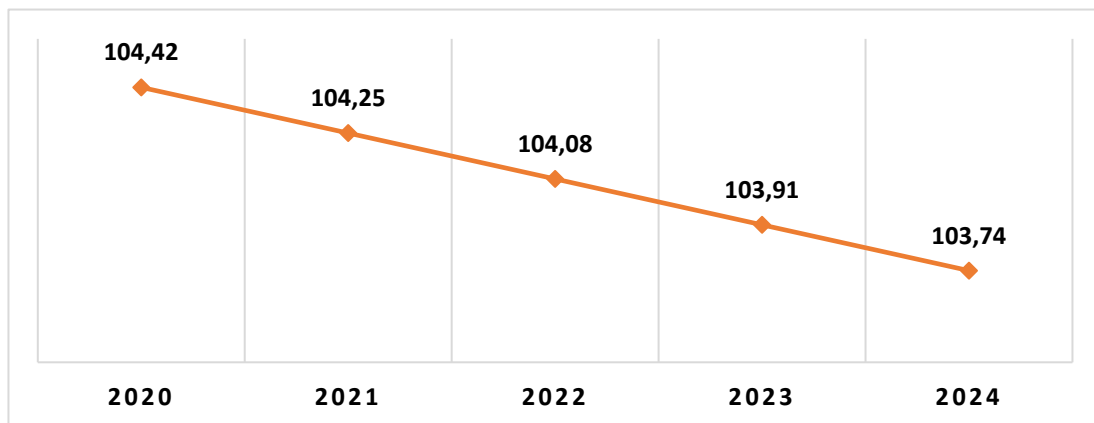


*Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025*

### C. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Banggai pada kurun waktu tahun tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.23 berikut.

**Gambar 2.23**  
**Rasio Jenis Kelamin (%)**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024**

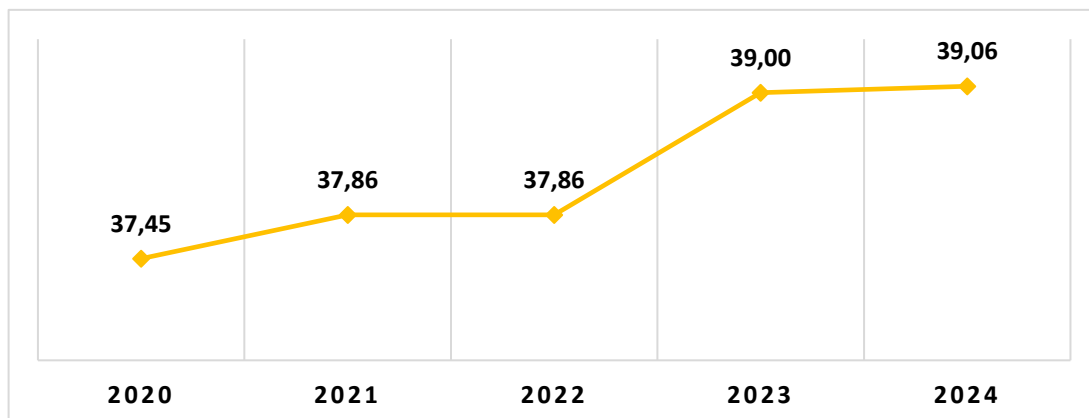


*Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025*

### D. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah ukuran persebaran penduduk yang menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Kepadatan penduduk Kabupaten Banggai pada kurun waktu tahun tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.24 berikut.

**Gambar 2.24**  
**Kepadatan Penduduk (per km<sup>2</sup>)**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024**

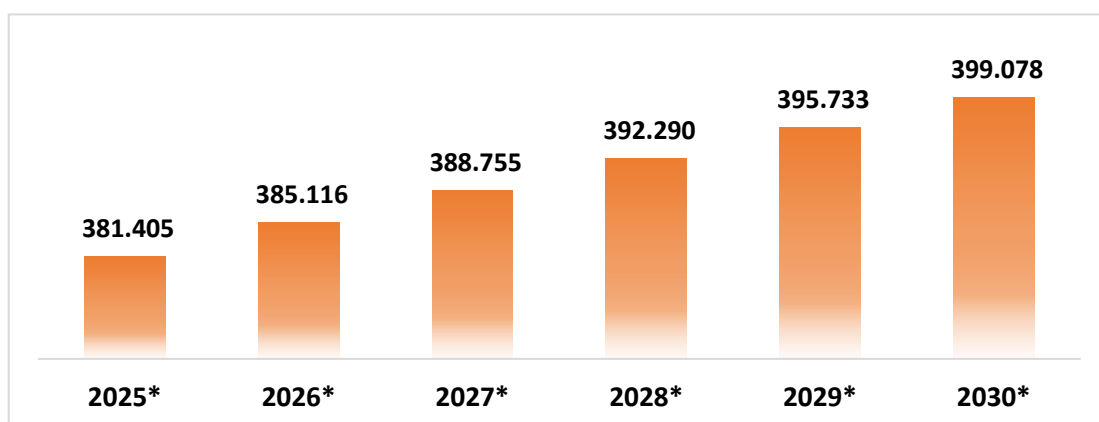


*Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025*

#### **E. Proyeksi Jumlah Penduduk**

Proyeksi penduduk merupakan perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan (migrasi). Jumlah penduduk Kabupaten Banggai pada tahun tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 diproyeksikan sebagaimana pada gambar 2.25 berikut.

**Gambar 2.25**  
**Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2025-2030**

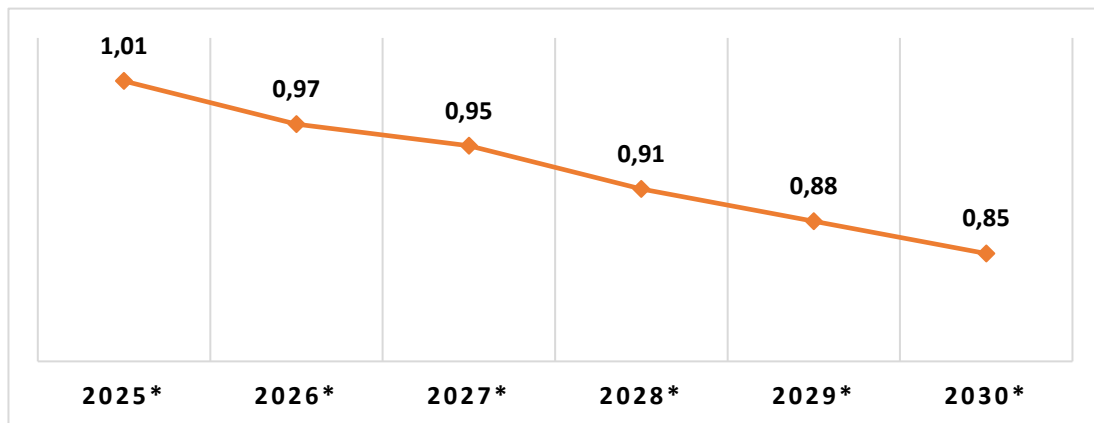


*Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020*

#### F. Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk

Proyeksi laju pertumbuhan penduduk adalah perkiraan laju peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah pada masa mendatang, yang didasarkan pada asumsi-asumsi ilmiah mengenai tiga komponen utama: tingkat kelahiran (fertilitas), tingkat kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (migrasi). Jumlah penduduk Kabupaten Banggai pada tahun tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 diproyeksikan sebagaimana pada gambar 2.26 berikut.

**Gambar 2.26**  
**Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk (Jiwa)**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2025-2030**

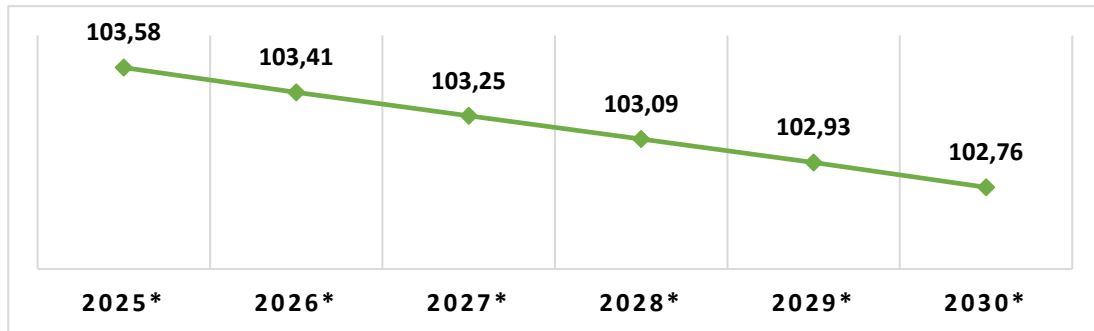


Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025

#### G. Proyeksi Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)

Proyeksi rasio jenis kelamin adalah perkiraan jumlah penduduk laki-laki dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah atau negara pada periode waktu mendatang, dihitung dengan membagi jumlah laki-laki dengan jumlah perempuan lalu dikalikan 100 (Rumus:  $SR = (\text{Jumlah Laki-laki} / \text{Jumlah Perempuan}) \times 100$ ). Angka ini penting untuk memahami keseimbangan gender dan kebutuhan pembangunan di masa depan. Berikut adalah proyeksi rasio jenis kelamin di Kabupaten Banggai pada tahun tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 yang disajikan dalam bentuk grafik pada gambar 2.27.

**Gambar 2.27**  
**Proyeksi Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2025-2030**

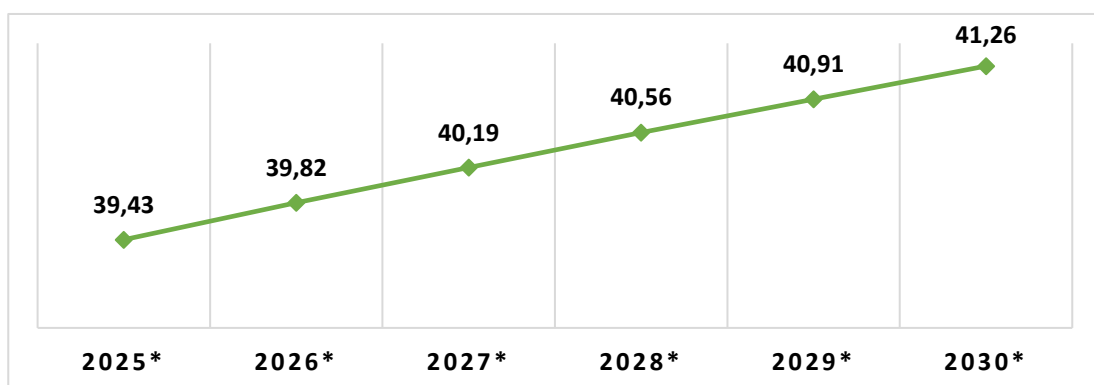


*Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025*

#### **H. Proyeksi Kepadatan Penduduk**

Proyeksi Kepadatan Penduduk Adalah perkiraan jumlah penduduk per satuan luas wilayah di masa depan, yang dihitung berdasarkan data pertumbuhan penduduk (kelahiran, kematian, dan migrasi) dari sensus dan survei penduduk. Proyeksi ini sangat penting untuk perencanaan pembangunan, seperti penyediaan pangan, sarana prasarana, pendidikan, kesehatan, dan perumahan, serta digunakan untuk mengevaluasi kegiatan Pembangunan. Berikut adalah proyeksi kepadatan penduduk Kabupaten Banggai pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 yang disajikan dalam bentuk grafik pada gambar 2.28.

**Gambar 2.28**  
**Proyeksi Kepadatan Penduduk (orang/km<sup>2</sup>)**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2025-2030**



*Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025*

## 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

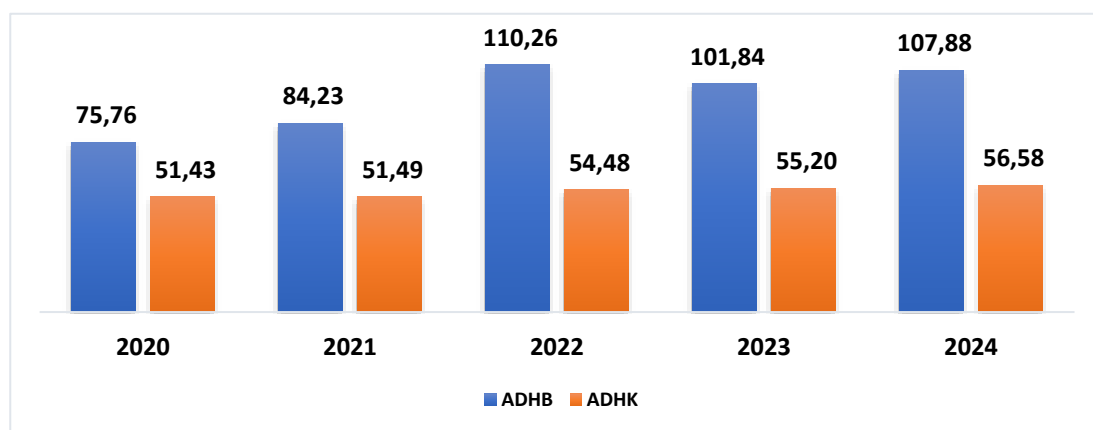
### 2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

#### A. PDRB dan Struktur Ekonomi

Nilai PDRB Kabupaten Banggai Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2024 mencapai 40,74 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan dari tahun 2023 yang sebesar 38,06 triliun rupiah.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB pada kurun waktu 5 tahun terakhir juga mengalami peningkatan, dari 18,52 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 21,38 triliun rupiah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan selama tahun 2024 Banggai mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 3,63 persen. Peningkatan PDRB ini disebabkan oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

**Gambar 2.29**  
**PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Banggai**  
**(Juta Rupiah) Tahun 2020–2024**



*Sumber: Kabupaten Banggai Dalam Angka 2025*

Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Kabupaten Banggai didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalan; dan Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan

PDRB Kabupaten Banggai. peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Banggai pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 32,17 persen (angka ini meningkat dari 24,29 persen di tahun 2020). Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 21,72 persen (menurun dari 23,38 persen di tahun 2020), disusul oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 18,47 persen (menurun dari 22,92 persen di tahun 2020). Adapun lapangan usaha lain memiliki peran masing-masing kurang dari 10 persen.

**Tabel 2.9**  
**Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Banggai ADHB**  
**Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020–2024**

No.	Kategori / Sub Kategori	Tahun				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,38	22,53	18,52	21,61	21,72
2.	Pertambangan dan Penggalian	22,92	22,12	21,61	19,01	18,47
3.	Industri Pengolahan	24,29	26,87	36,42	32,17	32,17
4.	Pengadaan Listrik, Gas	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02
5.	Pengadaan Air	0,05	0,05	0,04	0,05	0,05
6.	Konstruksi	7,87	7,38	5,96	6,92	7,15
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	5,16	5,07	4,37	5,20	5,19
8.	Transportasi dan Pergudangan	2,19	2,22	2,14	2,54	2,50
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,30	0,32	0,27	0,33	0,34
10.	Informasi dan Komunikasi	2,58	2,60	2,09	2,36	2,36
11.	Jasa Keuangan	1,90	1,96	1,56	1,70	1,75
12.	Real Estate	1,56	1,42	1,18	1,43	1,49
13.	Jasa Perusahaan	0,10	0,09	0,07	0,08	0,08
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,83	3,68	2,88	3,27	3,36
15.	Jasa Pendidikan	2,58	2,43	1,87	2,13	2,17
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,79	0,78	0,63	0,74	0,73
17.	Jasa Lainnya	0,50	0,47	0,38	0,44	0,45

*Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025*

Besarnya kontribusi Industri Pengolahan di sektor PDRB Kabupaten Banggai ini sebagian besar disokong oleh pengilangan minyak dan gas yang berupa LNG (59,48%) dan industri kimia berupa Amonia (15,39%). Selain itu terdapat industri makanan yang mempunyai kontribusi 10,58 persen terhadap Industri Pengolahan yang sebagian besar berupa industri kopra dan minyak sawit.

Kontributor terbesar ketiga pada PDRB Kabupaten Banggai yaitu Pertambangan dan Penggalian. Sektor ini sebagian besar disokong oleh pertambangan migas yang dilakukan oleh Pertamina Job Tomori. Selain itu subsektor pertambangan bijih logam menjadi penyokong terbesar kedua pada sektor ini. Sub sektor pertambangan bijih logam menyumbang 20,73 persen pada sektor Penggalian dan pertambangan.

Diantara ketiga lapangan usaha tersebut, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah kategori mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Industri Pertambangan dan Penggalian serta Industri Pengolahan peranannya menurun. Salah meningkatnya satu peranan penyebab Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah meningkatnya jumlah produksi pada lapangan usaha tersebut. Penurunan harga sampai 50% pada komoditas Industri Migas dan Industri Kimia juga menjadi pendorong penurunan kontribusi dari kedua sektor tersebut.

PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (output) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang

Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Banggai pada periode 2020–2024 dapat dilihat dari tabel 2.10 berikut ini:

**Tabel 2.10**  
**PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran**  
**Tahun 2020–2024 (Juta Rupiah)**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023*</b>	<b>2024**</b>
Konsumsi Rumah Tangga	10.867,97	11.480,67	12.471,47	13.372,50	14.173,44
Konsumsi LNPRT	462,53	491,56	567,34	649,68	741,60
Konsumsi Pemerintah	2,877,06	3.111,22	3.212,15	3.337,94	3.691,60
Pembentukan Modal Tetap Bruto	7.356,92	7.924,07	8.408,11	9.179,13	10.221,83
Perubahan Inventori	199,67	217,57	238,07	231,95	381,32
Net Ekspor Barang dan Jasa	35.525,77	32.063,33	52.181,39	46.798,92	51.877,35
<b>PDRB</b>	<b>27.360,88</b>	<b>30.825,09</b>	<b>40.776,13</b>	<b>38.057,96</b>	<b>40.737,03</b>

*Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025*

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Banggai pada periode 2020–2024 dapat dilihat dari tabel 2.11 berikut ini:

**Tabel 2.11**  
**PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut**  
**Pengeluaran Tahun 2020–2024 (Juta Rupiah)**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023*</b>	<b>2024**</b>
Konsumsi Rumah Tangga	6.460,07	6.632,83	6.903,15	7.186,67	7.487,25
Konsumsi LNPRT	274,57	277,88	304,12	328,04	367,96
Konsumsi Pemerintah	1.442,46	1.503,06	1.515,17	1.525,02	1.676,36
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.323,07	4.507,51	4.646,07	4.699,26	4.876,03
Perubahan Inventori	137,50	145,25	151,13	134,22	220,52
Net Ekspor Barang dan Jasa	30.755,82	24.910,23	33.984,02	32.168,53	39.244,99
<b>PDRB</b>	<b>18.517,22</b>	<b>18.840,59</b>	<b>20.139,75</b>	<b>20.627,67</b>	<b>21.376,37</b>

*Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025*

## **B. PDRB Perkapita**

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Banggai atas dasar harga berlaku sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 cukup fluktuatif. Pada tahun 2020 yang mengalami penurunan karena pengaruh COVID-19 dan pada tahun 2023 disebabkan terjadinya penurunan produksi.

Migas dan Amonia yang menjadi kontributor terbesar dalam PDRB Kabupaten Banggai. Pada tahun 2020 PDRB per kapita tercatat sebesar 75.679 ribu rupiah kemudian naik di tahun 2021 menjadi 84.300 ribu rupiah, dan kembali naik pada tahun 2022 menjadi 110.262 ribu rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan pengaruh faktor inflasi. Kemudian Pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 101.841 ribu rupiah dikarenakan turunnya harga Migas dan Amonia yang menjadi komoditas utama. PDRB per kapita Kabupaten Banggai pada tahun 2024 kembali mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 107.884 ribu rupiah.

Jika dilihat berdasarkan harga konstan, kenaikan PDRB per kapita Kabupaten Banggai tahun 2024 mengalami peningkatan sekitar 2,56 persen dari tahun 2023. Nilai PDRB per kapita Kabupaten

Banggai atas dasar harga berlaku Gambaran perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Banggai berdasarkan harga Konstan dan Harga Berlaku Tahun 2020-2024, dapat di lihat pada tabel 2.12 berikut.

**Tabel 2.12**  
**PDRB Perkapita Kabupaten Banggai**  
**Tahun 2020-2024**

Tahun/Year	2020	2021	2022	2023*	2024**
<b>Nilai PDRB/GRDP (Miliar Rupiah/Billion rupiahs)</b>					
- ADHB/ at current price	27,361	30,825	40,766	38,057	40,737
- ADHK/ at 2010 Constant Price	18,517	18,841	20,140	20,627	21,376
<b>PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (Ribu Rupiah/Thousand rupiahs)</b>					
- ADHB/ at current price	75,679	84,300	110,262	101,841	107,884
- ADHK/ at 2010 Constant Price	51,218	51,525	54,744	55,198	56,610
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/ Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price	-0.78	0.60	5.72	1.31	2.56
<b>Jumlah Penduduk (Ribu Orang) / Population (Thousand People)</b>	361.54	365.66	369.72	373.69	377.60
<b>Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/ Population Growth (Percent)</b>	-4.05	1.14	1.11	1.07	1.05

Sumber : Kabupaten Banggai Dalam Angka 2025

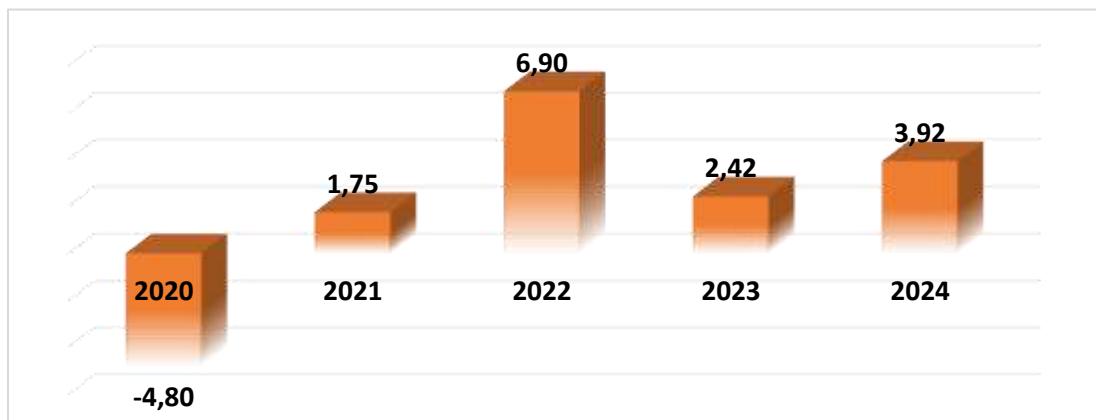
### C. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Nilai PDRB Kabupaten Banggai tahun 2024 atas dasar harga konstan 2010 mencapai 21,38 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari tahun 2023 yang sebesar 20,63 triliun rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2024 terjadi pertumbuhan

ekonomi sebesar 3,92 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang mencapai 2,42 persen.

**Gambar 2.30**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banggai (%)**  
**Tahun 2020-2024**



*Sumber : Kabupaten Banggai Dalam Angka 2025*

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai dari tahun 2020 sampai dengan 2024 cukup fluktuatif. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai mengalami penurunan menjadi -4,80 persen, yang utamanya diakibatkan karena dampak pandemi COVID-19. Berlanjut pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kembali meningkat menjadi 1,75 persen. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kembali meningkat drastis menjadi 6,90 persen, kemudian di tahun 2023 melambat menjadi 2,42 persen dan meningkat menjadi 3,92 pada tahun 2024.

Struktur laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Banggai menurut lapangan Usaha tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.13 berikut.

**Tabel 2.13**  
**Laju Pertumbuhan PDRB**  
**atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Banggai**  
**Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2020–2024**

No.	Kategori / Sub Kategori	Tahun				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2,66	3,58	1,55	3,47	0,18
2	Pertambangan dan Penggalian	1,36	-0,44	9,99	1,14	6,00
3	Industri Pengolahan	-10,77	-2,35	11,83	0,72	2,52
4	Pengadaan Listrik, Gas	5,09	3,68	10,00	6,69	5,25
5.	Pengadaan Air	4,21	6,01	3,30	3,04	4,00
6.	Konstruksi	-13,16	3,80	1,83	2,99	2,84
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-6,23	9,10	8,18	7,16	3,44
8.	Transportasi dan Pergudangan	-33,90	10,92	14,54	5,59	3,37
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-14,53	15,13	10,01	8,25	6,18
10.	Informasi dan Komunikasi	7,73	11,83	6,08	5,72	6,06
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	12,10	9,83	-3,68	0,37	9,72
12.	Real Estate	0,03	1,33	7,24	5,72	5,71
13.	Jasa Perusahaan	-1,82	3,60	5,42	4,95	2,31
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1,77	5,96	0,02	2,58	6,51
15.	Jasa Pendidikan	-2,77	5,61	0,22	4,88	6,67
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,64	3,01	2,90	6,66	4,38
17.	Jasa Lainnya	-0,01	6,05	4,39	5,27	6,02
<b>P D R B</b>		<b>-4,80</b>	<b>1,75</b>	<b>6,90</b>	<b>2,42</b>	<b>3,92</b>

*Sumber : Kabupaten Banggai Dalam Angka 2025*

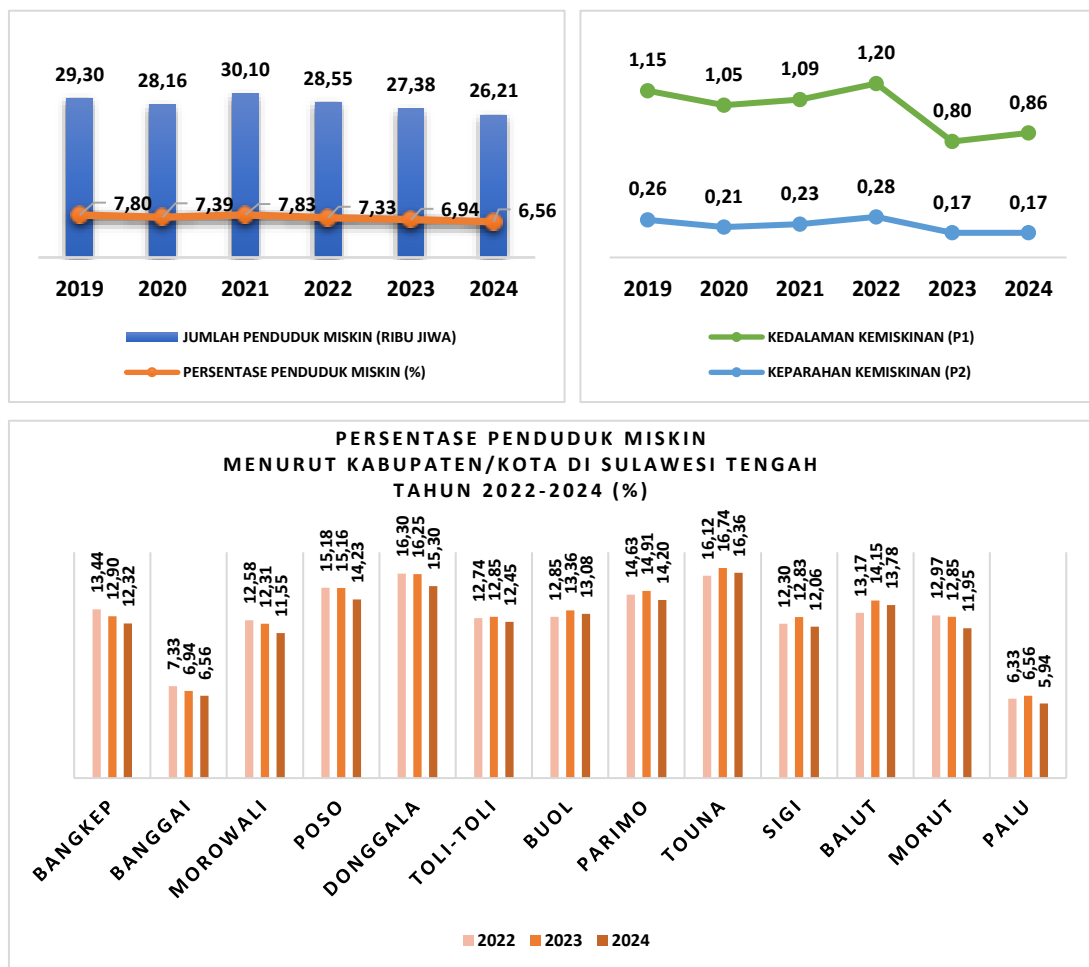
#### **D. Tingkat Kemiskinan**

Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dimana semakin tinggi nilai P1, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan disuatu daerah.

Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Kabupaten Banggai.

Angka Kemiskinan di Kabupaten Banggai pada lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif. Angka kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 7,80% atau 29,30 ribu jiwa, di tahun 2020 turun menjadi 7,39% atau 28,16 ribu jiwa, di tahun 2021 kemiskinan kabupaten Banggai meningkat menjadi 7,83% atau 30,10 ribu jiwa dan terus menurun di tahun 2022 menjadi 7,33% atau 28,55 ribu jiwa, di tahun 2023 menjadi 6,94% atau 27,38 ribu jiwa dan di tahun 2024 turun menjadi 6,56 atau 26,21 ribu jiwa. Kabupaten Banggai merupakan satu-satunya Kabupaten di Sulawesi Tengah yang mampu menurunkan angka kemiskinan di bawah 10 persen.

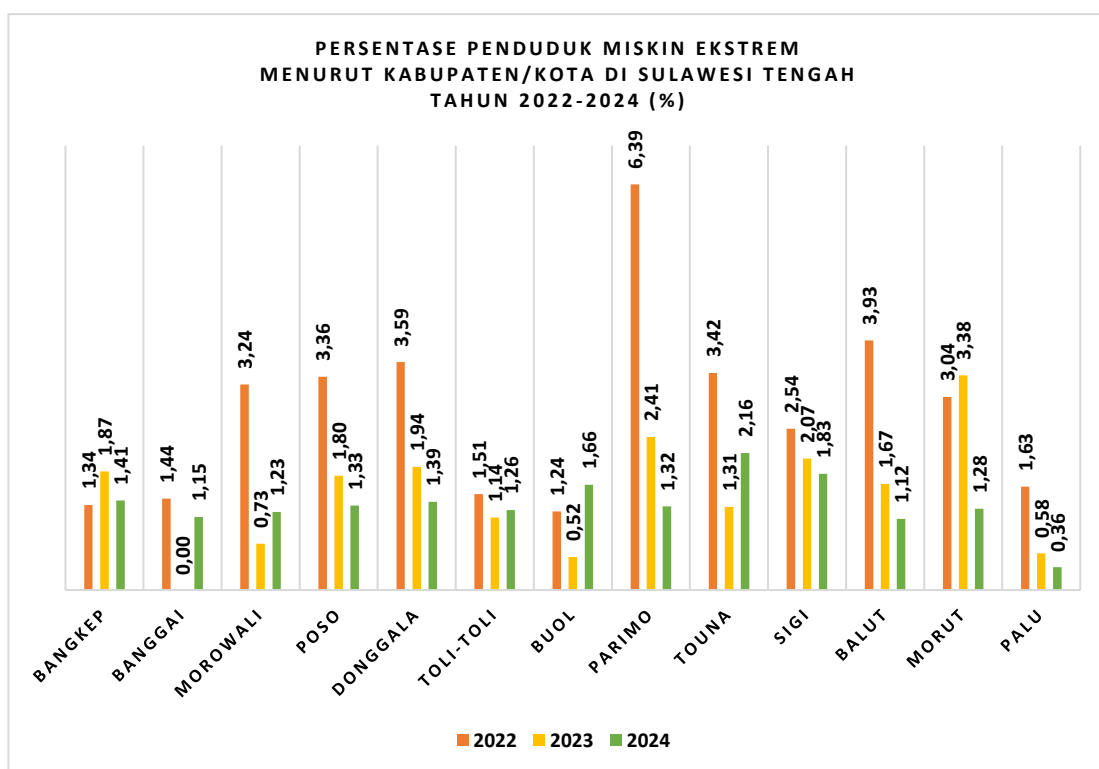
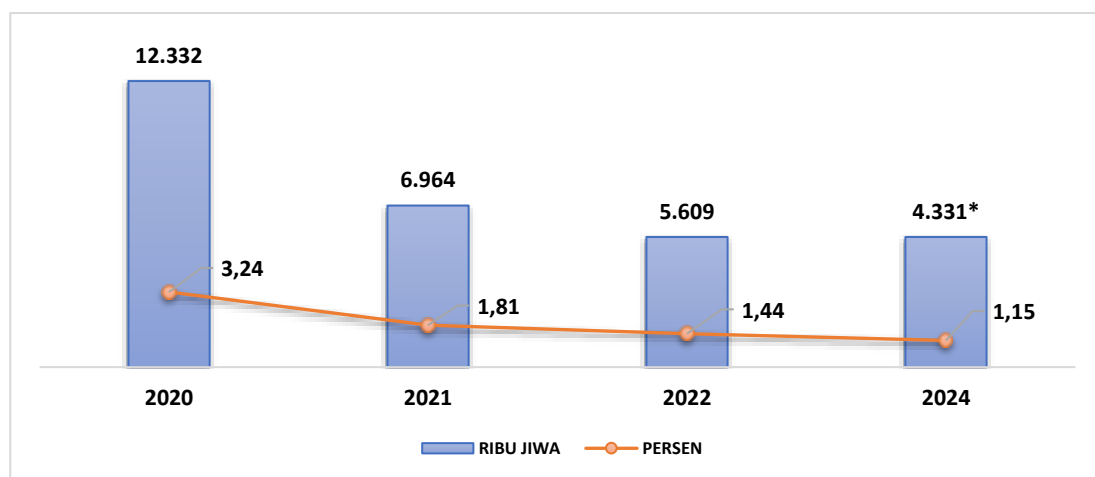
**Gambar 2.31**  
**Angka Kemiskinan Kabupaten Banggai**  
**Tahun 2019–2024**



Sumber : Kabupaten Banggai Dalam Angka 2025

Selanjutnya jumlah penduduk miskin ekstrem dari 6.964 Jiwa pada tahun 2021 menjadi 5.609 Jiwa tahun 2022, kemudian turun menjadi 4.331 Jiwa pada tahun 2024. Berdasarkan data P3KE 2021, Keluarga dan Individu Miskin Desil 1 tertinggi berada di Kecamatan Pagimana sejumlah 1.374 KK atau 6.474 jiwa.

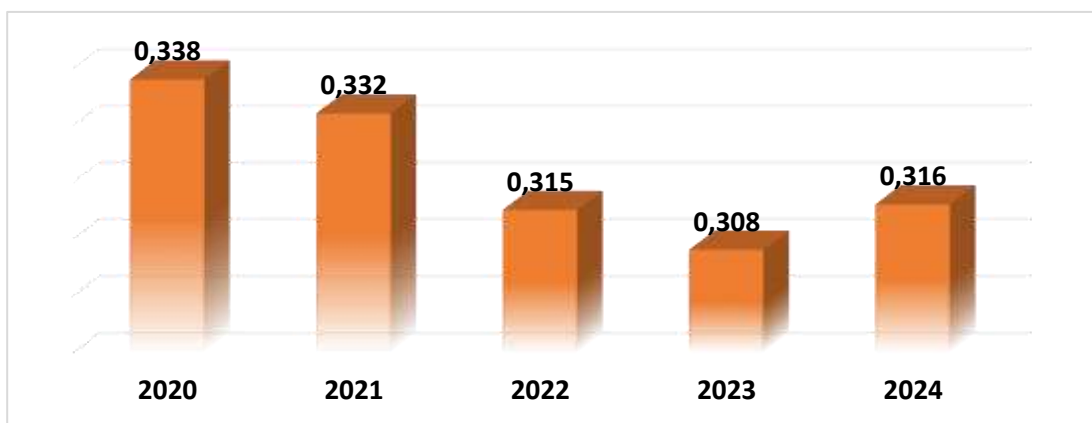
**Gambar 2.32**  
**Angka Kemiskinan Ekstrim Kabupaten Banggai**  
**Tahun 2020-2024**



### E. Gini Rasio

Rasio Gini adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam suatu wilayah atau populasi. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna (pendapatan semua orang sama), sedangkan nilai 1 menunjukkan ketidakmerataan sempurna (satu orang memiliki semua pendapatan). Semakin tinggi nilai Rasio Gini, semakin tinggi tingkat ketidakmerataan pendapatan dalam suatu wilayah. Angka Gini Rasio Kabupaten Banggai tahun 2024 adalah sebesar 0,316 point.

**Gambar 2.33**  
**Gini Rasio Kabupaten Banggai Tahun 2020–2024**



*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025*

### F. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Kabupaten Banggai Tahun 2024 menurun sebesar 0,01 persen yaitu 3,11 persen di bandingkan tahun 2023 yang sebesar 3,12 persen.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2024 sebesar 71,70 persen, dengan jumlah angkatan kerja pada Agustus 2024 sebanyak 204.604 orang.

**Gambar 2.34**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (%)**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2020–2024**

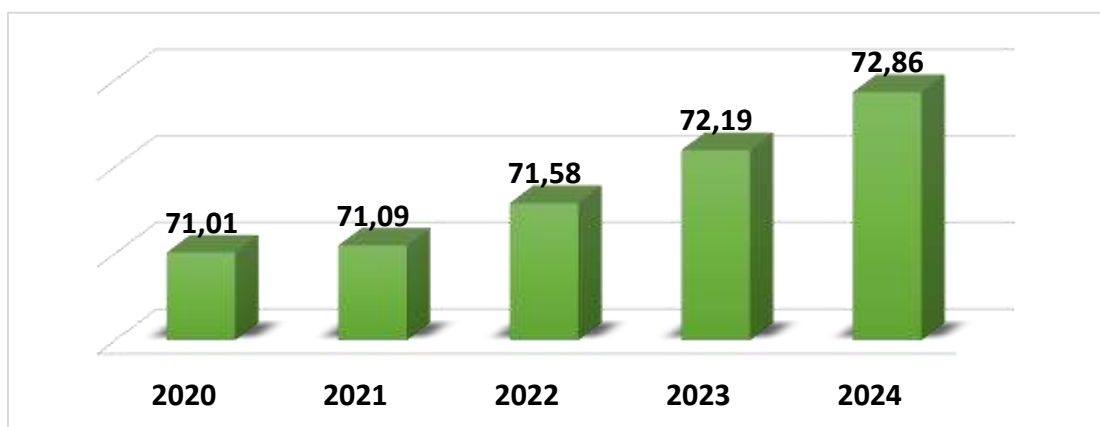


*Sumber : Kabupaten Banggai Dalam Angka 2025*

#### **G. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banggai Tahun 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, di mana angka IPM Kabupaten Banggai Tahun 2024 yaitu 72,86 Poin dengan Kategori “Tinggi”.

**Gambar 2.35**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2020–2024**



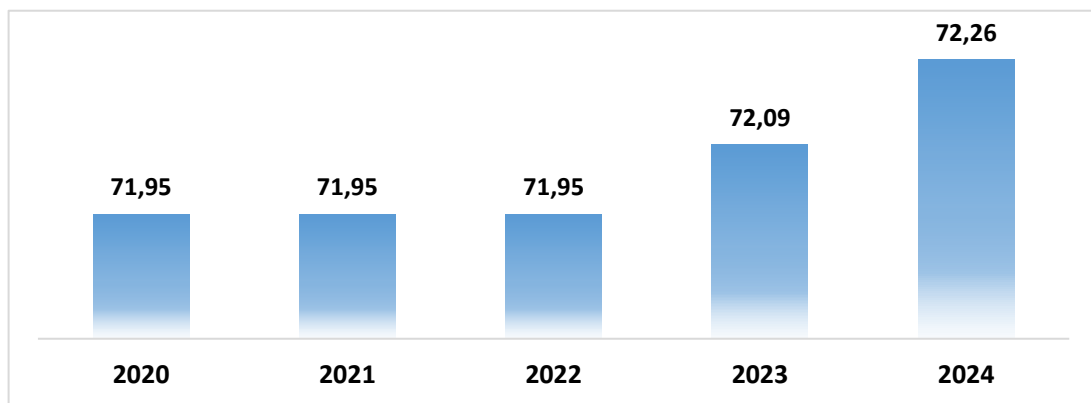
*Sumber : Kabupaten Banggai Dalam Angka 2025*

### 2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

#### A. Usia Harapan Hidup (UHH)

Indeks Pembangunan Manusia Usia Harapan Hidup adalah data statistik yang menggambarkan rata-rata lama waktu hidup seseorang dalam suatu daerah. Usia Harapan Hidup dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Usia Harapan Hidup penduduk Kabupaten Banggai terus mengalami peningkatan sejak sensus tahun 1971 yaitu 47,7 tahun kemudian meningkat sampai dengan tahun 2019 menjadi 70,61 dan pada tahun 2023 menjadi 72,09. Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Banggai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 2.36 berikut.

**Gambar 2.36**  
**Usia Harapan Hidup (Tahun)**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024**



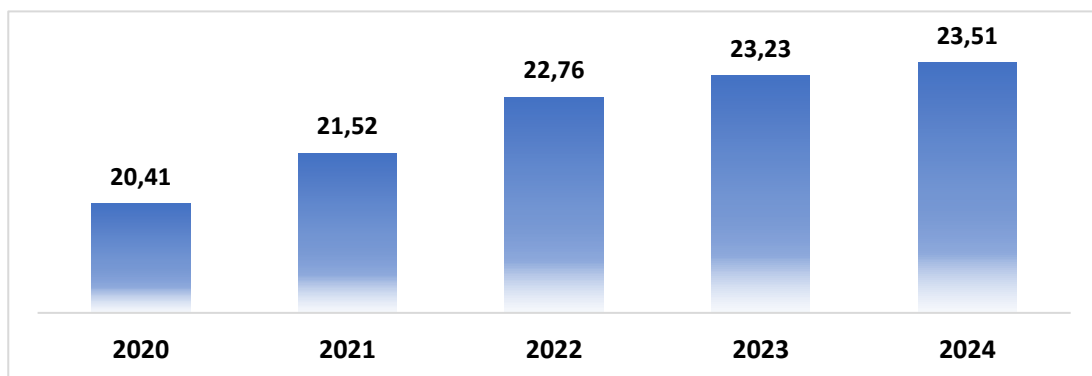
*Sumber : Kabupaten Banggai Dalam Angka 2025*

#### B. Indeks Keluarga Sehat

Keluarga sehat merupakan pondasi masa depan bangsa yang gemilang. Menurut WHO, keluarga sehat berarti keluarga dengan kesejahteraan fisik, mental, sosial dan spiritual yang optimal. Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh Pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan RI telah menetapkan 12 indikator keluarga

sehat sebagai indeks komposit pembentuk yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai, serta diharapkan banyak dari keluarga yang ada di Indonesia memiliki standar kesehatan yang optimal. Adapun 12 indikator tersebut yaitu: (1) Keluarga mengikuti program KB; (2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan; (3) Bayi mendapat imunisasi dasar yang lengkap; (4) Bayi mendapat ASI eksklusif; (5) Balita mendapat pemantauan pertumbuhan; (6) Penderita TBC mendapat pengobatan sesuai standar; (7) Penderita hipertensi rutin menjalani pengobatan; (8) Penderita gangguan jiwa tidak terlantar dan mendapat pengobatan; (9) Anggota keluarga tidak ada yang merokok; (10) Keluarga merupakan anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (11) Keluarga memiliki akses ke sarana air bersih; dan (12) Keluarga memiliki akses atau menggunakan jamban bersih. Berdasarkan potret capaian Indeks Keluarga Sehat di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami perbaikan dan cenderung meningkat, yakni dari 15,76 persen pada Tahun 2020 meningkat menjadi 23,38 persen pada Tahun 2024. Secara detail mengenai perkembangan Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Banggai dapat dilihat pada gambar 2.37 berikut.

**Gambar 2.37**  
**Perkembangan Capaian Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024**

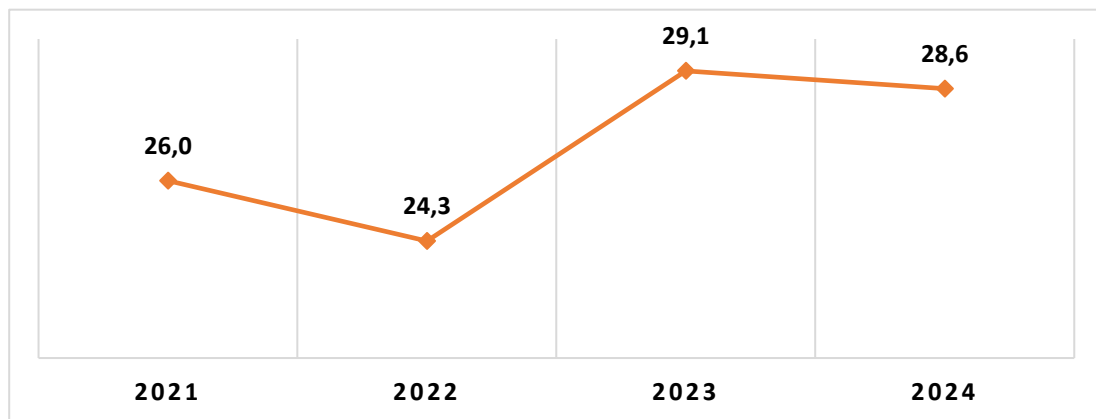


*Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2025*

### C. Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting adalah persentase anak usia di bawah lima tahun (balita) yang mengalami stunting, yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka prevalensi stunting di Kabupaten Banggai pada kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.38 berikut:

**Gambar 2.38**  
**Angka Prevalensi Stunting (%)**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2021-2024**



*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, 2025*

### D. Angka Kematian Ibu (Per 100.000 KH)

Angka Kematian Balita adalah (AKABA) jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, Angka Kematian Ibu (AKI) juga menjadi salah satu indikator penting dari derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. AKI juga dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status

kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Sensitivitas AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadikannya indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. Angka Kematian Ibu (AKI) dengan Angka Kematian Bayi (AKB) senantiasa menjadi indikator keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan. Untuk mengantisipasi masalah ini maka diperlukan terobosan-terobosan dengan mengurangi peran dukun dan meningkatkan peran Bidan. Harapan kita agar Bidan di Desa benar-benar sebagai ujung tombak dalam upaya penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI).

**Tabel 2.14**  
**Angka Kematian Ibu (AKI)**  
**di Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024**

<b>Uraian</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Jumlah Kematian Ibu (Ibu)	16	9	6	6	9
Jumlah Lahir Hidup (orang)	6.081	5.755	6.991	6.654	6.654
AKI per 100.000 Kelahiran Hidup	263,1	156,4	85,82	90,17	135,26

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, 2025*

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat melaporkan di tahun 2024 jumlah kematian Ibu Maternal (jumlah kematian ibu hamil, jumlah kematian ibu bersalin, dan jumlah kematian ibu nifas) adalah 9 kematian dari 6.654 kelahiran hidup.

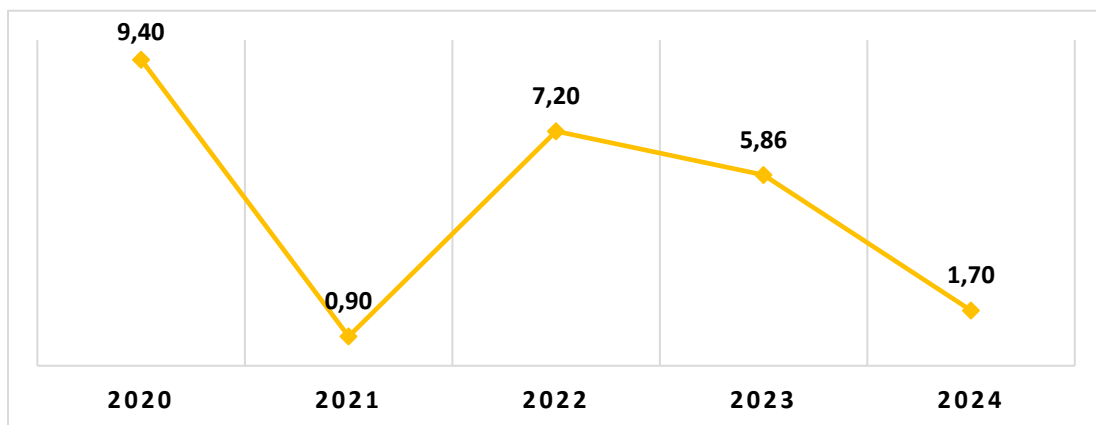
#### **E. Angka Kematian Bayi (Per 1.000 KH)**

Infant Mortality Rate (IMR) atau Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 (satu) tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Usia bayi merupakan kondisi yang rentan baik terhadap kesakitan maupun kematian. Ada banyak faktor yang

mempengaruhi tingkat AKB tetapi tidak mudah untuk menentukan faktor yang paling dominan dan faktor yang kurang dominan. Data kematian yang terdapat pada suatu komunitas dapat diperoleh melalui survei, karena sebagian besar kematian terjadi dirumah, sedangkan data kematian pada fasilitas pelayanan kesehatan hanya memperlihatkan kasus rujukan.

Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Banggai 5 (lima) tahun terakhir dapat di lihat pada gambar 2.39 berikut ini.

**Gambar 2.39**  
**Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH)**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024**

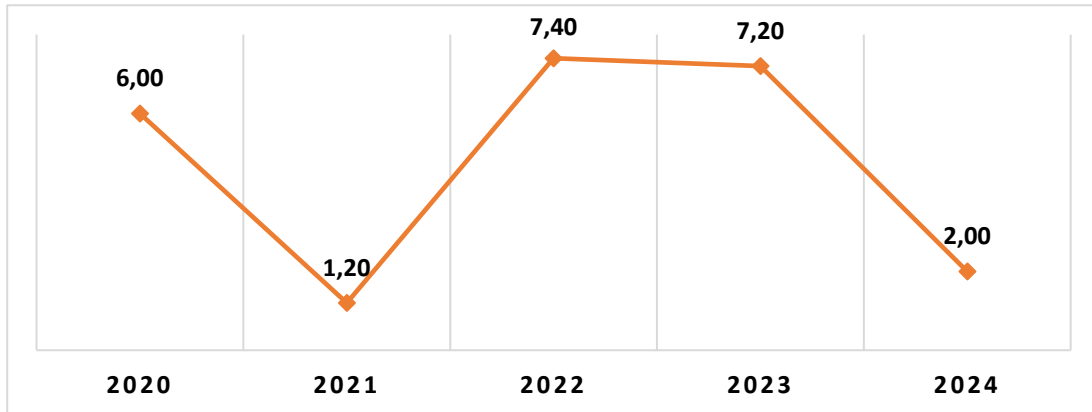


*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, 2025*

#### **F. Angka Kematian Balita (Per 1.000 KH)**

Angka Kematian Balita adalah (AKABA) jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. Gambar 2.40 dibawah memperlihatkan Angka Kematian Balita selama lima tahun terakhir. Dalam upaya untuk mempertajam penurunan diperlukan peningkatan akses balita terhadap sanitasi, air bersih dan penanganan segera terhadap gejala penyakit.

**Gambar 2.40**  
**Angka Kematian Balita (per 1.000 KH)**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024**

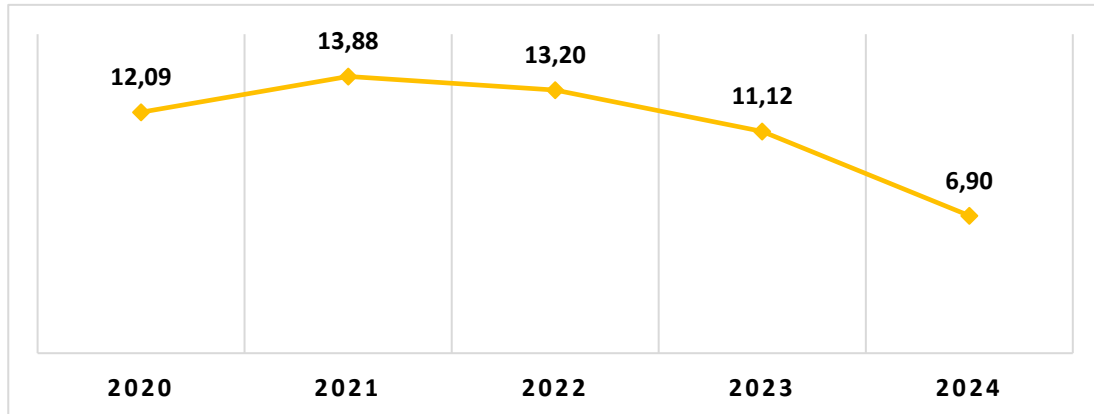


*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, 2025*

#### **G. Prevalensi Balita Gizi Kurang**

Masa balita merupakan usia penting untuk tumbuh kembang secara fisik. Pertumbuhan anak pada usia balita sangat pesat sehingga memerlukan asupan zat gizi yang sesuai dengan kebutuhan balita. Asupan zat gizi tidak dapat memenuhi kebutuhan balita maka dapat berakibat kurang gizi (Proverawati dan Kusumawati, 2010). Anak yang mengalami gizi kurang dapat mengalami pertumbuhan fisik dan kecerdasan yang tidak optimal. Gizi buruk, kurus, dan stunting merupakan bentuk manifestasi dari adanya gangguan pada proses pertumbuhan. Menurut Sulistyoningsih (2011), gizi juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan otak dan perilaku, kemampuan bekerja dan produktivitas serta daya tahan terhadap penyakit infeksi.

**Gambar 2.41**  
**Prevalensi Balita Gizi Kurang (%)**  
**Tahun 2020-2024**



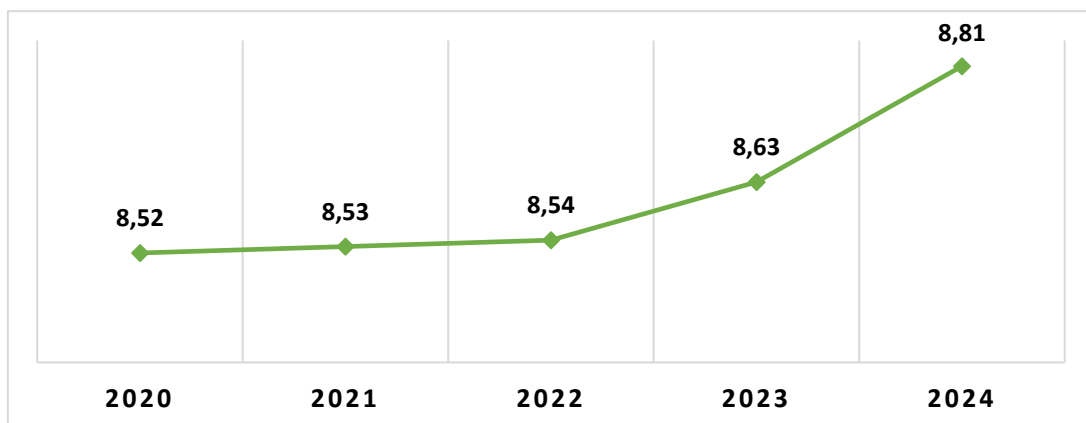
*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, 2025*

#### **2.1.2.2 Pendidikan Berkualitas Yang Merata**

##### **A. Rata-rata Lama Sekolah**

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun belajar pada pendidikan formal yang telah diselesaikan penduduk berusia 25 tahun ke atas. Perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banggai selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.42 berikut.

**Gambar 2.42**  
**Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024**

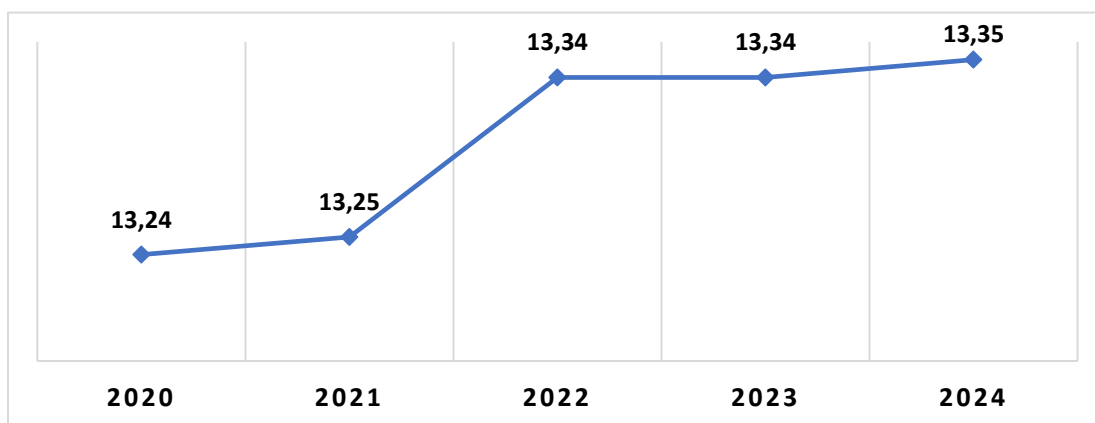


*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai, 2025*

## B. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Berdasarkan angka HLS, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan tentang pendidikan dan perubahannya yang terjadi di masa mendatang. Perkembangan angka harapan lama sekolah di Kabupaten Banggai selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.43 berikut.

**Gambar 2.43**  
**Harapan Lama Sekolah (Tahun)**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024**

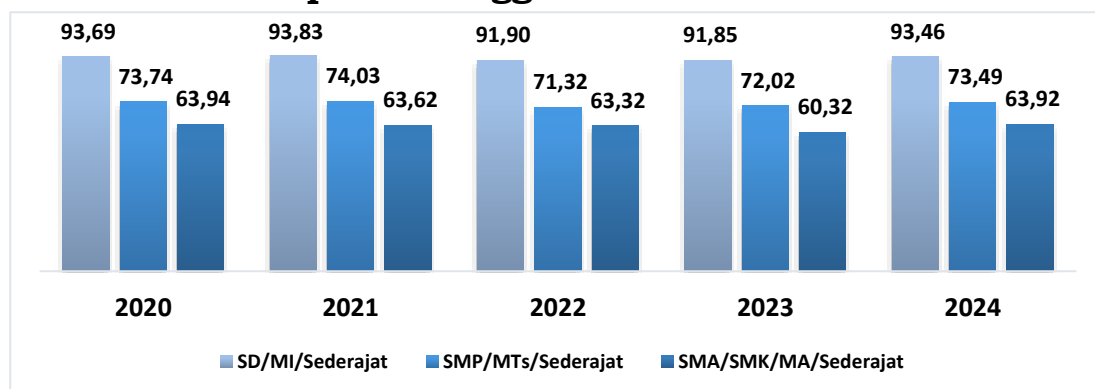


*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai, 2025*

## C. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya. APM dihitung dengan membandingkan jumlah siswa pada suatu jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang tersebut, kemudian dinyatakan dalam persen. Perkembangan Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Banggai selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.44 berikut.

**Gambar 2.44**  
**Angka Partisipasi Murni (%)**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024**

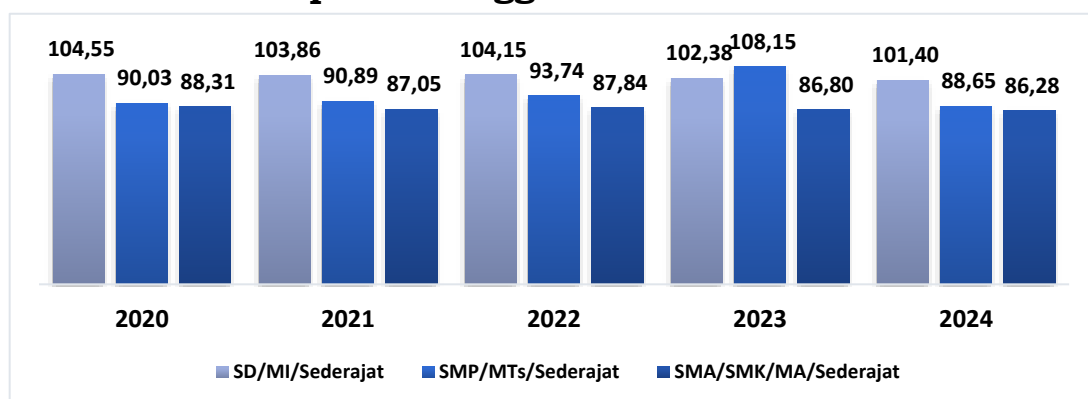


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai, 2025

#### D. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio antara jumlah siswa di suatu jenjang pendidikan (tanpa memandang usia) dengan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan yang sama, yang dinyatakan dalam persen. APK memberikan gambaran umum mengenai partisipasi penduduk dalam suatu tingkat pendidikan, termasuk mereka yang mungkin berusia diluar kelompok usia sekolah. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Banggai selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.45 berikut.

**Gambar 2.45**  
**Angka Partisipasi Kasar (%)**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai, 2025

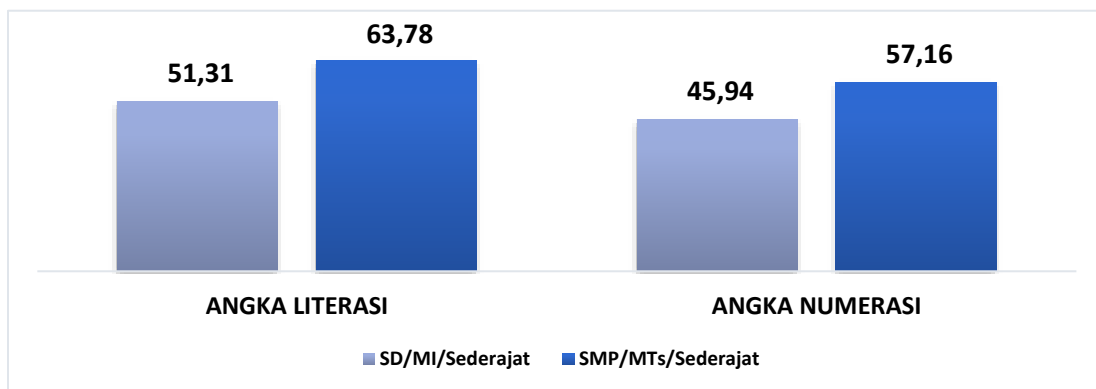
### E. Angka Literasi/Numerasi

Literasi adalah kemampuan menulis dan membaca. Literasi juga dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup.

Kemampuan Numerasi adalah kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Kemampuan numerasi juga digunakan untuk menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk grafik, tabel, bagan dan pemanfaatan interpretasi hasil analisis sebagai bahan prediksi dan pengambilan keputusan.

Capaian angka literasi dan numerasi kabupaten banggai tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.46 berikut.

**Gambar 2.46**  
**Angka Literasi dan Numerasi (%)**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2024**



*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai, 2025*

### F. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat literasi masyarakat di suatu wilayah, dengan fokus pada upaya pemerintah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai sarana belajar sepanjang hayat. IPLM mencakup berbagai aspek literasi, seperti kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Capaian

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tahun 2024 berdasarkan data dari Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka adalah 43,37.

### **2.1.2.3 Perlindungan Sosial Yang Adaptif**

#### **A. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**

Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hak setiap orang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya untuk mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Perlindungan terhadap Pekerja Bukan Penerima Upah yang ada pada sektor informal membutuhkan perlindungan yang dimaksudkan untuk menjamin kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi guna mewujudkan kesejahteraan Pekerja Bukan Penerima Upah dan keluarganya.

Pekerja Bukan Penerima Upah dan keluarganya sebagai kelompok masyarakat di Sulawesi Tengah yang rentan terhadap hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan dan meninggal dunia membutuhkan perhatian Pemerintah Daerah melalui pengembangan Sistem Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Program JKK merupakan program yang memberi manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Program JKM merupakan program yang memberi manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja. Peta Universal Coverage Jamsostek

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah sampai tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.15 berikut.

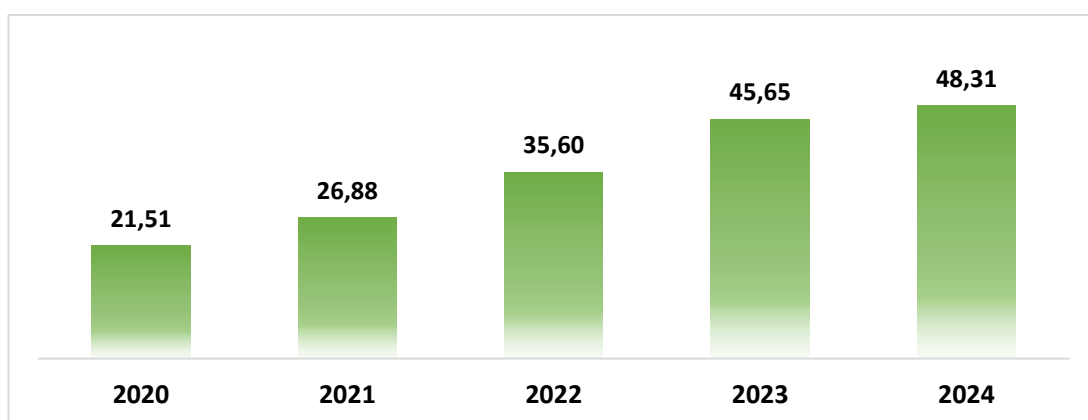
**Tabel 2.15**  
**Peta Universal Coverage Jamsostek Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Sampai Tahun 2025**

NO	Kabupaten/Kota	Formal				Informal				Total			
		Semesta	Realisasi	%	Selisih	Semesta	Realisasi	%	Selisih	Semesta	Realisasi	%	Selisih
a	b	c	d	e = d/c	f = d-c	g	h	i = h/g	j = h-g	k = c+g	l = d+h	m = l/k	n = l-k
1	Banggai	50.487	27.909	55%	-22.578	102.598	15.125	15%	-87.473	153.085	43.034	28%	-110.051
2	Banggai Kepulauan	13.285	9.634	73%	-3.651	35.585	1.004	3%	-34.581	48.870	10.638	22%	-38.232
3	Banggai Laut	8.041	113	1%	-7.928	23.149	23	0%	-23.126	31.190	136	0%	-31.054
4	Buol	15.974	11.306	71%	-4.666	44.771	6.884	15%	-37.827	60.685	18.192	30%	-42.493
5	Donggala	30.704	20.786	68%	-9.918	84.784	11.214	13%	-73.570	115.488	32.000	28%	-83.488
6	Morowali	88.906	50.054	56%	-38.852	64.360	28.312	44%	-36.048	153.066	78.366	51%	-74.900
7	Morowali Utara	34.372	23.369	68%	-11.003	26.197	14.413	55%	-11.784	60.569	37.782	62%	-22.787
8	Palu	18.844	28.319	150%	9.475	34.108	2.467	7%	-31.641	52.952	30.786	58%	-22.166
9	Parigi Moutong	36.851	25.663	70%	-11.188	169.277	11.387	7%	-158.084	206.122	36.850	18%	-169.272
10	Poso	28.365	22.243	78%	-6.122	82.509	5.897	7%	-76.612	110.874	28.140	25%	-82.734
11	Sigi	21.098	19.634	93%	-1.464	72.717	3.389	4%	-69.328	93.815	22.823	24%	-70.992
12	Tojo Una-una	17.439	14.922	86%	-2.517	45.015	7.622	17%	-37.393	62.454	22.544	36%	-39.910
13	Toli-toli	27.636	15.346	56%	-12.290	68.247	3.156	5%	-65.095	95.877	18.502	19%	-77.375
SULAWESI TENGAH		392.002	269.300	69%	-122.702	853.045	110.293	13%	-742.752	1.245.047	379.593	30%	-865.454

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

Adapun Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Banggai dapat dilihat pada gambar 2.47 berikut.

**Gambar 2.47**  
**Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024**



Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Banggai, 2025

#### **2.1.2.4 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju**

##### **A. Indeks Pembangunan Kebudayaan**

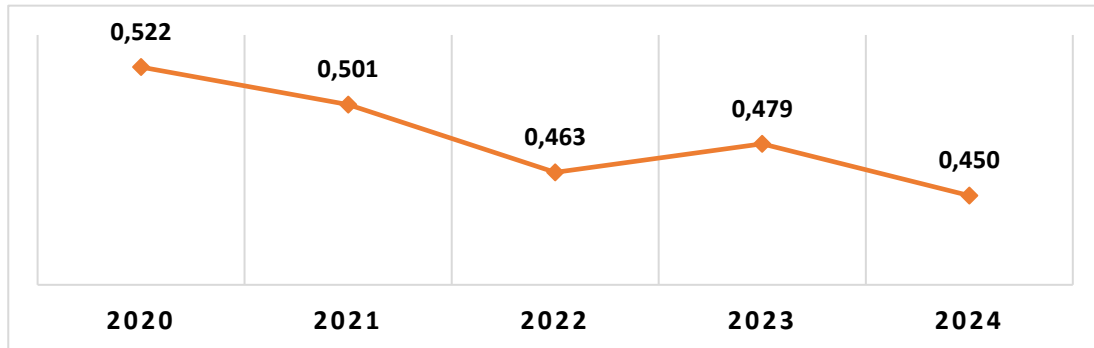
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan Pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai kebijakan bidang kebudayaan serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Banggai tahun 2024 adalah 27,17 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 24,38 persen.

#### **2.1.2.5 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif**

##### **A. Indeks Ketimpangan Gender**

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kesenjangan gender mempengaruhi pencapaian pembangunan manusia dalam tiga dimensi: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Nilai IKG berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin tinggi nilainya, semakin besar ketimpangan gender dalam pencapaian pembangunan. IKG bertujuan untuk memberikan gambaran tentang tingkat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, serta untuk mengukur dampak program-program pengarusutamaan gender di suatu wilayah. Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Banggai selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.48 berikut.

**Gambar 2.48**  
**Indeks Ketimpangan Gender (IKG)**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024**

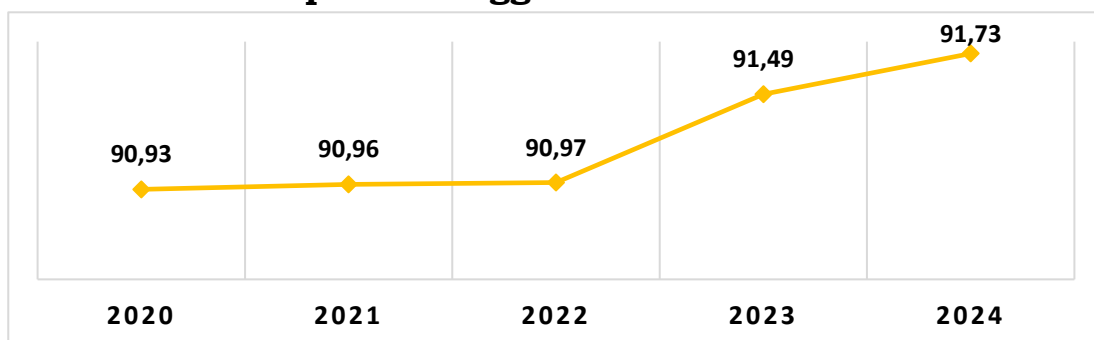


*Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2025*

### **B. Indeks Pembangunan Gender**

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu wilayah. IPG mengukur kesenjangan ini dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia: kesehatan, pendidikan, dan penguasaan sumber daya ekonomi. IPG membantu mengidentifikasi area di mana perempuan mungkin tertinggal dalam hal pembangunan dan dapat digunakan untuk merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mencapai kesetaraan gender. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IKG) Kabupaten Banggai selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.49 berikut.

**Gambar 2.49**  
**Indeks Pembangunan Gender**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024**



*Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2025*

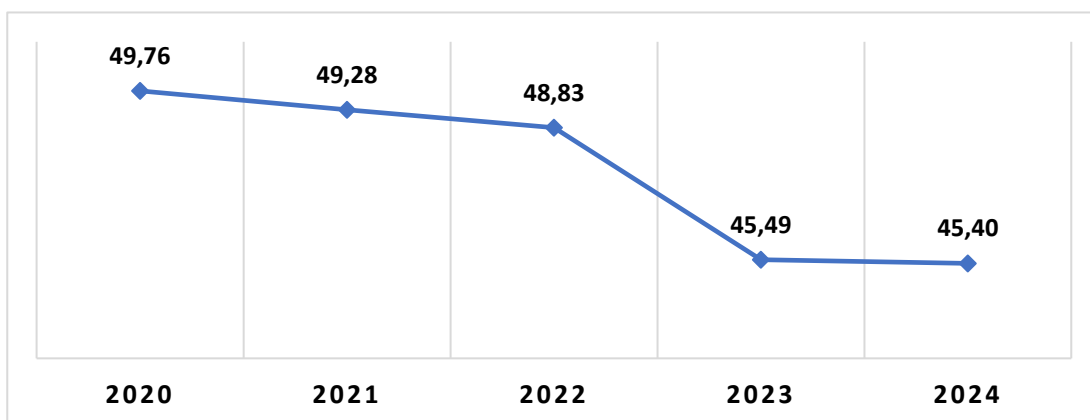
### 2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

#### 2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

##### A. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan (Dependency Ratio) adalah indikator yang mengukur beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) terhadap penduduk usia tidak produktif (anak-anak dan lanjut usia). Semakin tinggi angka ini, semakin besar beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk usia non-produktif. Angka Ketergantungan Kabupaten Banggai selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.50 berikut.

**Gambar 2.50**  
**Angka Ketergantungan**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024**



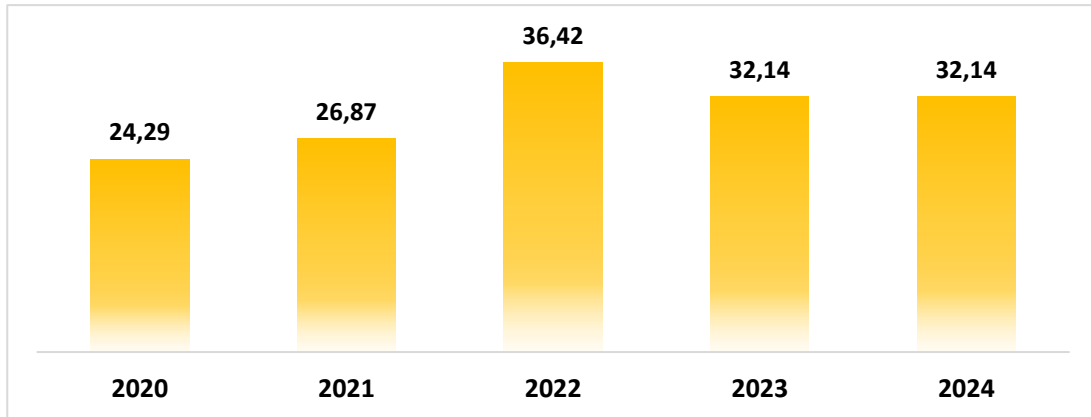
*Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2025*

#### 2.1.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

##### A. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Industri pengolahan memiliki peran penting dalam perekonomian daerah Kabupaten Banggai dengan memberikan kontribusi utama terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan ekspor, dan peningkatan investasi. Sektor ini juga mampu mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya, seperti sektor jasa dan pertanian.

**Gambar 2.51**  
**Rasio PDRB ADHB Industri Pengolahan**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024**

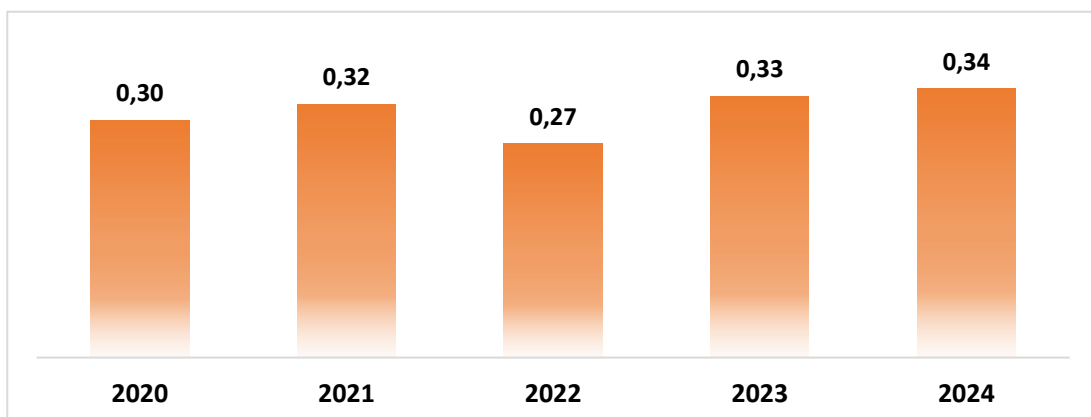


*Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025*

#### **B. Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum**

Sektor akomodasi dan makan minum memainkan peran penting dalam perekonomian daerah, terutama dalam sektor pariwisata. Sektor ini diharapkan mampu menyediakan kebutuhan dasar wisatawan, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada pendapatan daerah. Selain itu, akomodasi dan makan minum juga mendukung sektor-sektor lain seperti transportasi dan perdagangan.

**Gambar 2.52**  
**Rasio PDRB ADHB Akomodasi Makan dan Minum**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024**

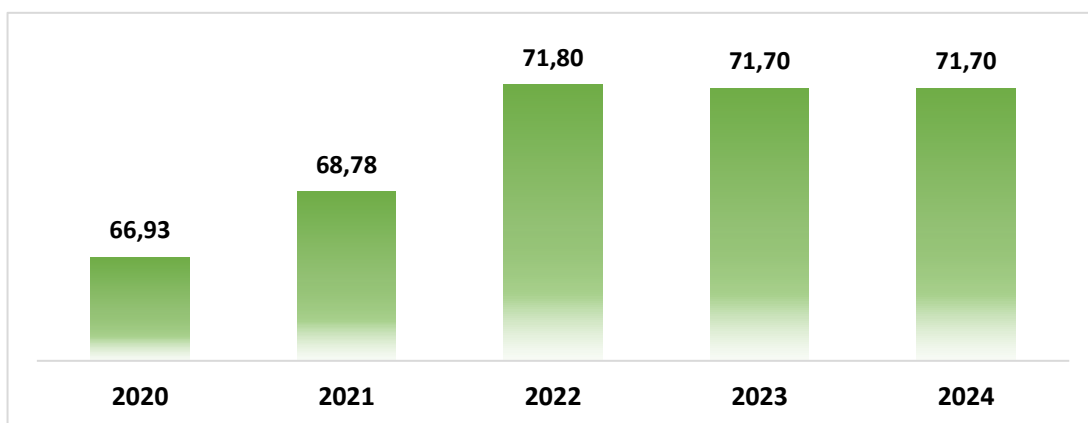


*Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025*

### C. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan jumlah penduduk angkatan kerja (jumlah penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan terhadap jumlah seluruh penduduk usia kerja (15-64 tahun). Dalam upaya menurunkan angka pengangguran salah satu yang ditingkatkan adalah kesempatan kerja bagi masyarakat. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 2.53 berikut.

**Gambar 2.53**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024**



Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025

Semakin tinggi tingkat kesempatan kerja berarti semakin berkurang tingkat pengangguran. Meningkatnya jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) dari tahun ke tahun, belum diiringi dengan perkembangan lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran.

### D. Indeks Inovasi Daerah

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan Indeks Inovasi Daerah adalah himpunan Inovasi Daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Hasil capaian Indeks Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.16 berikut.

**Tabel 2.16**  
**Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banggai**  
**Tahun 2020-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Skor</b>	<b>Predikat</b>	<b>Peringkat</b>
<b>2020</b>	4.133	Sangat Inovatif	24
<b>2021</b>	52,62	Inovatif	72
<b>2022</b>	49,45	Inovatif	158
<b>2023</b>	50,56	Inovatif	116
<b>2024</b>	59,81	Inovatif	72

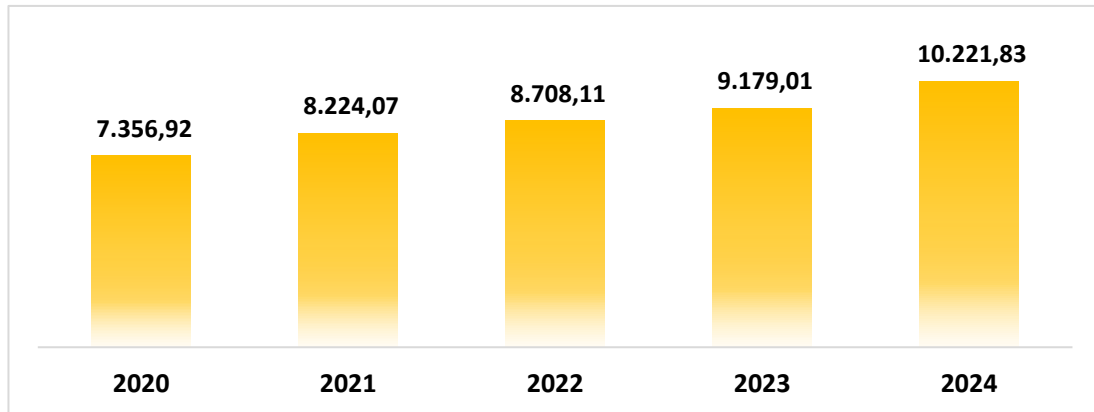
*Sumber : Kemendagri RI*

### **2.1.3.3 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**

#### **A. Pembentukan Modal Tetap Bruto**

Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memiliki peran penting dalam perekonomian suatu wilayah karena merupakan indikator investasi dalam bentuk aset tetap dan merupakan salah satu pendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Pembentukan modal atau investasi memiliki efek pengganda yang besar terhadap perekonomian. Selain mampu meningkatkan produksi atau pertumbuhan ekonomi, investasi juga akan menciptakan kesempatan kerja serta perluasan pasar. Kegiatan investasi memungkinkan Masyarakat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, serta meningkatkan pendapatan dan taraf kesejahteraan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa investasi adalah motor suatu perekonomian yang akan menggerakkan sektor-sektor produktif seperti industri manufaktur yang banyak menyerap tenaga kerja.

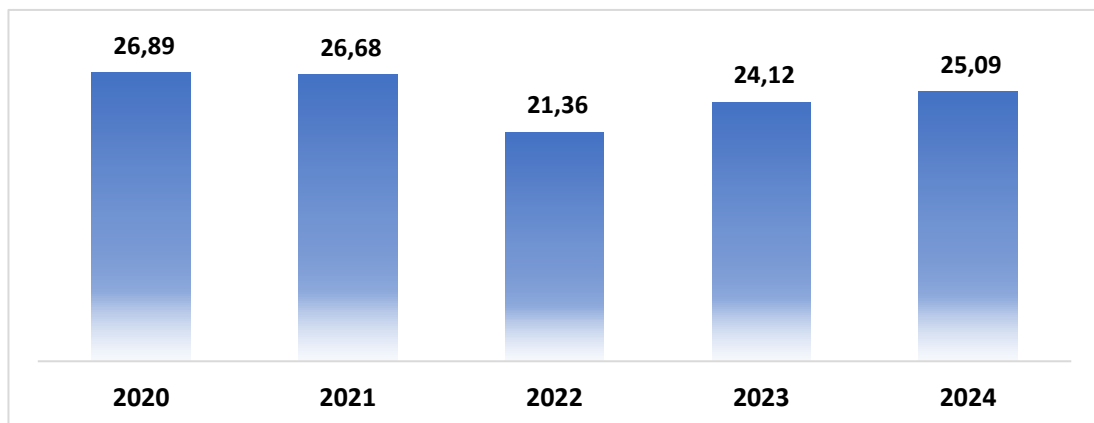
**Gambar 2.54**  
**Nilai PDRB ADHB Komponen PMTB (Milyar Rupiah)**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024**



*Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025*

Selanjutnya proporsi komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Banggai selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

**Gambar 2.55**  
**Proporsi Komponen PMTB Terhadap PDRB ADHB**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024**



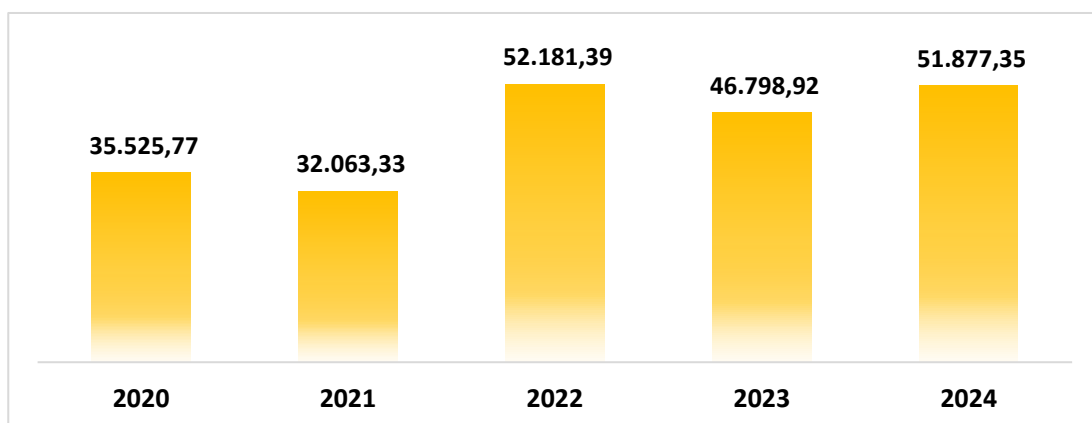
*Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025*

## **B. Ekspor Barang dan Jasa**

Ekspor barang dan jasa memiliki peran penting dalam perekonomian daerah dengan meningkatkan pendapatan, lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

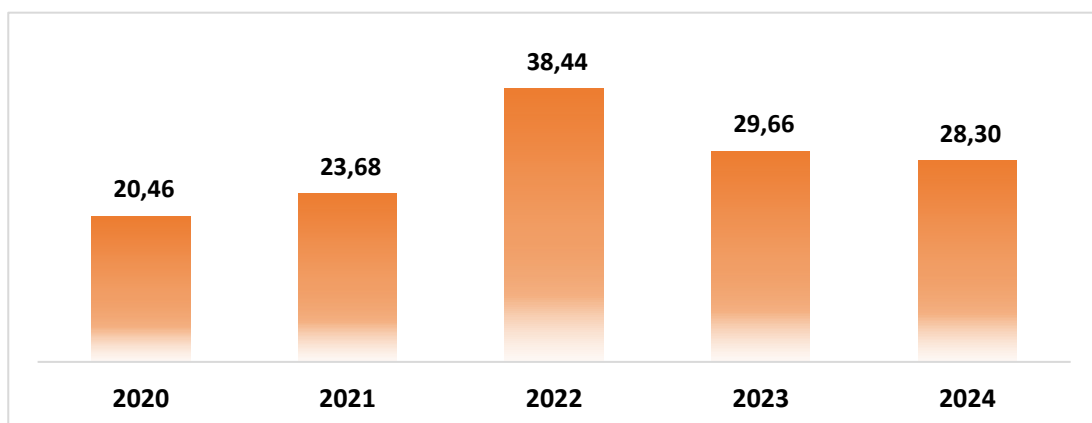
Nilai dan proporsi komponen Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Banggai selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.56 dan gambar 2.57 berikut.

**Gambar 2.56**  
**Nilai PDRB ADHB Komponen**  
**Ekspor Barang dan Jasa (Milyar Rupiah)**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024**



*Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025*

**Gambar 2.57**  
**Proporsi Komponen**  
**Ekspor Barang dan Jasa (%)**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024**



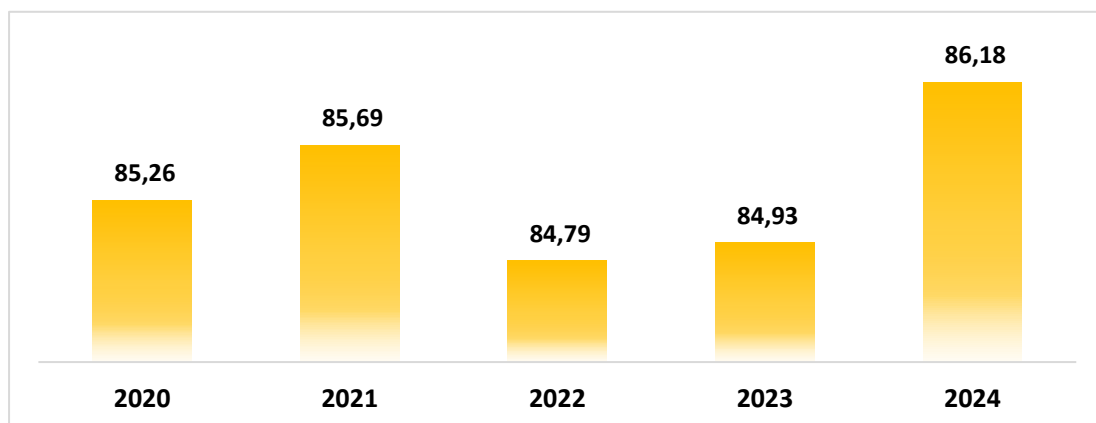
*Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025*

#### **2.1.3.4 Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi**

##### **A. Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak**

Rumah tangga dengan hunian layak adalah keluarga yang menempati rumah yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan, serta memiliki akses terhadap fasilitas dasar seperti air bersih dan sanitasi. Ini mencakup bangunan yang kokoh, luas tempat tinggal yang memadai, serta akses terhadap fasilitas sanitasi dan air bersih yang layak. Rumah yang layak huni dan terjangkau dalam konteks pemukiman dalam kerangka kerja monitoring SDGs, menggunakan lima kriteria yaitu (1) Ketahanan bangunan; (2) Kecukupan luas tempat tinggal; (3) Akses air minum layak; (4) Akses sanitasi layak; dan (5) Keamanan bermukim.

**Gambar 2.58**  
**Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024**



*Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025*

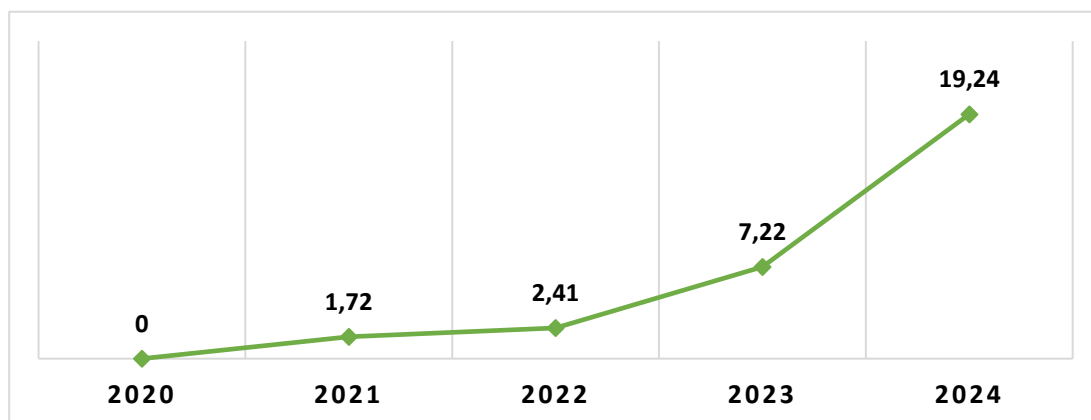
##### **B. Persentase Desa Mandiri**

Desa Mandiri adalah Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa mandiri sangat penting keberadaannya karena akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup

masyarakat, mendorong kemajuan ekonomi lokal, dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Dengan menjadi desa mandiri, desa dapat mengelola sumber daya lokal secara optimal, mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal, dan berkontribusi pada pembangunan daerah dan nasional.

Manfaat adanya Desa Mandiri yaitu masyarakat akan menikmati kesejahteraan ekonomi yang lebih baik, lingkungan yang bersih dan sehat, serta kualitas hidup yang lebih tinggi. Kemajuan desa akan berdampak baik bagi masa depan generasi muda kita, memberikan mereka kesempatan untuk berkembang dan sukses.

**Gambar 2.59**  
**Persentase Desa Mandiri**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024**



*Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2025*

Gambar 2.59 diatas menunjukkan peningkatan drastis persentase desa mandiri dari tahun 2023 sebesar 7,22 persen menjadi 19,24 persen pada tahun 2024. Selanjutnya status perkembangan desa di Kabupaten Banggai tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.17 berikut.

**Tabel 2.17**  
**Status Perkembangan Desa**  
**di Kabupaten Banggai Tahun 2024**

<b>Status</b>	<b>Jumlah Desa</b>
Desa Mandiri	56
Desa Maju	151
Desa Berkembang	84
Desa Tertinggal	-
Desa Sangat Tertinggal	-

*Sumber : Dinas PMD Kabupaten Banggai, 2025*

#### **2.1.3.5 Stabilitas Ekonomi Makro**

##### **A. Tingkat Inflasi**

Angka inflasi merupakan tolak ukur kestabilan perekonomian daerah. Pada bulan Juni 2025 inflasi year on year (y-on-y) Luwuk sebesar 4,00 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,25.

Inflasi y-on-y pada Juni 2025 terjadi karena adanya kenaikan indeks harga beberapa kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,29 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,18 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,96 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 3,04 persen; kelompok kesehatan sebesar 5,24 persen; kelompok transportasi sebesar 2,14 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,93 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,73 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,00 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,98 persen. Sementara kelompok yang mengalami penurunan indeks harga, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,08 persen.

**Gambar 2.60**  
**Inflasi Kabupaten Banggai**



Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025

Tingkat inflasi month to month (m-to-m) dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Luwuk bulan Juni 2025 masing-masing sebesar 0,02 persen, dan 3,11 persen.

#### **2.1.4 Aspek Pelayanan Umum**

##### **2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif**

###### **A. Indeks Reformasi Birokrasi**

Indeks Reformasi Birokrasi adalah sistem penilaian dan pemantauan yang digunakan pemerintah untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai sasaran terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Banggai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.18 berikut.

**Tabel 2.18**  
**Indeks Reformasi Birokrasi**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024**

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	64,72 (B)	66,69 (B)	67,85 (B)	66,41 (B)	76,03 (BB)

Sumber : Kemenpan RB RI

#### **B. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis yang terdiri dari prosedur, alat, dan aktivitas untuk menetapkan, mengukur, mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan kinerja instansi pemerintah.

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banggai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.19 berikut.

**Tabel 2.19**  
**Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024**

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Hasil Evaluasi Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81,74 (A)	80,54 (A)	80,02 (A)	75,02 (BB)	75,74 (BB)

Sumber : Kemenpan RB RI

#### **C. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada

masyarakat. Pada tahun 2024 capaian Indeks SPBE Kabupaten Banggai mendapatkan nilai tertinggi se-Sulawesi Tengah dengan capaian 3,59 (Sangat Baik).

**Tabel 2.20**  
**Indeks SPBE Kabupaten Banggai Tahun 2019-2024**

Uraian	Tahun		
	2022	2023	2024
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,07 (Cukup)	3,23 (Baik)	3,59 (Sangat Baik)

*Sumber : Kemenpan RB RI*

#### **D. Indeks Pelayanan Publik**

Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Berdasarkan Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 dari OMBUDSMAN Republik Indonesia, Kabupaten Banggai meraih nilai 95,83 dan berkategori B dengan Predikat Opini Kualitas Tinggi. Nilai ini meningkat dari tahun 2023 yang sebesar 82,79.

#### **2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial**

##### **A. Indeks Reformasi Hukum**

Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan reformasi hukum di suatu daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum, termasuk aspek regulasi, tata kelola, dan pelayanan publik berbasis hukum. IRH ini mengukur berbagai aspek terkait regulasi, termasuk

identifikasi dan pemetaan regulasi, proses reregulasi dan deregulasi, serta penguatan sistem regulasi nasional dan daerah.

**Gambar 2.61**  
**Capaian Indeks Reformasi Hukum**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2023-2024**



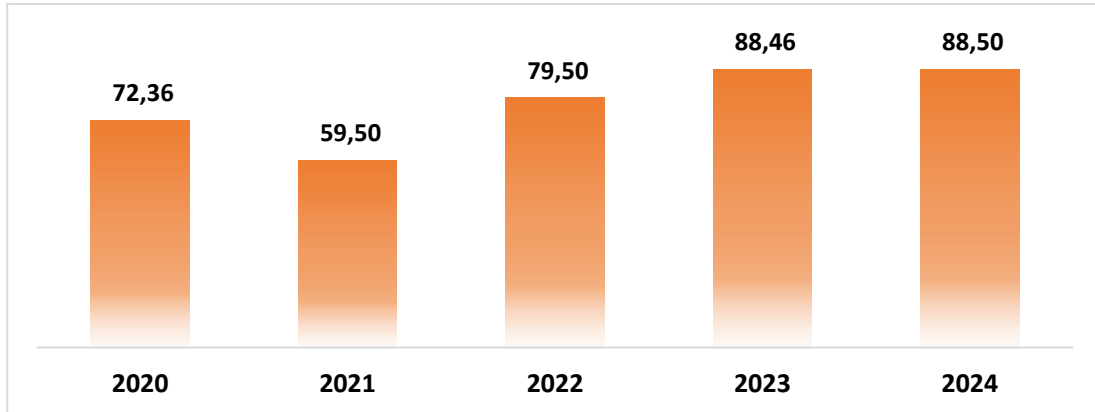
*Sumber : Kementerian Hukum RI, 2024*

## **B. Persentase Penegakkan Perda**

Persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana Perda yang telah ditetapkan ditegakkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini adalah indikator penting untuk mengukur efektivitas peraturan daerah dalam mencapai tujuannya.

Perda yang ditegakkan dengan baik dapat menciptakan ketertiban, keamanan, dan kepastian hukum dimasyarakat. Selain itu, penegakan Perda juga dapat mendorong percepatan pembangunan dan pelayanan publik. Penegakan Peraturan Daerah (Perda) adalah proses untuk memastikan bahwa Perda, yang merupakan peraturan perundang-undangan Tingkat daerah, ditegakkan dan ditaati oleh semua pihak. Ini termasuk pengawasan, penindakan, dan upaya yustisi untuk pelanggaran Perda. Penegakan Perda dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak hukum di tingkat daerah, serta instansi terkait lainnya.

**Gambar 2.62**  
**Persentase Penegakkan Perda**  
**Di Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024**



*Sumber : SATPOL PP Kabupaten Banggai, 2025*

#### **2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan**

##### **A. Indeks Daya Saing Daerah**

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. IDSD mencerminkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing daerah baik di tingkat domestik maupun internasional, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Capaian skor Indeks Daya Saing (IDSD) Kabupaten Banggai tahun 2024 adalah 3,40, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 2,90.

##### **2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah**

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Banggai selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 disajikan pada tabel 2.21 berikut.

**Tabel 2.21**  
**Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
A	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI						
1	Indeks ketahanan Pangan	Angka	85,38	85,15	85,73	85,72	85,141
2	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	%	8,15	11,91	11,85	9,95	9,52
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita					
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	38,39	38,57	39,21	39,64	40,33
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	79,618	79,35	76,67	77,75	81,16
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	18,83	22,65	27,15	29,82	36,56
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/orang	0,108	0,108	0,108	0,108	0,037
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	20,88	20,88	20,88	20,88	20,88
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%					
10	Indeks Risiko Bencana	Angka	163,20	163,2	163,2	163,03	156,37
11	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,20	0,20	0,31	0,33	0,37
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	-3,86	1,25	1,17	1,13	0,78
13	Rasio Jenis Kelamin Penduduk (Sex Ratio)	%	103,40	103,40	103,40	103,09	103,21
14	Kepadatan Penduduk	Orang/ km <sup>2</sup>	37,45	37,86	37,86	39,00	39,06
B	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-4,80	1,75	6,90	2,42	3,92

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Tingkat kemiskinan	%	7,39	7,83	7,33	6,94	6,56
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	75,679	84,300	110,262	101,841	107,884
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,42	3,57	3,09	3,12	3,11
5	Indeks Gini	Angka	0,338	0,332	0,315	0,308	0,316
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,01	71,09	71,58	72,19	72,86
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,95	71,95	71,95	72,09	72,26
8	Indeks Keluarga Sehat	Angka	20,41	21,52	22,76	23,23	23,51
9	Prevalensi Stunting (SGGI)	%	-	26,0	24,3	29,1	28,6
10	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,52	8,53	8,54	8,63	8,81
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,24	13,25	13,34	13,34	13,35
12	Angka Literasi						
	SD	%	N/A	N/A	34,31	47	53,85
	SMP	%	N/A	N/A	39,78	49,82	59,06
13	Angka Numerasi						
	SD	%	N/A	N/A	19,21	35,76	44,15
	SMP	%	N/A	N/A	50,52	51	53,17
14	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	N/A	N/A	N/A	49,15	43,37
15	Indeks Literasi Digital	Angka					
16	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	0	0	1,36	1,65	9,67
17	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	100	100	100	100	100
18	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	N/A	N/A	N/A	24,38	27,17
19	Indeks Perlindungan anak	Angka	56.52	53.60	56.74	58.54	N/A

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
20	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	Angka	N/A	51.88	53.96	58.76
21	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,522	0,501	0,463	0,479	0,450
22	Indeks Pembangunan Gender	Angka	90,93	90,96	90,97	91,49	91,73
23	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka					
<b>C</b>	<b>ASPEK DAYA SAING</b>						
1	Angka Ketergantungan	%	45,81	45,68	45,56	45,49	45,49
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	24,29	26,87	36,42	32,14	32,14
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	0,30	0,32	0,27	0,33	0,34
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%					
5	Rasio Kewirausahaan	%					
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	66,93	68,78	71,80	71,70	72,70
7	Indeks Inovasi Daerah	Angka	Sangat Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif
8	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	-	-	-	-	-
9	Indeks Ekonomi Biru Indonesias	Angka	-	-	-	45,87	40,15
10	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%					
11	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka					
12	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Milyar Rp.	7.356,92	8.224,07	8.708,11	9.179,01	10.221,83
13	Ekspor Barang dan Jasa	Milyar Rp.	35.525,77	32.063,33	52.181,39	46.798,92	51.877,35
14	Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka/ Kategori					
15	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	85,26	85,69	84,79	84,93	86,18

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
16	Persentase pemenuhan akses layanan dasar (Air Bersih, Sanitasi Aman serta Hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan)						
17	Indeks Kota Layak Huni untuk Kota Luwuk						
18	Persentase Desa Mandiri Berdasarkan IDM	%	0	1,72	2,41	7,22	19,24
19	Persentase BUMDes Sehat						
20	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%					
21	Tingkat Inflasi	%	0,83	2,48	6,62	4,35	2,75
<b>D</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>						
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	N/A	N/A	N/A	66,96	88
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	1,72	1,45	2,07	3,23	3,58
3	Indeks Pelayanan Publik	Angka	-	-	-	82,79 (Kualitas Tinggi)	95,83 (Kualitas Tinggi)
4	Indeks Integritas Nasional	Angka					
5	Persentase Penegakan Perda	%	0	0	0	0	0
6	Persentase Capaian Aksi HAM	%	81,99	82,60	82,95	88,65	99,80
7	Indeks Rasa Aman	Angka	0	0	0	0	0
8	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	0	0	0	0	0
9	Indeks Daya saing Daerah	Angka	-	-	-	2,90	3,40
10	Indeks Reformasi Birokrasi						
11	Indeks Inovasi Daerah						
12	Nilai SAKIP						

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
13	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)						
14	Nilai Survey Penilaian Integritas						
15	Indeks Sistem Merit						
16	Indeks Profesionalitas ASN						
	<b>Urusan Pendidikan</b>						
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	-	-	99,24	99,28	98,88
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	-	-	93,64	94,79	94,16
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	-	-	4,56	44,66	5,67
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	-	-	90,03	89,76	90,03
5	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	%					
6	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%					
7	Indeks pemerataan guru	Angka					

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
8	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	%					
9	Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbarui	%					
10	Persentase pengembangan bahasa dan sastra	%	100	100	100	100	100
<b>Urusan Kesehatan</b>							
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	263	165	104	90	150
2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek pada balita)	%	0	26	24,3	29,1	28,6
3	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	%	80	83	88	84	85
4	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	%	75	70	80	88	85
5	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	%	85	85	88	90	90
6	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100
<b>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>							
1	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan Permukiman rawan banjir	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Persentase layanan irigasi multikomoditas	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	curah lintas kabupaten/kota						
5	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST regional	%	N/A	N/A	N/A	N/A	16,11
6	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	%	N/A	81,35	88,62	90,99	100
7	Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	%	N/A	N/A	82,42	N/A	N/A
8	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	%	N/A	91,67	86,00	71,52	68,13
9	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	%	N/A	41,75	35,00	40,00	87,48
10	Tingkat kemantapan jalan	%	69,60	73,25	63,69	63,69	34,29
11	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi terampil	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Tingkat kepatuhan terhadap tata ruang	%	84,86	117,9	80,00	80,00	80,00
<b>Urusan Perumahan dan Kawaasan Permukiman</b>							
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak Huni	%	N/A	N/A	N/A	100	100
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	-	-	-	-	-
3	Persentase luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	0	0	13,70	35,16	55,27

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Persentase Pencegahan kawasan perumahan dan pemukiman kumuh	%	0	0	0	0	0
5	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	74,81	75,07	75,15	76,09	76,25
6	Persentase sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hukum Melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>							
1	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	0	0	0	0	0
2	Persentase penyelenggaraan tibumtranmas	%	100	100	100	100	100
3	Persentase Cakupan Perlindungan masyarakat	%	29,67	29,67	29,67	29,67	29,67
4	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	100	100	100	100	100
5	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	%					76,07
6	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%					87,93
7	Persentase penanganan pasca bencana	%					22,18
8	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	%					32
9	Cakupan layanan penyelamatan dan	%					20

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	evakuasi korban kebakaran						
	<b>Urusan Sosial</b>						
1	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Persentase Pekerja Sosial/ tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Persentase pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan Penanganan korban bencana kabupaten pada masa tanggap darurat dan Pasca bencana sesuai standar	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Persentase sdm kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri yang mendapatkan Pelayanan pemulihan	orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
7	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Persentase gelandangan dan pengemis yang terenuhi kebutuhan dasarnya	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Iainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Indeks kesejahteraan sosial penyandang disabilitas	Angka	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	Indeks kesejahteraan sosial lanjut usia	Angka	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	Indeks peranan sosial	Angka	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17	Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin peningkatan indeks Kebutuhan dasar	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	Peningkatan indeks keberdayaan ekonomi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
19	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	Persentase korban bencana alam, sosial dan/ atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100
21	Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	%	100	100	100	100	100
23	Persentase tarnan makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik	%	100	100	100	100	100
24	Persentase tarnan makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik	%	100	100	100	100	100
<b>Urusan Tenaga Kerja</b>							
1	Persentase kabupaten/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	0	0	0	0	0
2	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%					
3	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	%	554	664	634	798	135
4	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	0	0	0	0	3441
5	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	orang	4.594	7.267	11.121	11.115	11.115

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	1.3	N/	N/A	0.96	0.60
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	54.42	55.95	58.39	57.17	56.41
2	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Pembelajaran keluarga (puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	Layanan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Angka	58.15	52.85	53.17	55.71	N/A
6	Persentase anak memerlukan perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	%	N/A	N/A	N/A	N/A	0.05
7	Indeks Perlindungan Khusus Anak IPKA	Angka	55.13	53.85	68.63	67.88	N/A
	Urusan Pangan						
1	Persentase jumlah cadangan pangan	%	-	-	-	-	-
2	Skor pola pangan harapan	Angka	82,4	77,9	83,8	82,8	90,8
3	Persentase daerah rentan Rawan pangan	%	-	-	-	-	-
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	78,94	83,33	34,91	45,59	53,2

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Urusan Pertanahan						
1	Persentase tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diselesaikan tepat waktu	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	%					
3	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	%					
4	Tersedianya Tanah Obyek <i>Landreform</i> (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee						
5	Persentase tanah ulayat yang ditetapkan	%					
6	Persentase tanah kosong yaag dikelola	%					
7	Persentase luas lokasi konsolidasi tanah	%					
	Urusan Lingkungan Hidup						
1	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	-	-	-	5	10
2	Indeks Kualitas Air	Angka	70,00	70,00	68,33	66,57	65,65
3	Indeks Kualitas Udara	Angka	81,49	84,87	87,56	86,14	95,60
4	Persentase RTH	%	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034
5	Persentase limbah B3 yang terkelola	%	100	100	100	100	100
6	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/		-	-	-	-	-

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	atau kegiatan terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH						
7	Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya	%	-	-	-	-	-
8	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	%	-	-	-	-	-
9	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	-	-	-	3,3	6,6
10	Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100
11	Indeks kinerja pengelolaan sampah	Angka	-	-	-	-	-
<b>Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>							
1	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	%	0	0	0	1,84	4,45
2	Persentase kepemilikan kartu identitas anak	%	6,91	8,63	10,54	12,94	17,69
3	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	82,60	84,51	86,70	87,20	89,53
4	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	81,26	82,29	85,28	86,27	87,29
5	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	85,20	86,50	87,14	89,28	90,48
6	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	85,14	87,68	89,75	90,14	90,73
7	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	%	0	0	0	33,33	33,33

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
8	Cakupan pengelolaan profil Kependudukan	%	99,48	99,51	99,54	99,57	99,60
<b>Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>							
1	Persentase fasilitasi penataan desa	%	0,69	4,81	5,50	8,93	12,03
2	Persentase fasilitasi kerjasama desa	%	0,69	1,72	3,09	4,47	5,84
3	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	6,53	13,6	19,59	26,12	32,64
4	Persentase fasilitasi tata desa	%	29,89	45,42	60,95	78,50	100
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Desa (LKD)	%	8,59	17,18	25,77	34,36	42,96
6	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat	%	8,59	17,18	25,77	34,36	42,96
<b>Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>							
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)	Rata-rata anak per WUS	2.29	2.26	2.29	2.22	2.22
2	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age specific fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	N/A	N/A	N/A	35.29	33.90
3	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modem contraceptive (mCPR)	%	N/A	59.20	59.43	65	63.40
4	Persentase Kebutuhan BerKB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	N/A	16.56	17.67	11.4	9.6
5	Presentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	%	N/A	N/A	3.8	5.4	11.5

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Urusan Perhubungan						
1	Rasio Konektivitas						
2	Konektivitas darat	%	59.67	60.89	62.13	63.406	64.70
3	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	100	100	100	100
4	Konektivitas laut	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
5	Persentase Pengendalian KKOP	%	100	100	100	100	100
6	Cakupan perlintasan kereta api yang ditangani	%	-	-	-	-	-
	Urusan Komunikasi dan Informatika						
1	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informnasi publik pemerintah daerah survei	%					
2	Indeks SPBE	Angka	1,72	1,45	2,07	3,23	3,58
	Urusan Koperasi, Usaha dan Menengah						
1	Pertumbuhan volume usaha koperasi	%	25	78	70	32	33
2	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	%	45,00	45,50	46,56	47,62	50,00
3	Persentase koperasi aktif	%	76,87	78,83	79,36	79,79	80,96
4	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	10,58	13,22	13,22	13,22	15,84
5	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	76,87	78,83	79,36	79,79	80,96
6	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	%	0,30	0,85	1,77	2,84	4,26

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
7	Pertumbuhan wirausaha	%	1,28	1,28	1,28	1,28	1,62
8	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	%	10	10	10	10	10
9	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	%	20	20	20	20	20
<b>Urusan Penanaman Modal</b>							
1	Realisasi total terhadap target investasi	%	10,98	158,73	253,29	268,07	303,47
2	Persentase uruspeningkatan investor yang berinvestasi	%	100	100	100	100	100
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100
4	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	%	100	100	100	100	100
5	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	%	100	100	100	100	100
6	Persentase kerja sama penanaman modal yang ditindaklanjuti	%	0	0	0	0	0
<b>Urusan Kepemudaan dan Olahraga</b>							
1	Rasio wirausaha pemuda	%	0.45	0.48	0.54	0.61	0.68
2	Persentase atlet yang masuk pelatnas	%	0	0	0	0	0
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	%	10	13	15	20	23
<b>Urusan Statistik</b>							
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Angka				1,32	2,62

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Urusan Persandian						
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah					12,56	20,93
	Urusan Kebudayaan						
1	Tingkat partisipasi masyarakat, terhadap pengembangan kebudayaan						
2	Persentase kerennian tradisional yang dnestarikan dan dikembangkan	%					
3	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal						
4	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	%					
5	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	%					
6	Persentase kunjungan wisatawan ke museum	%					
	Urusan Perpustakaan						
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	0	0	0	42,62	56,41
2	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki	%	0	0	0	0	25
3	Persentase pustakawan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang pe ustakaan	%	0	0	27	27	12
	Urusan Kearsipan						
1	Tingkat ketersediaan arsip	%	3	3	3,5	3,7	7,8
2	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	%	7	7	7	8,5	9,3

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	%	0	0	0	0	0
4	Persentase SDM bidang kearsipan yang ditingkatkan kompetensinya	%	8	10	12	15	17
<b>Urusan Kelautan dan Perikanan</b>							
1	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	%	-2,79	3,58	1,58	3,35	3,41
2	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	17.930	19.952	21.149	25.015	27.864
3	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	938	3.685,24	5.689,76	6.242,22	6.578,44
4	Luasan kawasan konservasi	Angka	-	-	-	-	-
5	Angka konsumsi ikan	Kg/Perkapita/ Tahun	57,51	58,69	62,36	71,68	81,61
<b>Urusan Pariwisata</b>							
1	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	%	- 51	98,9,	25,41	28	32,08
2	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	%	-	-	-	-	-
3	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	%	-	-	-	1,8	4,5
4	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	%	-	-	-	48,8	50,6
<b>Urusan Pertanian</b>							
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	(21,74)	17,19	16,63	19,46	(13,59)
2	Peningkatan produksi hortikultura	%	3,40	10,77	5,52	86,26	(683,73)
3	Peningkatan produksi komoditas peternakan	%	1,57	1,555	2,87	2,15	5,63
4	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang	%	100	100	100	100	100

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Ditetapkan Menjadi LP2B						
5	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	100	100	100	100	100
6	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	%	-	-	-	-	5,56
7	Persentase penanganan bencana pertanian	%	-	95,90	93,75	95,34	84,69
8	Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	%	-	-	-	-	97,62
9	Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100
10	Persentase sdm penyuluh pertanian yang ditingkatkan	%	-	78,13	12,50	6,25	10,00
11	Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi	%	-	-	-	-	-
<b>Urusan Kehutanan</b>							
1	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	%					
2	Indeks keanekaragaman hayati	%					
3	Persentase peningkatan kelompok tani hutan (kth)	%					
4	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial TOPS	%					
5	Persentase tutupan lahan pada sempadan Sungai	%					

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral						
1	Jumlah volume air tanah pada cekungan air tanah di wilayah sungai lintas kabupaten/kota	Angka	-	-	-	-	-
2	Luas zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah di wilayah sungai lintas kabupaten/kota		-	-	-	-	-
3	Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT	Angka	-	-	-	-	-
4	Porsi EBT dalam Bauran Energi	%	-	-	-	-	-
5	Rasio Elektrifikasi	%	-	-	-	-	-
	Urusan Perdagangan						
1	Persentase izin usaha Perdagangan yang difasilitasi	%	30%	38%	45%	48%	50%
2	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	%	0	6%	3%	0%	1%
3	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	95%	90%	90%	75%	80%
4	Nilai ekspor barang		35,04	38,44	38,44	36,80	37,20
5	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	1%	1%	2%	3%	4%
6	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	%	0%	0%	0%	0%	1%
	Urusan Perindustrian						
1	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan indilstri	%	0%	0%	0%	1%	1%

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	%	0%	0%	1%	1%	0%
3	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini		3	0	28	19	13
<b>Urusan Transmigrasi</b>							
1	Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan	%	99,80	81,66	74,01	1,19	1,19
2	Persentase luas kawasan transmigrasi yang berkembang	%	40	33	0	16,84	77,80
3	Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan	%	8	10	12	15	20
<b>Unsur Sekretariat Daerah</b>							
1	Indeks kematangan organisasi	Angka	0	0	0	26,25	26,26
2	Efektivitas kerja sama daerah	Dokumen	N/A	N/A	57	96	84
3	Kinerja penyelenggaraan pemerintahan						
4	Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan	%	77,3	78	78,6	79	80,3
5	Persentase produk hukum yang dihasilkan	%	80	83	85	87	90
6	Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	%	89,22	93,82	88,59	92,67	91,39
7	Tingkat Kematangan UKPBJ	Indeks	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
8	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan						

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Unsur Sekretariat DPRD						
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	85,71	94,44	90	92,86	98,57
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	83,33	91,67	91,67	93,33	94,17
	Unsur Perencanaan						
1	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	100	100	100	100	100
3	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	100	100	100
4	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100	100	100	100
5	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100	100	100	100
	Unsur Keuangan						
1	Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan TKD	%				31,76	27,54
2	Persentase alokasi belanja Infrastruktur pelayanan publik	%				33,86	35,04
3	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	%	89,99	95,08	86,76	92,39	92,52
4	Persentase Penurunan SILPA	%	10,63	-738,25	-71,35	0,12	21,55

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Persentase laporan keuangan tepat waktu	%	100	100	100	100	100
6	Persentase penambahan nilai aset tetap	%	5	6	13	11	8
7	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	8,06	9,00	9,80	9,63	7,10
8	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	%					
9	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	%		100	100	100	100
<b>Unsur Kepegawaian</b>							
1	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	%	-	74.24	-	87	83
2	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	%	-	40	60	50	60
3	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	%	-	-	-	22,22	100
4	Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik	%	85	87	88	92	73
<b>Urusan Pendidikan dan Pelatihan</b>							
1	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	%	80	-	100	100	100
2	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	%	-	-	40	20	40
3	Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi	%	100	100	92.2	62.6	65
4	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	%	-	-	60	50	60

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Unsur Penelitian dan Pengembangan						
1	Persentase Kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	%	-	60	60	100	100
2	Persentase kajian berbasis Bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	%	100	-	-	100	100
3	Persentase kajian berbasis Bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	%	100	-	-	100	100
4	Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait Penelitian, pengembangan, Pengkajian dan penerapan di daerah	%	100	-	-	100	100
5	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	%	100	-	-	100	100
6	Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah	%	100	-	-	100	100
7	Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah	%	100	-	-	100	100
8	Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	%	100	-	-	100	100

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Unsur Pengawasan						
1	Tindaklanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-I	%	75,72	78,25	75,23	80,11	78,58
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Incern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	3	3
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	3
	Unsur Pemerintahan Umum						
1	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	0	0	0	0	0
2	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	%	0	0	0	0	0
3	Persentase organisasi kemasyarakatan an aktif	%	48,19	48,19	48,19	48,19	48,19
4	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, Fasilitasi kerukunan umat Beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	%	0	0	0	0	0
5	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100

### **2.1.5 Standar Pelayanan Minimal**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) sangat esensial karena merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas.

Standar Pelayanan Minimal berperan penting dalam menjamin kualitas dan pemerataan pelayanan dasar bagi masyarakat. SPM menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan yang minimal dan berkualitas.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengamanatkan pada Pemerintah daerah agar benar-benar memprioritaskan belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Sosial.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Pasal 4 PP Nomor 2 Tahun 2018 bahwa Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Adapun jenis SPM terdiri atas 6 (enam) bidang yang menjadi urusan wajib yaitu :

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Kesehatan
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4. Bidang Kawasan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Bidang Sosial

Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Banggai dilaksanakan berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal,
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Banggai untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintah daerah.

Realisasi capaian SPM untuk masing-masing bidang urusan sebagai berikut:

**A. Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Banggai Tahun 2024**

**Tabel 2.22**  
**Realisasi SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024**

NO	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (DEMAND)			CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH ANAK USIA SEKOLAH	JUMLAH SISWA BERSEKOLAH/ TAMAT	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan Anak Usia Dini	11895	11564	97,22	1.422	1.422	100%	96,21%	Baik
2	Pendidikan Dasar	56.790	49262	86,74	3.644	3.644	100%	96,69%	Baik
3	Pendidikan Kesetaraan		889		64	64	100%	93,63%	Baik

*Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai*

**B. Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Banggai Tahun 2024**

**Tabel 2.23**  
**Realisasi SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024**

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET DAERAH (%)	REALISASI
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100	99,46%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar	100	99,29%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar	100	98,91%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100	98,21%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sesuai standar	100	88,98%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sesuai standar	100	87,54%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sesuai standar	100	93,79%
8	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi sesuai standar	100	93,25%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100	90,53%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100	97,20%
11	Pelayanan kesehatan penderita Tuberkulosis	Pelayanan kesehatan penderita Tuberkulosis sesuai standar	100	94,76%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko Terinfeksi HIV	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko Terinfeksi HIV Sesuai standar	100	94,84%

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai*

**C. Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Tahun 2024**

**Tabel 2.24**  
**Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2024
1	2	3	4	5
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	92,18 %
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Meningkatnya kualitas sanitasi	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	92,22 %

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai*

**D. Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Kabupaten Banggai Tahun 2024**

Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang urusan Perumahan sesuai Program dan Kegiatan Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk Tahun Anggaran 2024 belum dapat ditargetkan dan dilaksanakan sesuai dengan Sub Kegiatan antara lain :

- a. Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten/kota
- b. Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten/kota
- c. Rembuk warga menentukan calon penerima bantuan rumah layak huni bagi korban bencana
- d. Pembangunan rumah bagi korban bencana.

**E. Capaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banggai Tahun 2024**

Realisasi capaian bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banggai terdiri dari 3 (tiga) jenis yakni:

**1) Satuan Polisi Pamong Praja**

**Tabel 2.25**  
**Realisasi SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH WARGA NEGARA BERHAK MENDAPAT PELAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA TERLAYANI
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	50	45

*Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai*

**2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

**Tabel 2.26**  
**Realisasi SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 Kategori Indeks Pencapaian SPM Trantibumlinmas**

NO	CAPAIAN SPM	TOTAL CAPAIAN
1	2	3
1	DAMKAR	81%

*Sumber : Dinas Damkar Kabupaten Banggai*

### 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Tabel 2.27**

**Realisasi SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH WARGA NEGARA BERHAK MENDAPAT PELAYANAN (JIWA)	JUMLAH WARGA NEGARA TERLAYANI (JIWA)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	246.877	187.538	75,96
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	246.877	140.697	56,99

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai

### 4) Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2024

**Tabel 2.28**

**Realisasi SPM Bidang Sosial Tahun 2024**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KERJA	TAHUN PENCAPAIAN	CAPAIAN KOTA		
				TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah warga Persentase (%) penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	2024	100%	98,46%	98,46%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	2024	100%	95,00%	95,00%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	2024	100%	98,46%	98,46%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial	Persentase (%) gelandangan	2024	100%	98,33%	98,33%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KERJA	TAHUN PENCAPAIAN	CAPAIAN KOTA		
				TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
	khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti				
5	Perlindungan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	2024	100%	96,00%	96,00%
Nilai Rata-Rata Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Banggai (%)						97,25%

*Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Banggai*

## 2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Gambaran Keuangan Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Analisis ini didasarkan atas informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah seperti angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu, asumsi indikator makro ekonomi, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta kebijakan di bidang keuangan negara.

### 2.2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024

#### 2.2.1.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Banggai selang tahun 2020-2024 dapat di gambarkan melalui kinerja pengelolaan pendapatan daerah, kinerja pengelolaan belanja daerah dan kinerja pengelolaan pembiayaan daerah serta neraca daerah, sebagai berikut:

#### A. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD mencerminkan kinerja pemerintah dalam kemampuannya untuk mengelola keuangan dan pendanaan pada periode tertentu. Kinerja pelaksanaan APBD ini dalam melihat

seberapa besar pemerintah memiliki kemandirian, kemampuan mengoptimalkan pendapatan, serta kemampuan dalam menekan pengeluaran, serta kemampuan dalam menyerap anggaran.

### **1. Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen pendapatan daerah Kabupaten Banggai adalah meliputi :

#### **a. Pendapatan Asli Daerah**

Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

#### **b. Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer yang terdiri atas transfer pemerintah pusat yang meliputi dana perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa, serta Transfer antar daerah yang meliputi Pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

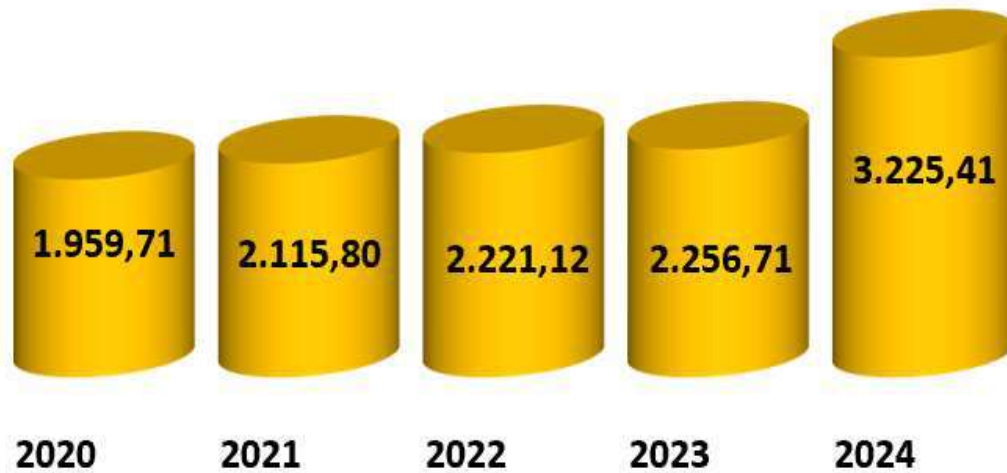
#### **c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari: Hibah, Dana Darurat, dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 terus mengalami peningkatan seperti terlihat dalam gambar 2.63 berikut ini:

**Gambar 2.63**  
**Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai**  
**Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)**

---



---

*Sumber : BPKAD Kabupaten Banggai 2025*

Adapun rata-rata realisasi pertumbuhan APBD Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024 di gambarkan sebagaimana tabel 2.29 berikut:

**Tabel 2.29**  
**Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024**

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
<b>PENDAPATAN - LRA</b>	<b>1.959.706.353.744,97</b>	<b>2.115.804.450.981,83</b>	<b>2.221.121.648.652,01</b>	<b>2.256.718.341.656,79</b>	<b>3.255.412.921.950,93</b>	<b>14,70</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>157.994.144.272,97</b>	<b>190.462.129.225,83</b>	<b>217.602.321.680,01</b>	<b>216.386.288.464,79</b>	<b>226.257.171.064,96</b>	<b>9,70</b>
Pendapatan Pajak Daerah	50.713.072.147,76	65.390.332.182,44	61.950.375.592,44	68.015.598.651,15	75.416.662.828,67	11,09
Pendapatan Retribusi Daerah	11.509.556.305,44	9.887.216.809,39	14.325.178.092,00	20.645.658.613,33	20.091.632.837,18	18,06
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan	2.989.217.754,00	3.813.505.652,75	3.962.201.302,68	5.714.244.284,00	6.234.376.221,00	21,20
Lain-lain PAD Yang Sah	92.782.298.065,77	111.371.074.581,25	137.364.566.692,89	122.010.786.916,31	124.514.499.178,11	8,56
<b>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</b>	<b>1.715.437.686.819,00</b>	<b>1.867.053.767.116,00</b>	<b>1.947.559.446.372,00</b>	<b>2.014.310.234.952,00</b>	<b>3.005.607.896.323,00</b>	<b>16,45</b>
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.429.584.691.213,00	1.500.743.051.838,00	1.619.287.389.501,00	1.696.369.090.390,00	2.695.439.568.183,00	19,13
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	234.192.435.000,00	311.186.169.000,00	250.001.275.000,00	247.311.422.000,00	228.920.237.000,00	1,18
Dana Insentif Daerah	0,00	76.993.734.000,00	29.076.464.000,00	20.281.195.000,00	0,00	-48,12
Dana Desa	234.192.435.000,00	234.192.435.000,00	220.924.811.000,00	227.030.227.000,00	228.920.237.000,00	-0,52
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	51.660.560.606,00	55.124.546.278,00	67.450.781.871,00	68.209.722.562,00	81.248.091.140,00	13,49
Pendapatan Bagi Hasil	46.927.920.606,00	55.124.546.278,00	67.450.781.871,00	68.209.722.562,00	81.048.091.140,00	14,94
Bantuan Keuangan			10.820.000.000,00	2.420.000.000,00	200.000.000,00	-67,34
<b>LAIN- LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA</b>	<b>86.274.522.653,00</b>	<b>58.288.554.640,00</b>	<b>55.959.880.600,00</b>	<b>26.021.818.240,00</b>	<b>23.547.854.562,97</b>	<b>-24,86</b>
Pendapatan Hibah	73.914.522.653,00	9.036.704.640,00	8.169.572.923,00	5.641.246.503,00	2.658.248.117,00	-45,30
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.360.000.000,00	49.251.850.000,00	47.790.307.677,00	20.380.571.737,00	20.889.606.445,97	60,16

Berdasarkan tabel 2.29 diatas rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai selang 2020–2024 sebesar 14,70%. Sementara rata-rata laju pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 9,70% diikuti dengan pendapatan transfer tumbuh sebesar 92,33% sedangkan pertumbuhan lain-lain pendapatan daerah yang sah rata-rata tumbuh sebesar 0,72%.

Berdasarkan tabel 2.29 dapat digambarkan bahwa pada tahun 2020 unsur paling menonjol yang memberikan kontribusi terbesar pada Pendapatan Asli Daerah adalah lain-lain PAD yang sah dimana kontribusinya adalah sebesar 58,72% dan sampai dengan tahun 2024 tetap memberikan kontribusi terbesar dengan capaian sebesar 55,03%. Dana Transfer pada tahun 2020 yang memberikan kontribusi terbesar masih didominasi oleh Dana Perimbangan yaitu sebesar 83,34% pada tahun 2024 dan 89,68%. Sedangkan untuk kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun 2020 yang memberikan peranan cukup besar adalah pada Pendapatan Hibah sebesar 85,67% sedangkan tahun 2024 kontribusi terbesar Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada kelompok belanja Lain\_lain Pendapatan sesuai peaturan perundang-undangan sebesar 88,71%. Perbandingan Realisasi unsur-unsur pendapatan terlihat dalam gambar 2.64 berikut ini :

**Gambar 2.64**  
**Perbandingan Realisasi Pendapatan Kabupaten Banggai**  
**Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)**



Sumber : BPKAD Kabupaten Banggai 2025

Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah tahun 2020 hanya mencapai 8,06% sementara untuk dana transfer adalah sebesar 87,54% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah adalah sebesar 4,40%. Seiring dengan bertambahnya waktu, pada tahun 2024 proporsi realisasi PAD terhadap Pendapatan tidak mengalami kenaikan bahkan cenderung menurun dengan proporsi sebesar 6,95% dan untuk dana transfer mengalami kenaikan sebesar 92,33% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan sebesar 0,72%. Proporsi tersebut mencerminkan bahwa Kabupaten Banggai masih sangat tergantung dari bantuan pusat untuk membiayai segala kebutuhan terkait dengan pembangunan dan pemerintahan. Untuk laju pertumbuhan realisasi masing-masing unsur pendapatan dengan asumsi bahwa besarnya realisasi pada tahun 2020 menggunakan angka penetapan 2020, adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.30**  
**Pertumbuhan Realisasi Masing-Masing Unsur Pendapatan**  
**Tahun 2021-2024 (%)**

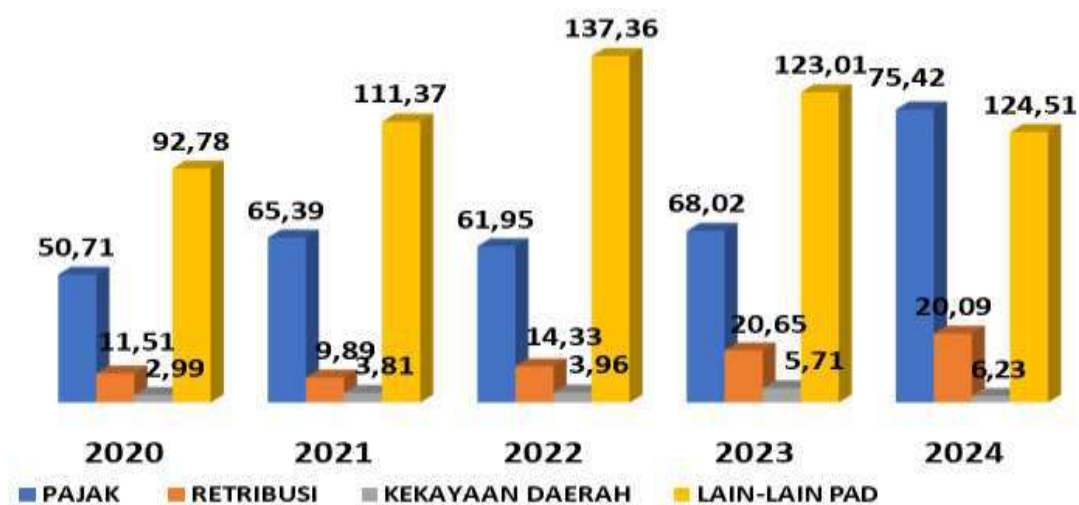
<b>Uraian</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Rata-Rata Pertumbuhan</b>
<b>Pendapatan - LRA</b>	7,97	4,98	1,60	44,25	14,70
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	20,55	14,25	-0,56	4,56	9,70
<b>Pendapatan Transfer - LRA</b>	8,84	4,31	3,43	49,21	16,45
<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA</b>	-32,44	-4,00	-53,50	-9,51	-24,86

*Sumber : BPKAD Kabupaten Banggai, 2024*

Kondisi pertumbuhan masing-masing unsur pendapatan di Kabupaten Banggai selang 2021-2024 menunjukkan fluktuasi. Dari tabel 2.30 diatas terlihat proporsi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer menunjukan peningkatan selama kurun waktu 2021-2024 sedangkan Lain-lain Pendapatan yang Sah menunjukkan penurunan. Rata-rata proporsi terbesar adalah Dana Transfer yaitu sebesar

14,93%. Diikuti oleh proporsi Pendapatan Asli Daerah dengan capaian proporsi rata-rata sebesar 13,71% serta proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah proporsi rata-rata sebesar (36,58%). Selanjutnya proporsi PAD dijabarkan sebagai berikut :

**Gambar 2.65**  
**Proporsi Masing-masing Unsur PAD**  
**Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)**



Sumber : BPKAD Kabupaten Banggai 2025

Berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), selama kurun waktu 2020-2024 menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 sebesar Rp157.994.144.272,97 menjadi Rp226.257.171.064,96 pada tahun 2024. Selanjutnya bila dilihat dari unsur-unsur PAD, pada tahun 2020 hasil pajak daerah proporsinya adalah sebesar 32,09% meningkat menjadi 35,33% pada tahun 2024, selanjutnya untuk hasil retribusi daerah pada tahun 2020 sebesar 7,28% terjadi kenaikan pada tahun 2024 menjadi sebesar 8,88%. Untuk komponen Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2020 sebesar 1,89% dan 2,76% pada tahun 2024, sedangkan pada komponen Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun 2020 sebesar 58,73% menurun menjadi sebesar 55,03% pada tahun 2024. Pertumbuhan masing-masing unsur PAD dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 2.31**  
**Pertumbuhan Masing-Masing Unsur PAD**  
**Tahun 2020-2024 (%)**

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan
Pajak Daerah	-8,75	28,94	-5,26	9,79	10,88	11,09
Retribusi Daerah	-6,107	-14,10	44,89	44,12	-2,68	18,06
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	5,602	27,58	3,90	44,22	9,10	21,20
Lain-lain PAD yang Sah	-25,39	20,03	23,34	-11,18	2,05	8,56

Pada tabel 2.31 diatas memperlihatkan perkembangan laju pertumbuhan realisasi unsur PAD, pada tahun 2020 laju pertumbuhan Hasil Pajak Daerah pada posisi -8,75% namun pada tahun 2021 terjadi kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 28,94%, sementara untuk tahun 2022 kembali terjadi penurunan sebesar -5,26%. Tahun 2023 dan tahun 2024 mengalami peningkatan yaitu dari 9,79% menjadi 10,88%. Untuk komponen retribusi daerah semula tahun 2021 berada pada posisi -6,107% kemudian di tahun 2022 laju pertumbuhannya sebesar -14,10% sementara untuk tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024 terjadi penurunan laju pertumbuhan realisasi yaitu 44,89%, 44.12% dan -2,68%, Adapun pertumbuhan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan yang berasal dari deviden atau konpensasi yang dibayarkan oleh pihak ketiga atas penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 berada pada posisi 5,602, kemudian pada tahun 2021 sebesar 27,58% terjadi penurunan sebesar 3,90% pada tahun 2022 dan kenaikan tahun 2023 sebesar

44,22% dan pada tahun 2024 turun menjadi 9,10%. Berikutnya adalah lain-lain PAD yang sah memiliki nilai pertumbuhan yang cenderung menurun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

## **2. Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah**

Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran yang nyata dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pada gilirannya, apabila kesejahteraan masyarakat telah meningkat maka diharapkan akan berdampak kepada perekonomian daerah secara luas.

Gambaran tentang perkembangan realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai selama Tahun 2020 - 2024 dan persebaran proporsinya dapat dilihat dalam tabel 2.32 berikut:

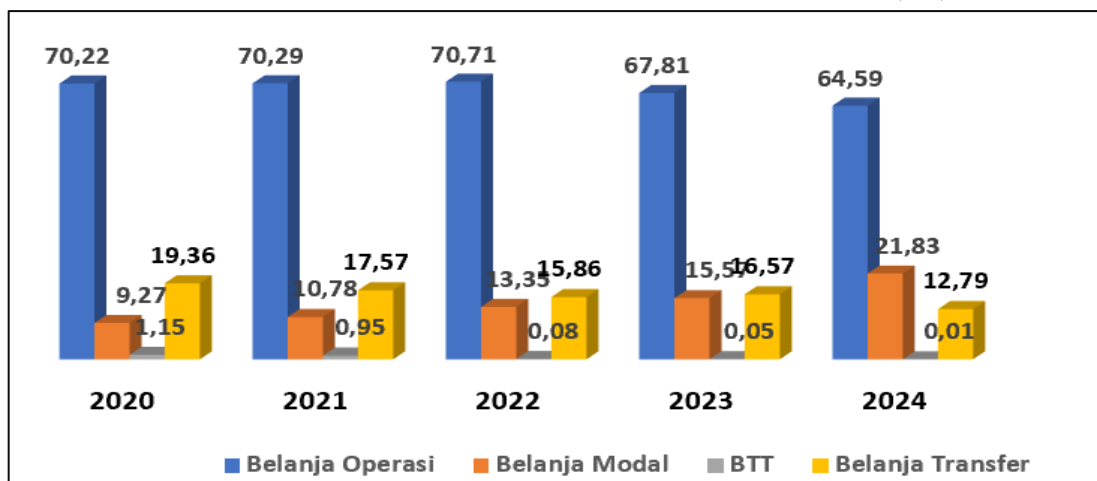
**Tabel 2.32****Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Selama Tahun 2020-2024**

<b>Uraian</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Rata-Rata Pertumbuhan</b>
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.823.685.331.255,00</b>	<b>2.009.070.705.713,73</b>	<b>2.218.867.199.135,88</b>	<b>2.304.388.953.228,50</b>	<b>3.073.951.690.441,98</b>	<b>20,99</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.280.622.999.749,00</b>	<b>1.412.083.627.951,22</b>	<b>1.569.021.843.285,88</b>	<b>1.562.700.563.060,50</b>	<b>1.985.681.216.435,54</b>	<b>12,01</b>
Belanja Pegawai	748.722.942.274,00	758.945.563.959,00	773.187.852.134,00	792.226.768.174,50	932.050.261.203,84	9,53
Belanja Barang dan Jasa	439.833.945.362,00	627.186.944.290,72	745.594.249.688,88	683.840.464.468,00	936.602.728.230,54	22,54
Belanja Bunga		200.458.752,50				-25,00
Belanja Subsidi	403.840.000,00	403.840.000,00	403.800.000,00	403.713.720,00	403.884.960,00	0,00
Belanja Hibah	91.662.272.113,00	24.444.820.949,00	41.391.276.463,00	82.033.096.698,00	114.229.309.642,00	33,36
Belanja Bantuan Sosial	-	902.000.000,00	8.444.665.000,00	4.196.520.000,00	2.395.032.400,00	185,75
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>169.016.197.643,00</b>	<b>216.631.648.676,51</b>	<b>296.231.328.646,00</b>	<b>358.702.391.758,00</b>	<b>671.072.054.401,44</b>	<b>43,27</b>
Belanja Modal - Tanah	355.548.475,00	251.494.220,00	-	540.059.109,00	868.905.947,00	-17,09
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	63.131.403.608,00	45.282.040.304,51	64.118.971.654,00	69.729.278.302,00	188.605.230.947,27	48,14
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	25.160.110.281,00	46.995.242.897,00	78.854.508.591,00	154.451.609.928,00	186.938.860.867,49	67,87
Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	80.278.231.879,00	123.230.853.685,00	152.509.584.401,00	133.597.972.919,00	294.280.781.639,68	46,28
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	90.903.400,00	872.017.570,00	748.264.000,00	375.471.500,00	30.000.000,00	175,81
Belanja Modal - Aset Lainnya				8.000.000,00	348.275.000,00	1.063,36
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>20.975.044.282,00</b>	<b>19.164.519.356,00</b>	<b>1.690.350.700,00</b>	<b>1.228.330.539,00</b>	<b>158.933.800,00</b>	<b>53,55</b>
<b>TRANSFER DAERAH</b>	<b>353.071.089.581,00</b>	<b>361.190.909.730,00</b>	<b>351.923.676.504,00</b>	<b>381.757.667.871,00</b>	<b>417.039.485.805,00</b>	<b>4,36</b>
<b>TRANSFER BAGI HASIL</b>						
<b>PENDAPATAN</b>	<b>13.565.884.050,00</b>	<b>14.065.884.050,00</b>	<b>18.066.274.824,00</b>	<b>12.943.866.569,00</b>	<b>14.345.058.805,00</b>	<b>3,65</b>
Bagi Hasil Pajak Daerah	10.532.934.050,00	11.032.934.050,00	13.417.671.334,00	12.943.866.569,00	14.345.058.805,00	12,74
Bagi Hasil Retribusi	3.032.950.000,00	3.032.950.000,00	4.648.603.490,00			-25,00
<b>TRANSFER BANTUAN</b>						
<b>KEUANGAN</b>	<b>339.505.205.531,00</b>	<b>347.125.025.680,00</b>	<b>333.857.401.680,00</b>	<b>368.813.801.302,00</b>	<b>402.694.427.000,00</b>	<b>4,52</b>
Transfer Bantuan Keuangan						

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Kepada Pemerintah Daerah						
Lainnya	-	-	-			
Bantuan Keuangan Kepada Desa	338.746.616.500,00	344.825.025.680,00	333.857.401.680,00	368.813.801.302,00	402.694.427.000,00	4,57
Bantuan Keuangan Lainnya	758.589.031,00	2.300.000.000,00				25,80

Untuk proporsi masing-masing belanja daerah di gambarkan sebagaimana diagram berikut :

**Gambar 2.66**  
**Proporsi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak**  
**Terduga dan Transfer Tahun 2020-2024 (%)**

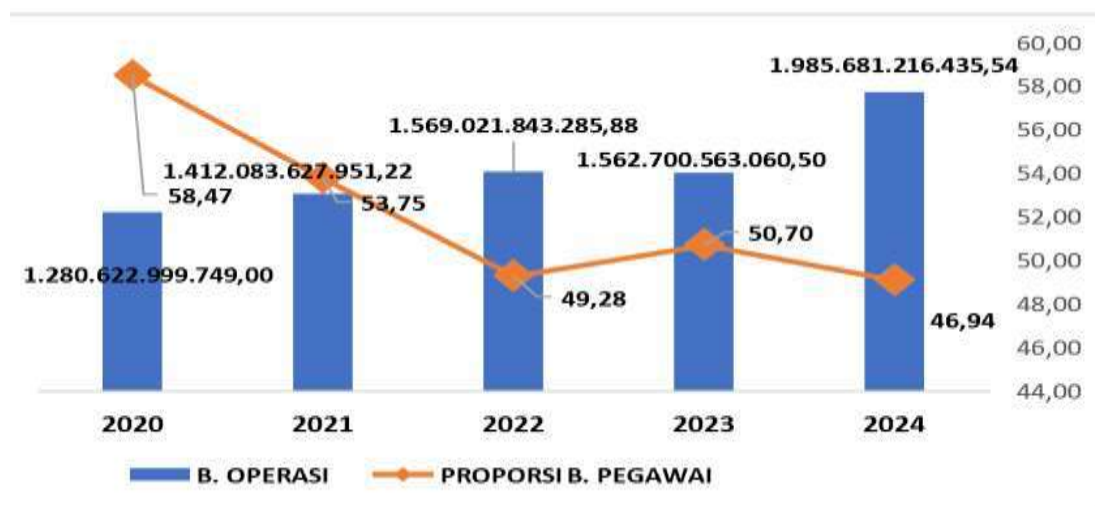


Sumber : BPKAD Kabupaten Banggai 2025

Bila dilihat berdasarkan komponen belanja dan transfer daerah, maka proporsi belanja operasi relatif lebih besar dibandingkan belanja modal dan transfer. Namun apabila dianalisis lebih dalam, secara rata-rata pertumbuhan belanja operasi sebesar 12,01% sedangkan Belanja modal secara rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 43,27% dan transfer sebesar 4,36% meskipun secara absolut belanja operasi lebih besar dibandingkan dengan belanja modal dan transfer, namun secara proporsi pertumbuhan belanja modal lebih besar daripada belanja operasi dan transfer hal ini ditunjukkan oleh besarnya proporsi pada belanja operasi tahun 2020 sebesar 70,22% dan mengalami kenaikan mulai tahun 2021 sebesar 70,29%, tahun 2022 naik sebesar 70,71%, mengalami penurunan di tahun 2023 sebesar 67,81% dan mencapai sebesar 64,59 di tahun 2024. Untuk proporsi belanja modal pada tahun 2020 adalah sebesar 9,27% dan naik tahun 2021 menjadi 10,78% dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022 dan tahun 2023 yaitu sebesar 13,35% dan 15,51% serta terakhir

tahun 2024 menjadi sebesar 21,83%. Pada gambar 2.67 mencerminkan kecenderungan peningkatan proporsi belanja operasi menunjukkan adanya komitmen pemerintah Kabupaten Banggai untuk meningkatkan kemajuan pembangunan daerah.

**Gambar 2.67**  
**Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Belanja Operasi**  
**Tahun 2020-2024**



*Sumber : BPKAD Kabupaten Banggai, 2024*

Gambar 2.67 diatas menggambarkan proporsi belanja pegawai terhadap belanja operasi. Sesuai grafik di atas dimana pada tahun 2020 proporsi belanja pegawai terhadap Belanja operasi adalah sebesar 58,47%, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 46,94% atau selama kurun waktu selama 5 tahun terjadi penurunan sebesar 11,53%. Sedang bila dilihat dari alokasi anggaran belanja operasi pada tahun 2020 sebesar Rp1.280.622.999.749,00 dan pada tahun 2024 sebesar Rp1.985.681.216.435,54 dengan kata lain belanja operasi selama kurun waktu 5 tahun mengalami peningkatan sebesar Rp705.058.216.686,54 atau naik sebesar 55,06%.

Belanja modal merupakan investasi penting bagi kemajuan ekonomi suatu daerah. Belanja modal dapat berupa pengadaan atau pembelian aset yang memiliki masa manfaat satu tahun dan ini merupakan aset yang bisa digunakan dalam kegiatan pemerintahan

yang bermanfaat secara ekonomis, sosial, dan manfaat lain, sehingga meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat. Dengan meningkatnya porsi belanja modal berarti penyediaan akan fasilitas belanja publik semakin besar ini berarti tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin baik.

Akan halnya kondisi yang terjadi di Kabupaten Banggai selama tahun 2020-2024 menunjukkan proporsi belanja modal terhadap total belanja dan transfer daerah dan nilainya menunjukkan bahwa rasio belanja modal terhadap total belanja dan transfer daerah pada tahun 2020 sebesar 9,27% naik menjadi sebesar 21,83% pada tahun 2024 dengan demikian terjadi kenaikan peran belanja modal terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2020-2024.

### **3. Kinerja Pengelolaan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang dikeluarkan untuk menutupi defisit anggaran.

Dalam kurun waktu tahun 2020-2024 penerimaan pembiayaan daerah menunjukkan kenaikan dari semula sebesar Rp31.854.786.494,82 pada tahun 2020 menjadi Rp201.294.492.918,07 pada tahun 2024. Adapun dalam Pengeluaran pembiayaan daerah cenderung meningkat dari sebesar Rp15.959.708.000 pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp5.100.000.000,00 pada tahun 2024. Dari nilai tersebut di atas diperoleh besarnya Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan maka diperoleh pembiayaan netto yaitu sebesar Rp15.895.078.494,82 pada tahun 2020 dan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp196.194.492.918,07 pada tahun 2024.

Nilai ini digunakan untuk menutupi defisit anggaran yang terjadi pada tahun 2020 dan defisit anggaran pada tahun 2024. Secara rinci perkembangan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Banggai tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.33 berikut.

**Tabel 2.33**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024 (Rupiah)**

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>						
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>31.854.786.494,82</b>	<b>149.581.923.057,79</b>	<b>256.251.001.265,54</b>	<b>256.556.561.655,78</b>	<b>201.294.492.918,07</b>	<b>104,87</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	17.840.078.494,82	149.544.923.057,79	256.251.001.265,54	256.556.561.655,78	201.259.492.918,07	<b>104,87</b>
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-		
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-		
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	13.959.708.000,00	37.000.000,00	-	-	35.000.000,00	
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-		
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	55.000.000,00	-	-	-		
<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>31.854.786.494,82</b>	<b>149.581.923.057,79</b>	<b>256.251.001.265,54</b>	<b>256.556.561.655,78</b>	<b>201.294.492.918,07</b>	<b>104,87</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>15.959.708.000,00</b>	-	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>7.626.108.220,00</b>	<b>5.100.000.000,00</b>	<b>37,05</b>
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00	7.626.108.220,00	5.100.000.000,00	<b>37,05</b>
Pembayaran Pokok Utang	13.959.708.000,00	-	-	-		
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-		
<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>15.959.708.000,00</b>	-	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>7.626.108.220,00</b>	<b>5.100.000.000,00</b>	<b>37,05</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>15.895.078.494,82</b>	<b>149.581.923.057,79</b>	<b>254.251.001.265,54</b>	<b>248.930.453.435,78</b>	<b>196.194.492.918,07</b>	<b>221,94</b>

### **2.2.2 Neraca Daerah**

Neraca Daerah Kabupaten Banggai periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang tercatat bahwa jumlah Aset Lancar mengalami kenaikan semula pada tahun 2020 adalah sebesar Rp245.671.225.654,77 naik menjadi Rp508.355.136.408,60 pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 26,29%. Aset tetap mengalami peningkatan tahun 2020 sebesar Rp2.107.264.256.095,62 meningkat menjadi Rp2.803.667.090.124,53 tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,50%. Hal serupa juga pada Kondisi Aset Lainnya tercatat pada tahun 2020 sebesar Rp41.459.054.457,40 mengalami kenaikan menjadi Rp130.180.992.558,15 pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan 216,13%. Dari nilai tersebut di atas memberikan gambaran pada jumlah aset daerah juga mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar Rp2.425.740.806.471,97 meningkat menjadi sebesar Rp3.483.940.862.802,79 pada tahun 2024.

Hutang dalam tabel 2.34 dibawah ini bukan berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai melakukan pembiayaan by debt dengan cara menghutang, melainkan karena secara administratif ada kewajiban yang belum dilunasi, jadi bersifat administratif.

#### **2.2.2.1 Rasio Lancar (Curent Ratio)**

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 2.31, bila kita analisis modal kerja yaitu menganalisa kecukupan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasi rutin, dengan menggunakan rumus Aset lancar dikurangi kewajiban lancar neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai memberikan angka yang positif dimana pada Tahun 2020 sebesar Rp245.671.225.654,77 dan Tahun 2021 sebesar Rp407.582.872.353,47 dan tahun 2022 sebesar Rp308.786.887.380,15 dan Rp383.836.657.951,93 Rp508.355.136.408,60 hal ini menunjukkan kondisi pemerintah daerah masih dalam kondisinya yang baik.

**Tabel 2.34**  
**Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Banggai**

URAIAN	TAHUN					Rata-Rata Pertumbuhan
	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>ASET</b>						
<b>ASET LANCAR</b>						
Kas dan Setara Kas	151.969.313.984,79	265.412.270.999,89	269.052.402.474,78	213.826.194.999,07	390.220.023.799,02	34,50
Kas di Kas Daerah	84.397.129.485,59	238.372.496.817,25	247.823.321.130,51	200.945.772.460,28	386.937.785.996,96	65,01
Kas di Bendahara Penerimaan	293.817.309,00	3.067.772,93	1.613.970,04	58.130.164,37	3.167.000,00	815,20
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	34.593.112,12	0,00	0,00	0,00	-25,00
Kas di BLUD	2.227.101.851,12	5.340.877.097,15	884.396.082,14	832.690.369,33	222.421.296,16	-5,69
Kas Dana BOS	12.984.515.184,61	675.323.629,61	216.148.008,61	201.499.602,61	0,00	-67,39
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	2.001.677.743,47	522.066.578,83	126.923.283,48	249.322.908,48	117.586.072,29	-26,50
Kas Lainnya	-	463.845.992,00	0,00	1.043.776.113,00	0,00	-50,00
Setara Kas	20.065.041.411,00	10.000.000.000,00	20.000.000.000,00	10.495.003.381,00	0,00	-24,42
Investasi Jangka Pendek	30.000.031.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-41,67
Kas Dana BOSP	-	-	0,00	0,00	149.269.440,61	
Kas Dana BOK Puskesmas	-	-	0,00	0,00	2.789.793.993,00	
Piutang Pajak Daerah	30.349.321.514,80	29.745.060.934,65	30.957.026.749,21	34.129.625.553,81	32.780.735.410,20	2,09
Piutang Retribusi Daerah	989.939.660,00	1.866.540.900,00	1.399.786.600,00	1.778.289.500,00	2.108.447.500,00	27,29
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	12.295.314.620,61	52.894.609.485,61	23.251.854.971,61	17.855.555.757,88	32.512.763.526,61	83,26
Piutang Transfer Antar Daerah	6.418.995.288,00	9.264.859.281,00	10.105.839.623,00	9.687.647.046,00	23.222.779.752,00	47,25
Piutang Lainnya	1.753.503.283,80	491.131.000,00	491.131.000,00	1.339.138.300,00	6.181.183.126,98	115,56
Pengisian Piutang	-14.758.562.299,23	-15.514.602.862,31	-15.441.791.164,98	-21.554.912.421,41	-23.960.687.617,89	13,85
Beban Dibayar Dimuka	9.708.333,33	20.708.333,33	14.886.986,30	16.666.666,67	0,00	-0,71
Persediaan	56.643.691.268,67	63.402.294.281,30	64.005.520.712,01	51.708.681.978,13	45.289.890.911,68	-4,69
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>245.671.225.654,77</b>	<b>407.582.872.353,47</b>	<b>383.836.657.951,93</b>	<b>308.786.887.380,15</b>	<b>508.355.136.408,60</b>	<b>26,29</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>						
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	1.306.000.000,00	1.269.000.000,00	1.269.000.000,00	1.269.000.000,00	1.234.000.000,00	-1,40
Investasi Jangka Panjang Permanen	30.040.270.264,18	32.918.067.494,89	37.944.558.065,88	41.912.979.075,51	40.503.643.711,51	7,99
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>31.346.270.264,18</b>	<b>34.187.067.494,89</b>	<b>39.213.558.065,88</b>	<b>43.181.979.075,51</b>	<b>41.737.643.711,51</b>	<b>7,64</b>
<b>ASET TETAP</b>						
Tanah	256.313.917.941,23	237.204.068.684,02	237.225.740.684,01	240.046.942.672,39	241.738.052.880,01	-1,39
Peralatan dan Mesin	708.127.541.764,19	766.983.765.515,74	781.632.823.285,17	850.273.540.264,72	917.582.803.407,28	6,73
Gedung dan Bangunan	900.030.796.682,67	946.447.974.800,62	1.050.330.796.721,17	1.191.507.036.039,97	1.283.138.356.116,91	9,32
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.580.658.599.880,48	1.707.362.838.521,64	1.880.208.155.795,75	2.009.380.618.948,17	2.256.521.352.759,70	9,33
Aset Tetap Lainnya	46.668.212.443,95	45.736.995.191,95	47.258.702.941,95	38.078.657.957,95	28.688.307.404,97	-10,69
Konstruksi Dalam Pengerjaan	10.820.780.241,02	14.810.035.086,13	11.388.511.109,66	62.485.983.939,00	123.784.055.776,23	140,13
Akumulasi Pengusutan	-1.395.355.592.857,92	-1.585.040.242.174,35	-1.732.491.671.686,91	-1.938.793.401.842,72	-2.047.785.838.220,55	10,11
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>2.107.264.256.095,62</b>	<b>2.133.505.435.625,75</b>	<b>2.275.553.058.850,80</b>	<b>2.452.979.377.979,48</b>	<b>2.803.667.090.124,53</b>	<b>7,50</b>

URAIAN	TAHUN					Rata-Rata Pertumbuhan
	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>ASET LAINNYA</b>						
Tagihan Jangka Panjang	5.561.300,00	5.561.300,00	25.598.300,00	5.561.300,00	4.179.276.294,87	18832,82
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	6.787.000.000,00	10.524.843.817,17	6.787.000.000,00	4,89
Aset Tidak Berwujud	7.568.075.000,00	8.052.574.500,00	8.502.038.500,00	8.864.760.000,00	14.548.452.288,96	20,09
Aset Lain-lain	35.126.861.872,40	39.342.344.985,14	105.992.553.296,81	104.768.610.516,57	273.178.986.402,25	85,25
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-1.241.443.715,00	-2.012.025.604,17	-2.821.527.162,50	-3.684.399.466,67	-4.860.635.432,10	41,20
Akumulasi Pengusutan Aset Lainnya	-	-	-77.098.843.991,91	-70.705.104.877,22	-163.652.086.995,83	30,79
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)			34.641.630.352,00	687.606.436.000,00	0,00	446,23
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>41.459.054.457,40</b>	<b>45.388.455.180,97</b>	<b>76.028.449.294,40</b>	<b>737.380.707.289,85</b>	<b>130.180.992.558,15</b>	<b>216,13</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>2.425.740.806.471,97</b>	<b>2.620.663.830.655,08</b>	<b>2.774.631.724.163,01</b>	<b>3.542.328.951.724,99</b>	<b>3.483.940.862.802,79</b>	<b>9,98</b>
<b>KEWAJIBAN</b>						
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	53.213.000,00	8.632.756.682,00	12.546.951.693,11	12.566.353.135,00	12.564.299.372,00	4042,13
Pendapatan Diterima Dimuka	58.496.666,00	64.316.673,00	45.970.000,00	123.772.450,00	109.048.715,00	34,69
Utang Belanja	42.741.597.028,00	54.755.307.753,19	34.627.817.188,19	38.613.667.101,19	61.818.534.886,64	15,74
Utang Jangka Pendek Lainnya	6.423.985.987,00	6.220.723.487,00	47.331.707,00	47.331.707,00	544.867.516,00	237,19
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>49.277.292.681,00</b>	<b>69.673.104.595,19</b>	<b>47.268.070.588,30</b>	<b>51.351.124.393,19</b>	<b>75.036.750.489,64</b>	<b>16,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>49.277.292.681,00</b>	<b>69.673.104.595,19</b>	<b>47.268.070.588,30</b>	<b>51.351.124.393,19</b>	<b>75.036.750.489,64</b>	<b>16,00</b>
<b>EKUITAS</b>						
<b>EKUITAS</b>	<b>2.376.463.513.790,97</b>	<b>2.550.990.726.059,89</b>	<b>2.727.363.653.574,71</b>	<b>3.490.977.827.331,80</b>	<b>3.408.904.112.313,15</b>	<b>9,98</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>2.376.463.513.790,97</b>	<b>2.550.990.726.059,89</b>	<b>2.727.363.653.574,71</b>	<b>3.490.977.827.331,80</b>	<b>3.408.904.112.313,15</b>	<b>9,98</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>2.425.740.806.471,97</b>	<b>2.620.663.830.655,08</b>	<b>2.774.631.724.163,01</b>	<b>3.542.328.951.724,99</b>	<b>3.483.940.862.802,79</b>	<b>9,98</b>

Untuk mendapatkan Rasio lancar yaitu dengan membagi jumlah aset lancar dengan kewajiban lancar sehingga diperoleh nilai pada tahun 2020 sebesar 65,91% tahun 2021 sebesar 5,83%, tahun 2022 sebesar 19,55% tahun 2023 sebesar 64,63% serta tahun 2024 sebesar 26,29%, Nilai ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya melalui pencairan aset lancarnya, namun di sisi lain selama periode tersebut terjadi kecenderungan penurunan nilai rasio lancar, memberi pertanda yang kurang baik yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.

#### **2.2.2.2 Rasio Cepat (Quick Ratio)**

Hasil perhitungan, nilai rasio cepat (rasio antara aset lancar dikurangi persediaan, terhadap hutang lancar) pada Tahun 2020 sebesar 383,60% tahun 2021 sebesar 493,99% tahun 2022 sebesar 676,63% dan tahun 2023 sebesar 500,63. Hasil perhitungan tersebut memperlihatkan adanya kemampuan aset lancar dalam menyelesaikan hutang secara cepat namun terjadi kecenderungan penurunan nilai rasio cepat. Hal ini berarti pemerintah Kabupaten Banggai memiliki aset yang cukup untuk membayar utang namun perlu diwaspadai adanya kecenderungan penurunan kemampuan aset di dalam menutup utang.

#### **2.2.2.3 Rasio Utang terhadap Total Aset (Total Debt to Total Assets Ratio)**

Hasil perhitungan rasio total utang terhadap total aset menunjukkan bahwa pada Tahun 2020 sebesar 2,03% dan Tahun 2021 sebesar 2,66%, dan Tahun 2022 sebesar 1,70%, dan Tahun 2023 sebesar Rp1,45%, serta Tahun 2024 sebesar 2,15%. Rasio total hutang terhadap total aset selama periode tersebut menunjukkan nilai yang relatif kecil sehingga Pemerintah Kabupaten Banggai mempunyai kemampuan untuk melunasi utang jika melakukan pinjaman kepada kreditur.

#### **2.2.2.4 Rasio Utang Terhadap Ekuitas (Total Debt to Equity Ratio)**

Hasil perhitungan rasio hutang terhadap ekuitas selama periode 2019–2023 menunjukkan bahwa Tahun 2020 sebesar 2,07%, Tahun 2021 sebesar 2,73%, Tahun 2022 sebesar 1,73%, dan Tahun 2023 sebesar 1,47%, serta Tahun 2024 sebesar 2,20%. Rasio total hutang terhadap ekuitas selama periode tersebut juga menunjukkan nilai yang relatif kecil sehingga Pemerintah Kabupaten Banggai mempunyai kemampuan untuk melunasi utang jika melakukan pinjaman kepada kreditur

#### **2.2.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu**

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Banggai selama periode 2020-2024 di laksanakan mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan selanjutnya sebagaimana telah diubah dengan Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Berdasarkan berbagai peraturan di maksud, bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu rangkaian/siklus APBD yang terintegrasi di mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Secara umum kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Banggai periode 2020-2024 adalah sebagai berikut :

### **2.2.3.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Kebijakan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2020-2024, diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan guna menjaga ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah anggaran yang memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya dan diupayakan adanya sumber-sumber pendapatan baru. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut adalah:

- a) Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
- b) Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui kegiatan yang bersifat intensifikasi dan ekstensifikasi;
- c) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota, POLRI;
- d) Meningkatkan kinerja Bank Sulteng dalam upaya peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- e) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Retribusi Daerah;
- f) Meningkatkan peran dan fungsi UPT Badan Pendapatan Daerah dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
- g) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
- h) Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah; Meningkatkan kinerja pelayanan Masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral,

pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima, dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Adapun kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

- a) Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri, Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak lainnya yang menjadi hak Pemerintah Daerah;
- b) Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan;
- c) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

#### **2.2.3.2 Pengelolaan Belanja Daerah**

Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2020-2024 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan optimal atas berbagai kebutuhan aktual pembangunan dan kebijakan efektif menuju pencapaian sasaran pembangunan yang dicirikan sinergi pembangunan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota terutama merespon prioritas Pembangunan Nasional yang secara keseluruhan dilaksanakan berdasarkan kepada anggaran berbasis kinerja. Kebijakan anggaran untuk belanja daerah diarahkan:

- a) Mengalokasikan belanja wajib/mengikat, meliputi belanja pegawai dan belanja bagi hasil;
- b) Belanja bantuan sosial dan belanja hibah, yang dapat menunjang ketercapaian target Indeks Pembangunan Manusia dan penurunan angka kemiskinan.
- c) Program Prioritas sesuai RPJMD Tahun 2020-2024;

- d) Program yang bersifat lanjutan dan sudah menjadi komitmen sebelumnya;
- e) Program baru sebagai landasan kegiatan baru;
- f) Penambahan alokasi belanja pelayanan dasar dan administrasi umum kantor (fixed cost);
- g) Mengalokasikan pembiayaan yang bersifat penting dan mendesak, seperti penanggulangan bencana;
- h) Penambahan alokasi anggaran untuk penunjang Program Nasional.

#### **2.2.4 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026-2030**

##### **2.2.4.1 Kerangka Pendanaan Periode 2025 - 2029**

Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Proyeksi anggaran merupakan proyeksi data anggaran untuk 5 (lima) tahun ke depan yang dihitung berdasarkan rata-rata pertumbuhan selama lima tahun yang lalu. Adapun proyeksi untuk lima tahun ke depan terdiri atas: proyeksi pendapatan, belanja, serta proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama. Oleh karena itu, hasil proyeksi ini, juga digunakan untuk memperkirakan kapasitas riil keuangan daerah yang sangat penting untuk melihat sejauh mana kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan publik.

Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.35**  
**Proyeksi APBD Kabupaten Banggai Tahun 2025 - 2029**

URAIAN	PROYEKSI					RATA-RATA PERTUMBUHAN
	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>PENDAPATAN</b>	<b>3,071,243,768,275.00</b>	<b>3,528,368,145,101.90</b>	<b>4,234,774,257,982.85</b>	<b>5,027,401,195,627.70</b>	<b>5,878,221,040,512.82</b>	<b>14.11</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>294,503,902,299.00</b>	<b>373,954,292,528.90</b>	<b>764,919,020,152.55</b>	<b>1,210,560,434,014.36</b>	<b>1,679,696,202,738.16</b>	<b>45.71</b>
Pendapatan Pajak Daerah	138,118,188,864.00	151,930,007,750.40	167,123,008,525.44	183,835,309,377.98	222,218,840,315.78	10.18
Pendapatan Retribusi Daerah	27,915,711,026.00	30,707,282,128.60	33,778,010,341.46	37,155,811,375.61	40,871,392,513.17	8.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan	5,714,244,284.00	56,285,668,712.40	415,483,533,954.40	826,181,399,196.40	1,236,879,264,438.40	334.35
Lain-lain PAD Yang Sah	122,755,758,125.00	135,031,333,937.50	148,534,467,331.25	163,387,914,064.38	179,726,705,470.81	8.00
<b>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</b>	<b>2,751,894,983,788.00</b>	<b>3,077,084,482,166.80</b>	<b>3,384,792,930,383.48</b>	<b>3,723,272,223,421.83</b>	<b>4,095,599,445,764.01</b>	<b>8.36</b>
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2,685,101,874,000.00	2,953,612,061,400.00	3,248,973,267,540.00	3,573,870,594,294.00	3,931,257,653,723.40	8.00
Transfer antar Daerah	66,793,109,788.00	123,472,420,766.80	135,819,662,843.48	149,401,629,127.83	164,341,792,040.61	22.97

URAIAN	PROYEKSI					RATA-RATA PERTUMBUHAN
	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA</b>	<b>24,844,882,188.00</b>	<b>77,329,370,406.20</b>	<b>85,062,307,446.82</b>	<b>93,568,538,191.50</b>	<b>102,925,392,010.65</b>	<b>48.25</b>
Lain-lain Pendapatan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- undangan	24,844,882,188.00	77,329,370,406.20	85,062,307,446.82	93,568,538,191.50	102,925,392,010.65	48.25
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3,256,416,085,349.00</b>	<b>3,524,188,145,101.90</b>	<b>4,190,176,257,982.85</b>	<b>4,927,401,195,627.69</b>	<b>5,798,221,040,512.82</b>	<b>12.48</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2,226,206,802,202.97</b>	<b>2,448,827,482,423.27</b>	<b>2,773,710,230,665.59</b>	<b>3,081,081,253,732.15</b>	<b>3,499,189,379,105.73</b>	<b>9.58</b>
Belanja Pegawai	1,122,468,605,946.00	1,234,715,466,540.60	1,378,187,013,194.66	1,546,005,714,514.13	1,750,606,285,965.54	9.41
Belanja Barang dan Jasa	1,049,701,895,008.77	1,154,672,084,509.65	1,310,139,292,960.61	1,441,153,222,256.67	1,625,268,544,482.34	9.25
Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Belanja Subsidi	404,000,000.00	444,400,000.00	488,840,000.00	537,724,000.00	591,496,400.00	8.00
Belanja Hibah	53,632,301,248.20	58,995,531,373.02	84,895,084,510.32	93,384,592,961.35	122,723,052,257.49	19.06
Belanja Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

URAIAN	PROYEKSI					RATA-RATA PERTUMBUHAN
	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>609,922,599,056.03</b>	<b>650,914,858,961.63</b>	<b>909,575,643,228.56</b>	<b>1,276,319,941,895.54</b>	<b>1,673,951,936,085.10</b>	<b>23.59</b>
Belanja Modal - Tanah	14,556,938,926.35	16,012,632,818.99	62,613,896,100.88	113,875,285,710.97	150,262,814,282.07	82.97
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	85,793,426,149.00	94,372,768,763.90	103,810,045,640.29	114,191,050,204.32	125,610,155,224.75	8.00
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	219,353,942,129.07	221,289,336,341.98	268,418,269,976.18	370,260,096,973.79	482,286,106,671.17	18.08
Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	289,313,150,851.61	318,244,465,936.77	450,068,912,530.45	645,075,803,783.49	859,583,384,161.84	25.60
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	545,141,000.00	599,655,100.00	20,659,620,610.00	28,512,317,015.13	51,363,548,716.64	694.68
Belanja Modal Aset Lainnya	360,000,000.00	396,000,000.00	4,004,898,370.76	4,405,388,207.84	4,845,927,028.62	188.27
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>10,284,301,600.00</b>	<b>11,312,731,760.00</b>	<b>12,444,004,936.00</b>	<b>30,000,000,000.00</b>	<b>30,000,000,000.00</b>	<b>32.22</b>
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>410,002,382,490.00</b>	<b>413,133,071,957.00</b>	<b>494,446,379,152.70</b>	<b>540,000,000,000.00</b>	<b>595,079,725,322.00</b>	<b>7.97</b>
Belanja Bagi Hasil	16,603,389,990.00	19,734,079,457.00	41,707,487,402.70	40,000,000,000.00	50,000,000,000.00	30.22

URAIAN	PROYEKSI					RATA-RATA PERTUMBUHAN
	2025	2026	2027	2028	2029	
Belanja Bantuan Keuangan	393,398,992,500.00	393,398,992,500.00	452,738,891,750.00	500,000,000,000.00	545,079,725,322.00	
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(185,172,317,074.00)</b>	<b>4,180,000,000.00</b>	<b>44,598,000,000.00</b>	<b>100,000,000,000.00</b>	<b>80,000,000,000.00</b>	<b>193.78</b>
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>185,172,317,074.00</b>	<b>(4,180,000,000.00)</b>	<b>(44,598,000,000.00)</b>	<b>(100,000,000,000.00)</b>	<b>(80,000,000,000.00)</b>	<b>193.78</b>
Penerimaan Pembiayaan	<b>188,972,317,074.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(0.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	(40.00)
Pengeluaran Pembiayaan	<b>3,800,000,000.00</b>	<b>4,180,000,000.00</b>	<b>44,598,000,000.00</b>	<b>100,000,000,000.00</b>	<b>80,000,000,000.00</b>	216.23
<b>SISA LEBIH/ (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN SiLPA/ (SiKPA)</b>	<b>0.00</b>	<b>(0.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

## **2.3 Permasalahan dan Isu Strategis**

Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Dengan demikian, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Sedangkan Permasalahan pembangunan daerah pada hakikatnya menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan dengan cita-cita pembangunan.

### **2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah**

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat di antisipasi/diminimalisir dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Untuk itu di perlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan pembangunan daerah.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah sangat berkaitan dengan tahapan atau rumusan dalam Bab-Bab selanjutnya

dalam penyusunan dokumen RPJMD ini, yaitu pada tahapan perumusan Isu strategis Daerah, Perumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, arah Kebijakan dan sampai pada perumusan Program Perangkat Daerah yang selanjutnya akan di jabarkan lebih lanjut ke dalam Kegiatan dan Sub kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah.

Guna memudahkan dalam perumusannya di tetapkan Kerangka Logis Permasalahan Pembangunan Daerah yang di mulai dari identifikasi masalah pokok/utama, yang akan berkaitan dengan rumusan Misi Jangka Panjang Daerah, kemudian identifikasi penyebab dari masalah pokok/utama menjadi masalah daerah, yang akan berkaitan dengan rumusan Arah Pembangunan dan sasaran Pokok Jangka Panjang Daerah, dan Identifikasi akar masalah, sebagai penyebab dari masalah yang lebih rinci yang akan berkaitan dengan rumusan arah kebijakan atau kebijakan umum jangka Panjang daerah.

**Gambar 2.68**  
**Kerangka Logis Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah**



Berdasarkan Kerangka Logis sebagaimana di atas, berikut disajikan hasil rumusan Permasalahan pembangunan daerah yang terdiri atas Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah serta Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

#### **2.3.1.1 Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, sebagaimana di uraikan pada Bab II, di rumuskan Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Banggai yang terdiri atas 6 (enam) pokok permasalahan atau masalah utama sebagai berikut:

1. Kualitas, keunggulan dan daya saing Sumber daya Manusia Kabupaten Banggai masih perlu di tingkatkan.
2. Perekonomian Daerah belum sepenuhnya tangguh dan inklusif.
3. Sarana Prasarana Dasar, konektivitas dan TIK belum memadai, layak dan merata.
4. Potensi Bencana Daerah yang cukup tinggi, serta ancaman degradasi lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai Tata Ruang
5. Masih adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah

6. Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas belum sepenuhnya terwujud.

Kesepuluh masalah pokok di atas kemudian di jabarkan menjadi masalah dan akar masalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.36 berikut :

**Tabel 2.36**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1.	Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Masih perlu di tingkatkan	1. Akses dan kualitas layanan pendidikan guna Mewujudkan Banggai Cerdas belum optimal dan masih perlu di tingkatkan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kendala geografis pada beberapa wilayah Kecamatan dan Desa, berkontribusi terhadap kelanjutan Pendidikan siswa utamanya ke jenjang SMP sederajat dan SMA sederajat.</li> <li>2. Sarana/Prasarana dan Fasilitas Pendidikan yang relatif belum memadai, baik di jenjang PAUD, SD sederajat dan SMP Sederajat serta Pendidikan Non Formal.</li> <li>3. Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar belum optimal</li> <li>4. Pengembangan kurikulum serta Keterbatasan akses internet di beberapa Kecamatan/Desa sehingga digitalisasi Pendidikan tidak optimal untuk mendukung proses belajar mengajar.</li> <li>5. Sebaran, Kualitas dan Kuantitas Tenaga pendidik dan kependidikan yang kurang dan tidak merata.</li> <li>6. Peran serta masyarakat dalam Pendidikan masih perlu di tingkatkan.</li> <li>7. Cakupan layanan perpustakaan dan Gerakan literasi masyarakat masih rendah.</li> </ol>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
		2. Kualitas Layanan Kesehatan menuju Banggai Sehat belum optimal dan masih perlu di tingkatkan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kendala geografis pada beberapa wilayah Kecamatan dan Desa, menyebabkan sulitnya akses ke fasilitas kesehatan.</li> <li>2. Sarana dan prasarana di Fasilitas Kesehatan dan Pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Luwuk belum memadai untuk mendukung Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).</li> <li>3. Ketersediaan Sumber daya manusia Kesehatan masih terbatas dan belum merata hingga kewilayah terpencil.</li> <li>4. Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan relatif belum memadai dan mencukupi.</li> <li>5. Kesadaran akan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masih rendah.</li> <li>6. Pola Asuh, Pola Makan dan ketersediaan air bersih dan sanitasi layak belum memadai sehingga menyebabkan tingginya prevalensi stunting.</li> </ol>
		3. Kurangnya Tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan pasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Pengangguran Terbuka masih cukup tinggi.</li> <li>2. Kurangnya Pelatihan kerja dan rendahnya produktivitas tenaga kerja, akibat tidak di</li> </ol>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
		kerja serta kurangnya wirausaha baru	<p>dukung oleh tersedianya sarana pelatihan kerja yang memadai.</p> <p>3. Kurangnya Diklat Vokasi untuk penyiapan tenaga kerja dan calon wirausaha baru.</p> <p>4. Lapangan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kualifikasi pencari kerja, utamanya di industri gas dan ikutannya.</p> <p>5. Pengawasan dan Perlindungan tenaga melalui Hubungan Industrial belum optimal</p> <p>6. Tumbuhnya usaha rintisan (Start up Company) kurang di fasilitasi.</p>
		4. Penanggulangan kemiskinan daerah belum di laksanakan secara terpadu dan terintegrasi	<p>1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tidak Update dan Mutakhir, sehingga program-program kesejahteraan sosial tidak tepat sasaran.</p> <p>2. Masih adanya Egoisme Sektoral atau mentalitas SILO pada Perangkat Daerah, utamanya untuk penanggulangan kemiskinan.</p> <p>3. Keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan masalah kemiskinan dan kerawanan sosial masih kurang.</p> <p>4. Program penanggulangan kemiskinan bersifat parsial dan tidak menyentuh langsung substansi masalah.</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
		5. Pengarusutamaan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pelayanan Keluarga Berencana guna mewujudkan Keluarga Sejahtera masih perlu di tingkatkan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran akan pentingnya Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi masih rendah, utamanya masyarakat di perdesaan.</li> <li>2. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak perempuan, anak serta pemberdayaan gender.</li> <li>3. Partisipasi angkatan kerja perempuan masih rendah.</li> <li>4. Belum optimalnya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.</li> <li>5. Angka perkawinan usia muda/remaja masih cukup tinggi.</li> </ol>
		6. Pemajuan dan Pelestarian Budaya Banggai, Balantak, Saluan dan Andio (Babasalan) belum di lakukan secara optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peran lembaga pendidikan dalam pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal belum optimal.</li> <li>2. Penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari masih rendah.</li> <li>3. Rendahnya apresiasi masyarakat dalam mengangkat dan menjaga nilai-nilai kebudayaan daerah.</li> <li>4. Terbatasnya akses Informasi tentang kebudayaan daerah</li> </ol>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
			5. Acara/festival budaya dan kesenian daerah masih relatif kurang. 6. Museum belum dioptimalkan.
		7. Kehidupan beragama yang harmonis, toleran dan saling menghargai antar pemeluk agama masih perlu ditingkatkan	1. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Wawasan Kebangsaan masih perlu di tingkatkan. 2. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideology dan pembauran kebangsaan serta terwujudnya ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kepercayaan.
		8. Kualitas Pemuda relatif masih rendah	1. Masih tingginya perilaku beresiko pada pemuda seperti bahaya kekerasan, penyalahgunaan NAFZA, Miras dan HIV/AIDS. 2. Ruang kreasi positif bagi pemuda dan fasilitasi wirausaha muda kreatif masih kurang 3. Peran Organisasi kepemudaan, Karang Taruna, Pramuka dan organisasi Kemahasiswaan dalam bidang sosial, ekonomi dan politik relatif masih kurang dan perlu di tingkatkan.
		9. Prestasi Olah Raga Kabupaten Banggai belum optimal	1. Pembinaan organisasi cabang olah raga prestasi oleh Pemda dan KONI masih kurang.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
			<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Sarana dan Prasarana olah raga prestasi maupun olah raga tradisional masih terbatas, kurang memadai dan tidak merata.</li> <li>3. Partisipasi masyarakat dalam pembinaan dan kegiatan olah raga masih sangat kurang.</li> <li>4. Even-even olah raga prestasi maupun tradisional masih sangat kurang.</li> </ul>
2.	Perekonomian Daerah belum sepenuhnya tangguh dan inklusif.	1. Kualitas, Koperasi dan Usaha Mikro masih rendah di barengi pertumbuhan wirausaha baru yang belum optimal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro belum melakukan modernisasi dan mengakomodasi penerapan Inovasi teknologi dan informatika, utamanya untuk distribusi dan pemasaran.</li> <li>2. Pendekatan kelompok, komunitas dan kluster dalam pengembangan koperasi dan usaha mikro belum sepenuhnya di terapkan.</li> <li>3. Kemitraan dalam pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro masih kurang, utamanya bantuan modal usaha dan Inovasi Produk.</li> <li>4. Iklim usaha UMKM belum sepenuhnya mendukung.</li> <li>5. Pengetahuan dan literasi Digital para pelaku UMKM masih terbatas.</li> </ul>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
		2. Sektor Industri Kecil Menengah dan perdagangan masih perlu di tingkatkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pasar yang tertib, bersih, indah dan nyaman masih kurang, di sertai kontribusi terhadap PAD yang masih sangat kurang.</li> <li>2. Nilai Eksport daerah masih kurang</li> <li>3. Peningkatan perlindungan konsumen melalui penerapan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang bertanda tera sah belum optimal.</li> <li>4. Akses Industri Kecil Menengah terhadap modal dan pemasaran terbatas.</li> <li>5. Belum siapnya IKM di era Digitalisasi ekonomi saat ini.</li> </ol>
		3. Produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura perlu lebih di tingkatkan untuk mewujudkan Banggai swasembada pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi lahan pertanian berkelanjutan perlu di optimalkan.</li> <li>2. Belum optimalnya dukungan sarana produksi pertanian, karena belum dapat memenuhi kebutuhan lahan pertanian seluas ± 27.778,53 Ha.</li> <li>3. Penyediaan benih/bibit belum memenuhi prinsip 5 T yaitu tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat harga.</li> <li>4. Kurangnya akses terhadap informasi pasar, sumber permodalan, teknologi, sarana dan prasarana pertanian.</li> </ol>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
			5. Masih kurangnya pemanfaatan dan penerapan teknologi pertanian. 6. Kapasitas SDM Pertanian masih rendah dan peran Kelembagaan Pertanian belum optimal.
		4. Kualitas Jaringan Irigasi sesuai kewenangan Kabupaten masih perlu di tingkatkan	1. Aksesibilitas, keberlanjutan, keamanan dan ketersediaan potensi Sumber Daya Air terbatas. 2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi partisipatif.
		5. Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan masih perlu di tingkatkan	1. Industri pengolahan hasil perkebunan masih kurang. 2. Penerapan teknologi pasca panen untuk meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan belum di terapkan secara optimal. 3. Konflik lahan industri perkebunan besar masih sering terjadi. 4. Kurangnya akses terhadap informasi pasar, sumber permodalan, teknologi, sarana dan prasarana perkebunan.
		6. Populasi dan produksi hasil peternakan masih perlu ditingkatkan guna mewujudkan Banggai swasembada daging.	1. Peternakan yang umumnya masih tradisional. 2. Jaminan ketersediaan dan kestabilan harga pakan ternak bagi petani ternak belum ada. 3. Usaha atau unit pembibitan ternak di Kabupaten Banggai masih perlu di optimalkan.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
			4. Pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, kesehatan hewan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit hewan belum optimal, di sebabkan oleh wilayah kerja yang luas tidak sebanding dengan tenaga keswan serta biaya operasional pelayanan terbatas.
		7. Belum optimalnya produksi perikanan dan hasil olahan perikanan	1. Penggunaan teknologi oleh nelayan perikanan tangkap maupun budidaya yang masih sangat sederhana dan tradisional. 2. Masih tingginya harga pakan ikan dan biaya operasional yang berakibat pada produktifitas yang rendah 3. Terbatasnya sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya dan akses terhadap teknologi perikanan. 4. Keterbatasan infrastruktur perikanan budidaya/tangkap dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan (air bersih, listrik, BBM, sistem rantai dingin, TPI, dan pelabuhan perikanan).
		8. Kesejahteraan petani, peternak dan nelayan masih rendah dan perlu ditingkatkan serta Kelembagaan petani, peternak	1. Belum adanya jaminan ketersediaan pupuk sepanjang waktu dan harga yang tetap serta berubsidi bagi kelompok tani.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
		dan nelayan yang belum berfungsi optimal.	2. Belum terlaksananya pembentukan institusi usaha agribisnis bagi kelompok tani dalam peningkatan nilai tambah produk pertanian. 3. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan pengetahuan kelompok petani/pternak/nelayan dalam menjalankan usaha peningkatan kualitas produksi pertanian/perikanan. 4. Rendahnya akses pemasaran dan permodalan bagi kelompok nelayan dan pembudidaya ikan.
		9. Belum Optimalnya Ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman serta terjangkau bagi masyarakat.	1. Terdapat Desa Rawan pangan di Kabupaten Banggai. 2. Laju alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan cukup tinggi. 3. Lahan tidur dan Lahan pekarangan di perdesaan masih belum di manfaatkan secara optimal 4. Jaminan ketersediaan pangan daerah dan kestabilan harga 5. Kesadaran yang masih rendah terhadap keanekaragaman bahan makanan pokok selain beras
		9. Pemanfaatan potensi pertambangan mineral, minyak	1. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor pertambangan perlu di bentuk/di revitalisasi.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
		dan gas bumi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah belum optimal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan industri minyak dan gas bumi untuk mendukung perekonomian daerah dan pengembangan SDM masih perlu di tingkatkan.</li> <li>3. Kontribusi industri pertambangan terhadap PAD masih rendah.</li> <li>4. Tenaga kerja lokal yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri pertambangan masih terbatas.</li> <li>5. Pemanfaatan potensi Gas untuk jaringan Gas Rumah Tangga belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Banggai.</li> </ul>
		10. Pengelolaan Pariwisata Daerah belum terintegrasi dan berkembang dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya lokasi destinasi pariwisata prioritas yang akan di tangani secara terintegrasi.</li> <li>2. Industri pariwisata/industri kreatif belum tumbuh dan berkembang dengan baik.</li> <li>3. Promosi Pariwisata masih di lakukan secara terbatas.</li> <li>4. Kelembagaan pariwisata belum berperan secara optimal</li> </ul>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
		11. Iklim Investasi dan Penanaman modal daerah masih perlu di tingkatkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana prasarana pendukung investasi di daerah terbatas.</li> <li>2. Iklim investasi yang kurang terpromosi dengan intensif</li> <li>3. Regulasi yang belum memihak kepada pelaku bisnis.</li> <li>4. Sistem pelayanan perizinan investasi yang mudah dan profesional masih perlu ditingkatkan.</li> </ol>
3.	Infrastruktur wilayah, konektivitas dan pelayanan dasar belum memadai, layak dan merata	1. Kualitas layanan Air bersih, air minum, sanitasi dan perumahan layak di perdesaan maupun perkotaan masih rendah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat 11 Lokasi Kawasan kumuh di Kabupaten Banggai, dengan luas 78,81 Ha.</li> <li>2. Masih terdapat 14,31% atau 13.095 unit Rumah Tidak layak Huni dari 91.495 Rumah di Kabupaten Banggai.</li> <li>3. Terdapat 14.156 (13,40%) Rumah Tangga yang belum memiliki rumah (Backlog) dari 105.651 Rumah Tangga di Kabupaten Banggai.</li> <li>4. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum belum memadai.</li> <li>5. Jaringan drainase perkotaan luwuk belum tertata dengan baik.</li> </ol>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
			6. Pengelolaan sampah perkotaan belum berbasis masyarakat melalui penerapan prinsip <i>reduce</i> , <i>reuse</i> dan <i>recycle</i> .
		2. Kualitas dan konektivitas jaringan jalan, jembatan dan sarana prasarana transportasi masih rendah dan tidak merata.	1. Kapasitas Fiskal Pemerintah Daerah untuk membiayai infrastruktur transportasi/konektivitas terbatas. 2. Presentasi jaringan jalan dalam kondisi Rusak masih sangat besar. 3. Moda transportasi masih terbatas, belum memadai, terpadu dan nyaman. 4. Fasilitas keselamatan lalu lintas jalan belum memadai 5. Sarana dan prasarana transportasi Pelabuhan rakyat tidak memadai. 6. Kontribusi sektor perhubungan terhadap peningkatan PAD belum optimal.
		3. Infrastruktur pelayanan publik/ perkantoran pemerintah belum memadai	1. Terdapat beberapa Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang belum memiliki kantor definif dan memadai. 2. Tertib bangunan Gedung melalui PBG perlu di tingkatkan.
		4. Pemanfatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam berbagi bidang,	1. Masih terdapat Desa yang Blank Spot.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
		utamanya untuk mendukung ekonomi digital/transformasi digital dan E-Government belum optimal.	2. Jaringan komunikasi dan informatika berteknologi terkini masih belum tersedia secara merata. 3. Belum adanya Master Plan pengembangan Teknologi dan Informatika Kabupaten Banggai. 4. Kompetensi Aparatur di bidang TIK masih terbatas 5. Literasi TIK masyarakat ( <i>digital Society</i> ) masih rendah.
4.	Potensi Bencana Daerah yang cukup tinggi, serta ancaman degradasi lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai Tata Ruang	1. Koordinasi dan integrasi Pemda dan Masyarakat dalam penanggulangan Bencana Daerah belum optimal.	1. Rencana Penanggulangan Bencana Daerah dan kajian Resiko Bencana Kabupaten belum di susun dan di integrasikan dalam dokumen perencanaan daerah. 2. Manajemen bencana berbasis masyarakat belum terlaksana dengan baik, terutama untuk sistem logistik pangan dan jaring pengaman sosial untuk masyarakat terdampak bencana baik alam maupun non alam. 3. Data Bencana terpadu tidak tersedia. 4. Sistem Peringatan Dini Bencana belum tersedia. 5. Penyiapan Desa Tangguh Bencana/Tangguh lawan Covid 19 sangat kurang.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
			6. Sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran belum memadai.
		2. Upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup serta dampak perubahan iklim belum terintegrasi dan terlaksana dengan baik	1. Kelembagaan dan penegakan hukum di bidang SDA dan Lingkungan Hidup masih belum konsisten. 2. Peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup masih rendah. 3. Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca tidak di implementasikan dengan optimal. 4. Pengelolaan sampah perkotaan belum berbasis masyarakat dengan pendekatan <i>Reduce, Reuse</i> dan <i>Recycle</i> .
		3. RTRW belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang untuk pembangunan daerah	1. Pelanggaran Pemanfaatan ruang cukup tinggi. 2. Data dan informasi geospasial belum tersedia. 3. Penyediaan RTH publik dari target 20% belum terpenuhi. 4. RTRW Kabupaten Banggai tahun 2012-2032 perlu di revisi dan dijabarkan kedalam rencana rincinya. 5. Terbatasnya akses informasi penataan ruang.
5.	Masih adanya kesenjangan	1. Rencana pemekaran daerah, kecamatan dan desa belum terealisasi sesuai yang di	1. Belum ada desain besar untuk pemekaran wilayah di Kabupaten Banggai.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
	pembangunan antar wilayah	harapkan untuk mengatasi kesenjangan wilayah	2. Belum ada kajian pemekaran untuk Kecamatan dan Desa di Kabupaten Banggai.
		2. Pemenuhan layanan dasar, infrastruktur, kemandirian ekonomi dan pemberdayaan Masyarakat untuk mencapai Desa Maju dan Mandiri belum optimal.	1. Pembangunan perdesaan berbasis kawasan dan potensi lokal desa belum optimal yang di indikasikan dengan Kerjasama antar desa masih kurang. 2. Jumlah BUMDes yang terbentuk 265 Dari 291 Desa. BUMDes sehat/aktif 137 atau 47,7%, yang lebih banyak bergerak di bidang simpan pinjam. 3. Masih kurangnya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dalam meningkatkan usaha produktif masyarakat perdesaan. 4. Masih banyak lahan produktif yang terlantar/pekarangan yang tidak di manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, gizi dan ekonomi rumah tangga perdesaan.
		3. Fungsi perkotaan Luwuk sebagai Kota layak huni	1. Penerapan konsep Water Front city dalam penataan Kota Luwuk belum di rencanakan dengan baik. 2. Pemenuhan dan optimalisasi fungsi ekologis ruang terbuka hijau publik Kawasan perkotaan Luwuk belum optimal.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
			3. Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan Luwuk belum optimal 4. jaringan jalan alternatif dalam kota luwuk (ring Road atas dan bawah) untuk mengatasi kemacetan kota. 5. Penertiban parkir dalam kota luwuk belum optimal
6.	Implementasi Reformasi Birokrasi belum optimal	1. Kualitas Pelayanan publik berbasis teknologi informasi belum memuaskan	1. Sistem, mekanisme dan prosedur serta standar pelayanan publik. 2. Kualitas dan Kuantitas aparatur pelayanan publik. 3. Sarana dan Prasarana pendukung pelayanan publik masih perlu di tingkatkan, agar lebih memadai.
		2. Indeks Inovasi Daerah Cukup Baik, namun perlu di Tingkatkan	1. Nilai indeks inovasi Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020, mengalami penurunan di banding tahun 2018 dan 2019. 2. Implementasi Satu Inovasi per Perangkat Daerah per tahun belum berjalan optimal.
		3. Kinerja/kualitas perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah belum optimal	1. Data dan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah belum memadai, karena Banggai Satu Data belum di terapkan. 2. Belum adanya Fungsional perencana dan Fungsional peneliti.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
			<p>3. Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi rencana pembangunan belum optimal.</p> <p>4. Hasil penelitian dan pengembangan daerah belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan.</p> <p>5. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) belum berjalan dengan optimal.</p> <p>6. Partisipasi masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media masa dalam pembangunan masih rendah.</p>
		4. Kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan	<p>1. Opini WTP selama 9 Tahun berturut-turut.</p> <p>2. Transparansi/keterbukaan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah kepada publik belum di laksanakan secara maksimal.</p> <p>3. Intgerasi <i>E-Planing</i> dan <i>E-Budgeting</i> melalui aplikasi SIPD belum optimal.</p> <p>4. Masih adanya temuan BPK berkaitan dengan kesalahan administrasi pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>5. Pengamanan asset daerah belum optimal</p>
		5. Belum Maksimalnya Penggalan Potensi-Pendapatan Asli Daerah (PAD).	1. Pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat belum maksimal.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
			<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah masih rendah.</li> <li>3. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah belum optimal dilakukan.</li> <li>4. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah belum maksimal dilaksanakan.</li> <li>5. Pemberian insentif/ bonus dan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang berhasil mencapai atau melampaui target, dan menjatuhkan sanksi kepada Perangkat Daerah yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara optimal dalam satu tahun anggaran belum sepenuhnya dilaksanakan.</li> <li>6. Penerapan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Berbasis Teknologi Informasi belum sepenuhnya dilaksanakan.</li> </ul>
		6. Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Pemda sudah baik, namun masih perlu di tingkatkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai LHE SAKIP = 81,74 atau kategori A. perlu di pertahankan dan di tingkatkan implementasinya.</li> <li>2. Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP pada Level 3, perlu di pertahankan dan di tingkatkan.</li> </ul>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
			<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Nilai <i>Monitoring Centre Prevention (MCP)</i> pada kategori baik</li> <li>4. Fungsi Pengawasan masyarakat yang dilaksanakan DPRD belum berjalan optimal dan sinergis dengan tindak lanjutnya.</li> </ul>
		7. Kualitas Produk Hukum Daerah Belum optimal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas program pembentukan Peraturan Daerah dan produk hukum daerah lainnya masih rendah.</li> <li>2. Penegakan pelaksanaan produk hukum daerah belum optimal karena keterbatasan personil Pol PP, yang di tunjukan oleh rasio Pol PP per 10.000 penduduk baru belum sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Banggai.</li> <li>3. Masih tingginya kasus pelanggaran Perda Oleh Masyarakat.</li> </ul>
		8. Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah belum tepat fungsi dan tepat ukuran dan Tata Laksana yang belum berbasis TIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) rendah</li> <li>2. Tingkat Kematangan Organisasi relatif baik</li> <li>3. Peralihan Jabatan Fungsional dan penyesuaian terhadap Nomenklatur Program dan kegiatan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019.</li> <li>4. Penataan Arsip Daerah belum maksimal</li> </ul>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
		9. Kualitas pelaksanaan Otonomi Daerah dan Otonomi Desa belum sesuai yang di harapkan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD masih pada kategori sedang atau cukup baik.</li> <li>2. Belum di laksanakan secara optimal pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.</li> <li>3. Kapasitas Aparat dan Kelembagaan Pemerintah Desa masih rendah.</li> <li>4. Persandian Daerah belum berfungsi secara optimal.</li> <li>5. Penataan Arsip Daerah belum optimal.</li> </ol>
		10. Manajemen Sumber Daya Aparatur yang belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesejahteraan dan profesionalisme ASN belum optimal.</li> <li>2. Kapasitas SDM Aparatur masih rendah.</li> <li>3. Sistem Merit belum sepenuhnya di terapkan.</li> </ol>

### **2.3.1.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.**

Dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah, tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan atau terkait dengan tujuan serta sasaran pembangunan daerah (RPJMD) dalam suatu periode. Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan dimaksud tidak diselenggarakan pemerintah daerah. Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai di masa-masa lalu atau memenuhi standar layanan bagi masyarakat.

Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib (Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar) serta urusan pilihan. Permasalahan masing-masing urusan dimaksud digambarkan sebagai berikut :

#### **A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.**

Gambaran permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut :

##### **1. Pendidikan**

- a. Indeks SPM Pendidikan Tahun 2023 telah mencapai mencapai 92,68%, Indikator kemampuan literasi dan kemampuan Numerasi pada kategori Sedang dan Kurang.
- b. Wajib belajar 9 tahun belum tuntas, yang di tunjukan oleh angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2023 yang baru mencapai 8,63 Tahun. Baru sebanyak 61,72% penduduk usia

15 tahun keatas berhasil menyelesaikan wajib belajar 9 Tahun.

- c. Angka Putus Sekolah di Kabupaten Banggai relative masih tinggi
- d. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana prasarana Pendidikan dasar.
- e. Kualitas dan kuantitas guru masih rendah dan distribusinya belum merata.
- f. Masih rendahnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya Pendidikan.
- g. Masih rendahnya akses Masyarakat terhadap layanan Pendidikan, utamanya berkaitan dengan kondisi geografis.
- h. Pembiayaan Pendidikan melalui APBD masih perlu di tingkatkan.

## **2. Kesehatan**

- a. Indikator-indikator utama sektor Kesehatan menunjukan peningkatan, tetapi perlu optimalisasi lebih lanjut.
- b. Capaian SPM Kesehatan cukup baik, tetapi perlu peningkatan terutama pada pelayanan Kesehatan hipertensi, diabetes melitus, tuberculosis dan HIV/Aids.
- c. Jumlah SDM/Tenaga Kesehatan sesuai standar belum terpenuhi secara merata di fasilitas Kesehatan
- d. Jumlah sarana Baik RS, Puskesmas, Pustu, Poskesdes sesuai standar belum terpenuhi di beberapa fasilitas kesehatan.
- e. Ketersediaan Alkes, Obat dan BMHP di sarana faskes belum terpenuhi secara maksimal.
- f. Peningkatan kasus morbiditas penyakit menular hingga emerging wabah serta peralihan kasus degerenatif atau penyakit tidak menular pada populasi masyarakat yang semakin tinggi.

- g. Pembiayaan Kesehatan belum sepenuhnya maksimal dalam Upaya mendukung pelaksanaan Pembangunan Kesehatan serta indikator standar pelayanan minimal bidang kesehatan.
- h. Mutu manajemen pelayanan Kesehatan di unit faskes belum sepenuhnya maksimal karena masih terdapat Puskesmas dengan status akreditasi dasar.

### **3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- a. Tingkat kemantapan jalan belum optimal, jalan dalam kondisi mantap baru mencapai kurang lebih 63%. Masih terdapat beberapa ruas jalan yang belum terhubung dan masih banyak jembatan penghubung yang belum terbangun. Serta Kapasitas Ruas jalan yang perlu di tingkatkan, terutama Kawasan perkotaan.
- b. Di bidang sumber daya air, masalah yang di hadapi adalah Belum tersedianya jaringan pengukur data hidroklimatologi untuk DAS yang berada di wilayah Kabupaten Banggai, Ketersediaan air baku di wilayah perkotaan dan perdesaan belum memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauannya dan Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara fasilitas infrastruktur yang terbangun dan pemeliharaan lingkungan DAS.
- c. Di bidang air bersih/air minum masalahnya adalah Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan SPAM, Belum optimalnya ketersediaan data skema jaringan perpipaan existing baik SPAM IKK Perkotaan maupun SPAM IKK Perdesaan, dan Jaringan perpipaan existing telah melampaui umur teknis.
- d. Beberapa wilayah Perkotaan Luwuk belum terlayani PDAM secara optimal, yang antara lain di sebabkan oleh kapasitas Instalasi Pengolahan Air, sumber air dan jaringan instalasi

perpipaan dalam Kota Luwuk yang telah berkurang keandalannya.

- e. Kapasitas fiskal daerah untuk pembiayaan infrastruktur terbatas.
- f. Belum optimalnya fungsi jaringan irigasi. Kondisi saluran primer dan saluran sekunder masih perlu di tingkatkan kemantapannya.
- g. Belum selesainya revisi RTRW Kabupaten Banggai dan rencana rincinya.

#### **4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

- a. Masih terdapat Rumah Tidak layak huni yang tersebar di wilayah Kabupaten Banggai.
- b. Adanya Rumah Tangga yang belum memiliki Rumah (Backlog perumahan).
- c. Lahan untuk pembangunan perumahan sangat mahal yang mengakibatkan Sulitnya kepemilikan rumah murah.
- d. Terdapat perumahan yang berada di lokasi Terlarang (Rawan Bencana, perumahan berada di lokasi yang bukan peruntukannya) 38 Kawasan.
- e. Masih terdapat kawasan Perumahan dan Permukiman kumuh di wilayah kabupaten Banggai seluas 71,80 Ha
- f. Perkembangan Perumahan dan Permukiman tidak dibarengi dengan pengembangan Prasarana, sarana dan utilitas.

#### **5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

- a. Rasio Satuan Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk belum sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Banggai.
- b. Masih tingginya kejadian kriminal di wilayah Kabupaten Banggai.
- c. Masih terjadinya kasus pelanggaran perda oleh masyarakat.

## 6. Sosial

- a. Perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi PMKS belum di laksanakan secara optimal.
- b. Belum adanya shelter atau tempat penampungan sementara bagi PMKS terlantar khususnya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
- c. Keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan masalah kerawanan sosial masih kurang.
- d. Data mutakhir dan update untuk penanggulangan kemiskinan.

### B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.

Gambaran permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagaimana tabel 2.37 berikut :

**Tabel 2.37**  
**Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai**  
**Terkait Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan**  
**dengan Pelayanan Dasar**

	URUSAN	PERMASALAHAN
1.	Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Jumlah angkatan kerja belum sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja. Hal ini terlihat dari angka Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,12% di Tahun 2023, serta Angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) atau presentasi Angkatan Kerja terhadap penduduk usia kerja mencapai 71,70% di tahun 2023.</li><li>b. Lapangan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kualifikasi pencari kerja, utamanya di industri gas dan ikutannya.</li><li>c. Pengawasan dan Perlindungan tenaga kerja belum optimal</li><li>d. Tumbuhnya usaha rintisan (Start up Company) masih kurang di fasilitasi.</li><li>e. Kurangnya Diklat Vokasi untuk penyiapan tenaga kerja dan calon wirausaha baru.</li></ol>
2	Pemberdayaan Perempuan dan	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Angka perkawinan usia muda/remaja masih cukup tinggi.</li></ol>

	URUSAN	PERMASALAHAN
	Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Jumlah keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I masih cukup besar</li> <li>c. Kabupaten Layak Anak dan Sekolah Ramah Anak belum bisa di wujudkan.</li> <li>d. Partisipasi angkatan kerja perempuan masih rendah.</li> <li>e. Terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak perempuan, anak serta pemberdayaan gender.</li> <li>f. Belum optimalnya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.</li> </ul>
3.	Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jaminan ketersediaan pangan daerah dan kestabilan harga</li> <li>b. Kesadaran yang masih rendah terhadap keanekaragaman bahan makanan pokok selain beras</li> <li>c. Pola pangan harapan masyarakat masih belum mencerminkan kondisi yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).</li> <li>d. Terdapat 8 Desa Rawan pangan di Kabupaten Banggai</li> <li>e. Lahan tidur dan Lahan pekarangan di perdesaan masih belum di manfaatkan secara optimal</li> </ul>
4.	Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masih rendahnya kepemilikan sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat dan pemerintah daerah</li> <li>b. Penguasaan tanah oleh pemerintah daerah bagi pembangunan dan fasilitas umum masih kurang</li> </ul>
5.	Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya ancaman kerusakan lingkungan hidup oleh berbagai aktivitas</li> <li>b. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup</li> <li>c. Kelembagaan dan penegakan hukum di bidang SDA dan Lingkungan Hidup masih belum konsisten.</li> <li>d. Peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup masih rendah.</li> <li>e. Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca tidak di implementasikan dengan optimal.</li> <li>f. Pengelolaan sampah perkotaan belum berbasis masyarakat dengan pendekatan ekonomi sirkular.</li> </ul>
6.	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepemilikan terhadap dokumen kependudukan. Masih terdapat ± 5% penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP. Sedangkan kepemilikan akte kelahiran per 1.000 penduduk telah mencapai 77,85%.</li> <li>b. Belum maksimalnya pelayanan administrasi kependudukan yang menjangkau wilayah kecamatan dan perdesaan terpencil.</li> </ul>
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah BUMDes yang terbentuk 167 Dari 291 Desa. 16 BUMDes terbit sertifikat Badan Hukum, dan 32 BUMDes dalam proses perbaikan.</li> <li>b. Status desa Mandiri dan Maju berdasarkan Indeks Desa Membangun 2023 baru mencapai 62,20% atau 181 Desa. Sedangkan untuk kategori desa berkembang sejumlah 108 Desa dan masih terdapat desa tertinggal sejumlah 2 Desa.</li> </ul>

	URUSAN	PERMASALAHAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pelaksanaan dan penyelenggaraan otonomi desa belum optimal</li> <li>d. Delegasi kewenangan ke pemerintah desa belum optimal</li> <li>e. Kemampuan aparat desa dan anggota BPD terbatas.</li> <li>f. Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa belum optimal.</li> </ul>
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rasio akseptor KB cukup tinggi yaitu 0.70%, perlu di pertahankan.</li> <li>b. Tenaga penyuluh KB yang tidak cukup. Tenaga penyuluh KB terdiri dari P3K dan ASN Pusat berjumlah 35 Orang, tenaga kontrak 24 orang.</li> </ul>
9.	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum adanya sistem angkutan umum publik dalam kota dan perdesaan yang terpadu dan nyaman</li> <li>b. Masih rendahnya frekuensi kapal berlabuh di pelabuhan Bunta dan Pagimana</li> <li>c. Fasilitas keselamatan lalu lintas jalan berupa rambu, pagar pengaman dan marka jalan masih kurang.</li> <li>d. Belum terwujudnya fasilitas dermaga kecil yang aman dan nyaman</li> <li>e. Optimalisasi pemanfaatan terminal oleh jasa angkutan umum di seluruh kecamatan,</li> <li>f. Kondisi Pelabuhan Rakyat Luwuk kurang memadai.</li> </ul>
10.	Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keterbukaan informasi publik belum di laksanakan</li> <li>b. Mekanisme <i>chek and balances</i> di kalangan pers.</li> <li>c. Belum terbentuknya Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) pada semua Kecamatan</li> <li>d. Masih terdapat Kecamatan dan 42 Desa yang Blank Spot.</li> <li>e. Kompetensi Aparatur di bidang TIK masih terbatas</li> <li>f. Literasi TIK masyarakat (digital Society) masih rendah.</li> </ul>
11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rendahnya jumlah koperasi aktif yaitu tahun 2023 154 Unit, Tidak aktif = 39 Unit, Koperasi yang melaksanakan RAT = 55 Unit, Koperasi yang memiliki sertifikat NIK = 95 Unit.</li> <li>b. Daya saing UMKM masih rendah, era Digitalisasi Ekonomi. Jumlah UMKM tahun 2023 = 10.366</li> <li>c. Pembinaan manajemen perkoperasian dan UKM</li> <li>d. Akses permodalan dan pemasaran koperasi dan UKM masih terbatas.</li> <li>e. Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro belum melakukan modernisasi dan mengakomodasi penerapan Inovasi teknologi dan informatika.</li> <li>f. Pendekatan kelompok, komunitas dan kluster dalam pengembangan koperasi dan usaha mikro belum sepenuhnya di terapkan.</li> <li>g. Kemitraan dalam pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro masih kurang.</li> </ul>

	URUSAN	PERMASALAHAN
		h. Iklim usaha UMKM perlu di kembangkan
12.	Penanaman Modal	a. Sistem pelayanan perizinan investasi yang mudah dan profesional masih perlu ditingkatkan, menuju digitalisasi pelayanan. b. Sarana prasarana pendukung investasi di daerah terbatas. c. Iklim investasi yang kurang terpromosi dengan intensif. d. Kurang optimalnya kerjasama dan promosi penanaman modal. e. Masih kurangnya peta potensi digital.
13.	Kepemudaan dan Olah Raga	a. Pembinaan organisasi cabang olah raga prestasi oleh Pemda dan KONI perlu di optimalkan. b. Sarana dan Prasarana olah raga prestasi maupun olah raga tradisional masih terbatas dan kurang merata. c. Partisipasi masyarakat dalam pembinaan dan kegiatan olah raga masih sangat kurang. d. Even-even olah raga prestasi maupun tradisional perlu ditingkatkan. e. Masih tingginya perilaku beresiko pada pemuda seperti bahaya kekerasan, penyalahgunaan NAPZA, Miras dan HIV/AIDS. f. Ruang kreasi positif bagi pemuda dan fasilitasi wirausaha muda kreatif masih kurang g. Peran Organisasi kepemudaan, Karang Taruna, Pramuka dan organisasi Kemahasiswaan dalam bidang sosial, ekonomi dan politik relative perlu di tingkatkan.
14.	Statistik	a. Belum optimalnya dukungan PD dalam penyediaan data statistik sektoral. b. Masih banyak jenis data statistik yang belum tersedia sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna data. c. Banggai Satu Data masih perlu di optimalkan.
15.	Persandian	a. Rendahnya fasilitas, sarana dan prasarana persandian daerah b. Belum terlaksananya pengukuran/penilaian system keamanan informasi. c. Keterbatasan SDM.
16.	Kebudayaan	a. Peran lembaga pendidikan dalam pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal belum optimal. b. Penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari masih rendah. c. Rendahnya apresiasi masyarakat dalam mengangkat dan menjaga nilai-nilai kebudayaan daerah. d. Terbatasnya akses Informasi tentang kebudayaan daerah e. Acara/festival budaya dan kesenian daerah perlu ditingkatkan. f. Museum daerah belum berfungsi secara optimal.

	URUSAN	PERMASALAHAN
17.	Perpustakaan	a. Keterbatasan sarana dan prasarana perpustakaan daerah b. Koleksi buku di perpustakaan terbatas c. Minat baca masyarakat rendah d. Kebijakan untuk mendukung gerakan gemar membaca. e. Masih belum optimalnya penggunaan perpustakaan daerah oleh masyarakat umum
18.	kearsipan	a. Keterbatasan sarana prasarana kearsipan daerah. b. Layanan informasi kearsipan c. Tenaga arsiparis terbatas.

### C. Urusan Pilihan

Gambaran permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pemerintahan pilihan adalah sebagaimana tabel 2.38 berikut :

**Tabel 2.38**  
**Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai**  
**Terkait Urusan Pemerintahan Pilihan**

	URUSAN	PERMASALAHAN
1.	Kelautan dan Perikanan	a. Nilai tambah produksi kelautan dan perikanan. b. Penggunaan teknologi oleh nelayan perikanan tangkap maupun budidaya yang masih sangat sederhana dan tradisional. c. Masih tingginya harga pakan ikan dan biaya operasional yang berakibat pada produktifitas yang rendah d. Terbatasnya sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya dan akses terhadap teknologi perikanan. e. Keterbatasan infrastruktur perikanan budidaya/tangkap dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan (air bersih, listrik, BBM, sistem rantai dingin, TPI, dan pelabuhan perikanan). f. Rendahnya akses permodalan bagi kelompok nelayan dan pembudidaya ikan
2.	Pariwisata	a. Kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB belum optimal. b. Industri pariwisata/industri kreatif masih perlu dikembangkan. c. Promosi Pariwisata perlu dioptimalkan. d. Kelembagaan pariwisata belum berperan secara optimal.

	URUSAN	PERMASALAHAN
		e. Belum berkembangnya pariwisata berbasis lingkungan (Ecotourism), pariwisata berbasis sejarah dan budaya serta berbasis religi dan olah raga.
3.	Pertanian	a. Alih Fungsi Lahan pertanian Tanaman Pangan. b. Belum optimalnya dukungan sarana produksi pertanian. Penyediaan benih/bibit belum memenuhi prinsip 5 T yaitu tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat harga. c. Kurangnya akses terhadap informasi pasar, sumber permodalan, teknologi, sarana dan prasarana pertanian. d. Masih kurangnya pemanfaatan dan penerapan teknologi pertanian. e. Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pertanian perlu dioptimalkan. f. Jaminan ketersediaan pupuk sepanjang waktu dan harga yang tetap dan berubsidi bagi kelompok tani. g. Pembentukan institusi usaha agribisnis bagi kelompok tani dalam peningkatan nilai tambah produk pertanian h. Peternakan yang umumnya masih tradisional i. Jaminan ketersediaan dan kestabilan harga pakan ternak bagi petani ternak. j. Keberadaan usaha atau unit pembibitan ternak di Kabupaten Banggai perlu di tingkatkan perannya. k. Pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, kesehatan hewan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit hewan belum optimal. l. Nilai Tambah produksi hasil peternakan
5.	Kehutanan	a. Masih maraknya penebangan liar walaupun dalam skala yang kecil b. Belum optimalnya pemanfaatan hutan untuk tujuan lain selain hasil kayu, misalnya ekowisata c. Belum terkelolanya penataan taman hutan rakyat
4.	Perdagangan	a. Sarana dan prasarana perdagangan seperti pasar dan pertokoan/kios bagi pedagang kecil belum mampu mendukung peningkatan volume perdagangan b. Revitalisasi pasar c. Peningkatan perlindungan konsumen melalui penerapan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang bertanda tera sah belum optimal.
7.	Perindustrian	a. Belum luasnya jangkauan pembinaan bagi pelaku industri kecil dan rumah tangga. b. Pola pemasaran hasil industri yang masih skala lokal c. Upaya penciptaan iklim industri yang menarik investasi masuk ke daerah. d. Belum optimalnya antisipasi terhadap transformasi digital.

	URUSAN	PERMASALAHAN
8.	Transmigrasi	a. Tidak adanya program transmigrasi lokal b. Belum optimalnya program penyiapan kawasan permukiman transmigrasi baru.

**D. Unsur Pendukung, Unsur Penunjang, Unsur Pengawasan, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum.**

Permasalahan Pembangunan berkaitan dengan Unsur Pendukung, Unsur Penunjang, Unsur Pengawasan, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum, adalah sebagai berikut:

**1. Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD**

- a. Implementasi Penyederhanaan Birokrasi dengan sistem kerja baru berbasis fungsional, serta tata Laksana Birokrasi Pemerintahan daerah melalui pengembangan/optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- b. Reformasi Produk hukum daerah.
- c. Pengembangan Inovasi Daerah.
- d. Kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD perlu di tingkatkan.

**2. Perencanaan**

- a. Implementasi Satu Data Banggai untuk mendukung perencanaan Pembangunan.
- b. Partisipasi masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media masa dalam pembangunan dengan pendekatan PENTAHHELIX perlu dioptimalkan.

**3. Keuangan**

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaa daerah masih perlu di tingkatkan.
- b. Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah melalui SIPD.
- c. Transparansi Pengelolaan Keuangan daerah.

d. Pengamanan Aset Daerah belum optimal.

**4. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**

- a. Transformasi SDM Aparatur melalui Core Values ASN yaitu BERAHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif serta Kolaboratif) dan Employer Branding ASN yaitu “Bangga Melayani Bangsa”.
- b. Implementasi *Meryt System* perlu dioptimalkan.
- c. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Teknis dan Fungsional perlu dioptimalkan.

**5. Penelitian dan Pengembangan**

- a. Indeks Inovasi Daerah perlu di tingkatkan.
- b. Hasil penelitian dan pengembangan daerah belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan.

**6. Pengawasan**

- a. Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja perlu di pertahankan dan di tingkatkan.
- b. Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP perlu di pertahankan dan di tingkatkan.

**7. Kecamatan**

Delegasi/Pelimpahan Kewenangan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan perlu di optimalkan.

**8. Kesatuan Bangsa dan Politik**

- a. Penerapan moderasi beragama melalui Forum Komunikasi Umat Beragama belum optimal.
- b. Pemahaman wawasan Kebangsaan dan Idiologi Pancasila perlu dioptimalkan lagi.

### **2.3.2 Isu Strategis Daerah**

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Mendasari Permendagri 86 Tahun 2017, penentuan isu strategis sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani; dan
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional.

#### **2.3.2.1 Isu Strategis Global/International**

Mengacu pada Dokumen RPJPN 2025-2045, terdapat sepuluh isu/tantangan/megatrend global yang akan di hadapi Indonesia menuju tahun 2045. Perubahan Global tersebut merupakan perubahan transformatif berskala besar, berjangka waktu panjang dan bersifat sangat masif, terutama di sebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi, termasuk kecerdasan buatan.

**Gambar 2.69**  
**Megatrend Global 2045**



### **A. Perkembangan Demografi Global**

Perkembangan demografi global merupakan factor penting yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Menurut data World Population Prospects (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa Pada Tahun 2050. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan, energi dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan (life-span) yang semakin panjang.

Dalam demografi skala mikro, perubahan struktur dan bentuk keluarga, perkembangan teknologi digital, serta penetrasi global memengaruhi kualitas keluarga. Mobilitas penduduk dan pergeseran

ideologi berisiko memunculkan struktur dan bentuk keluarga yang berbeda. Semakin maraknya fenomena tidak memiliki anak (childfree), menunda pernikahan, dan perilaku kehidupan sesama jenis telah menyebabkan turunnya angka kelahiran. Sementara itu, perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi di negara berkembang. Akses terhadap media digital yang tidak terkendali berisiko meningkatkan kekerasan perdagangan manusia, adiksi terhadap pornografi, perilaku menyimpang, dan Perilaku berisiko anggota keluarga. Hal-hal tersebut menjadi tantangan bagi keluarga dalam memaknai dan menjalankan fungsinya secara optimal

## **B. Geopolitik dan Geoekonomi**

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi tatanan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara-negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal ini berpotensi meningkatkan ketegangan antarnegara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan.

Kebijakan makroekonomi yang kredibel dan berdasarkan prinsip kehati-hatian telah menjadi penopang pertumbuhan ekonomi negara berkembang selama ini dan unenjadi salah satu Pilar utama di masa mendatang. Investasi jangka panjang dalam memperbaiki sumber daya manusia dan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Reformasi dan perbaikan iklim usaha akan mendukung terbangunnya struktur perekonomian yang berdaya saing dan berkualitas.

Dengan kebijakan yang tepat, negara berkembang mempunyai peluang mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi dari negara maju. Negara berkembang memiliki struktur demografi yang menguntungkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum, pertumbuhan sektor industri manufaktur akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja di negara berkembang.

### **C. Perkembangan Teknologi**

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti Internet of Things (IOT), blockchain Hyper Connection, Artificial Intelligence (AI), Distributed Ledger Technology (DLT), Production Lifecycle Management; Robotic Process Automation (RPA), Edge Computing, Auto Robotic System, 3D, dan Future Technologies.

Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Hal ini perlu didorong agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi secara optimal, yang diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi.

Pandemi COVID-19 telah mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor. Selama pandemi, banyak pelaku usaha seperti UMKM dan koperasi mengembangkan digitalisasi usaha untuk menjaga keberlangsungan proses bisnis, Digitalisasi usaha dapat mendorong peningkatan produktivitas serta pasar usaha. Meskipun demikian, tingkat pemanfaatan teknologi digital dalam operasional usaha masih terbatas dan belum merata karena faktor sumber daya manusia, permodalan, dan infrastruktur penunjang. Faktor penghambat pemanfaatan teknologi dan digital perlu diatasi karena penggunaan teknologi dan digital dapat mendorong efektivitas dan efisiensi usaha sehingga dapat meningkatkan produktivitas.

Teknologi yang berkembang di masa depan akan mempengaruhi sektor manufaktur, sektor pendidikan, perkembangan teknologi juga menyebabkan jenis pekerjaan tergantikan oleh teknologi. Berdampak pada sektor yang tidak mampu beradaptasi, berdampak besar pada cara kerja pemerintah.

#### **D. Peningkatan Urbanisasi Dunia**

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Menurut UN DESA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara emerging economies.

Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara emerging economies yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Pada banyak kota Asia dan Afrika, sekitar 25-30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai. Urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyerak ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi

kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa. Dari Sisi ekonomi, terjadi perubahan aktivitas penduduk ke arah dominasi sektor industri, jasa, dan perdagangan. Tren ini mendorong perubahan paradigma pengelolaan perkotaan ke arah kompak (compact) melalui efisiensi layanan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat memacu inovasi di kawasan perkotaan, khususnya dalam mengatasi masalah yang timbul sehari-hari. Pendekatan teknologi pintar dan pengelolaan informasi berbasis mahadata ke depan akan menjadi kunci bagi upaya kawasan perkotaan untuk menjadi yang terdepan. Di Sisi lain, dampak pandemi COVID-19, di samping menimbulkan kerugian jiwa dan material, juga menjadi pemicu perkembangan teknologi yang memudahkan proses kolaborasi lintas ruang dan waktu. Tantangan terhadap pengarusutamaan pendekatan hijau juga menjadi peluang bagi penerapan kebijakan yang bukan hanya humanis, melainkan juga ramah lingkungan. Kota yang mampu beradaptasi terhadap transformasi pasca pandemi dan pengarusutamaan pendekatan hijau tersebut akan mampu menarik SDM kompetitif untuk menetap dan berkarya.

#### **E. Konstelasi Perdagangan Global**

Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat kawasan Asia-Afrika. erekonomian Negara berkembang terutama negara E7 diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan dominasi dari negara maju yang tergabung dalam G7. Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan intra-Asia yang menunjukkan tren yang berlanjut terutama dari Tiongkok, India dan negara-negara ASEAN. Selain itu, peningkatan pendapatan serta proyeksi peningkatan demografi penduduk di Kawasan Afrika, Nigeria dan beberapa negara di Afrika Selatan, mendorong perdagangan

internasional bergerak ke kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggi.

Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi kecepatan perubahan teknologi dan digital, dan keberlanjutan yang terus berkembang. Perkembangan teknologi digital mendorong kompleksitas dan diversifikasi produksi. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengurangi biaya transaksi dan mempercepat perubahan dalam struktur perdagangan. Negara yang dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan digital, memanfaatkan hilirisasi sumber daya alam dan mineral untuk memproduksi produk yang lebih kompleks dan berkelanjutan, berpeluang semakin memiliki peran penting dalam rantai nilai perdagangan global.

#### **F. Tata Kelola Keuangan Global**

Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dari sisi belanja negara, pergeseran komposisi demografi yang menuju aging society pada tahun 2045 akan menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun. Dari sisi pembiayaan anggaran, Tren ke depan akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter global yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal.

#### **G. Pertumbuhan Kelas Menengah (*middle class*)**

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia. Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan

konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru (new life style). Jenis pekerjaan baru yang diperkirakan berkembang di masa mendatang antara lain, pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, pekerjaan melalui virtual-metaverse, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi. Pekerjaan baru ini akan mempercepat dan mempermudah proses bisnis, tetapi di Sisi lain berpotensi meningkatkan mobilitas pekerja antar sektor dan antarjenis pekerjaan.

#### **H. Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam**

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA di antaranya air, pangan, dan energi, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat persaingan SDA global ke depan akan bergantung pada ketatnya aktor permintaan dan penawaran, di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

#### **I. Perubahan Iklim**

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga krisis global The Triple Planetary Crisis) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan.

Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global. Pelaksanaan jalur pembangunan yang lebih hijau melalui penerapan ekonomi hijau dan pembangunan

rendah karbon merupakan arah pembangunan global di masa mendatang. Stimulus hijau dan paket-paket stimulus lainnya menjadi tren kebijakan global ke depan. Selain itu pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di dunia. Teknologi energi terbarukan akan menjadi sangat kompetitif di masa mendatang. Skala keekonomian tenaga surya dan bayu akan semakin menurun dan murah ke depannya.

#### **J. Pemanfaatan Luar Angkasa (*space economy*)**

Tren eksplorasi antariksa semakin meningkat selama satu dekade terakhir. Antariksa dipandang sebagai warisan bersama umat manusia (*commons heritage of humankind*), yaitu suatu ruang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Ketetapan bahwa antariksa tidak tunduk pada kepemilikan suatu negara tertentu, telah mendorong banyak negara mengembangkan industri antariksa. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia di bumi. Proses menghubungkan bumi dengan luar angkasa kemudian memunculkan tiga isu utama, yaitu ekonomi antariksa (*space economy*), kelestarian antariksa (*space sustainability*), dan keamanan antariksa (*space security*).

#### **2.3.2.2 Isu Strategis Nasional**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, terdapat 7 (tujuh) tantangan pembangunan lima tahun ke depan yang menjadi perhatian utama, yaitu:

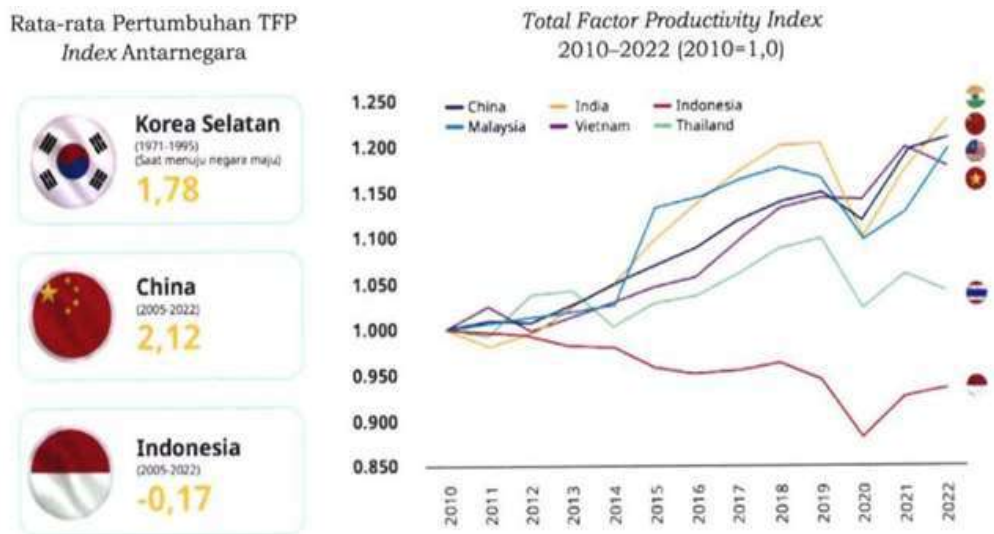
##### **A. Rendahnya Produktivitas**

Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Mengacu pada rilis laporan Asian Productivity Organization (2024), rata-rata produktivitas Indonesia yang tecermin dari Local Factor Productivity selama tahun 2015-2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin

dari periode sebelumnya tahun 2010-2015 (-0,9 persen ke -0,3 persen). Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,78 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode 1971-1995 dan Tiongkok sebesar 2,12 selama kurun waktu 2005-2022. Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Rendahnya Produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan daycare berkualitas yang terjangkau.

Produktivitas yang rendah juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat. Selama tahun 2005-2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama tahun 2010-2015. Pertumbuhan ekonomi meningkat kembali mencapai rata-rata 5,0 persen selama tahun 2015-2019 dan 5,05 persen pada tahun 2023.

**Gambar 2.70**  
**Rata-rata Pertumbuhan *Total Factor Productivity Index***



Sumber: Asian Productivity Organization (2024), diolah

Selain itu, produktivitas yang rendah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial. Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sulit tumbuh lebih cepat dan stagnan dalam rentang 5,0 persen.

#### **B. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan Asian Productivity Organization (2024 |, produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto per tenaga kerja tahun 2022 relatif rendah, yaitu sebesar US\$ 28.600 per pekerja. Angka tersebut masih tertinggal jauh di bawah Amerika Serikat US\$149.100 per pekerja dan di bawah rata-rata kawasan Association of Southeast Asian Nations sebesar US\$ 0,200 per pekerja. Tantangan peningkatan Produktivitas tenaga kerja di antaranya disumbang oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dari capaian rata-rata nilai Programme for International Student Assessment siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada tahun 2022. Angka

tersebut menurun dibanding tahun 2018 dengan nilai rata-rata 382 serta masih tertinggal dibandingkan siswa dari negara-negara The Organization for Economic Cooperation and Development sebesar 488,33.

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 menunjukkan sebesar 52,32 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (sekolah menengah pertama/ madrasah tsanawiyah sederajat ke bawah), sedangkan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan menengah (sekolah menengah atas/ sekolah menengah kejuruan sederajat) sebesar 34,82 persen, dan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan tinggi sebesar 12,86 persen. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

### **C. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat**

Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019-2024, jumlahnya meningkat sebesar 8,65 juta orang sehingga mencapai 137,5 juta orang atau sekitar 49,2 persen dari total populasi. Di sisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat sebanyak 12,72 juta orang dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, angka ini mencapai 67,69 juta atau 24,33 persen

dari total populasi (Badan Pusat statistik, 2024). Meskipun jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, populasi kelas menengah justru mengalami penurunan. Risiko pergeseran status ini, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja. Pada Agustus 2024, tercatat 46.420 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (Kementerian Ketenagakerjaan, 2024) dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat.

Salah satu faktor yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah rendahnya daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari deflasi yang terjadi pada komponen harga yang diatur pemerintah dan harga bergejolak. Menurut laporan lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2024), komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi dari 1,68 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,40 persen pada September 2024. Sementara itu, komponen harga bergejolak mengalami deflasi yang signifikan, dari 3,04 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,43 persen pada September 2024. Daya beli masyarakat yang rendah berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri. Dengan permintaan yang lemah, industri tidak dapat memenuhi biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha.

#### **D. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya

ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

#### **E. Krisis Lingkungan**

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (triple planetary crisis) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan sekitar 50-75 persen dari populasi global berpotensi terdampak kondisi iklim yang mengancam jiwa pada tahun 2100 (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2022). Kerusakan ekonomi akibat risiko bencana diperkirakan sebesar Rp.22,8 triliun per tahun (Kementerian Keuangan, 2023), sementara jumlah kematian selama 10 tahun terakhir mencapai 9.176 orang (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024).

Sekitar satu juta spesies tumbuhan dan hewan menghadapi ancaman kepunahan (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019). Sementara itu, risiko polusi udara merupakan penyebab penyakit dan kematian dini terbesar di dunia, serta menyebabkan hingga 4,2 juta kematian setiap tahun (United Nations Framework Convention on Climate Change, 2022). Indonesia merupakan negara dengan tingkat polusi tertinggi di Asia Tenggara dengan konsentrasi particulate mater 2,5 (World Health organization, 2021). Sekitar 70 persen dari 20 ribu sumber air minum rumah tangga yang diuji tercemar (Badan Pusat Statistik, 2022). Pada tahun 2020, sebanyak 40,3 persen timbulan sampah merupakan sampah makanan dan diproyeksikan akan menghasilkan 344

kg/kapita/tahun pada tahun 2045 (Proyeksi Business-As-Usual, Report Food and Loss Waste in Indonesia, 2021). Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi udara juga secara langsung akan menyebabkan krisis sumber daya alam.

Ekstraksi sumber daya alam di dunia meningkat tiga kali lipat dalam lima dekade terakhir dengan pertumbuhan lebih dari 2,3 persen per tahun. Indonesia sebagai negara dengan tingkat ekstraksi pertambangan terbesar ke-8 di dunia (United Nations Environment Programme, 2023), turut berkontribusi dalam krisis tersebut. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2022 menunjukkan masih terdapat 2.741 lokasi tambang ilegal yang berpotensi merusak lingkungan. Pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi serta kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya dan (energi, air, dan pangan) di tingkat global berpotensi mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah.

Risiko Triple Planetary Crisis berimplikasi pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang dan tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler. Untuk itu, penyelarasan aspek pertumbuhan ekonomi dan lingkungan menjadi hal yang perlu diprioritaskan.

#### **F. Geopolitik dan Geoekonomi**

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Perkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai seluruh kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah

eskalasi persaingan antar negara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan antar negara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan. Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia telah menarik perhatian banyak pihak. Tentu saja hal tersebut berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antarnegara, baik yang berada di dalam maupun luar kawasan.

Selanjutnya, ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Ekonomi dunia diproyeksikan tumbuh pada 3,2 persen selama 2024 dan 2025 (International Monetary Fund, 2024). Sementara itu, inovasi

global diperkirakan menurun secara bertahap dari 6,8 persen pada 2023 menjadi 5,9 persen pada 2024 dan 4,5 persen pada 2025 (International Monetary Fund, 2024). Di sisi lain, prospek perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan jalur perdagangan, tecermin dari tingginya tingkat suku bunga global serta ketidakpastian akibat gejolak geopolitik.

Dalam jangka menengah, situasi suku bunga global yang relatif tinggi diperkirakan akan tetap berlanjut terlepas dari pemangkasan yang dilakukan oleh The Federal Reserve. Peningkatan laju inflasi mendorong bank sentral di seluruh dunia untuk menaikkan suku bunga acuan secara bersamaan sejak semester kedua tahun 2023, seperti Bank of England dan The Federal Reserve. Kenaikan suku bunga acuan tersebut juga dilakukan di negara-negara anggota G20, seperti Brasil, India, dan Indonesia. Kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan secara bersamaan oleh bank bank sentral di seluruh dunia akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpotensi memicu resesi ekonomi global.

Faktor gejolak geopolitik, tekanan inflasi, suku bunga yang tinggi, penguatan dolar Amerika Serikat, pergeseran belanja konsumen dari barang ke jasa, penurunan harga komoditas, serta tekanan harga pangan akibat kenaikan biaya input pertanian dan pertumbuhan populasi global, serta perubahan iklim juga menyebabkan perlambatan aktivitas perdagangan global pada tahun 2023 dan menjadi tantangan berikutnya. Hal ini tercermin dari penurunan Battic Dry Index Level menjadi rata-rata indeks sebesar 1.393,56 dibandingkan rata-rata indeks 1.930,86 di tahun 2022. Adapun perlambatan aktivitas perdagangan pada tahun 2023 utamanya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perlambatan volume perdagangan

pada tahun setelah mengalami pertumbuhan pada tahun 2021 dan 2022. Dengan gambaran tersebut, tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, baik di dalam negeri maupun internasional serta membutuhkan arah kebijakan yang solid untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

#### **G. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah**

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan Pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi.

Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi/ Corruption Perception Index Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022 dan stagnan di angka yang sama pada 2023 (peringkat 115 dari 180 negara). Adapun pada indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia, meski mengalami tren Perbaikan pada periode 2019-2022, namun capaian tersebut sedikit mengalami tantangan pada tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan risiko dalam pencapaian pemberantasan korupsi. Selanjutnya, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang

dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

#### **2.3.2.3 Isu Provinsi Sulawesi Tengah**

Sesuai rancangan awal RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045, isu-isu strategis Sulawesi Tengah mencakup hal-hal antara lain:

##### **A. Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah Masih Tinggi**

Kesenjangan ekonomi antar wilayah di Sulawesi Tengah masih merupakan tantangan penting pembangunan di masa-masa mendatang. Pada kondisi saat ini, kesenjangan ekonomi antar wilayah di Sulawesi Tengah dipandang relatif masih cukup tinggi, khususnya kesenjangan pembangunan antara wilayah-wilayah pada kabupaten di daratan Pulau Sulawesi Tengah dengan wilayah-wilayah kabupaten yang memiliki daerah kepulauan, pegunungan dan pedalaman. Selain itu, kabupaten-kabupaten sebagai penghasil bahan tambang dan gas alam memiliki kontribusi pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang mengandalkan komoditas pertanian sebagai pemicu pertumbuhan ekonominya. Bahkan pada kurun waktu 10 tahun terakhir kontribusi industri pengolahan sumber hasil tambang dan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian mendominasi dalam memberikan andil tingginya pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah.

Isu kesenjangan ekonomi antarwilayah sangat terkait dengan pemerataan pembangunan, dimana pemerataan pembangunan dapat dilihat dari komparasi antara kecepatan pembangunan diantara satu kabupaten dengan yang lainnya, misalnya: jumlah kawasan pengembangan ekonomi, jumlah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, pembangunan jaringan infrastruktur jalan, pembangunan pelabuhan dan bandara serta infrastruktur lainnya.

Ketimpangan ekonomi mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat, karena kesenjangan ekonomi antarwilayah yaitu adanya perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Perbedaan ini yang menyebabkan tingkat pembangunan dan distribusi pendapatan di setiap wilayah berbeda-beda, sehingga menimbulkan adanya gap atau jurang kesejahteraan di beberapa wilayah Sulawesi Tengah. Perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah kabupaten membuat kemampuan kabupaten dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Pemerataan pembangunan adalah sangat penting untuk dilakukan pada jangka 20 tahun ke depan untuk mendorong pemerataan pendapatan masyarakat yang selanjutnya akan memberikan dampak positif pada mengecilnya gap antara kelompok Masyarakat.

Upaya pemerintah daerah Sulawesi Tengah dalam mengurangi ketimpangan-ketimpangan tersebut diantaranya dengan menerapkan kebijakan fiskal daerah yang sehat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah daerah untuk mengarahkan ekonomi melalui pengeluaran dan pendapatan bersumber pajak daerah. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah daerah dapat mempengaruhi: (i) variable variabel permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi; (ii) pola persebaran sumber daya dan (iii) distribusi pendapatan. Melalui kebijakan fiskal daerah, pemerintah daerah Sulawesi Tengah dapat meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja, membuka peluang investasi daerah dan dapat memberikan andil terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional.

#### **B. Produktivitas Sektor Unggulan Daerah Masih Rendah**

Sulawesi tengah memiliki beberapa komoditas unggulan daerah dari sub sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, pertambangan, perikanan dan kelautan seperti: padi, jagung, kakao,

kelapa dalam, sapi potong, rotan, getah pinus, nikel, gas alam, ikan tuna dan rumput laut. Sampai saat ini, produktivitas sektor unggulan daerah dianggap masih rendah karena nilai tambah produk yang belum memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat Sulawesi Tengah, meskipun persentase tenaga kerja dan profesi di sektor petani, pekebun, penambang dan nelayan memiliki persentase terbesar dibandingkan profesi lainnya.

Tingkat produktifitas sektor unggulan yang rendah disebabkan oleh proporsi tenaga kerja yang besar di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, pertambangan, perikanan dan kelautan cenderung memiliki tingkat pengetahuan dan keahlian yang rendah sehingga akses petani/pekebun/nelayan terhadap kemampuan pengelolaan dan aksesibilitas terhadap faktor produksi terutama lahan, peralatan dan modal adalah sangat minim yang selanjutnya tingkat pengembalian dari keuntungan usaha akan menjadi rendah dan cenderung penduduk pada profesi sektor-sektor unggulan memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi.

Oleh karena itu, komoditas sektor unggulan harus memiliki kriteria tertentu sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah, diantaranya yaitu (i) komoditas unggulan harus mampu menjadi penggerak utama pembangunan perekonomian. Artinya, komoditas unggulan dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan produksi, pendapatan, maupun pengeluaran; (ii) komoditas unggulan mempunyai keterkaitan dari hulu sampai hilir dan memiliki keterkaitan yang III-18 kuat dengan sesama komoditas unggulan maupun komoditas lainnya; (iii) seharusnya komoditas unggulan mampu bersaing dengan produk sejenis dari wilayah lain di pasar nasional dan pasar internasional, baik dalam harga produk, biaya produksi, kualitas pelayanan, maupun aspek-aspek lainnya; (iv) komoditas unggulan memiliki

status teknologi yang terus meningkat, terutama melalui inovasi teknologi; dan (v) arah pengembangan komoditas unggulan berorientasi pada kelestarian sumber daya dan lingkungan.

### **C. Nilai Tambah Sektor Pariwisata Masih Rendah**

Sulawesi Tengah memiliki keanekaragaman wisata yang meliputi wisata Bahari, wisata alam, wisata budaya dan Wisata Geopark yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Isu strategis kedepannya yaitu bagaimana meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap peningkatan ekonomi daerah melalui nilai tambah pariwisata yang saling terkait satu sama lainnya. Kondisi saat ini, pariwisata yang ditawarkan belum memiliki hubungan obyek wisata yang saling terkait dan mendukung antara satu dengan lainnya, misalnya wisata Bahari yang ditawarkan belum dilengkapi dengan tersedianya sarana dan prasarana pendukung seperti: bandara dan pelabuhan yang memadai, hotel dan cottage, restaurant dan kuliner lokal serta aksesibilitas jalan yang memadai.

Kondisi obyek wisata yang tidak berdiri sendiri atau wisata yang dapat menggerakkan pusat-pusat perekonomian lainnya maka akan membukan lapangan kerja baru bagi masyarakat lainnya, kondisi inilah yang dimaksudkan sebagai nilai tambah. Sudah saatnya, pariwisata Sulawesi Tengah mempromosikan paket wisata bernilai tambah. Sulawesi Tengah tidak hanya sekedar melakukan strategi business as usual atau hanya menjadi trend followers tetapi keanekaragaman budaya, bahasa, kuliner, dan alam yang dimiliki dapat mengantarkan Sulawesi Tengah menjadi pusat pariwisata nasional bahkan dunia.

Kedepannya isu pembangunan kepariwisataan di Sulawesi Tengah harus diikuti dengan kegiatan mempertahankan kualitas lingkungan (carrying capacity), meningkatkan kualitas tata kelola destinasi, meningkatkan pelayanan pariwisata yang prima, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pariwisata, membuka

aksesibilitas udara, darat, dan laut, membuka peluang investasi sektor pariwisata, dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana khususnya di daerah-daerah wisata.

Upaya peningkatan pariwisata yang berkualitas ditunjukkan dengan peningkatan nilai tambah yang dapat diterima oleh Sulawesi Tengah atau masyarakat setempat, peningkatan nilai devisa melalui peningkatan lama tinggal dan belanja para wisatawan, peningkatan kualitas destinasi, kesiapan industri dan masyarakat, serta kapasitas sumber daya manusia pariwisata. Penerimaan nilai tambah dipersiapkan dengan peningkatan daya saing dan membangun ketahanan sektor pariwisata, termasuk melalui diversifikasi aktivitas ekonomi dalam rantai pasok pariwisata, perbaikan lingkungan usaha mikro, kecil, dan menengah yang kondusif dan berkenambungan serta pembangunan citra pariwisata Sulawesi Tengah yang berkualitas.

#### **D. Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah masih rendah**

Aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di Sulawesi Tengah masih menjadi salah satu isu strategis. Kondisi geografis Sulawesi Tengah berupa kepulauan, perbukitan, pedalaman dan hutan membuat sulit dalam penataan aksesibilitas dan konektivitas atau jaringan penghubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Aksesibilitas yang rendah menyebabkan sulitnya suatu daerah untuk dijangkau sehingga terjadi perlambatan pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, muncul berbagai permasalahan klasik yang ditemui daerah dan masyarakat, seperti tingginya daerah rawan pangan, harga barang-barang pokok tinggi, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang tidak maksimal, kemampuan digitalisasi rendah, pembangunan tidak merata serta kondisi keamanan daerah yang rentan terhadap ancaman. Demikian juga dengan konektivitas yang rendah akan menyebabkan pemerataan pembangunan yang tidak merata karena terhambat pada terbatasnya tata kelola jaringan

penghubung antara wilayah-wilayah yang minus ekonomi dengan sentra-sentra produksi atau pusat-pusat ekonomi.

Penguatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah merupakan salah satu strategi yang ditempuh dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan maka diperlukan tercapainya kondisi aksesibilitas dan konektivitas yang ideal sehingga dapat mendukung perkembangan wilayah dan pemerataan pembangunan dapat tercapai.

Pengembangan wilayah pedesaan di Sulawesi Tengah masih memerlukan dukungan aksesibilitas yaitu kemudahan atau keterjangkauan oleh wilayah lain atau keterjangkauan pedesaan terhadap wilayah sekitarnya. Jika aksesibilitas terbangun maka akan membuka peluang besar untuk potensi pengembangan wilayahnya. Adapun konektivitas dapat diartikan sebagai keberadaan aksesibilitas yang mampu mempermudah jangkauan antar wilayah yang berarti akses terhadap keanekaragaman informasi yang tersedia dalam skala global yang mendukung pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah. Indikasi yang akan diwujudkan pada 20 tahun mendatang yaitu tersedianya jaringan jalan antar daerah baik Kondisi Jalan maupun Jenis Jalan yang mendukung dalam mengakses wilayah selanjutnya akan tersedia tersedianya sistem jaringan lainnya seperti: jaringan listrik, telepon seluler, internet dan lainnya.

Upaya yang hendak dilakukan dalam rangka isu strategis tersebut, yaitu: pertama, memaksimalkan pertumbuhan melalui kesatuan kawasan, bukan keseragaman (*inclusive development*) dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; kedua, memperluas pertumbuhan melalui konektivitas wilayah-wilayah melalui inter-moda *supply chain system* yang menghubungkan hinterland dan yang tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan serta ketiga, mencapai pertumbuhan inklusif dengan

menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam mendapatkan manfaat pembangunan.

#### **E. Infrastruktur dan Literasi Digital Masih Rendah**

Ketersediaan infrastruktur dan literasi (kemampuan penguasaan) digital di Sulawesi Tengah, masih dianggap rendah dikarenakan masih banyaknya daerah di kabupaten/kota yang masih ber status ‘blank spot’. Hal yang paling prioritas yaitu tersedianya infrastruktur digital yang menjangkau hingga daerahdaerah pedesaan di kepulauan, pegunungan, pedalaman dan area hutan. Biaya pengadaan infrastruktur adalah tergolong mahal sehingga diperlukan langkah awal berupa perencanaan yang baik, terarah dan terukur.

Literasi digital sangat penting dalam era digital saat ini dan di kemudian hari karena teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari dan menjadi alat yang penting dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, bisnis, dan komunikasi. Kemampuan literasi digital yang baik akan membantu seseorang untuk beradaptasi dengan perubahan yang terus-menerus dalam dunia teknologi dan meningkatkan kesempatan untuk sukses dalam bidang yang terkait dengan TIK.

Saat ini, isu infrastruktur dan digital di Sulawesi Tengah dikategorikan rendah karena masih kurangnya akses ke perangkat teknologi dan kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan teknologi terutama bagi kaum milenial. Selain itu, masih banyak masyarakat yang kurang memahami manfaat dan cara menggunakan teknologi digital, sehingga tidak tertarik untuk meningkatkan kemampuan. Pemanfaatan teknologi informasi teknologi juga belum sepenuhnya, seperti rendahnya kemampuan masyarakat untuk terhindar dari korban penipuan dan berita hoaks di platform daring yang tidak terlepas dari masih rendahnya literasi keamanan digital warga sehingga diperlukan upaya lebih masif untuk meningkatkannya.

Pihak pemerintah daerah telah melakukan kolaborasi dengan pihak swasta untuk meningkatkan literasi digital di Sulawesi Tengah melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, namun masih diperlukan upaya yang lebih besar untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh.

#### **F. Produktivitas dan Kualitas SDM/Tenaga Kerja Masih Rendah**

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Indikator ketenagakerjaan di suatu wilayah dapat diketahui dengan seberapa besar penduduk yang aktif secara ekonomi sebagai pekerja, seberapa besar tingkat pengangguran dan kondisi lainnya. Pada umumnya isu-isu ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah seperti: rasio angkatan kerja dan lapangan kerja tidak sebanding, produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing rendah, serta tingkat upah masih rendah. Tenaga kerja yang berkualitas akan sangat menentukan produk yang dihasilkan.

Pembangunan ekonomi di Sulawesi Tengah sangat dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antar pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Saat ini dengan paradigma menempatkan penduduk sebagai subyek pembangunan, maka dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi sebagai tenaga kerja.

Kapasitas sumber daya manusia dan tenaga kerja sangat penting dalam rangka melaksanakan Revolusi Industri 5.0. Saat ini tenaga kerja Sulawesi Tengah belum terserap dengan baik oleh

lapangan pekerjaan yang tersedia di Sulawesi Tengah terutama lapangan pekerjaan dengan skala besar atau sektor-sektor formal dikarenakan kualitas SDM dan pekerja yang perlu ditingkatkan. Kedepannya diperlukan upaya pemerintah daerah untuk memberikan stimulan berupa penyiapan wadah untuk meningkatkan skill dan kemampuan baik pekerja yang akan bekerja di sektor-sektor formal maupun sektor informal selanjutnya menyiapkan sekolah-sekolah kejuruan yang sesuai pemetaan kebutuhan tenaga kerja dengan berfokus pada peningkatan sisi softskill disamping kemampuan sisi akademis.

#### **G. Kontribusi UMKM dan Koperasi Masih Kecil**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi merupakan salah satu pengungkit tumbuhnya perekonomian yang dilihat dari seberapa besar kontribusinya terhadap PDRB daerah. UMKM dan koperasi memiliki skala perekonomian yang berbasis kerakyatan dan dapat menjadi critical engine atau pengungkit bagi tumbuhnya perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja.

Perlambatan scalling up UMKM dan koperasi terhambat dari susah aksesibilitas permodalan dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya bukan bank. Isu kedepannya terkaitnya UMKM yaitu kontribusi UMKM terhadap peningkatan nilai ekspor terutama ekspor komoditas bahan jadi bukan mentah sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha dan meningkatkan kontribusi pajak daerah. UMKM dapat memberikan kontribusi besar terhadap pengurangan tingkat pengangguran di Sulawesi Tengah. Dengan semakin banyaknya keterlibatan tenaga kerja pada UMKM akan membantu mengurangi jumlah pengangguran.

Pemerintah daerah Sulawesi Tengah untuk masa-masa mendatang akan berpihak dan fokus kepada para pelaku UMKM agar mudah mendapatkan kegiatan pemberdayaan UMKM, baik dari sisi permodalan maupun dari sisi pengembangan kapasitas usaha. Sektor

UMKM yang terbukti mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang besar juga merupakan solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran. Tren positif ini yang perlu terus dijaga pertumbuhannya agar sektor UMKM dalam skala yang besar mampu mengatasi masalah pengangguran secara lokal maupun nasional.

Pada saat ini perkembangan koperasi di Sulawesi Tengah masih kurang mendapat perhatian karena koperasi menunjukkan kinerja yang kurang dan citra yang lebih baik dari sebelumnya. Situasi ini merupakan salah satu stimulan bahwa komitmen pemerintah Sulawesi Tengah harus lebih ditingkatkan dalam pembangunan dan pengembangan koperasi. Prospek pengembangan koperasi di masa depan adalah sangat prospektif, dengan syarat bahwa koperasi harus memiliki identitas. Dimana koperasi harus mempraktekkan prinsip-prinsip koperasi dalam organisasi dan bisnis. Koperasi sebagai badan usaha, organisasi dan kegiatan usaha harus didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi.

Di masa-masa mendatang koperasi dijadikan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, penyedia terbesar lapangan kerja, berperan penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan Masyarakat, menciptakan pasar baru dan sumber inovasi serta berkontribusi dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sangat strategis dalam perekonomian Indonesia, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi daerah Sulawesi Tengah di masa depan.

#### **H. IPTEK dan Riset Masih Lemah**

Perkembangan kehidupan masyarakat di masa mendatang ditunjukkan dengan semakin cepatnya perubahan dalam segala bidang kehidupan, semua itu diakibatkan efek globalisasi serta perkembangan teknologi informasi yang sangat akseleratif. Negara-negara dengan tingkat kapabilitas teknologi informasi yang tinggi akan

memiliki daya inovasi dan daya saing yang sangat besar yang sanggup menentukan arah perkembangan ekonomi dalam skala global. Pengembangan Iptek dan riset di Sulawesi Tengah dirasakan masih sangat minim, terlihat dari aplikasi penerapan teknologi dan berbasis riset yang masih kurang dalam pengelolaan bidang-bidang produksi seperti sektor pertanian, perikanan dan kehutanan.

Dengan kondisi dunia yang telah berubah sedemikian cepat dan dengan hadirnya revolusi industri 5.0 yang ditandai dengan adanya kemajuan teknologi AI (Artificial Intelligence), ICT (Information Communication Technology), IoT (Internet of Things), Biotechnology dan Driverless Vehicles, maka sudah saatnya proses transformasi ini segera dapat direspon oleh daerah dan dilaksanakan melalui kebijakan strategis nasional dan daerah dalam bidang iptek dan pendidikan tinggi. Hal pokok dalam mendukung Indonesia 5.0, bagi daerah Sulawesi Tengah adalah mempercepat pembangunan iptek dan riset di daerah. Oleh karena itu peran riset iptek dan riset harus segera ditingkatkan dengan kebijakan pengarusutamaan (mainstreaming) riset iptek daerah melalui perencanaan yang terintegrasi secara nyata dan konsisten dengan dunia industri.

Penerapan Iptek, Riset dan inovasi menjadi kunci bagi daerah untuk tumbuh menjadi provinsi maju dengan daya saing tinggi. Oleh karena itu, ekosistem kebijakan berbasis Iptek, Riset dan inovasi harus terus ditumbuhkan. Selain itu, pengembangannya pun patut dijadikan prioritas pembangunan daerah oleh pengambil kebijakan.

Isu-isu yang terkait Iptek dan Riset yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu menjadi penggerak daya saing daerah, kontribusi teknologi tinggi terhadap ekspor manufaktur juga masih rendah, sumber daya Iptek yang meliputi pendanaan, jumlah dan kualitas peneliti dan perekayasa, hingga tingkat produktivitas Iptek yang berkaitan dengan paten dan publikasi ilmiah juga masih belum optimal.

Untuk menjawab isu-isu diatas, perlu disusun strategi yang tepat, yaitu: pertama, adopsi dan penerapan Iptek. Kedua, peningkatan kemampuan dan kemandirian Iptek. Ketiga, pengembangan teknologi berbasis maritim. Keempat, pengembangan dana inovasi. Kelima, pelembagaan dan kerjasama model pentahelix, dan keenam, pengembangan Iptek berbasis budaya. Olehnya diperlukan penguatan kemitraan diantara pemerintah daerah, dunia industry dan perguruan tinggi. Hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh para akademisi dan peneliti di perguruan tinggi dapat diaplikasikan oleh industri dan dikembangkan menjadi produk komersial untuk kepentingan pasar dan bisnis.

#### **I. Pembangunan Berkelanjutan belum berjalan dengan baik**

Pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Tengah dinilai belum berjalan baik, dimana pembangunan masih terfokus utama pada pencapaian keuntungan ekonomi dan belum sepenuhnya memperhatikan keberlangsungan atau pelestarian lingkungan. Pembangunan berkelanjutan merupakan strategi untuk pengembangan model baru yang memberikan jaminan bagi perbaikan mutu hidup manusia dalam arti yang sesungguhnya sekaligus melestarikan daya hidup dan keanekaragaman spesies di bumi. Yang dijadikan tujuan pada model ini, yaitu pembangunan yang memenuhi syarat-syarat keuntungan ekonomi tetapi juga memperhatikan keberlanjutannya.

Implementasi pembangunan berkelanjutan memiliki hubungan yang terkait dengan pola-pola kerja pemerintah daerah. Konsep Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan berwawasan jangka panjang, yang meliputi jangka waktu antargenerasi dan berupaya menyediakan sumber daya yang cukup dan lingkungan yang sehat sehingga dapat mendukung kehidupan terutama untuk menuju Generasi Emas 2045.

Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah telah berkomitmen mendukung pengembangan Sustainable Development Goals (SDGs) hingga tahun 2030, dan komitmen itu antara lain diwujudkan melalui program dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Menengah dan Panjang pada periode-periode sebelumnya, namun implementasinya masih belum bisa terwujud sepenuhnya. Isu-isu yang terkait pembangunan berkelanjutan di daerah Sulawesi Tengah seperti: penghapusan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan kota yang berkelanjutan, antisipasi perubahan iklim, dan perlindungan laut dan kemaritiman.

**J. Kawasan Perdesaan belum Optimal di Kembangan menjadi daerah penyangga.**

Kehidupan masyarakat perkotaan atau ibu kota provinsi harus ditopang dengan daerah-daerah pinggiran (peripheral) disekitarnya agar kondisi pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Aspek daerah penyangga diperlukan karena daerah inti (perkotaan) memiliki jumlah penduduk yang besar disertai aktivitas ekonomi yang beranekaragam. Daerah penyangga memiliki kriteria, seperti ketersediaan pangan strategis (padi, jagung dan ubi), hortikultura, hasil kebun dan ternak serta hasil perikanan yang melimpah, kondisi hutan primer yang baik, memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) dan kondisi alam sebagai penyedia jasa wisata.

Desa berperan sebagai daerah penyangga, hanya saja untuk konteks Sulawesi Tengah pedesaan belum optimal berperan sebagai daerah penyangga bahkan kecenderungan desa dipandang sebagai daerah minus yang tidak layak menopang kehidupan manusia di era modern ini. Olehnya itu, model pengembangan pedesaan diawali dengan model pemberdayaan masyarakat desanya yang diharapkan bisa berperan sebagai prime mover dalam memberikan kontribusi input produksi terhadap daerah yang disanggahnya.

Kedepannya, strategi yang digunakan menjadikan desa-desa dalam suatu kawasan yang berperan secara tematik, seperti: pembangunan desa konservasi, desa mandiri dan swasembada pangan, desa lumbung pangan, desa ramah wisata dan lainnya. Maksud utama dari pembangunan desa dengan model kawasan tematik adalah memberikan peluang dan kesempatan masyarakatnya untuk berperan secara sendiri dalam menentukan nasib pembangunan desanya melalui kegiatan yang partisipatif, terkelola dengan baik serta berbasis SDA lokal.

**K. Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) belum memberikan dampak optimal terhadap Penurunan Kemiskinan.**

Dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi daerah yang juga untuk menopang ekonomi nasional, diperlukan peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategis. Kawasan tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pengembangan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bertujuan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata dan perdagangan sehingga dapat meningkatkan lapangan pekerjaan. Terbukanya lapangan pekerjaan akan berimbas pada meningkatnya jumlah tenaga kerja dan mendorong pendapatan masyarakat meningkat sehingga kemiskinan menurun.

Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dibangun di Sulawesi Tengah, selama ini belum memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Beberapa penyebabnya seperti: pertama, komoditas yang diekspor melalui KIP atau KEK dominan masih dalam bentuk mentah,

seperti: kakao, kelapa dalam, kopi dan cengkeh, ikan beku dan lainnya sehingga belum memberikan nilai tambah (add value) bagi petani dan pengolah; kedua, letak atau lokasi KIP atau KEK terhitung jauh dengan sentrasentra produksi pertanian dan pangan sehingga memerlukan biaya angkutan yang dapat mengurangi keuntungan dari pelaku usaha dan petani; ketiga, sasaran pasar yang belum jelas serta peran dari off-taker yang belum sepenuhnya menguntungkan petani; keempat, komoditas yang dihasilkan belum memenuhi kriteria kualitas, kuantitas dan kontinuitas.

Harapan dikemudian hari KIP dan KEK ini difungsikan sebagaimana mestinya untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Sehingga pengembangan KIP dan KEK dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta meningkatkan daya saing daerah.

#### **L. Tata Kelola Pemerintahan belum Optimal**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) dilakukan Reformasi birokrasi sebagai langkah awal. Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah upaya untuk membangun pemerintahan yang lebih berdaya guna dalam melaksanakan pembangunan daerah. Birokrasi pemerintah daerah dapat diibaratkan sebagai mesin penggerak pembangunan dan pelayanan publik. Sehingga, untuk memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat, diperlukan birokrasi yang transparan, akuntabel, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Isu-isu tata kelola pemerintahan yang berfokus pada tata kelola pemerintahan yang baik yaitu berupaya optimal untuk mewujudkan aspek-aspek pembentuk zona integritas. Aspek-aspek tersebut meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan,

dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta mendorong pengelolaan pemerintahan yang berbasis elektronik.

Aspek manajemen perubahan memiliki tujuan untuk mengubah pola pikir dan budaya kerja individu untuk menjadi lebih berintegritas. Aspek Penataan Tata Laksana menitikberatkan pada efektivitas dan efisiensi sistem dalam layanan, prosedur kerja dibuat secara jelas, tepat dan cepat. Aspek Penataan Sistem Manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Aspek Penguatan Akuntabilitas merupakan perwujudan tanggung jawab instansi dalam pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah Aspek Peningkatan Kualitas Layanan Publik yang merupakan Upaya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui inovasi.

Kedepannya Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah memiliki tantangan tentang hal ini, dikarenakan tuntutan profesionalitas ASN yang tepat sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Di kondisi saat ini, tata kelola pemerintahan perlu dibenahi lagi untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima.

Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah (birokrasi pemerintah) harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik. Pemenuhan terhadap kepentingan publik secara substantif seharusnya memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan positif terhadap hasil pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Namun untuk konteks daerah masalah pelayanan publik sudah lama menjadi pusat perhatian masyarakat seiring banyaknya kasus pelayanan publik yang dianggap belum maksimal.

Hal tersebut diatas, mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah belum menunjukkan hasil yang

memuaskan bagi masyarakat. Pelayanan yang berbelit-belit, inefisiensi, lambat, tidak ramah serta tidak jelasnya waktu penyelesaian dan tidak jelasnya biaya pelayanan merupakan indikasi bahwa kualitas pelayanan yang diberikan aparaturnya pemerintah daerah masih rendah dan pelayanan publik belum berkualitas.

Beberapa faktor penyebab belum berkualitasnya pelayanan publik adalah faktor SDM aparaturnya, organisasi birokrasi, tata laksana, pola pikir, kinerja organisasi, budaya birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, perilaku birokrasi, sistem dan strategi pelayanan, kepemimpinan yang transaksional, struktur organisasi yang adaptif, perilaku organisasi yang koruptif, lemahnya implementasi kebijakan, belum diterapkannya prinsip *good governance* dan komunikasi birokrasi.

#### **2.3.2.4 Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Banggai 2025-2029**

Berdasarkan hasil pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029, dapat diidentifikasi isu strategis KLHS di maksud yaitu sebagai berikut :

##### **A. Adaptasi dan Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim**

Bencana dan perubahan iklim tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi tetapi juga menyebabkan pengaruh terhadap lingkungan, sosial dan kualitas kehidupan masyarakat. Peningkatan emisi gas rumah kaca akibat meningkatnya aktivitas manusia dan polusi memicu terjadinya pemanasan global. Pemanasan global mendatangkan efek negatif bagi lingkungan, antara lain : peningkatan suhu rata-rata bumi, mencairnya es di kutub, peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem, perubahan pola curah hujan, perubahan iklim. Pemanasan global mendorong terjadinya bencana hidrometeorologi.

Bencana hidrometeorologi adalah bencana alam yang disebabkan oleh aktivitas cuaca dan iklim, seperti hujan, angin, dan suhu udara. Bencana hidrometeorologi yang sering terjadi di Kabupaten Banggai adalah banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, dan gelombang pasang (abrasi). Berdasarkan dokumen kajian risiko bencana kab. Banggai prioritas penanganan risiko bencana yang sifatnya tetap dan kelasnya tinggi adalah : cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tsunami, likuefaksi. Sedangkan prioritas penanganan risiko bencana yang terus meningkat dan kelasnya tinggi adalah: banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi, dan tanah longsor. Dari pencatatan kejadian yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Banggai dari tahun 2015 sampai 2021, kejadian bencana tercatat yang berdampak pernah terjadi adalah bencana banjir, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, dan gempabumi. Dari kejadian tersebut, bencana banjir yang terjadi tahun 2017 memiliki dampak paling besar dalam kurun 10 tahun terakhir. Dimana kejadian banjir berdampak menyeluruh di beberapa desa di setiap kecamatan di Kabupaten Banggai. Beberapa dampak tersebut berpengaruh besar terhadap jiwa terdampak, akses transportasi, aktivitas kehidupan masyarakat, aktivitas perekonomian.

## **B. Pengelolaan, Pengendalian dan Ketahanan Ekologi**

Kabupaten Banggai merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Namun, kekayaan alam tersebut juga rentan terhadap kerusakan akibat berbagai aktivitas manusia, seperti industri, pertanian, dan pertambangan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banggai, sektor pertambangan dan penggalan memberikan kontribusi sebesar 13,09% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banggai pada tahun

2022. Sektor ini juga menyerap tenaga kerja sebanyak 12.851 orang pada tahun yang sama.

Jenis pertambangan yang dominan di Kabupaten Banggai adalah pertambangan nikel. Berdasarkan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai memiliki potensi nikel sebesar 1,7 miliar ton. Saat ini, terdapat 20 perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Kabupaten Banggai. Selain nikel, Kabupaten Banggai juga memiliki potensi pertambangan emas, batubara, batu gamping, andesit, baru quarry, dan pasir. Namun, pengeloaan potensi pertambangan tersebut masih belum optimal. Kegiatan pertambangan tersebut dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup dan sehingga terganggu keanekaragaman hayati di wilayah ini.

Beberapa usaha pertambangan nikel yang terdapaat di wilayah ini berada pada hulu dan hilirnya adalah cagar alam. Sehingga jika terjadi kerusakan pada daerah hulu maka aka merusak ekosistem dan ekologis. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan, pengendalian dampak lingkungan, dan ketahanan ekologi yang berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Banggai.

### **C. Tata Kelola Pelayanan Publik**

Visi Kabupaten Banggai yang terdapat dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Tahun 2021-206 yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel". Peningkatan tata kelola dan pelayanan publik sangat penting dilakukan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kepuasan warga, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Tantangan dalam upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas adalah meningkatkan transparansi dalam penyampaian informasi publik, anggaran, dan kebijakan pemerintah daerah,

mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, menerapkan teknologi informasi untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mendorong budaya kerja yang inklusif dan berorientasi pada pelayanan pelanggan.

#### **D. Kesehatan, Pendidikan dan Jaminan Sosial Untuk Semua**

Salah satu isu kesehatan yang dihadapi di Banggai adalah masih rendahnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: Masih terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, dan tenaga kesehatan, masih tingginya biaya layanan kesehatan, terutama untuk layanan kesehatan rujukan, rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan. Beberapa isu kesehatan di Banggai antara lain Penyakit tidak menular (PTM). PTM merupakan penyebab kematian terbesar di Kabupaten Banggai. Kasus PTM yang paling banyak terjadi adalah hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Peningkatan kasus PTM di Kabupaten Banggai disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perubahan gaya hidup, peningkatan usia harapan hidup, dan peningkatan polusi udara. Pada tahun 2015, dikutip dari pemberitaan Antara jumlah penderita diabetes melitus di Kabupaten Banggai sebanyak 1.089 kasus lama dan 768 kasus baru, total 1.857 kasus. Kemudian, tahun 2021 penderita diabetes melitus di Kabupaten Banggai sebanyak 24.694. Angka ini mengacu pada profil kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah yang dirilis Dinkes Sulawesi Tengah pada tahun 2022 lalu. Penyakit menular. Penyakit menular yang menjadi perhatian di Kabupaten Banggai adalah malaria, demam berdarah dengue (DBD), dan tuberculosis (TBC). Malaria merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. DBD merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan

merupakan faktor penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Beberapa isu kesehatan lingkungan yang menjadi perhatian di Kabupaten Banggai adalah sanitasi yang buruk, pencemaran air dan udara, serta kurangnya akses air bersih. ketersediaan tenaga pendidik dan minimnya sarana penunjang para guru dalam mengembangkan kualitas anak didik. Kondisi ini diakuinya disebabkan belum meratanya program pendidikan di daerah ini. Berdasarkan data, APM SD/MI/ sederajat masih belum mencapai target nasional (91,9), APK SD/MI/ sederajat belum mencapai target nasional.

#### **E. Infrastruktur Ekonomi**

Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Infrastruktur ekonomi adalah prasarana dan sarana yang menunjang kegiatan ekonomi.

Infrastruktur ekonomi dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: Public utilities, yaitu infrastruktur yang menyediakan layanan dasar untuk masyarakat, seperti listrik, air bersih, telekomunikasi, dan gas alam. Public work, yaitu infrastruktur yang menyediakan sarana dan prasarana umum, seperti jalan, jembatan, bendungan, irigasi, dan drainase. Transportasi, yaitu infrastruktur yang menghubungkan berbagai wilayah, seperti jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, dan bandara.

Infrastruktur ekonomi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing suatu negara. Berikut adalah beberapa manfaat pembangunan infrastruktur ekonomi: Meningkatkan produktivitas. Infrastruktur yang memadai dapat mempermudah dan mempercepat pergerakan barang dan jasa, sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Meningkatkan efisiensi.

Infrastruktur yang memadai dapat mengurangi biaya produksi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi. Meningkatkan daya saing. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan daya saing produk domestik di pasar global. Meningkatkan pemerataan pembangunan. Infrastruktur yang memadai dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Sarana jalan di Kabupaten Banggai yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banggai sepanjang 1.178,46 km dengan kondisi yang relatif baik.

#### **F. Ketahanan Sosial, Budaya dan Kerukunan Beragama**

Ketahanan sosial secara sederhana dapat dipahami sebagai kemampuan individu dan kelompok warga beradaptasi menghadapi berbagai perubahan global dan cepat dalam bidang politik, ekonomi, agama, sosial-budaya, teknologi dan informasi yang terjadi di lingkungannya. kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antarumat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada tahun 2021 di Kabupaten Banggai terjadi beberapa demonstrasi baik dari mahasiswa/akademisi dan masyarakat, total kejadian demonstrasi yang berjumlah 5 (lima) yaitu :

- Aksi demo penolakan masyarakat Kecamatan Masama terhadap Investasi Nikel
- Aksi demo terhadap pembebasan lahan Tanjung Sari
- Aksi demo mahasiswa penolakan kebijakan penunjukan Rektor Untika.
- Aksi demo Masyarakat terhadap Kebijakan penetapan Dirut Perumdam.
- Aksi demo masyarakat terhadap Pemilihan Kepala Desa Longkoga Kecamatan Bualemo.

- Aksi demo mahasiswa terhadap pemadaman listrik yang tidak menentu waktu dan jadwalnya oleh PLN UP3 Luwuk.
- Aksi demo penolakan buruh terhadap pemindahan bongkar muat peti kemas dari Pelabuhan Luwuk ke Pelabuhan Tangkiang.

#### **2.3.2.5 Isu Strategis Kabupaten Banggai**

Dari hasil kajian terhadap kondisi Kabupaten Banggai dari berbagai aspek pembangunan dan berdasarkan berbagai isu dan kebijakan di tingkat global, nasional, provinsi maupun lokal, maka dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Kabupaten Banggai. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai 2021-2026 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan isu strategis yang tepat akan menghindarkan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang salah didefinisikan. Input dari tahap ini akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran pada Bab selanjutnya.

Perumusan isu strategis Kabupaten Banggai dilakukan melalui serangkaian tahapan yaitu dengan mengidentifikasi isu-isu penting yang di tinjau dari hasil telaahan terhadap permasalahan Pembangunan, Isu Strategis Global/Internasional, Isu strategis Nasional RPJMN 2025-2029, TPB SDGs, Isu Strategis Propinsi dan Isu Strategis KLHS. Proses pemilihan, penilaian dan penapisan isu strategis ini dilakukan melalui FGD dalam forum konsultasi publik.

Berdasarkan proses perumusan isu strategis sebagaimana di atas, di rumuskan isu strategis Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Masih Rendah.
2. Pembangunan Ekonomi belum Inklusif
3. Sarana Prasarana Konektivitas dan Pelayanan Dasar masih belum memadai
4. Penataan Ruang, Ketahanan Ekologi, Adaptasi dan Mitigasi Bencana
5. Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah
6. Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.

Gambaran masing-masing isu strategis Kabupaten Banggai 2025-2029 yakni sebagai berikut :

**1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Masih Rendah**

Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai antara lain di tunjukan oleh capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang merupakan komposit dari indeks pendidikan, indeks Kesehatan dan pengeluaran riil perkapita yang menggambarkan pencapaian dimensi standar hidup layak. Capaian IPM Kabupaten Banggai setiap tahun cenderung menunjukkan peningkatan. di Tahun 2023 IPM Kabupaten Banggai mencapai 72,19 atau kategori Tinggi. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya terjadi kenaikan IPM sebesar 1,83 point dengan rata-rata pertumbuhan 0,86%. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Kabupaten Banggai.

Tinggi rendahnya nilai IPM tidak terlepas dari program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Peningkatan IPM tidak dapat terjadi secara instan namun melalui sebuah proses yang bertahap yang memerlukan waktu cukup panjang. Oleh karena itu, program pembangunan manusia perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus dipantau pelaksanaanya agar lebih terarah.

Pendidikan berkualitas yang merata, masih menjadi tantangan di Kabupaten Banggai. Wajib Belajar 9 Tahun belum berhasil di

tuntaskan, hal ini terlihat dari angka Rata-Rata Lama Sekolah yang masih 8,63 Tahun, walaupun angka Harapan Lama Sekolah cenderung membaik menjadi 13,34 Tahun. Sedangkan untuk dimensi Pendidikan berkaitan dengan antara lain penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan serta penyebarannya, rasio murid terhadap guru, kelas, dan sekolah serta sarana dan prasarana pendukung. Pembangunan Pendidikan di arahkan untuk menciptakan penduduk Kabupaten Banggai yang cerdas, kreatif, dan berbudi pekerti luhur.

Tantangan lainnya untuk mewujudkan SDM Kabupaten Banggai yang berkualitas dan unggul adalah derajat Kesehatan Masyarakat. Usia Harapan Hidup Kabupaten Banggai Tahun 2023 meningkat 0,14 tahun menjadi 72,09 Tahun, dari tahun sebelumnya 71,95 Tahun. Beberapa masalah yang masih menjadi tantangan kedepan di sektor Kesehatan yaitu peningkatan pelayanan Kesehatan yang terjangkau dan berkualitas terjamin bagi setiap penduduk Kabupaten Banggai. Kebijakan untuk meningkatkan Upaya Kesehatan harus di tekankan pada peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat promotif dan preventif, penanggulangan masalah Gizi terutama terkait penurunan stunting, pelayanan Kesehatan ibu, anak dan lanjut usia, Keluarga Berencana, pemerataan sarana prasarana, serta pelayanan Kesehatan yang responsif dan perluasan cakupan jaminan Kesehatan.

Masalah Pendidikan dan Kesehatan sebagaimana di uraikan di atas, tentunya sangat terkait dengan persoalan kemiskinan penduduk Kabupaten Banggai. Isu kualitas dan Daya Saing SDM Kabupaten Banggai sangat erat kaitannya dengan Upaya percepatan penuntasan kemiskinan, melalui perlindungan sosial yang adaptif.

Kualitas sumberdaya manusia juga berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang terbuka di daerah. Oleh sebab itu pembangunan SDM di Kabupaten Banggai diarahkan agar benar-benar mampu

menghasilkan tenaga kerja yang memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan Daerah. Selain itu, dalam menyongsong pembangunan digital, pemerintah Indonesia memperbaiki kurikulum pendidikan, memperkuat kompetensi melalui pelatihan vokasi dan program magang, serta pelaksanaan sertifikasi profesi di seluruh institusi di wilayah Indonesia.

Peningkatan keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan Masyarakat inklusif merupakan salah satu Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keluarga berkualitas antara lain di wujudkan melalui penguatan kesiapan membangun keluarga, peningkatan kapasitas dan ketrampilan keluarga dan penyediaan pusat layanan keluarga. Terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang perlu mendapatkan perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Banggai yaitu antara lain peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan dalam perspektif gender, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam Pendidikan/pengasuhan anak, penurunan pekerja anak dan pencegahan perkawinan anak/usia dini.

Di bidang kepemudaan, pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing dengan semangat kewirausahaan yang tinggi menjadi sasaran utama, sedangkan di bidang olah raga upaya pemasaran dan pemasyarakatan olahraga, yang menimbulkan kegemaran untuk hidup lebih sehat dan bugar di kalangan masyarakat dengan budaya olahraga, serta pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terancang dan berkesinambungan, mutlak perlu di lakukan sebagai wahana yang strategis dan efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk

membentuk watak dan karakter bangsa (nation and character building).

Sedangkan ketahanan budaya, terkait dengan Upaya Pemajuan dan pelestarian kebudayaan daerah guna memperteguh jati diri bangsa, pembinaan idiologi Pancasila dan penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral dan modal dasar Pembangunan.

## **2. Pembangunan Ekonomi belum Inklusif**

Pembangunan Ekonomi Inklusif adalah Pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Menurut International Disability and Development Consortium (IDDC), pembangunan ekonomi inklusif adalah proses untuk memastikan bahwa semua kelompok yang terpinggirkan sepenuhnya dilibatkan dalam proses pembangunan.

Karena itu, konsep pembangunan ekonomi inklusif akan mengupayakan adanya kebijakan afirmatif dalam setiap kebijakan yang diambil negara/daerah. Dalam konsep ini sebuah pertumbuhan harus merupakan pertumbuhan yang mampu menciptakan kesempatan ekonomi bagi penduduk miskin, serta memastikan bahwa semua kelompok masyarakat yang terpinggirkan bisa terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan, pemerintah Kabupaten Banggai perlu memfokuskan pada peningkatan produktivitas dan inovasi pada sektor-sektor produktif dan keunggulan potensi daerah, beralih kepada kegiatan ekonomi bernilai tambah serta ekonomi yang mengandalkan pengetahuan, inovasi dan ketrampilan tinggi.

Keberadaan UMKM dan Koperasi perlu di optimalkan melalui antara lain kemudahan berusaha dan perizinan, peningkatan nilai

tambah dan meningkatkan produktivitas, perluasan jaringan pasar domestik dan global, akselerasi digitalisasi dan penggunaan teknologi, peningkatan kapasitas tenaga kerja dan penciptaan wirausaha, serta perluasan akses pembiayaan usaha.

Ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru perlu dikembangkan dengan mengangkat nilai-nilai budaya, seni dan kearifan Masyarakat, serta kreatifitas talenta Banggai ketingkat nasional dan global. Hal ini juga merupakan bagian dari Upaya membangun pariwisata daerah Kabupaten Banggai ke depan.

Aktivasi dan produktivitas BUMD juga perlu mendapatkan perhatian untuk mendukung Pembangunan ekonomi di Kabupaten Banggai sesuai bidang usahanya masing-masing. Peningkatan kinerja BUMD di harapkan dapat memperbesar manfaat bagi daerah dan Masyarakat. Perlu di kembangkan kolaborasi sinergis antara BUMD dengan BUMN, swasta dan Masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang di miliki oleh Kabupaten Banggai.

Kabupaten Banggai adalah salah satu daerah yang di anugrahi oleh Allah SWT potensi sumber daya alam yang cukup melimpah. Dengan kontur dan kondisi geografis yang ada, kabupaten banggai memiliki potensi pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan, potensi perikanan dan kelautan serta potensi sumber daya mineral serta minyak dan gas bumi.

Berdasarkan data Meskipun secara umum Kabupaten Banggai sudah mampu mewujudkan sebagai daerah yang berdaulat pangan, tetapi belum mampu untuk menentukan sepenuhnya kebijakan dan strategi produksi, distribusi dan konsumsi pangan yang sehat, dan sesuai sumber daya dan budaya dengan metode yang ramah lingkungan, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan memberikan perhatian khususnya kepada mayoritas petani, peternak dan nelayan

kecil penghasil pangan, pedagang kecil dan rakyat miskin rawan pangan.

Adapun beberapa Isu Strategis pada sektor pertanian di Kabupaten Banggai adalah :

- a. Fenomena perubahan iklim global memberikan dampak terhadap capaian produksi dan produktivitas pertanian;
- b. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian serta terjadinya degradasi sumber daya alam;
- c. Belum optimalnya peran Kelembagaan petani;
- d. Lemahnya akses petani terhadap permodalan, dan terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, alsintan) pendukung pengembangan sistem agribisnis;
- e. Ketahanan Pangan;
  - 1) Ketergantungan beras sebagai komoditas pangan pokok masih cukup tinggi.
  - 2) Pola konsumsi masyarakat masih belum Beragam, Bergizi, Seimbang Dan Aman (B2SDA).
- f. Fluktuasi harga produk pertanian akibat ketersediaan bahan pangan tidak kontinyu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai distribusi produk pertanian.

Selain potensi sumber daya alam sebagaimana diatas, Kabupaten Banggai memiliki potensi SDA Mineral, Minyak dan Gas Bumi yang potensial dan di harapkan dapat menimbulkan efek pengganda bagi perekonomian daerah. Isu yang mengemuka saat ini adalah bagaimana Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan potensi penerimaan daerah dari sektor pertambangan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendorong potensi Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan Migas dan Perusahaan

lainnya untuk berkontribusi dalam program-program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai.

### **3. Sarana Prasarana Konektivitas dan Pelayanan Dasar masih belum memadai**

Kabupaten Banggai memiliki masalah sarana prasarana yang belum memadai, baik sarana prasarana konektivitas seperti jalan, jembatan, irigasi, telekomunikasi dan ketenagalistrikan maupun infrastruktur pelayanan dasar seperti air bersih/air minum, sanitasi dan perumahan layak.

Total Panjang jalan di Kabupaten Banggai adalah sepanjang 1.885,88 Km, yang terdiri atas 340,07 Km Jalan Negara/Nasional, 367,35 Km Jalan Provinsi dan 1.178,46 Km Jalan Kabupaten dengan kondisi baik mencapai 68,90%. Dari gambaran kondisi jalan ini, menunjukkan bahwa infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Banggai, utamanya wilayah perdesaan masih belum memadai dan perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kesenjangan infrastruktur jalan terjadi pada wilayah Kepala Burung Kabupaten Banggai yang meliputi 8 Kecamatan dan di lintasi oleh jalan Provinsi sepanjang kurang lebih 230 Km, dan sebagian besar dalam kondisi rusak. Kondisi ini kemudian juga di perparah dengan tidak memadainya sarana dan prasarana transportasi darat yang melayani wilayah kepala burung di maksud.

Air dan sanitasi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Setiap ada air minum atau air bersih maka pasti akan ada air limbah. Tidak kurang dari 85% air bersih berubah menjadi air limbah. Oleh karenanya, pengelolaan air bersih akan berkaitan pula dengan pengelolaan sanitasi. Fasilitas sanitasi yang layak yang memenuhi standar kesehatan yang disertai perilaku hidup bersih dan sehat merupakan elemen yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sumber air dengan kualitas yang

buruk akan mengancam kondisi kesehatan masyarakat yang menggunakannya.

Akses terhadap sanitasi dan air bersih merupakan hal yang penting dalam upaya melahirkan sumber daya manusia yang unggul. Ketidadaan sanitasi yang layak dan air bersih dalam jumlah yang mencukupi merupakan awal dari munculnya berbagai persoalan kesehatan di masyarakat, seperti: stunting, kematian bayi serta ibu, penularan berbagai virus, dan penyakit lainnya.

Selain isu air bersih dan sanitasi lingkungan, pembangunan perumahan dan permukiman menjadi isu penting pemenuhan layanan dasar yang di butuhkan masyarakat. Arah kebijakan pembangunan perumahan adalah meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai.

Sementara untuk kebutuhan ketenagalistrikan di Kabupaten Banggai relative telah tercukupi dengan akan di operasikannnya Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Luwuk yang berkapasitas 40 MW atau setara dengan 30 ribu pelanggan baru. Mesin pembangkit itu dinilai memberikan dampak positif bagi lingkungan, dengan pengurangan emisi gas karbon CO<sub>2</sub> sebesar 105 ribu ton per tahun dan mereduksi penggunaan BBM untuk operasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebesar Rp20 miliar/bulan.

Selain konektivitas fisik yaitu sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara sebagaimana di atas, konektivitas dan talenta digital menjadi isu terkini yang menjadi prioritas pemerintah saat ini untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat transformasi digital. Hal ini dapat di lakukan melalui penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta pengembangan SDM yang memiliki talenta digital.

Untuk mendukung akselerasi transformasi digital di Indonesia, pemerintah telah menetapkan kegiatan strategis di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Yang menjadi fokus utamanya adalah membangun infrastruktur digital dan memperluas jangkauan internet ke seluruh Indonesia. Pemerintah akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital, termasuk internet dengan kecepatan tinggi dan digital capabilities dengan kerjasama pemerintah, publik dan swasta untuk dapat berinvestasi di teknologi digital seperti cloud, data center, security management dan infrastruktur broadband.

Salah satu infrastruktur yang memegang peranan penting dalam transformasi digital adalah kehandalan koneksi internet. Banyak desa-desa yang akses internetnya sudah kencang, tetapi tidak sedikit juga yang hanya bisa dapat sinyal 2G atau bahkan blankspot sama sekali. Ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar transformasi digital masih masalah infrastruktur. Peralihan ke ruang digital tidak hanya butuh sekadar koneksi tetapi juga akses yang berkualitas. Demi mencapai hal tersebut, dibutuhkan partisipasi berbagai sektor untuk menjamin ketersediaan infrastruktur.

Masalah koneksi internet sebagaimana di gambarkan di atas itulah yang menjadi hal utama di Kabupaten Banggai. Bahwa masih terjadi kesenjangan digital di beberapa wilayah di kabupaten banggai yang disebabkan karena adanya ketimpangan dan ketidakseimbangan pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kesenjangan digital ini menyebabkan terbatasnya akses masyarakat di beberapa wilayah terhadap informasi dan komunikasi. Luas wilayah dan kondisi geografis Kabupaten Banggai yang berbentuk pegunungan, penyebaran penduduk yang tidak merata, serta penggunaan satelit yang kurang optimal juga menyebabkan jangkauan komunikasi dan penyebaran informasi menjadi tidak merata. Penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika yang hampir seluruhnya mengandalkan

peran dunia usaha juga menyebabkan adanya blank spot di wilayah non-komersial seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Balantak Utara, pesisir utara Kecamatan Bunta dan beberapa desa yang terletak wilayah pegunungan di Kecamatan Lobu. Kendala serius yang juga dihadapi pemerintah Kabupaten Banggai untuk mengatasi kesenjangan digital terletak pada cara pandang masyarakat mengenai pemanfaatan TIK, sehingga pemerintah perlu meyakinkan dan melatih masyarakat bahwa penggunaan TIK mampu meningkatkan produktivitas, lapangan kerja, dan ketersediaan informasi yang cepat serta mudah digunakan di berbagai aspek bidang kehidupan.

Berkaitan dengan isu ini, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah Kabupaten Banggai yaitu antara lain :

- a. Mengatasi kesenjangan digital yang terjadi pada beberapa Kecamatan dan Desa *Blank Spot*, karena di anggap bukan sebagai wilayah komersial dalam pandangan penyedia jasa telekomunikasi.
- b. Kebutuhan akses internet untuk Digitalisasi Pendidikan, ekonomi, E-Government dan pelayanan public.
- c. Maraknya konten hoax, konten pornografi, judi, kekerasan, SARA, malware dan konten ilegal lainnya telah memicu banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, kerusuhan antar suku atau agama, meningkatnya kejahatan, serta pengaruh buruk bagi masyarakat terutama anak-anak. Oleh sebab itu di perlukan literasi TIK bagi masyarakat secara lebih masif.
- d. Penguatan terhadap fungsi persandian untuk pengamanan informasi rahasia, mengamankan data, informasi dan aset informasi secara keseluruhan.

#### **4. Penataan Ruang, Ketahanan Ekologi, Adaptasi dan Mitigasi Bencana**

Pengendalian dan pemanfaatan tata ruang merupakan isu strategis dalam pembangunan wilayah dikarenakan semua kegiatan pembangunan khususnya yang memanfaatkan ruang harus mengacu pada rencana tata ruang. Saat ini sedang dalam proses revisi terhadap RTRW Kabupaten Banggai 2013-2023 dan di harapkan akan menyusul produk hukum mengenai rencana tata ruang yang lebih operasional, baik berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Rinci Kawasan Strategis, serta perangkat pengendalian pemanfaatan ruang berupa peraturan zonasi, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, dan standar-standar teknis lainnya yang belum tersedia.

Berkaitan dengan isu lingkungan hidup, selain upaya mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, masalah persampahan juga menjadi perhatian utama. Pengelolaan persampahan menjadi fenomena masalah lingkungan terutama di kawasan perkotaan seperti ibukota kecamatan dan ibukota kabupaten yaitu Kota Luwuk. Pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Selain itu keterbatasan lahan TPA menuntut peran serta dan kesadaran masyarakat untuk ikut membantu dalam mengelola sampah domestik. Selama ini peran serta masyarakat hanya diwujudkan sebatas membayar retribusi sampah. Peran serta tersebut diharapkan dapat ditingkatkan lagi dengan mengurangi sampah dari sumbernya (masing-masing rumah tangga) dan melakukan pemilahan sampah. Perlu inovasi daerah yang lebih masif dan sistematis untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Selanjutnya berkaitan dengan penanggulangan bencana, isu yang mengemuka adalah masih rendahnya kapasitas Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penanganan bencana.

penanggulangan bencana untuk lima tahun ke depan harus di fokuskan pada upaya untuk meningkatkan tata kelola resiko bencana yang ada, kolaborasi pentahelix atau dengan melibatkan semua pihak. Karena bencana bukan tanggung jawab bersama melainkan bencana adalah urusan kita bersama, serta memperhatikan laju perkembangan teknologi dengan adaptasi industri 5.0 yang baik. Resiko bencana akan tetap ada selama manusia masih beraktifitas, tapi dengan kesiapan dan monitoring yang di laksanakan, di harapkan bisa mengurangi resiko itu

## **5. Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah**

Pengembangan wilayah di lakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan keseluruhan wilayah dan masyarakat. Koridor pertumbuhan berorientasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah melalui percepatan pengembangan Kawasan-Kawasan pertumbuhan, sedangkan koridor pemerataan berorientasi untuk pemenuhan pelayanan dasar yang lebih merata melalui pengembangan Pusat Kegiatan Lokal sehingga terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas, di wilayah Kecamatan pada koridor pemerataan.

Kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok sosial-ekonomi di Kabupaten Banggai masih merupakan salah satu tantangan penting dalam pembangunan Daerah. Saat ini, kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Banggai dipandang relatif masih cukup tinggi, khususnya kesenjangan pembangunan antara wilayah beberapa wilayah kecamatan, daerah perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Banggai. Oleh karena itu, upaya untuk melakukan percepatan pemerataan pembangunan, termasuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar kelompok sosial-ekonomi dan antar wilayah menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan daerah.

Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini berimplikasi terhadap kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah, yang dapat mengganggu stabilitas keamanan wilayah akibat kecemburuan masyarakat terutama yang berasal dari daerah dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Kesenjangan antar wilayah dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah perbedaan kandungan sumberdaya alam; perbedaan kondisi geografis; kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa; konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah; serta alokasi dana pembangunan antar-wilayah.

Oleh sebab itu kebijakan yang harus di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai dalam mengatasi isu kesenjangan wilayah ini antara lain melalui meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan serta mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah, terutama di daerah perdesaan.

Salah satu upaya untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi kesejangan wilayah adalah melalui pembangunan infastruktur terpadu berbasis Kawasan, utamanya yang terkait dengan logistik dan konektivitas. Fakta empiris menunjukkan bahwa perkembangan kapasitas infrastruktur di suatu wilayah berjalan seiring dengan perkembangan ekonominya. Keberadaan infrastruktur mendorong peningkatan produktivitas faktor-faktor produksi. Perbaikan infrastruktur meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, karena investasi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Infrastruktur yang baik juga akan merangsang peningkatan pendapatan masyarakat, karena aktivitas ekonomi yang semakin meningkat sebagai akibat mobilitas faktor produksi dan aktivitas perdagangan yang semakin tinggi.

#### **6. Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.**

Upaya untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntable serta pelayanan publik yang prima

dan berkualitas hanya dapat di capai melalui Reformasi Birokrasi. Capaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Banggai beberapa tahun terakhir ini menunjukkan kemajuan yang berarti. Berdasarkan hasil evaluasi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) tahun 2023, indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Banggai bernilai “B” atau kategori Baik, sedangkan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah dengan Predikat “BB”. Pada tahun 2020 juga, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Banggai berhasil menjadi salah satu unit kerja “Zona Integritas” dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Kabupaten Banggai juga berhasil mendapatkan Predikat WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama 11 Tahun berturut-turut.

Tantangan lainnya terkait tata Kelola pemerintahan yaitu penerapan sistem merit dalam manajemen ASN dan penerapan manajemen talenta ASN. Dibidang pelayanan publik, berdasarkan penilaian dari Kemenpan RB dan Ombudsman RI, tingkat kepatuhan pemerintah Kabupaten Banggai terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Publik bernilai Sangat Baik dan berada pada Zona Hijau berdasarkan Kategori Ombudsman RI. Sementara itu untuk Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banggai mengalami penurunan, dari Kabupaten Terinovatif menjadi Kabupaten Inovatif di tahun 2023.

Berdasarkan capaian di atas, maka yang menjadi isu sentralnya adalah upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan capaian yang sudah ada dan menunjukkan bahwa hasil penilaian di atas telah benar-benar di implementasikan secara terus menerus dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banggai, yang tujuan akhirnya adalah pada perwujudan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, beberapa hal yang menjadi tantangan dalam isu ini yaitu antara lain:

- a. Peningkatan layanan public yang berkualitas dan inklusif melalui peningkatan aksesibilitas dan inklusifitas pelayanan terpadu (fisik dan Non fisik).
- b. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital di barengi Peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang masih sangat rendah dan belum bersesuaian dengan capaian Reformasi Birokrasi dan SAKIP diatas.
- c. Peningkatan Indeks Inovasi daerah melalui kebijakan minimal satu Perangkat Daerah/Unit Kerja satu Inovasi per tahun.
- d. Penerapan *Performance Based Budgeting* dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, sehingga dapat terwujud pemerintahan yang berorientasi hasil (*Result Oriented Government*).
- e. Transformasi produk hukum daerah.
- f. Penyederhanaan Birokrasi dengan system kerja baru berbasis fungsional, serta tata Laksana Birokrasi Pemerintahan daerah melalui pengembangan/optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- g. Transformasi SDM Aparatur melalui *Core Values* ASN yaitu BERAHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif serta Kolaboratif) dan *Employer Branding* ASN yaitu “Bangga Melayani Bangsa”.

Berdasarkan Isu Strategis di atas, maka di gambarkan sandingan/keselarasan Isu Strategis Nasional, Sulawesi Tengah dan Kabupaten Banggai sebagai berikut :

**Tabel 2.39**  
**Keselarasan Isu Strategis Nasional,**  
**Sulawesi Tengah dan Kabupaten Banggai**

<b>Isu Strategis / Tantangan Pembangunan Nasional</b>	<b>Isu Strategis Sulawesi Tengah</b>	<b>Isu Strategis Kabupaten Banggai</b>
Aspek Ekonomi	Kesenjangan Ekonomi antar Wilayah Masih Tinggi	Pembangunan Ekonomi Inklusif
	Produktivitas Sektor Unggulan Daerah Masih Rendah	
	Nilai Tambah Sektor Pariwisata masih rendah	
	Produktivitas dan Kualitas SDM/Tenaga Kerja Masih rendah	
	Kontribusi UMKM dan Koperasi masih kecil	
	Iptek dan Riset masih lemah	
	Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah masih rendah	Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah
	Infrastruktur dan Literasi Digital masih rendah	Infrastruktur TIK dan Transformasi Digital
Aspek Sosial	Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) belum memberikan dampak Optimal terhadap Penurunan Kemiskinan	
	Produktivitas dan Kualitas SDM/Tenaga Kerja Masih rendah	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	Pembangunan Berkelanjutan belum berjalan dengan baik	
Tata Kelola Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan belum Optimal	Tata Kelola Pemerintahan dan

<b>Isu Strategis / Tantangan Pembangunan Nasional</b>	<b>Isu Strategis Sulawesi Tengah</b>	<b>Isu Strategis Kabupaten Banggai</b>
Sistem Hukum, Stabilitas Pertahanan dan Diplomasi	Tata Kelola Pemerintahan belum Optimal	Kualitas Pelayanan Publik.
Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi	Produktivitas dan Kualitas SDM/Tenaga Kerja Masih rendah	Ketahanan Sosial dan Budaya
		Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
		Penataan Ruang, Perubahan Iklim, Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
Kewilayahan dan Infrastruktur	Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah masih rendah	Sarana Prasarana Konektivitas dan Pelayanan Dasar
	Infrastruktur dan Literasi Digital masih rendah	Infrastruktur TIK dan Transformasi Digital
	Kawasan Pedesaan belum optimal dikembangkan menjadi daerah penyangga.	Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah
Kestinambungan Pembangunan	Pembangunan Berkelanjutan belum berjalan dengan baik	Kestinambungan Pembangunan
		Penataan Ruang, Perubahan Iklim, Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Sedangkan Keterkaitan Isu Strategis Jangka Panjang Kabupaten Banggai dengan Isu Strategis KLHS RPJPD Kabupaten Banggai 2025-2045, tergambar sebagai berikut :

**Tabel 2.40**  
**Keterkaitan Isu Strategis Jangka Panjang dengan Isu Strategis**  
**KLHS RPJMD Kabupaten Banggai 2025-2029**

<b>ISU STRATEGIS KLHS RPJMD TAHUN 2025 - 2029</b>	<b>ISU STRATEGIS KABUPATEN BANGGAI 2025 - 2029</b>
Adaptasi dan Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim	Penataan Ruang, Ketahanan Ekologi, Adaptasi dan Mitigasi Bencana
	Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam dan Ketahanan Pangan Daerah.
Pengelolaan, Pengendalian dan Ketahanan Ekologi	Penataan Ruang, Ketahanan Ekologi, Adaptasi dan Mitigasi Bencana
	Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam dan Ketahanan Pangan Daerah.
Tata Kelola Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.
Kesehatan, Pendidikan dan Jaminan Sosial Untuk Semua	Ketahanan Sosial dan Budaya
	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
Infrastruktur Ekonomi	Sarana Prasarana Konektivitas dan Pelayanan Dasar
	Infrastruktur TIK dan Transformasi Digital
	Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah
	Pembangunan Ekonomi Inklusif
Ketahanan Sosial, Budaya dan Kerukunan Beragama	Ketahanan Sosial dan Budaya



**BerAKHLAK** **#** bangga melayani bangsa  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



# BAB-III

## VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

### **BAB III**

#### **VISI, MISI DAN**

#### **PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Visi dan Misi merupakan kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus memberikan arah pembangunan atau *clarity of direction*. Visi dan misi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan /atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi dan misi merupakan gambaran ke depan Kabupaten Banggai pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2025-2029. Gambaran tentang visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang mempedomani/merujuk pada Visi dan Misi, tahapan, arah pembangunan dan sasaran pokok dalam RPJPD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2045, mempedomani RTRW Kabupaten Banggai 2012-2032 dan RPJMN 2025-2029 serta memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2024, Visi RPJPD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2045 yaitu:

**“BANGGAI SEBAGAI GERBANG TIMUR SULAWESI TENGAH YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN MELALUI INDUSTRI KOMODITAS SUMBER DAYA ALAM (BANGGAI EMAS 2045)“**

Visi ini merupakan hasil ekstraksi dari segenap pemikiran, keinginan, harapan dan cita-cita seluruh masyarakat agar Kabupaten Banggai dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pelayanan Pendidikan, kesehatan, perdagangan, jasa, industri

pertanian, perikanan/kelautan, pariwisata dan pertambangan di bagian timur Sulawesi Tengah, yang memiliki daya saing, baik secara regional maupun nasional, maju dalam segala bidang pembangunan, sejajar dan sederajat dengan daerah lainnya di Indonesia yang telah maju serta masyarakatnya yang sejahtera bertumpu pada kekuatannya sendiri, melalui potensi Sumber Daya Alam yang di miliki dan di kelola secara berkelanjutan.

Kondisi ini pada tahun 2045 kedepan akan mewujudkan melalui Banggai Emas 2045, yang pada gilirannya akan mendukung terwujudnya Sulawesi Tengah Emas dan Indonesia Emas 2045.

**Gambar 3.1**

**Kerangka Perumusan Visi Kabupaten Banggai Tahun 2025-2045**



Berdasarkan Visi di atas, di tetapkan Misi RPJPD Kabupaten Banggai 2025-2045, sebagai berikut :

- 1. Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing melalui Transformasi Sosial**
- 2. Ekonomi Daerah Tangguh dan Inklusif melalui Transformasi Ekonomi**

3. **Transformasi Tata Kelola untuk Pemerintahan yang Baik dan Inovatif**
4. **Ketahanan Sosial dan Budaya untuk Kehidupan Bermasyarakat yang Berkualitas.**
5. **Ketahanan Ekologi dan Pembangunan Berkelanjutan.**
6. **Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan**
7. **Sarana Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan**
8. **Kesinambungan Pembangunan**

Secara Diagramatis Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai tahun 2025-2045, tergambar sebagai berikut :

**Gambar 3.2**  
**Rumusan Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banggai Tahun 2025-2045**



Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2045 ini kemudian di jabarkan kedalam 17 Arah Pembangunan (Banggai Emas), 16 Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai. Yang kemudian menjadi dasar perumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Banggai 2025-2029, dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029.

### **3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029**

#### **3.1.1 Visi dan Misi**

Dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2020-2024 yang tergambar dalam kondisi umum daerah, permasalahan pembangunan daerah, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, baik skala lokal, regional, nasional maupun isu global, maka dirumuskan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

**Bergerak Bersama Berkelanjutan Menuju Gerbang Timur  
Sulawesi Tengah (GERakan BANGgai Terdepan, Inovatif,  
MajU dan sejahteRa)**

Pokok-Pokok atau Makna Visi di maksud adalah sebagai berikut :

<b>BERGERAK BERSAMA</b>	Bergerak Bersama secara kolaboratif dengan seluruh stakeholders Pembangunan di daerah dengan prinsip PENTAHHELIX
<b>BERKELANJUTAN</b>	Merupakan kelanjutan dari kinerja dan capaian Pembangunan pada periode kepemimpinan kami sebelumnya.
<b>GERBANG TIMUR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>GERBANG TIMUR</b> merupakan singkatan dari <b>GERAKAN BANGGAI TERDEPAN, INOVATIF, MAJU DAN SEJAHTERA.</b></li> <li>▪ <b>GERBANG TIMUR</b> dapat di makanakan sebagai Kondisi Kabupaten Banggai sebagai pusat pelayanan pendidikan, Kesehatan, perdagangan, jasa, industri pertanian, perikanan/kelautan, pertambangan dan pariwisata berbasis kearifan lokal di Kawasan Timur Sulawesi Tengah</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>TERDEPAN</b> artinya Kabupaten Banggai sebagai Kabupaten juara, unggul dan terdepan di bandingkan daerah lainnya di Sulawesi Tengah dalam berbagai aspek Pembangunan.</li> <li>▪ <b>INOVATIF</b> artinya mengarusutamakan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan publik.</li> <li>▪ <b>MAJU</b> artinya Berdaya, kualitas hidup tinggi, modern, Tangguh, inovatif, produktif dan mampu memanfaatkan sumber daya local untuk memenuhi kebutuhan daerah secara mandiri.</li> <li>▪ <b>SEJAHTERA</b> artinya taraf hidup meningkat, sehat, produktif, berpendidikan, aman dan Bahagia.</li> </ul>
<b>SULAWESI TENGAH</b>	Bagian dari Provinsi Sulawesi Tengah

**Kabupaten Banggai sebagai Gerbang Timur Sulawesi Tengah** di maknakan sebagai posisi geografis Kabupaten Banggai yang sangat strategis, berada di semenanjung timur pulau Sulawesi dan merupakan bagian timur Sulawesi Tengah. Dalam WIKIPEDIA disebutkan bahwa **Semenanjung Timur** atau **Semenanjung Banggai** adalah satu dari 4 semenanjung utama di Pulau Sulawesi. Semenanjung Timur membentang dari bagian tengah pulau hingga ke timur, membentuk batas selatan Teluk Tomini dan batas utara Teluk Tolo. Wilayah Semenanjung Timur berada sepenuhnya dalam Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Banggai.

Melalui Visi ini Kabupaten Banggai ingin memposisikan diri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pelayanan Pendidikan dan Kesehatan serta pelayanan perdagangan, jasa dan pariwisata di bagian timur Sulawesi Tengah. Hal ini di dasari oleh pertimbangan antara lain yaitu :

- a. Kabupaten Banggai memiliki posisi strategis dalam jaringan transportasi darat, penerbangan dan pelayaran di Kawasan timur pulau Sulawesi. Letak geografisnya dapat menghubungkan antara Manado, Gorontalo, Kawasan Teluk Tomini, Taliabu (Ternate), Buton, Kendari dan Makassar serta kabupaten sekitarnya yaitu Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Tojo Una-Una dan Morowali Utara, baik melalui darat, laut dan udara, baik untuk distribusi orang, barang dan cargo. Posisi strategis ini memungkinkan Kota Luwuk menjadi pusat perdagangan karena memiliki kawasan industri besar atau ditopang oleh infrastruktur transportasi seperti bandar udara dan pelabuhan.
- b. Hal ini diperkuat oleh posisi Kabupaten Banggai sebagai lumbung pangan kedua di Sulawesi Tengah, sentra terbesar komoditas perkebunan kelapa dalam, dan populasi ternak terbesar di Sulawesi Tengah, pariwisata, serta potensi industri perikanan dan maritim yang menjanjikan karena diapit oleh Teluk Tolo dan Teluk Tomini.
- c. Kabupaten Banggai memiliki 3 (tiga) Perguruan Tinggi swasta yang telah eksis selama kurang lebih 24 Tahun, dengan jumlah mahasiswa yang cukup besar dan berasal dari wilayah di Kawasan Timur Sulawesi Tengah dan Kepulauan Sula Maluku Utara. Berpotensi dikembangkan untuk menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dan terbaik.
- d. RSUD Luwuk merupakan Rumah Sakit Rujukan di Bagian timur Sulawesi Tengah, yang dapat ditingkatkan kelasnya menjadi tipe A serta membangun dan meningkatkan fasilitas Kesehatan lainnya menjadi Rumah Sakit tipe D dan C.

Berdasarkan Visi dan maknanya sebagaimana telah diuraikan di atas, ditetapkan ukuran keberhasilan pencapaian/perwujudan Visi Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Indikator keberhasilan visi ini

di dasarkan pada Sasaran Visi RPJP dan RPJM Nasional, sasaran Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029 dan Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Banggai 2025-2045. Sasaran Visi di maksud adalah sebagai adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Sasaran Visi RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029**

NO	Sasaran Visi RPJMD Tahun 2025-2029	Target Sasaran	
		BASE LINE 2025	TARGET 2029
PENINGKATAN PENDAPATAN PERKAPITA			
1.	PDRB Perkapita (Juta Rp)	119,11	166,55
2.	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (%)	41,29	45,82
3.	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	32,30	33,05
KEMISKINAN MENURUN DAN KETIMPANGAN BERKURANG			
1.	Tingkat Kemiskinan	6,27 – 6,51	4,95 - 5,50
2.	Indeks Gini	0,300	0,260
3.	Kontribusi PDRB Kabupaten (%)	11,05	12,75
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,14	4,78
KEPEMIMPINAN DAERAH UNTUK MENCAPAI VISI DAERAH			
1.	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Sangat Inovatif
2.	Indeks Daya Saing Daerah	3,50	3,90
PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Indeks Pembangunan Manusia	72,86 - 73,43	74,00 - 75,56
PENURUNAN EMISI GRK MENUJU NET ZERO EMISSION			
1.	Penurunan Intesitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	609.706,30	
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81,88	83,63

Visi RPJMD 2025-2029 di atas selain merefleksikan Visi Daerah yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Banggai 2025–2045 sebagaimana telah di uraikan sebelumnya, juga memiliki keterkaitan dan sinkron dengan Visi Presiden dalam RPJMN 2025-2029 dan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029, sesuai prinsip konsistensi perencanaan yang di atur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU. No. 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penjelasan keterkaitan itu bisa dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Keterkaitan Visi Nasional, Provinsi dan Kabupaten Banggai**

Visi Nasional		Visi Sulawesi Tengah		Visi Kabupaten Banggai	
RPJPN 2025-2045	RPJMN 2025-2029	RPJPD 2025-2045	RPJMD 2025-2029	RPJPD 2025-2045	RPJMD 2025-2029
Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan	Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029	Banggai Sebagai Gerbang Timur Sulawesi Tengah Yang Maju Dan Berkelanjutan Melalui Industri Komoditas Sumber Daya Alam (Banggai Emas 2045)	Bergerak Bersama Berkelanjutan Menuju Gerbang Timur Sulawesi Tengah (Gerakan Banggai Terdepan, Inovatif, Maju dan Sejahtera)

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau pemerintah dalam usahanya mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai Visi daerah.

Rumusan Misi sebagai penjabaran Visi Bupati dan Wakil Bupati Banggai Terpilih, yang akan tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banggai 2025-2029, adalah sebagai berikut:

- 1. SDM Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing**
- 2. Ekonomi Daerah Tangguh dan Inklusif Berbasis Potensi Unggulan**
- 3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Berkualitas , Merata dan Ramah Lingkungan.**
- 4. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan.**
- 5. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif.**

Penjelasan masing-masing Misi adalah sebagaimana gambaran berikut ini :



Misi ini di arahkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai yang sehat, cerdas, terampil, produktif, sejahtera dan mandiri serta berbudaya. Kualitas Sumber Daya manusia dapat dilihat melalui angka *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*, dan angka pertumbuhan penduduk. Semakin tinggi angka IPM suatu daerah, maka kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya juga tinggi. IPM akan menunjukan antara lain indeks/derajat pendidikan, derajat kesehatan serta kemampuan/daya beli masyarakat (*Purchasing Power Parity (PPP)*), dimana kesemuanya itu merupakan ukuran/indikator tingkat kesejahteraan suatu kelompok masyarakat. Pada sisi lain, laju pertumbuhan penduduk yang kecil, angka harapan hidup yang tinggi dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik, meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (*PPKS*), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga dan berkembangnya jiwa wirausaha, sehingga dapat menekan tingkat kemiskinan dan pengangguran, juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai.

Misi ini juga berkaitan dengan upaya pemajuan Kebudayaan daerah Banggai, Balantak, Saluan dan Andio, yang dilakukan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan Daerah dengan mempedomani Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Banggai. Misi kebudayaan ini merupakan basis atau dasar dari pelaksanaan misi lainnya, artinya seluruh pelaksanaan misi pembangunan daerah Kabupaten Banggai 2021-

2026, harus memperhatikan dan di dasarkan pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Babasalan yang bersendikan agama, dan selama ini tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Misi ini juga bermakna bahwa melalui pembinaan, kerukunan dan harmonisasi keagamaan akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang aman dan damai, dengan pembinaan yang intensif akan meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai religi dalam kehidupan bermasyarakat dan memelihara toleransi antar umat beragama dalam mewujudkan kerukunan dan harmonisasi, sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agamanya secara baik dan tentram.



Misi ini di arahkan pada upaya untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan yang lebih produktif dan berdaya saing dengan memanfaatkan teknologi, baik di perdesaan maupun perkotaan, terbentuknya kluster-kluster/kawasan ekonomi produktif dalam bentuk industri pengolahan hasil perikanan, pertanian, perkebunan dan kehutanan, termasuk pengembangan UMKM dan koperasi, dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran penting guna meningkatkan kemandirian ekonomi, karena memiliki potensi sebagai pertumbuhan pendapatan per kapita, sumber pertumbuhan lapangan pekerjaan, sebagai motor penggerak pembangunan perdesaan, pengurangan impor, penyelamat kegiatan ekonomi pada masa krisis, sebagai wadah pengembangan kewirausahaan, dan sumber investasi produksi. Olehnya itu daya saing Koperasi dan UMKM perlu di tingkatkan sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang Go Modern, Go

Digital, Go Online dan berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas”), baik pada aspek-aspek kegiatan usaha yang dijalani, seperti aspek produksi, pemasaran, pembiayaan, kelembagaan dan SDM, maupun kemampuan entrepreneur dalam meningkatkan usahanya.

Pengelolaan potensi unggulan daerah seperti pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan serta potensi pertambangan migas dan non migas perlu di optimalkan secara berkelanjutan dan memperhatikan kelestarian lingkungan, agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkualitas serta mendorong bergeraknya sektor ekonomi lainnya lebih signifikan, yang pada gilirannya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Upaya ini dapat di wujudkan antara lain melalui :

- 1 Peningkatan produksi dan produktivitas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.
- 2 Peningkatan Populasi dan Produksi Peternakan.
- 3 Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya, serta industry maritime/perikanan.
- 4 Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah.
- 5 Pengelolaan dan Investasi pertambangan milik daerah

Misi ini di arahkan pada upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perikanan dan kelautan, dalam mewujudkan Banggai Swasembada pangan berkelanjutan. Banggai Swasembada Pangan merupakan upaya pemerintah Kabupaten Banggai untuk meningkatkan produksi dan produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas pangan yang beragam, bergizi dan seimbang, dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat.

Berkaitan dengan potensi Sumber Daya Alam Gas Bumi yang di miliki oleh Kabupaten Banggai, Pemerintah daerah di beri ruang dan peran oleh Pemerintah melalui Peraturan Perundang-undangan untuk dapat terlibat secara langsung dalam pengelolaan Wilayah Kerja Migas melalui penawaran Partisipating Interest (PI) 10%. Oleh karena itu, sebagai salah satu daerah penghasil migas, kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan Participating Interest harus dipastikan dimanfaatkan oleh daerah melalui BUMD yang sepenuhnya dimiliki oleh Daerah. Keterlibatan Pemerintah Daerah ini di harapkan akan memberikan keuntungan/profit bagi BUMD yang akan menambah pendapatan daerah. Selain itu akan memberikan pengetahuan dan pengalaman BUMD dalam pengelolaan Blok Migas sebagai Kontraktor, juga menciptakan transparansi atau keterbukaan mengenai lifting, cadangan, cost dan lain-lain. Saat ini melalui BUMD Banggai Energi Utama (BEU) sedang berproses upaya pemerintah daerah untuk memperoleh PI 10% di maksud yang di targetkan akan di peroleh di tahun 2027.

Keseluruhan Upaya di atas di lakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merata dan berkelanjutan dan dapat di nikmati oleh seluruh lapisan Masyarakat.



Pemenuhan kebutuhan infrastruktur/sarana prasarana merupakan kebutuhan yang vital bagi daerah yang masih kekurangan sarana prasarana pelayanan dasar atau yang memerlukan infrastruktur penunjang yang penting bagi peningkatan produktivitas ekonomi daerah. Keinginan Kabupaten Banggai untuk membangun infrastruktur merupakan kebutuhan yang semakin nyata, sejalan dengan pembangunan ekonomi

yang di lakukan. Infrastruktur sangat penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan daerah serta untuk mendorong tumbuhnya perekonomian daerah secara lebih cepat.

Ketersediaan infrastruktur wilayah yang memadai dan berkualitas seperti jalan, jembatan, air bersih, irigasi, transportasi, telekomunikasi serta energi dan ketenagalistrikan menjadi syarat mutlak bagi masuknya investasi di daerah ini, selain karena potensi wilayah yang kita miliki. oleh karena penyediaan dan peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan merata tidak saja menjadi prasarana yang dapat memberi daya ungkit terhadap optimalisasi pengembangan berbagai potensi daerah, tetapi juga akan membuka keterisolasian wilayah dan aksesibilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Misi ini diarahkan pada upaya untuk mempercepat penyediaan sarana prasarana termaksud diatas, utamanya sarana prasarana pelayanan dasar yang di butuhkan oleh masyarakat Kabupaten Banggai, secara merata dan berkualitas. Di harapkan tidak ada lagi rumah tangga yang tidak menikmati listrik, air bersih, fasilitas sanitasi lingkungan dan tidak ada lagi area Blank Spoot yang tidak terjangkau telekomunikasi, serta tidak ada lagi desa-desa yang terisolir dan tidak dapat di jangkau.

Selain masalah sarana prasarana, upaya untuk meningkatkan ketahanan bencana daerah melalui koordinasi/integrasi dan peningkatan kapasitas pemda dan masyarakat dalam penanggulangan bencana menjadi sangat penting. Hal ini mengingat Kabupaten Banggai juga merupakan salah satu wilayah dengan kategori rawan bencana. Oleh sebab itu upaya penanggulangan bencana mesti diintegrasikan/ diinternalisasikan kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, agar program penanggulangan

bencana dapat dilakukan secara efektif, sinergis dan tidak tumpang tindih. Selain itu upaya ini untuk memastikan ketersediaan pendanaan bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah., sehingga tercipta kemandirian pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana..



Misi Ke empat Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan di arahkan pada 3 hal yaitu Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM atau Indeks Desa), Kemandirian Ekonomi Perdesaan melalui BUMDes dan Koperasi Merah Putih dan Pemekaran Wilayah untuk mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah.

Wilayah perdesaan memiliki peranan yang vital dan strategis di dalam pembangunan ekonomi mandiri dan berkelanjutan, terutama melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah Lembaga ekonomi desa yang di kelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa, dengan tujuan dapat meningkatkan pendapatan Asli Desa, pengelolaan potensi desa serta sebagai tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi perdesaan. Pendirian dan pengelolaan BUMDesa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu diperlukan upaya yang cukup serius agar BUMDesa dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Program/ Inovasi 1 BUMDes 500 Juta akan di lanjutkan melalui misi ini.

Selain BUMDes, misi ini di arahkan untuk mendukung Program Koperasi Merah Putih untuk mendorong kemandirian desa dan kesejahteraan anggotanya. Sementara, BUMDes berorientasi pada pengelolaan

aset ekonomi desa untuk kepentingan masyarakat desa.

Desa mandiri adalah salah satu tujuan dari pembangunan desa di Indonesia. Desa mandiri adalah desa yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan desa dan memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakatnya. Desa mandiri tidak hanya bergantung pada bantuan dari pemerintah, tetapi juga mampu mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada di desanya. Desa mandiri adalah desa yang memiliki kemandirian dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan pemerintahan. Desa mandiri juga memiliki identitas dan karakteristik yang khas, serta menjaga nilai-nilai lokal yang positif.

Sedangkan Pemekaran wilayah adalah proses pembentukan daerah baru dari wilayah yang sudah ada, seperti Provinsi, Kabupaten, Kecamatan ataupun Desa. Tujuan dari pemekaran ini adalah untuk menciptakan daerah yang lebih mandiri, meningkatkan pelayanan public dan mempercepat pemerataan Pembangunan.



Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik/amanah (Good Governance) dan Pemerintahan yang Bersih (Clean Government) telah menjadi komitmen nasional dan daerah. Misi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif arahkan pada upaya menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih (good dan clean governance) pada seluruh struktur pemerintahan daerah secara disiplin dan sungguh-sungguh, sehingga diharapkan akan tercipta sistem pemerintahan dan birokrasi daerah yang bebas praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan didukung oleh adanya penegakan hukum serta pengawasan internal

dan eksternal melalui Reformasi birokrasi. Misi ini juga diarahkan pada upaya untuk meningkatkan profesionalisme aparatur daerah, peningkatan fungsi pelayanan publik yang prima dan berbasis teknologi informasi, serta peningkatan sinergitas antar pelaku / stakeholders pembangunan, utamanya partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan. Reformasi birokrasi ini juga mesti diikuti oleh meningkatnya kapasitas kelembagaan partai politik dan parlemen daerah.

Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), Reformasi birokrasi juga mendorong setiap pemerintah daerah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, reformasi birokrasi mendesak pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan mindset dan culture set harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukan performa/kinerjanya. Birokrasi juga harus lebih lincah, sederhana, adaptif dan inovatif, serta mampu bekerja secara efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan apa yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo bahwa kecepatan melayani serta birokrasi akuntabel, efektif dan efisien menjadi kunci bagi terwujudnya Reformasi Birokrasi, oleh sebab itu harus di bangun secara sistematis dan berkelanjutan, dengan melibatkan aktor-aktor di luar pemerintah dalam penyusunan dan pelaksanaan program-program Reformasi Birokrasi.

Misi yang tertuang RPJMD Tahun 2025-2029, disamping sebagai penjabaran tahapan, arah dan kebijakan dalam pencapaian Visi, harus pula menjadi bagian dari arah, kebijakan dan tahapan dalam pencapaian Misi RPJPD Kabupaten Banggai Tahun 2025–2045. Oleh karena itu, maka Misi dari kedua dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut satu sama lain harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan, sehingga keselarasan keduanya dapat dikemukakan sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Keselarasan Misi RPJPD 2025–2045**  
**dengan Misi RPJMD 2025–2029**

<b>Misi RPJPD 2025-2045</b>	<b>Misi RPJMD 2025– 2045</b>
<b>Misi 1</b> Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing melalui Transformasi Sosial	Diterjemahkan ke dalam <b>Misi 1</b> SDM Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing
<b>Misi 2</b> Ekonomi Daerah Tangguh dan Inklusif melalui Transformasi Ekonomi	Diterjemahkan kedalam <b>Misi 2</b> Ekonomi Daerah Tangguh dan Inklusif Berbasis Potensi Unggulan <b>Misi 4</b> Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
<b>Misi 3</b> Transformasi Tata Kelola untuk Pemerintahan yang Baik dan Inovatif	Diterjemahkan kedalam <b>Misi 5</b> Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif
<b>Misi 4</b> Ketahanan Sosial dan Budaya untuk Kehidupan Bermasyarakat yang Berkualitas.	Diterjemahkan kedalam <b>Misi 1</b> SDM Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing

<b>Misi RPJPD 2025-2045</b>	<b>Misi RPJMD 2025– 2045</b>
<b>Misi 5</b> Ketahanan Ekologi dan Pembangunan Berkelanjutan	Diterjemahkan kedalam <b>Misi 3</b> Pemenuhan Sarana dan Prasarana Berkualitas, Merata dan Ramah Lingkungan
<b>Misi 6</b> Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Diterjemahkan kedalam <b>Misi 3</b> Pemenuhan Sarana dan Prasarana Berkualitas, Merata dan Ramah Lingkungan <b>Misi 4</b> Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
<b>Misi 7</b> Sarana Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Diterjemahkan kedalam <b>Misi 3</b> Pemenuhan Sarana dan Prasarana Berkualitas, Merata dan Ramah Lingkungan <b>Misi 4</b> Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
<b>Misi 8</b> Kecinambungan Pembangunan	Diterjemahkan kedalam <b>Misi 5</b> Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif

RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025–2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah seyogyanya menjadi bagian dari pencapaian Misi yang tertuang RPJM Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029, sehingga antara misi perencanaan pembangunan Kabupaten Banggai dengan misi perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah terjadi keselarasan.

**Tabel 3.4**  
**Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Banggai 2025-2029 dengan**  
**Misi RPJMD Sulawesi Tengah 2025-2029**

<b>Misi RPJMD Sulteng 2025-2029</b>	<b>Misi RPJMD Banggai 2025-2029</b>
<b>Misi 1</b> Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja.	<b>Misi 1</b> SDM Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing
<b>Misi 2</b> Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan..	<b>Misi 1</b> SDM Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing <b>Misi 2</b> Ekonomi Daerah Tangguh dan Inklusif Berbasis Potensi Unggulan
<b>Misi 3</b> Mewujudkan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor.	<b>Misi 3</b> Pemenuhan Sarana dan Prasarana Berkualitas, Merata dan Ramah Lingkungan. <b>Misi 4</b> Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan.
<b>Misi 4</b> Meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah Yang tangguh berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal.	<b>Misi 1</b> SDM Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing <b>Misi 5</b> Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif

Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (SPN) Pasal 5 ayat (2), maka dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-

2029, disamping berpedoman pada RPJP Daerah perlu pula memperhatikan RPJM Nasional, sehingga penjabaran program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banggai menjadi bagian integral dari program nasional. Oleh karena itu, maka misi yang diemban oleh pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD harus memiliki keselarasan dengan misi yang tertuang dalam RPJMN sebagai arah dan kebijakan pembangunan nasional.

**Tabel 3.5**  
**Keselaran Misi RPJMD Kabupaten Banggai 2025-2029 dengan**  
**Misi RPJM Nasional 2025-2029**

<b>Misi RPJMN 2025-2029 (ASTA CITA/PRIORITAS NASIONAL)</b>	<b>Misi RPJMD Banggai 2025-2029</b>
<b>Misi/Asta Cita/PN 1</b> Memperkokok Ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	<b>Misi 1</b> SDM Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing <b>Misi 5</b> Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif
<b>Misi/Asta Cita/PN2</b> Memantapkan Sistem Pertahanan Kemananan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	<b>Misi 2</b> Ekonomi Daerah Tangguh dan Inklusif Berbasis Potensi Unggulan
<b>Misi/Asta Cita/PN 3</b> Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, mengembangkan industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	<b>Misi 3</b> Pemenuhan Sarana dan Prasarana Berkualitas, Merata dan Ramah Lingkungan. <b>Misi 4</b> Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
<b>Misi/Asta Cita/PN 4</b> Memperkuat Pembangunan SDM, sains, teknologi, Pendidikan,	<b>Misi 1</b> SDM Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing

<b>Misi RPJMN 2025-2029 (ASTA CITA/PRIORITAS NASIONAL)</b>	<b>Misi RPJMD Banggai 2025-2029</b>
Kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z dan penyandang disabilitas	
<b>Misi/Asta Cita/PN 5</b> Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	<b>Misi 2</b> Ekonomi Daerah Tangguh dan Inklusif Berbasis Potensi Unggulan
<b>Misi/Asta Cita/PN 6</b> Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	<b>Misi 2</b> Ekonomi Daerah Tangguh dan Inklusif Berbasis Potensi Unggulan <b>Misi 4</b> Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
<b>Misi/Asta Cita/PN 7</b> Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.	<b>Misi 5</b> Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif
<b>Misi/Asta Cita/PN 8</b> Memperkuat penyelerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur	<b>Misi 1</b> SDM Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing <b>Misi 3</b> Pemenuhan Sarana dan Prasarana Berkualitas, Merata dan Ramah Lingkungan

### **3.1.2 Tujuan dan Sasaran**

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dalam hal ini tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.

Tujuan (*goal*) adalah pernyataan-pernyataan yang merupakan penjabaran tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan pembangunan daerah yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Sasaran (*objective*) adalah penjabaran dari tujuan, yaitu merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai selama Periode 2025-2029 berdasarkan Visi dan Misi adalah:

**Tabel 3.6**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
<b>Misi 1 :</b> SDM Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing	1.1 Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai yang Berbudaya, Produktif dan Sejahtera.	1.1.1 Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi
		1.1.2 Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata
		1.1.3 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Perluasan Kesempatan Kerja
		1.1.4 Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Gender yang setara
		1.1.5 Terwujudnya Kebudayaan Daerah yang Maju dan Masyarakat yang Harmonis dan Toleran
		1.1.6 Meningkatnya daya saing Pemuda dan prestasi olah raga
<b>Misi 2 :</b> Ekonomi Daerah Tangguh dan Inklusif Berbasis Potensi Unggulan	2.1 Pertumbuhan Ekonomi Daerah Inklusif dan Berkelanjutan berbasis potensi unggulan Daerah	2.1.1 Terwujudnya Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang inklusif secara berkelanjutan.
		2.1.2 Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Menuju Banggai Swasembada Pangan Berkelanjutan

Misi	Tujuan	Sasaran
		untuk Mendukung Perekonomian Daerah
<b>Misi 3 :</b> Pemenuhan Sarana dan Prasarana Berkualitas, Merata dan Ramah Lingkungan.	3.1 Penyediaan, Pemenuhan dan Pemerataan Sarana Prasarana Dasar, TIK dan Konektivitas	3.1.1 Tersedianya Sarana dan Prasarana Dasar yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan.
		3.1.2 Tersedianya sarana dan prasarana konektivitas yang Berkualitas dan Merata untuk mendukung Aktivitas Perekonomian dan Penanggulangan Kemiskinan
	3.2 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta kelestarian Lingkungan Hidup	3.2.1 Meningkatnya Ketahanan Daerah melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
		3.1 Terwujudnya Tata Ruang, lingkungan hidup yang berkualitas, lestari dan berkelanjutan
<b>Misi 4 :</b> Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	4.1 Pemekaran Wilayah, Pembangunan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan	4.1.1 Terwujudnya pemekaran Desa/Kelurahan, Kecamatan dan pembentukan DOB Baru
		4.1.2 Meningkatnya Status Desa Maju dan Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun

Misi	Tujuan	Sasaran
		(IDM) atau Indeks Desa
		4.1.3 Terwujudnya Kota Luwuk sebagai Kota Layak Huni
<b>Misi 5 :</b> Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif	5.1.3 Penguatan Reformasi Birokrasi Berdampak dan Berkelanjutan.	5.1.1 Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah
		5.1.2 Meningkatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel
		5.1.3 Meningkatnya Efektivitas Kelembagaan Daerah dan Manajemen Sumber Daya Aparatur

Secara rinci gambaran masing-masing tujuan dan sasaran sesuai Misi RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 dapat di gambarkan sebagai berikut :

#### **a. Tujuan dan Sasaran Misi 1**

Misi **Sumber Daya Manusia Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing** di lakukan melalui Transformasi pada seluruh siklus hidup manusia Kabupaten Banggai melalui Pendidikan, pelatihan dan penguasaan IPTEK, peningkatan Gizi dan Kesehatan Masyarakat , pengasuhan, keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan Masyarakat inklusif, pemajuan kebudayaan daerah, beragama maslahat, serta pengurangan kemiskinan dan pengangguran, perlindungan dan bantuan sosial yang adaatif.

Misi pertama ini mempertegas komitmen Pemerintah Kabupaten Banggai untuk menciptakan SDM unggul, sehat, berkarakter dan adaatif terhadap perkembangan zaman. Fokus Misi pertama di

arahkan pada bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, keagamaan serta prestasi pemuda dan olah raga.

Di bidang pendidikan layanan akan di laksanakan secara inklusif dan berkelanjutan. Pemerataan akses pendidikan gratis di SD dan SMP, pemberian beasiswa hingga ke jenjang SMA/SMK dan Perguruan Tinggi, serta penerapan Dana Operasional Sekolah (DOS) SD/SMP merupakan upaya konkrit yang akan di lakukan dalam menciptakan kesempatan belajar yang setara bagi masyarakat Kabupaten Banggai. Penguatan kurikulum berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia industri, juga menjadi prioritas untuk mempersiapkan generasi muda kabupaten Banggai yang cerdas, kreatif dan siap bersaing di era digital.

Pelayanan Kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan di lakukan untuk memastikan seluruh warga Kabupaten Banggai mendapatkan akses layanan berobat gratis, melalui kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional, pengembangan telemedicine dan pelayanan kesehatan bergerak untuk desa-desa yang sulit terjangkau (pegunungan dan kepulauan). Penanganan stunting, kesehatan ibu hamil dan balita, penguatan posyandu dan rintisan peningkatan status Puskesmas menjadi Rumah Sakit Tipe C/D di 4 wilayah prioritas juga menjadi perhatian.

Sekain itu, sasaran dalam Misi ini juga di arahkan pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan sosial yang adaptif dan perluasan lapangan kerja untuk pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan gender yang setara, pemajuan kebudayaan daerah (BABASALAN) dan masyarakat yang harmonis dan toleran serta meningkatnya daya saing pemuda dan prestasi olah raga.

Untuk mencapai Misi 1 tersebut, di rumuskan Tujuan dan Sasaran di sertai indikator pencapaian sasaran sebagai berikut sebagai mana tabel 3.7 berikut :

**Tabel 3.7**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 1 RPJMD**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029**

Tujuan/Sasaran/Indikator		Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
<b>Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai yang Berbudaya, Produktif dan Sejahtera</b>					
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Angka	72,86	72,86-73,43	74,00-75,56
<b>1.</b>	<b>Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi</b>				
	a. Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72,26	72,36	72,74
	b. Prevalensi Stunting (SGGI)	%	28,6	24,1	14,2
<b>2.</b>	<b>Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata</b>				
	a. Hasil Pembelajaran : Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:				
	– Literasi Membaca				
	a) SD	Angka	51,31	53,81	63,81
	b) SMP	Angka	63,78	64,88	69,28
	– Numerasi				
	a) SD	Angka	45,94	48,84	60,44
	b) SMP	Angka	57,16	58,66	64,66
	b. Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,35	13,51	14,13
	c. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,81	8,96	9,53
<b>3.</b>	<b>Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Perluasan Kesempatan Kerja</b>				
	a. Tingkat Kemiskinan	%	6,56	6,27 – 6,51	4,95 – 5,50
	b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,11	2,74 – 3,00	2,12 – 3,00
<b>4.</b>	<b>Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Gender yang setara</b>				
	a. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	58,76	61,40	66,00

Tujuan/Sasaran/Indikator		Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
	b. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,450	0,444	0,394
	c. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	N/A	59,5	66,37
<b>5. Terwujudnya Kebudayaan Daerah yang Maju dan Masyarakat yang Harmonis dan Toleran</b>					
	a. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	27,17	29,72	39,92
	b. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Angka	N/A	80,00	85,40
<b>6. Meningkatnya daya saing Pemuda dan Prestasi Olah Raga</b>					
	a. Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	N/A	65	75
	b. Indeks Pembangunan Olahraga	Angka	N/A	0,450	0,650

Secara diagramatis, berdasarkan cascading kinerja tujuan dan sasaran Misi 1 dapat di gambarkan sebagai berikut :

**Gambar 3.3**  
**Cascading Kinerja Tujuan dan Sasaran Misi 1 RPJMD**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029**

<b>MISI 1 RPJMD</b>	SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL, BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING					
<b>TUJUAN RPJMD</b>	PENINGKATAN KUALITAS DAN DAYA SAING SDM KABUPATEN BANGGAI YANG BERBUDAYA, PRODUKTIF DAN SEJAHTERA					
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)					
<b>SASARAN RPJMD</b>	TERWUJUDNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG TINGGI	TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS DAN MERATA	MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAFTIF DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	TERWUJUDNYA KELUARGA BERKUALITAS DAN GENDER YANG SETARA	TERWUJUDNYA KEBUDAYAAN DAERAH YANG MAJU SERTA MASYARAKAT YANG HARMONIS DAN TOLERAN	MENINGKATNYA DAYA SAING PEMUDA DAN PRESTASI OLAH RAGA
	1. USIA HARAPAN HIDUP (UHH). 2. PRIVALENSI STUNTING	1. HASIL PEMBELAJARAN Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada assessment Tingkat nasional untuk: • Literasi Membaca • Numerasi 2. HARAPAN LAMA SEKOLAH 3. RATA - RATA LAMA SEKOLAH	1. TINGKAT KEMISKINAN 2. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPP)	1. INDEKS PEMBANGUNAN KUALITAS KELUARGA (IBANGGA) 2. INDEKS KETIMPANGAN GENDER 3. INDEKS PERLINDUNGAN ANAK	1. INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN (IPK) 2. INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (IKUB)	1. INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA 2. INDEKS PEMBANGUNAN OLAH RAGA.
<b>TUJUAN PD</b>	TERWUJUDNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG TINGGI	TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS DAN MERATA	MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAFTIF DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	TERWUJUDNYA KELUARGA BERKUALITAS DAN GENDER YANG SETARA	TERWUJUDNYA KEBUDAYAAN DAERAH YANG MAJU SERTA MASYARAKAT YANG HARMONIS DAN TOLERAN	MENINGKATNYA DAYA SAING PEMUDA DAN PRESTASI OLAH RAGA
<b>SASARAN PD</b>	RUMUSAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SESUAI TUJUAN DAN TUPOKSI PD	RUMUSAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SESUAI TUJUAN DAN TUPOKSI PD	RUMUSAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SESUAI TUJUAN DAN TUPOKSI PD	RUMUSAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SESUAI TUJUAN DAN TUPOKSI PD	RUMUSAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SESUAI TUJUAN DAN TUPOKSI PD	RUMUSAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SESUAI TUJUAN DAN TUPOKSI PD
<b>URUSAN</b>	Kesehatan + CROSS CUTTING	Pendidikan + CROSS CUTTING	SOSIAL, KETENAGAKERJAAN + CROSS CUTTING	KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK + CROSS CUTTING	KESBANGPOL, PENDIDIKAN, PARIWISATA, SATPOL PP, PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PEMUDA DAN OLAH RAGA + CROSS CUTTING

Cascading Kinerja RPJMD di atas, menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah terkait, pengampu Misi 1 untuk menjabarkan lebih lanjut dalam Renstra Perangkat Daerah masing-masing. Sasaran RPJMD akan menjadi Tujuan Perangkat Daerah, sedangkan sasaran strategis Perangkat Daerah di sesuaikan dengan tupoksi masing-masing sebagai penjabaran dari tujuan Perangkat Daerah di Misi 1.

#### **b. Tujuan dan Sasaran Misi 2**

Misi **Ekonomi Daerah Tangguh dan Inklusif Berbasis Potensi Unggulan** dimaksudkan untuk mewujudkan ekonomi daerah yang maju dan berkeadilan yang di tunjukan dengan pertumbuhan sektor ekonomi yang tinggi dan stabil, produktivitas kuat, berdaya saing dan nilai tambah tinggi. Hal ini di lakukan melalui percepatan terwujudnya industri sektor pangan (pertanian dan perikanan/kelautan), pengembangan koperasi dan UMKM, tranformasi digital, serta peningkatan peran BUMD dalam pengelolaan potensi Minyak dan Gas Bumi.

Misi ini juga di fokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan investasi, penyederhanaan perizinan, kemudahan berusaha, kemudahan akses pembiayaan hingga pemberian stimulus investasi yang pro rakyat serta tumbuhnya wirausaha muda baru yang inovatif, kreatif dan adaftif terhadap perkembangan zaman. Misi ini di harapkan meneguhkan posisi Kabupaten Banggai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, perdagangan, pertanian, kelautan dan perikanan di kawasan Timur Sulawesi Tengah dan pulau Sulawesi.

Untuk mencapai Misi 2 tersebut, di rumuskan Tujuan dan Sasaran di sertai indikator pencapaian sasaran sebagai berikut sebagaimana tabel 3.8 berikut :

**Tabel 3.8**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 2**  
**RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029**

Tujuan/Sasaran/Indikator		Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
<b>Pertumbuhan Ekonomi Daerah Inklusif dan Berkelanjutan berbasis potensi unggulan daerah</b>					
Laju Pertumbuhan Ekonomi		%	3,92	4,61 – 5,00	4,78 – 6,53
PDRB Perkapita		Juta Rp.	107,88	119,11	166,55
<b>1.</b>	<b>Terwujudnya Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang inklusif secara berkelanjutan</b>				
	a. Indeks Gini	Angka	0,316	0,268 – 0,300	0,250 – 0,290
	b. Tingkat Inflasi	%	2,75	3,13	2,78
	c. Pertumbuhan Ekonomi	%	3,92	4,61 – 5,00	4,78 – 6,53
<b>2.</b>	<b>Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Menuju Banggai Swasembada Pangan Berkelanjutan untuk Mendukung Perekonomian Daerah</b>				
	a. Prevalensi Ketidakcukupan konsumsi Pangan	%	9,52	9,09	7,37
	b. Indeks Ketahanan Pangan	Angka	85,14	85,60	87,33

Secara diagramatis, berdasarkan cascading kinerja tujuan dan sasaran Misi 2 dapat di gambarkan sebagai berikut :

**Gambar 3.4**  
**Cascading Kinerja Tujuan dan Sasaran Misi 2 RPJMD**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029**

<b>MISI 2 RPJMD</b>	<b>EKONOMI DAERAH TANGGUH DAN INKLUSIF BERBASIS POTENSI UNGGULAN</b>	
<b>TUJUAN RPJMD</b>	<b>PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN BERBASIS POTENSI UNGGULAN DAERAH</b>	
	PERTUMBUHAN EKONOMI PDRB PERKAPITA	
<b>SASARAN RPJMD</b>	<b>TERWUJUDNYA STABILITAS DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH YANG INKLUSIF SECARA BERKELANJUTAN.</b>	<b>MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN MENUJU BANGGAI SWASEMBADA PANGAN</b>
	1. GINI RASIO 2. ANGKA INFLASI 3. PERTUMBUHAN EKONOMI	1. PRIVALENSI KETIDAKCUKUPAN KONSUMSI PANGAN 2. INDEKS KETAHANAN PANGAN
<b>TUJUAN PD</b>	<b>TERWUJUDNYA STABILITAS DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH YANG INKLUSIF SECARA BERKELANJUTAN.</b>	<b>MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN MENUJU BANGGAI SWASEMBADA PANGAN</b>
<b>SASARAN PD</b>	<b>RUMUSAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SESUAI TUJUAN DAN TUPOKSI PD</b>	<b>RUMUSAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SESUAI TUJUAN DAN TUPOKSI PD</b>
<b>URUSAN</b>	<b>(PENANAMAN MODAL, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM, PARIWISATA) + CROSS CUTTING</b>	<b>PERTANIAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN, KETAHANAN PANGAN + CROSS CUTTING</b>

Cascading Kinerja RPJMD di atas, menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah terkait, pengampu Misi 2 untuk menjabarkan lebih lanjut dalam Renstra Perangkat Daerah masing-masing. Sasaran RPJMD akan menjadi Tujuan Perangkat Daerah, sedangkan sasaran strategis Perangkat Daerah di sesuaikan dengan tupoksi masing-masing sebagai penjabaran dari tujuan Perangkat Daerah di Misi 2.

### **c. Tujuan dan Sasaran Misi 3**

Misi 3 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Berkualitas, Merata dan Ramah Lingkungan di maksudkan sebagai dasar dan pijakan untuk Pembangunan daerah tahap berikutnya, maka percepatan Pemenuhan sarana prasarana dasar, konektivitas dan TIK yang berkualitas, ramah lingkungan, terjangkau dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Banggai, akan di lakukan melalui Misi 3 ini. Misi ini juga memberi arahan pengelolaan lingkungan hidup yang Lestari dan berketahanan, resiliensi bencana dan perubahan iklim.

Misi ini sebagai perwujudan komitmen Pemerintah Kabupaten Banggai untuk memperkuat ketahanan daerah melalui pembangunan dan penyediaan sarana prasarana dan infrastruktur yang berkelanjutan, merata dan adaptif terhadap tantangan lingkungan. Penyediaan air bersih, rumah layak huni, sanitasi aman, pembangunan jalan dan jembatan, transportasi perdesaan dan perkotaan mejandi fokus dalam misi ini. Selain itu Misi ini juga di fokuskan terhadap peningkatan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana dengan mengoptimalkan kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana serta revisi Tata Ruang Wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang Lestari dan berkelanjutan

Untuk mencapai Misi 3 tersebut, di rumuskan Tujuan dan Sasaran di sertai indikator pencapaian sasaran sebagai berikut sebagai mana tabel 3.9 berikut :

**Tabel 3.9**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 3**  
**RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029**

Tujuan/Sasaran/Indikator		Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
<b>Penyediaan, Pemenuhan dan Pemerataan Sarana Prasarana Dasar, TIK dan Konektivitas</b>					
Indeks Kepuasan layanan Infrastruktur		Indeks	N/A	76,61 (Baik)	78,95 (Baik)
<b>1.</b>	<b>Tersedianya Sarana dan Prasarana Dasar yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan</b>				
	Persentase pemenuhan akses layanan dasar (Air Bersih, Sanitasi Aman serta Hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan)	%	88,43	89,34	95,00
<b>2.</b>	<b>Tersedianya sarana dan prasarana konektivitas yang Berkualitas dan Merata untuk mendukung Aktivitas Perekonomian dan Penanggulangan Kemiskinan</b>				
	a. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%	34,29	40,99	83,66
	b. Rasio Konektivitas	%	N/A		
	c. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	N/A		
<b>Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta kelestarian Lingkungan Hidup</b>					
Indeks Resiko Bencana (IRB)		Angka	156,37	147,48	119,28
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		Angka	81,16	82,21	82,86
<b>1.</b>	<b>Meningkatnya Ketahanan Daerah melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana</b>				
	a. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Angka	0,37	0,39	0,51
<b>2.</b>	<b>Terwujudnya Tata Ruang, lingkungan hidup yang berkualitas, lestari dan berkelanjutan</b>				
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	81,16	82,21	82,86

Tujuan/Sasaran/Indikator		Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
	b. Persentasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO <sub>2</sub> eq		609.706,30	
	c. Tingkat Kepatuhan Terhadap Tata Ruang	%	80	81	92

Secara diagramatis, berdasarkan cascading kinerja tujuan dan sasaran Misi 3 dapat di gambarkan sebagai berikut :

**Gambar 3.5**  
**Cascading Kinerja Tujuan dan Sasaran Misi 3 RPJMD**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029**

<b>MISI 3 RPJMD</b>	PEMEMUHAN SARANA DAN PRASARANA BERKUALITAS, MERATA DAN RAMAH LINGKUNGAN			
<b>TUJUAN RPJMD</b>	PENYEDIAAN, PEMENUHAN DAN PEMERATAAN SARANA PRASARANA DASAR, TIK DAN KONEKTIVITAS		RESILIENSI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM SERTA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	
	INDEKS KEPUASAN LAYANAN INFRASTRUKTUR		INDEKS RESIKO BENCANA (IRB) INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)	
<b>SASARAN RPJMD</b>	TERSEDIAINYA SARANA DAN PRASARANA DASAR YANG BERKUALITAS, LAYAK DAN MERATA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN	TERSEDIAINYA SARANA DAN PRASARANA KONEKTIVITAS YANG BERKUALITAS DAN MERATA UNTUK MENDUKUNG AKTIVITAS PEREKONOMIAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	MENINGKATNYA KETAHANAN BENCANA DAERAH MELALUI PENINGKATAN KAPASITAS PEMDA DAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN BENCANA	TERWUJUDNYA TATA RUANG, LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS, LESTARI DAN BERKELANJUTAN
	PERSENTASE PEMENUHAN AKSES LAYANAN DASAR (AIR BERSIH, SANITASI AMAN SERTA HUNIAN LAYAK, TERJANGKAU DAN BERKELANJUTAN)	1. JALAN MANTAP KABUPATEN 2. RASIO KONEKTIVITAS 3. INDEKS PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD)	1. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP 2. PERSENTASE PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 3. TINGKAT KEPATUHAN TERHADAP TATA RUANG
<b>TUJUAN PD</b>	TERSEDIAINYA SARANA DAN PRASARANA DASAR YANG BERKUALITAS, LAYAK DAN MERATA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN	TERSEDIAINYA SARANA DAN PRASARANA KONEKTIVITAS YANG BERKUALITAS DAN MERATA UNTUK MENDUKUNG AKTIVITAS PEREKONOMIAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	MENINGKATNYA KETAHANAN BENCANA DAERAH MELALUI PENINGKATAN KAPASITAS PEMDA DAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN BENCANA	TERWUJUDNYA TATA RUANG, LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS, LESTARI DAN BERKELANJUTAN
<b>SASARAN PD</b>	RUMUSAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SESUAI TUJUAN DAN TUPOKSI PD	RUMUSAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SESUAI TUJUAN DAN TUPOKSI PD	RUMUSAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SESUAI TUJUAN DAN TUPOKSI PD	RUMUSAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SESUAI TUJUAN DAN TUPOKSI PD
<b>URUSAN</b>	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN + CROSS CUTTING	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN + CROSS CUTTING	PENANGGULANGAN BENCANA, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM + CROSS CUTTING	LINGKUNGAN HIDUP, PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG + CROSS CUTTING

Cascading Kinerja RPJMD di atas, menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah terkait, pengampu Misi 3 untuk menjabarkan lebih lanjut dalam Renstra Perangkat Daerah masing-masing. Sasaran RPJMD akan menjadi Tujuan Perangkat Daerah, sedangkan sasaran strategis Perangkat Daerah di sesuaikan dengan tupoksi masing-masing sebagai penjabaran dari tujuan Perangkat Daerah di Misi 3.

#### d. Tujuan dan Sasaran Misi 4

Misi ini di arahkan pada Upaya untuk mengurangi kesenjangan wilayah di Kabupaten Banggai dengan cara antara lain percepatan pencapaian desa Maju dan Mandiri, persiapan dan percepatan pemekaran wilayah desa, Kecamatan dan DOB, Pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan dan Tambahan Dana Kelurahan.

Untuk mencapai Misi 4 tersebut, di rumuskan Tujuan dan Sasaran di sertai indikator pencapaian sasaran sebagai berikut sebagaimana tabel 3.10 berikut :

**Tabel 3.10**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 4 RPJMD**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029**

Tujuan/Sasaran/Indikator		Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
<b>Pemekaran Wilayah, Pembangunan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan</b>					
<b>1.</b>	<b>Terwujudnya pemekaran Desa/Kelurahan, Kecamatan dan pembentukan DOB Baru</b>				
	Realisasi Pemekaran Desa/Kelurahan, Kecamatan dan DOB, sesuai Design besar pemekaran di Kabupaten Banggai.	%	10	15	35
<b>2.</b>	<b>Meningkatnya Status Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) atau Indeks Desa</b>				
	a. Persentase Desa Mandiri Berdasarkan IDM	%	19,24	40	80
	b. Persentase BUMDes Sehat	%	49,50	50	75
<b>3.</b>	<b>Terwujudnya Kota Luwuk sebagai Kota Layak Huni</b>				
	Indeks Kota Layak Huni untuk Kota Luwuk	Indeks	N/A		

Secara diagramatis, berdasarkan cascading kinerja tujuan dan sasaran Misi 4 dapat di gambarkan sebagai berikut :

**Gambar 3.6**  
**Cascading Kinerja Tujuan dan Sasaran Misi 4 RPJMD**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029**

<b>MISI 4 RPJMD</b>	PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN		
<b>TUJUAN RPJMD</b>	PEMEKARAN WILAYAH, PEMBANGUNAN KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN		
<b>SASARAN RPJMD</b>	TERWUJUDNYA PEMEKARAN DESA/KELURAHAN, KECAMATAN DAN PEMBENTUKAN DOB BARU	MENINGKATNYA STATUS DESA MAJU DAN MANDIRI BERDASARKAN INDEKS DESA	MENINGKATNYA FUNGSI KAWASAN PERKOTAAN LUWUK
	REALISASI PEMEKARAN DESA/KELURAHAN, KECAMATAN DAN DOB SESUAI DESIGN BESAR PEMEKARAN DI KABUPATEN BANGGAI	1. PERSENTASE DESA MANDIRI BERDASARKAN IDM 2. PERSENTASE BUMDes SEHAT	1. REALISASI LUWUK KOTA TEPIAN AIR 2. REALISASI LUWUK KOTA GAS 3. REALISASI LUWUK CLEAN AND GREEN CITY
<b>TUJUAN PD</b>	TERWUJUDNYA PEMEKARAN DESA/KELURAHAN, KECAMATAN DAN PEMBENTUKAN DOB BARU	MENINGKATNYA STATUS DESA MAJU DAN MANDIRI BERDASARKAN INDEKS DESA	MENINGKATNYA FUNGSI KAWASAN PERKOTAAN LUWUK
<b>SASARAN PD</b>	RUMUSAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SESUAI TUJUAN DAN TUPOKSI PD	RUMUSAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SESUAI TUJUAN DAN TUPOKSI PD	RUMUSAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SESUAI TUJUAN DAN TUPOKSI PD
<b>URUSAN</b>	SEKRETARIAT DAERAH + CROSS CUTTING	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA + CROSS CUTTING	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP + CROSS CUTTING

Cascading Kinerja RPJMD di atas, menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah terkait, pengampu Misi 4 untuk menjabarkan lebih lanjut dalam Renstra Perangkat Daerah masing-masing. Sasaran RPJMD akan menjadi Tujuan Perangkat Daerah, sedangkan sasaran strategis Perangkat Daerah di sesuaikan dengan tupoksi masing-masing sebagai penjabaran dari tujuan Perangkat Daerah di Misi 4.

#### **e. Tujuan dan Sasaran Misi 5**

Guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta berorientasi hasil, di lakukan transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang meliputi antara lain kelembagaan daerah yang efektif, penguatan system merit, manajemen talenta ASN, peningkatan aksesibilitas dan inklusifitas pelayanan public terpadu, serta transformasi layanan pemerintahan berbasis digital.

Untuk mencapai Misi 5 tersebut, di rumuskan Tujuan dan Sasaran di sertai indikator pencapaian sasaran sebagai berikut sebagai mana tabel 3.11 berikut :

**Tabel 3.11**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 5 RPJMD**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029**

Tujuan/Sasaran/Indikator		Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
<b>Penguatan Reformasi Birokrasi Berdampak dan Berkelanjutan</b>					
Indeks Reformasi Birokrasi		Predikat	BB	BB	A
<b>1.</b>	<b>Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah</b>				
	a. Indeks Pelayanan Publik	Indeks/Predikat	Kualitas Tinggi	Kualitas Tinggi	Kualitas Tinggi
	b. Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif
<b>2.</b>	<b>Meningkatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel</b>				
	a. Nilai SAKIP	Predikat	BB	BB	A
	b. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	2,87	2,96	3,15
	c. Indeks SPBE	Indeks/Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	d. Nilai Survey Penilaian Integritas	Nilai	Baik	Baik	Baik
<b>3.</b>	<b>Meningkatnya Efektivitas Kelembagaan Daerah dan Manajemen Sumber Daya Aparatur</b>				
	Indeks Sistem Merit	Indeks	Baik	Baik	Baik
	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	N/A	Baik	Sangat Baik

Secara diagramatis, berdasarkan cascading kinerja tujuan dan sasaran Misi 5 dapat di gambarkan sebagai berikut :

**Gambar 3.7**  
**Cascading Kinerja Tujuan dan Sasaran Misi 5 RPJMD**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029**

<b>MISI 5 RPJMD</b>	TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN INOVATIF		
<b>TUJUAN RPJMD</b>	PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI BERDAMPAK DAN BERKELANJUTAN.		
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI		
<b>SASARAN RPJMD</b>	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN INOVASI DAERAH	MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH	MENINGKATKAN EFEKTIVITAS KELEMBAGAAN DAERAH DAN MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR
	1. INDEKS PELAYANAN PUBLIK 2. INDEKS INOVASI DAERAH	1. NILAI SAKIP 2. INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD) 3. INDEKS SPBE 4. NILAI SURVEY PENILAIAN INTEGRITAS	1. INDEKS SISTEM MERIT 2. INDEKS PROFESIONALITAS ASN
<b>TUJUAN PD</b>	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN INOVASI DAERAH	MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH	MENINGKATKAN EFEKTIVITAS KELEMBAGAAN DAERAH DAN MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR
<b>SASARAN PD</b>	RUMUSAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SESUAI TUJUAN DAN TUPOKSI PD	RUMUSAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SESUAI TUJUAN DAN TUPOKSI PD	RUMUSAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SESUAI TUJUAN DAN TUPOKSI PD
<b>URUSAN</b>	SEKRETARIAT DAERAH + CROSS CUTTING	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA + CROSS CUTTING	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP + CROSS CUTTING

Cascading Kinerja RPJMD di atas, menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah terkait, pengampu Misi 5 untuk menjabarkan lebih lanjut dalam Renstra Perangkat Daerah masing-masing. Sasaran RPJMD akan menjadi Tujuan Perangkat Daerah, sedangkan sasaran strategis Perangkat Daerah di sesuaikan dengan tupoksi masing-masing sebagai penjabaran dari tujuan Perangkat Daerah di Misi 5.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029, adalah sebagaimana tergambar dalam tabel 3.12 berikut :

**Tabel 3.12**  
**Keterkaitan Visi Misi Tujuan Sasaran dan Indikator RPJMD Kabupaten Banggai 2025-2029**

NO	VISI/ MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2025)	TARGET KINERJA SASARAN					KONDISI AKHIR	
						2026	2027	2028	2029	2030		
	Visi : Bergerak Bersama Berkelanjutan Menuju Gerbang Timur Sulawesi Tengah ( Gerakan Banggai Terdepan, Inovatif, Maju dan Sejahtera)											
1.	Misi I : SDM Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing											
		Tujuan 1.1 Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai yang Berbudaya, Produktif dan Sejahtera.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	73,43	73,95	74,51	75,04	75,56	76,09	76,09	
		Sasaran 1.1.1 Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72,36	72,45	72,55	72,64	72,74	72,83	72,83	
			Prevalensi Stunting (SGGI)	%	24,1	20,1	18,1	16,3	14,2	14,0	14,0	
		Sasaran 1.1.2 Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata	1. Hasil Pembelajaran Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:									
			a. Literasi Membaca									
			▪ SD	Kategori	53,81	56,31	58,81	61,31	63,81	66,31	66,31	
			▪ SMP	Kategori	64,88	65,98	67,08	68,18	69,28	70,38	70,38	
			b. Numerasi									
			▪ SD	Kategori	48,84	51,74	54,64	57,54	60,44	63,34	63,34	
			▪ SMP	Kategori	58,66	60,16	61,66	63,16	64,66	66,16	66,16	
2. Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,51	13,66	13,82	13,98	14,13	14,28	14,28				

NO	VISI/ MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2025)	TARGET KINERJA SASARAN					KONDISI AKHIR
						2026	2027	2028	2029	2030	
			3. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,96	9,10	9,25	9,39	9,53	9,67	9,67
		<b>Sasaran 1.1.3</b> Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Perluasan Kesempatan Kerja	Tingkat Kemiskinan	%	6,27	5,94	5,61	5,28	4,95	4,65	4,65
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,74	2,59	2,43	2,28	2,12	2,00	2,00
		<b>Sasaran 1.1.4</b> Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Gender yang setara	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga)	Angka	61.40	62,6	63,7	64,9	66	67,2	67,2
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0.444	0,432	0,419	0,397	0,394	0,391	0,391
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	59.51	60.47	62.44	64.50	66.37	68.33	68.33
		<b>Sasaran 1.1.5</b> Terwujudnya Kebudayaan Daerah yang Maju dan Masyarakat yang Harmonis dan Toleran	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	29,72	32,27	34,82	37,37	39,92	42,47	42,47
			Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Angka	80,00	81,40	82,80	84,00	85,40	86,80	86,80
		<b>Sasaran 1.1.6</b> Meningkatnya daya saing Pemuda dan prestasi olah raga	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	65	67	69	72	75	78	78
			Indeks Pembangunan Olah Raga	Angka	0,400	0,405	0,425	0,450	0,475	0,500	0,500
2.	Misi II : Ekonomi Daerah Tangguh dan Inklusif Berbasis Potensi Unggulan										
		Tujuan 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Daerah Inklusif dan Berkelanjutan berbasis potensi unggulan Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,14	4,28	4,43	4,60	4,78	4,90	4,90
			PDRB Perkapita	Juta Rp.	119,11	129,16	140,30	152,71	166,55	178,20	178,20

NO	VISI/ MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2025)	TARGET KINERJA SASARAN					KONDISI AKHIR
						2026	2027	2028	2029	2030	
		<b>Sasaran 2.1.1</b> Terwujudnya Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang inklusif secara berkelanjutan.	Gini Rasio	Angka	0,300	0,290	0,280	0,270	0,260	0,250	0,250
			Angka Inflasi	%	3,13	3,03	2,94	2,86	2,78	2,65	2,65
			Pertumbuhan Ekonomi	%	4,14	4,28	4,43	4,60	4,78	4,90	4,90
		<b>Sasaran 2.1.2</b> Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Menuju Banggai Swasembada Pangan Berkelanjutan untuk Mendukung Perekonomian Daerah.	Prevalensi Ketidacukupan konsumsi Pangan	%	9,09	8,66	8,23	7,80	7,37	6,94	6,94
			Indeks Ketahanan Pangan	Angka	85,60	85,78	86,05	86,69	87,33	87,74	87,74
3.	Misi III : Pemenuhan Sarana dan Prasarana Berkualitas, Merata dan Ramah Lingkungan										
		<b>Tujuan 3.1</b> Penyediaan, Pemenuhan dan Pemerataan Sarana Prasarana Dasar, TIK dan Konektivitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks/ predikat	N/A	75,83 (Kurang Baik)	76,61 (Baik)	77,39 (Baik)	78,17 (Baik)	78,95 (Baik)	78,95 (Baik)
		<b>Sasaran 3.1.1</b> Tersedianya Sarana dan Prasarana Dasar yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan.	Persentase pemenuhan akses layanan dasar (Air Bersih, Sanitasi Aman serta Hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan)	%	N/A	89,34	91,50	93,20	95,00	96,70	96,70
		<b>Sasaran 3.1.2</b> Tersedianya sarana dan prasarana konektivitas yang Berkualitas dan Merata untuk mendukung Aktivitas Perekonomian dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%	40,99	48,99	58,56	69,99	83,66	100	100
			Rasio Konektivitas	%							
			Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka							

NO	VISI/ MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2025)	TARGET KINERJA SASARAN					KONDISI AKHIR
						2026	2027	2028	2029	2030	
		<b>Tujuan 3.2</b> Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Angka	147,48	140,43	133,38	126,33	119,28	112,23	112,23
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	81,88	82,05	82,73	83,14	83,63	84,02	84,02
		<b>Sasaran 3.2.1</b> Meningkatnya Ketahanan Daerah melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Angka	0,39	0,42	0,45	0,48	0,51	0,54	0,54
		<b>Sasaran 3.2.2</b> Terwujudnya Tata Ruang, lingkungan hidup yang berkualitas, lestari dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	81,88	82,05	82,73	83,14	83,63	84,02	84,02
			Persentasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO2eq	609.706,30						
			Tingkat Kepatuhan Terhadap Tata Ruang	%	81	83	86	89	92	95	95
4.	Misi IV : Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan										
		<b>Tujuan 4.1</b> Pemekaran Wilayah, Pembangunan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan.									
		<b>Sasaran 4.1.1</b> Terwujudnya pemekaran Desa/Kelurahan, Kecamatan dan pembentukan DOB Baru.	Realisasi Pemekaran Desa/Kelurahan, Kecamatan dan DOB Baru, sesuai Design besar pemekaran di Kabupaten Banggai.	%	15	20	25	30	35	40	40

NO	VISI/ MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2025)	TARGET KINERJA SASARAN					KONDISI AKHIR
						2026	2027	2028	2029	2030	
		<b>Sasaran 4.1.2</b> Meningkatnya Status Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) atau Indeks Desa	Persentasi Desa Mandiri Berdasarkan IDM	%	40	50	60	70	80	90	90
			Persentasi BUMDes Sehat	%	50	56	63	69	75	80	80
		<b>Sasaran 4.1.3</b> Terwujudnya Kota Luwuk sebagai Kota Layak Huni	Indeks Kota Layak Huni untuk Kota Luwuk								
<b>5.</b>	<b>Misi V : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif</b>										
		<b>Tujuan 5.1</b> Penguatan Reformasi Birokrasi Berdampak dan Berkelanjutan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB	BB	BB	BB	A	A	A
		<b>Sasaran 5.1.1</b> Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	Kualitas Tinggi	Kualitas Tinggi	Kualitas Tinggi	Kualitas Tinggi	Kualitas Tinggi	Kualitas Tinggi	Kualitas Tinggi
			Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
		<b>Sasaran 5.1.2</b> Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	Predikat	BB	BB	A	A	A	A	A
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	3,50	3,53	3,56	3,60	3,63	3,64	3,64
			Indeks SPBE	Indeks	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
			Nilai Survey Penilaian Integritas	Nilai	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		<b>Sasaran 5.1.3</b> Meningkatnya Efektivitas Kelembagaan Daerah dan Manajemen Sumber Daya Aparatur	Indeks Sistem Merit	Indeks/ Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
			Indeks Profesionalitas ASN	Indeks/ Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

### **3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah**

Guna mewujudkan Visi dan Misi, serta Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif, berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, pentahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir, kerangka kerja atau rangkaian kerja, sebagai penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD, guna menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Arah Kebijakan dalam RPJMD menjelaskan tahapan pembangunan tahunan (milestone) Kabupaten Banggai periode 2025-2029.

Sedangkan Program prioritas dihasilkan dari *cascading* kinerja (bukan *cascading* indikator) yang dimulai dari Visi sampai dengan *outcomes* serta dilengkapi dengan indikator sesuai tingkatannya.

### **3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029**

Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banggai tahun 2025-2029 adalah sebagaimana tabel 3.13 di bawah ini :

**Tabel 3.13**

**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029**

**Visi : Bergerak Bersama Berkalanjutan Menuju Gerbang Timur Sulawesi Tengah**

**(GERakan BANGgai Terdepan, Inovatif, MajU dan sejahteRa)**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>MISI 1 : SDM UNGGUL, BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING</b>			
<b>Tujuan 1.1</b> Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera	<b>Sasaran 1.1.1</b> Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi	Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui transformasi sistem kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya melalui Gerbang Sehat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan pelaksanaan integrasi layanan primer</li> <li>2. Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan gizi ibu, anak, usia dewasa dan lansia serta dukungan program Makan Bergizi Gratis.</li> <li>3. Pemenuhan sarana prasarana sesuai standar, obat, vaksin dan BMHP di fasilitas pelayanan Kesehatan primer dan laboratorium Kesehatan.</li> <li>4. Peningkatan Upaya pemberdayaan Masyarakat dalam pembudayaan hidup sehat, pengendalian faktor resiko PTM dan peningkatan literasi Kesehatan Masyarakat.</li> <li>5. Pengendalian penyakit menular dan penuntasan TBC</li> <li>6. Penguatan surveilens, pengendalian KLB/Wabah dan penanganan bencana.</li> <li>7. Peningkatan Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional.</li> </ol>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			8. Peningkatan status Puskesmas menjadi Rumah Sakit Tipe D atau Tipe C. 9. Peningkatan sarana dan prasarana serta kualitas layanan RSUD Luwuk sebagai Rumah Sakit Rujukan. 10. Penyediaan tenaga kesehatan dengan distribusi yang merata hingga ke wilayah terpencil dan sulit akses. 11. Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi.
	<b>Sasaran 1.1.2</b> Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata	Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas layanan Pendidikan melalui Gerbang Cerdas	1. Penuntasan Program pendidikan wajar 9 tahun menuju wajib belajar 13 tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah dan 12 tahun Pendidikan dasar dan menengah). 2. Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) dan Penanganan Dewasa Tidak Sekolah (DTS). 3. Penyaluran bantuan Pendidikan yang tepat sasaran melalui penerapan DOS (Dana Operasional Sekolah). 4. Perluasan dan Penguatan Kualitas Layanan PAUD 1 Tahun Pendidikan pra sekolah. 5. Percepatan Pelaksanaan PAUD Holistik Integratif, Kelas Parenting, Penguatan UKS dan Sanitasi Sekolah, untuk pencegahan stunting

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			6. Peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan non formal. 7. Peningkatan kualitas Pendidikan agama, budaya dan budi pekerti/karakter serta pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan Teknologi Digital di sekolah. 8. Pelestarian dan pemajuan budaya, Bahasa dan sastra serta pengarusutamaanya dalam Pendidikan. 9. Peningkatan kualitas, kuantitas dan kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan, serta sebaran yang merata pada semua satuan Pendidikan dasar. 10. Peningkatan cakupan pelayanan perpustakaan melalui Gerakan literasi masyarakat.
	<b>Sasaran 1.1.3</b> Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Perluasan Kesempatan Kerja	Gerbang produktif melalui pengembangan Diklat Vokasional dan Kewirausahaan	1. Peningkatan Pelatihan kerja dan Penyelenggaraan Diklat Vokasional. 2. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja. 3. Peningkatan layanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan kesempatan kerja.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<p>4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial yang harmonis serta penciptaan iklim ketenagakerjaan yang baik.</p> <p>5. Fasilitasi Perkembangan usaha rintisan lokal (Start up Company) dan pelatihan vokasi digital.</p> <p>12. Fasilitasi Wirausaha Pemuda, Santri, Wirausaha Sosial dan Komunitas.</p>
		<p>Penanggulangan kemiskinan daerah secara terpadu dan lintas sektor, menuju Banggai Sejahtera</p>	<p>1. Validasi Data Penduduk Miskin, rentan miskin serta data penerima penerima bantuan sesuai skema Bansos Adaktif.</p> <p>2. Sinkronisasi program lintas Perangkat Daerah dalam penanggulangan kemiskinan, melalui Inovasi “Tumis Ikan Teri” (Tuntaskan Kemiskinan melalui kegiatan Terintegrasi).</p> <p>3. Penyelenggaraan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UGD Kemiskinan)</p> <p>4. Meningkatkan Kapasitas PSKS dan Kelembagaan Kesos dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.</p> <p>5. Peningkatan Upaya Pemberdayaan, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Bagi PPKS.</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			6. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana (alam dan sosial) pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
	<b>Sasaran 1.1.4</b> Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Gender yang setara	Pangarusutamaan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pelayanan Keluarga Berencana guna mewujudkan Keluarga Sejahtera.	1. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi. 2. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan serta Peningkatan pemenuhan hak perempuan dalam ketenagakerjaan. 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan pangarusutamaan gender (PUG). 4. Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan. 5. Peningkatan Kualitas Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 6. Perwujudan Kabupaten Layak Anak dan Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk Pemenuhan Hak Anak (PHA).

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	<b>Sasaran 1.1.5</b> Terwujudnya Kebudayaan Daerah yang Maju serta Masyarakat yang Harmonis dan Toleran.	Meningkatkan Pemajuan dan pelestarian Kebudayaan Banggai, Balantak, Saluan dan Andio.	1. Revitalisasi dan reaktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal Babasalan. 2. Pengembangan seni dan budaya Babasalan 3. Pemanfaatan kekayaan Budaya Babasalan untuk kesejahteraan rakyat banggai melalui pengembangan Pariwisata Budaya. 4. Pelestarian serta pengelolaan Cagar Budaya dan Museum Daerah.
		Pengarusutamaan Moderasi Beragama (Wasathiyah) sebagai karakter beragama masyarakat Kabupaten Banggai.	1. Peningkatan wawasan kebangsaan dan pembinaan idiologi Pancasila di tengah masyarakat. 2. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan
		Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1. Optimalisasi penegakan Peraturan Daerah 2. Peningkatan penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 3. Peningkatan Perlindungan Masyarakat
	<b>Sasaran 1.1.6</b> Meningkatkan daya saing Pemuda dan Prestasi olah raga	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan daerah serta pengembangan olah raga.	1. Peningkatan Kapasitas dan daya saing Kepemudaaan agar dapat berpartisipasi Aktif dalam pembangunan daerah (Sosial, Politik dan Ekonomi), melalui Fasilitasi Ruang Kreasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<p>positif bagi pemuda termasuk membangun wirausaha muda kreatif.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pencegahan perilaku beresiko pada pemuda (bahaya kekerasan, penyalahgunaan NAFZA, Miras dan HIV/AIDS).</li> <li>3. Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan, Karang Taruna dan Pramuka.</li> <li>4. Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan melalui pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan, olah raga prestasi, olah raga rekreasi dan organisasi olah raga.</li> <li>5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olah raga.</li> </ol>
<b>MISI 2 : EKONOMI DAERAH TANGGUH DAN INKLUSIF BERBASIS POTENSI UNGGULAN</b>			
<b>Tujuan 2.1</b> Pertumbuhan Ekonomi Daerah Inklusif dan Berkelanjutan berbasis potensi unggulan Daerah	<b>Sasaran 2.1.1</b> Terwujudnya Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang inklusif secara berkelanjutan.	Fasilitasi Koperasi Generasi Baru yang Maju, Modern serta UMKM Naik Kelas dan Go Digital	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Koperasi dan UMKM berbasis kewirausahaan dengan pendekatan kelompok, komunitas dan kluster sesuai sentra komoditas dan wilayah.</li> <li>2. Pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan Koperasi dan UMKM secara lintas sektor dan mengedepankan kemitraan.</li> <li>3. Modernisasi dan penerapan Inovasi Teknologi pada produk dan jasa Koperasi dan UMKM.</li> </ol>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			4. Iklim Usaha UMKM yang kondusif 5. Digitalisasi pemasaran UMKM dan koperasi.
		Memperkuat pertumbuhan ekonomi di sektor industri dan perdagangan.	1. Peningkatan tertib usaha perdagangan melalui peningkatan jumlah pasar yang tertib, bersih, indah dan nyaman serta berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. 2. Peningkatan stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. 3. Peningkatan nilai ekspor daerah. 4. Peningkatan perlindungan konsumen melalui penerapan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang bertanda tera sah. 5. Peningkatan jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang berkembang dan mampu mengakses pasar.
		Meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing.	1. Peningkatan peluang dan potensi serta promosi investasi/penanaman modal di daerah, berbasis potensi lokal. 2. Peningkatan kualitas layanan Penanaman modal/ pelayanan perizinan berusaha melalui optimalisasi sistem OSS. 3. Peningkatan iklim penanaman modal yang berdaya saing. 4. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah daerah dan dunia usaha/swasta.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			5. Peningkatan kemitraan antara PMA dan PMD dengan UKM Lokal.
		Meningkatkan Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah	1. Pengembangan destinasi pariwisata prioritas 2. Pengembangan pemasaran pariwisata berbasis digital. 3. Peningkatan kapasitas tenaga kerja pariwisata melalui pelatihan Vokasi dan peningkatan kompetensi digital pelaku pariwisata. 6. Pengembangan kelembagaan pariwisata dan masyarakat sadar wisata. 7. Peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan ( <i>event</i> ) dan <i>Meetings, incentives, Conferences, Exhibitions (MICE)</i> . 8. Pelibatan Masyarakat lokal dalam mendukung produktivitas pariwisata.
		Pengembangan dan pemanfaatan Potensi pertambangan (Mineral, Minyak dan Gas) untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1. Pengembangan sistem pola Kerjasama antara pemerintah dan perusahaan industri minyak dan gas, melalui pembentukan/revitalisasi dan pemberdayaan BUMD. 2. Percepatan pembangunan usaha industri minyak dan gas daerah dengan melakukan Kerjasama antara pemerintah dan perusahaan industri minyak dan gas. 3. Peningkatan Kerjasama Pendidikan antara pemerintah dan perusahaan industri minyak

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<p>dan gas untuk meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Banggai yang dapat diserap menjadi tenaga kerja industri minyak dan gas</p> <p>4. Re-negosiasi antara pemerintah dan perusahaan industri minyak dan gas untuk meningkatkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih menguntungkan bagi masyarakat Kabupaten Banggai</p> <p>5. Percepatan pembangunan Jaringan Gas (City Gas) melalui Kerjasama antara pemerintah dan perusahaan industri minyak dan gas.</p>
	<p><b>Sasaran 2.1.2</b></p> <p>Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Menuju Banggai Swasembada Pangan Berkelanjutan untuk Mendukung Perekonomian Daerah..</p>	<p>1. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan</p>	<p>1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan (LCP2B).</p> <p>2. Penyediaan benih yang memenuhi prinsip 5T (tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat harga).</p> <p>3. Peningkatan Penyediaan prasarana dan pemanfaatan teknologi pertanian.</p> <p>4. Penyediaan akses terhadap informasi pasar, sumber permodalan, teknologi, sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan.</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		2. Meningkatkan penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat khususnya untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai kewenangan Kabupaten Banggai.	1. Peningkatan ketersediaan air baku untuk jaringan irigasi dalam mendukung produksi dan produktivitas tanaman pangan. 2. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi.
		3. Meningkatkan populasi dan produksi peternakan menuju Banggai sejuta ternak	1. Peningkatan ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak. 2. Peningkatan populasi dan produktivitas ternak. 3. Meningkatkan ketersediaan dan produksi pakan ternak. 4. Menjamin produk hewani yang ASUH dan berdaya saing. 5. Peningkatan Pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, kesehatan hewan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit hewan.
		4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi hasil perikanan dan pemasarannya dalam rangka memenuhi	1. Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya melalui pemanfaatan teknologi perikanan, pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. 2. Peningkatan infrastruktur perikanan tangkap dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		kebutuhan protein yang berasal dari ikan.	(air bersih, listrik, BBM, sistem rantai dingin, pelabuhan perikanan). 3. Penyediaan Akses nelayan/pembudidaya ikan terhadap permodalan, teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
		5. Meningkatkan Ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman serta terjangkau bagi masyarakat.	1. Peningkatan Infrastruktur pangan, diversifikasi dan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan serta pengawasan keamanan pangan. 2. Implementasi Perda Lahan Pangan Berkelanjutan. 3. Pemanfaatan Lahan pekarangan melalui implementasi Inovasi satu juta satu pekarangan.
		6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kesejahteraan Petani/Peternak dan Nelayan.	1. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pertanian/ perkebunan. 2. Peningkatan peran dan fungsi Kelembagaan Peternak 3. Peningkatan Pembinaan Kelompok Nelayan dan pembudidaya ikan
MISI 3 : PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA BERKUALITAS, MERATA DAN RAMAH LINGKUNGAN.			
Tujuan 3.1 Penyediaan, Pemenuhan dan Pemerataan Sarana	Sasaran 3.1.1 Tersedianya Sarana dan Prasarana Dasar yang Berkualitas, Layak dan Merata	1. Meningkatkan kualitas layanan Air Minum dan Perumahan layak di	1. Penataan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten menuju Banggai Tanpa Kekumuhan.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Prasarana Dasar, TIK dan Konektivitas	Untuk Penanggulangan Kemiskinan.	perkotaan dan perdesaan untuk kehidupan masyarakat yang lebih layak dan bermartabat.	2. Penyediaan Akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan korban bencana. 3. Penyediaan akses dan peningkatan system penyediaan air minum yang aman melalui jaringan perpipaan di perkotaan maupun perdesaan. 4. Peningkatan kualitas layanan Air Minum perkotaan melalui PDAM
		2. Meningkatkan kualitas layanan sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman perkotaan dan perdesaan.	1. Peningkatan dan pengembangan sistem jaringan drainase dan sistem air limbah domestik di perkotaan dan perdesaan. 2. Eliminasi Praktek Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
	<b>Sasaran 3.1.2</b> Tersedianya sarana dan prasarana konektivitas yang Berkualitas dan Merata untuk mendukung Aktivitas Perekonomian dan Penanggulangan Kemiskinan	1. Meningkatkan Jaringan jalan, jembatan, sarana dan prasarana transportasi secara merata dan berkualitas untuk konektivitas wilayah	1. Kerjasama penyediaan infrastruktur dengan pihak swasta melalui mekanisme KPBU. 2. Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan yang berkualitas yang menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Banggai. 3. Peningkatan kinerja pelayanan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<p>utamanya di wilayah terpencil, pedalaman dan daerah rawan bencana.</p> <p>4. Penyediaan sistem angkutan umum publik dalam kota dan perdesaan yang terpadu dan nyaman.</p> <p>5. Penyediaan Fasilitas keselamatan lalu lintas jalan.</p> <p>6. Pengembangan infrastruktur dan layanan angkutan laut/pelayaran untuk mendukung konektivitas dengan Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai Laut dan kepulauan Taliabo</p>
		2. Meningkatkan tertib pembangunan bangunan Gedung.	<p>1. Peningkatan layanan PBG dan regulasi bangunan gedung</p> <p>2. Penyediaan Fasilitas Pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik.</p>
		3. Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta ketenagalistrikan sampai ke pelosok desa.	<p>1. Percepatan Implementasi Master Plan pengembangan Teknologi dan Informatika Kabupaten Banggai.</p> <p>2. Pembangunan Infrastruktur TIK dan system jaringan intra Pemerintah Daerah untuk mendukung transformasi digital.</p> <p>3. Peningkatan kompetensi aparatur di bidang Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK).</p> <p>4. Peningkatan keterbukaan informasi public dan Literasi TIK masyarakat (<i>Digital society</i>).</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>Tujuan 3.2</b> Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta kelestarian Lingkungan Hidup	<b>Sasaran 3.2.1</b> Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Meningkatkan ketahanan bencana daerah melalui koordinasi/ integrasi pemda dan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integrasi Kajian Resiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana daerah ke dalam perencanaan pembangunan daerah.</li> <li>2. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, melalui penguatan manajemen bencana berbasis masyarakat dan data Bencana terpadu.</li> <li>3. Penguatan system peringatan dini bencana.</li> <li>4. Penguatan system logistiik pangan dan jaring pengaman sosial untuk masyarakat terdampak bencana.</li> <li>5. Pengembangan Desa Tangguh Bencana</li> <li>6. Penguatan system penanggulangan bahaya kebakaran melalui penyiapan sarana dan prasarana, pencegahan dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.</li> </ol>
	<b>Sasaran 3.2.2</b> Terwujudnya Tata Ruang, lingkungan hidup yang berkualitas, lestari dan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup..</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan kelembagaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang SDA dan LH.</li> <li>2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.</li> <li>3. Peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.</li> </ol>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			4. Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Keanekaragaman hayati. 5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui pembangunan rendah karbon. 6. Pengelolaan sampah perkotaan berbasis masyarakat dengan pendekatan <i>Reduce</i> , <i>Reuse</i> dan <i>Recycle</i> .
		2. Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang Daerah dan pertanahan	1. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 dan rencana rincinya. 2. Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah. 3. Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 4. Pengurangan jumlah sengketa, konflik dan perkara tata ruang dan pertanahan.
<b>MISI 4 : PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN.</b>			
<b>Tujuan 4.1</b> Pemekaran Wilayah, Pembangunan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan	<b>Sasaran 4.1.1</b> Terwujudnya pemekaran Desa/Kelurahan, Kecamatan dan pembentukan DOB Baru	Meningkatkan realisasi pemekaran Desa, Kecamatan dan Rintisan Pembentukan DOB Baru sesuai yang di rencanakan	1. Penyusunan Desain Besar Pemekaran daerah Kabupaten Banggai 2. Kajian pemekaran daerah Kabupaten Banggai 3. Rintisan dan persiapan pemekaran Desa, Kecamatan dan Pembentukan DOB Baru

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	<b>Sasaran 4.1.2</b> Meningkatnya Status Desa Maju dan Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) atau Indeks Desa	Meningkatkan Desa Maju dan Mandiri melalui pemenuhan layananan dasar, infrastruktur, kemandirian ekonomi dan pemberdayaan Masyarakat di perdesaan.	1. Peningkatan pembangunan perdesaan berbasis kawasan dan potensi lokal desa, melalui Kerjasama antar desa. 2. Revitalisasi BUMDes/BUMDes Bersama melalui kebijakan satu BUMDes 500 Juta. 3. Peningkatan Investasi produk unggulan perdesaan/ kawasan perdesaan melalui BUMDes dan koperasi Merah Putih untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis. 4. Peningkatan partisipasi Masyarakat Desa 5. Pemasalan Pemanfaatan Pekarangan melalui system pertanian terintegrasi di Perdesaan (kelanjutan program satu juta satu pekarangan)
	<b>Sasaran 4.1.3</b> Meningkatnya Fungsi Kawasan Perkotaan Luwuk	Mewujudkan Luwuk Kota Layak Huni	1. Penerapan konsep <i>Water Front city</i> dalam penataan Kota Luwuk di sepanjang pesisir Pantai, Sungai jolek dan Sungai Soho, sebagai pusat aktivitas ekonomi, sosial, budaya dan rekreasi. 2. Pemenuhan dan optimalisasi fungsi ekologis ruang terbuka hijau publik Kawasan perkotaan Luwuk. 3. Fasilitasi/rintisan Luwuk <i>City Gas</i>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			4. Optimalisasi Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan Luwuk. 5. Penataan dan Pembangunan jaringan jalan dalam kota luwuk (ring Road atas dan bawah), sebagai jalan alternatif mengatasi kemacetan kota. 6. Penertiban parkir dalam kota luwuk.
<b>MISI 5 : TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN INOVATIF</b>			
<b>Tujuan 5.1</b> Peningkatan Kualitas Reformasi di Kabupaten Banggai untuk terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	<b>Sasaran 5.1.1</b> Meningkatnya indeks reformasi birokrasi Kabupaten Banggai	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK	1. Peningkatan kemudahan perizinan dan investasi serta kemudahan berusaha 2. Peningkatan kualitas dan cakupan layanan administrasi kependudukan 3. Peningkatan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 4. Modernisasi/Digitalisasi system dan manajemen pelayanan publik. 5. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Perangkat Daerah pengampu SPM. 6. Peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
		2. Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah	1. Banggai Inovatif 2. Penguatan Kembali Laboratorium Inovasi Daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		3. Meningkatkan kinerja/kualitas perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.	1. Penerapan Open Data, Satu Data Banggai. 2. Pengembangan <i>performance base budgeting</i> melalui integrasi perencanaan dan penganggaran daerah berbasis IT. 3. Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi rencana pembangunan. 4. Pemanfaatan hasil penelitian pengembangan daerah. 5. Peningkatan Partisipasi masyarakat, dunia usaha dan akademisi dalam pembangunan melalui pendekatan Pentahelix.
		4. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.	1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah 2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah 3. Peningkatan Kualitas Pengelolaan pendapatan Daerah
		5. Meningkatkan pengawasan, transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kab. Banggai.	1. Peningkatan level Maturitas SPIP 2. Peningkatan Level Kapabilitas APIP 3. Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 4. Penerapan Rencana Aksi/Komitmen Global Pemerintahan Terbuka ( <i>Open Government Partnership</i> ) Kabupaten Banggai.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			5. Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan DPRD dan Masyarakat.
		6. Meningkatnya penataan peraturan perundang-undangan daerah dan penegakan Perda.	1. Peningkatan kualitas proses dan substansi Peraturan Perundang-undangan daerah. 2. Peningkatan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah, sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
		7. Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi tepat ukuran.	1. Peningkatan ketepatan ukuran, ketepatan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 2. Pengurangan dan penghapusan tugas dan fungsi yang tumpang tindih antar unit kerja atau antar Perangkat Daerah. 3. Peningkatan koordinasi dan pola hubungan kerja antar Perangkat daerah. 4. Peralihan Jabatan Fungsional dan penyesuaian terhadap Nomenklatur Program dan kegiatan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019.
		8. Penataan Tata Laksana Perangkat Daerah, Kecamatan dan Desa serta fungsi Pemerintahan Umum.	1. Penerapan system, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis <i>e-Government</i> . 2. Pengembangan <i>e-Government</i> secara terintegrasi.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			3. Peningkatan kualitas <i>e-procurement</i> 4. Peningkatan kualitas pengelolaan arsip daerah. 5. Peningkatan Kualitas Persandian Daerah. 6. Peningkatan kualitas pelayanan sekretariat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. 7. Peningkatan Fungsi Kesbangpol. 8. Peningkatan Kapasitas kelembagaan dan kinerja pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa.
		9. Peningkatan kompetensi, profesionalitas dan disiplin ASN serta budaya kerja.	1. Penegakan disiplin ASN melalui penerapan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> . 2. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur pejabat struktural melalui diklat kepemimpinan Tkt IV, III dan II. 3. Peningkatan jabatan fungsional. 4. Peningkatan budaya dan etos kerja ASN. 5. Penerapan system manajemen kinerja individu. 6. Pengembangan system informasi manajemen SDM Aparatur yang komprehensif dan terintegrasi.

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana diatas merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai tujuan dan sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan tema/urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan sampai akhir periode perencanaan.

Pentahapan pembangunan daerah dalam kurun waktu 2025-2030 kedepan di lakukan secara terukur dan konsisten agar terwujud Gerbang Timur di akhir periode perencanaan.

**Tahap Transisi** (Tahun 2025-2026) adalah tahapan **Transisi menuju Gerbang Timur** yang merupakan kelanjutan dan kesinambungan dari RPJMD 2021-2026. Pada tahapan ini di lakukan penyesuaian, sinkronisasi dan penajaman terhadap visi dan misi termasuk penyelesaian permasalahan pembangunan, program dan kegiatan periode sebelumnya selama periode menjabat Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2021-2024.

**Tahap Pertama** (Tahun 2026) adalah tahapan Penyiapan **Fondasi Gerbang Timur**. Berdasarkan permasalahan dan kinerja pembangunan sampai dengan tahun 2025 di lakukan persiapan, penyelesaian, pemenuhan dan peningkatan berbagai sektor pembangunan untuk menjadi dasar atau pondasi dalam melaksanakan tahap awal proses Banggai menuju Gerbang Timur Sulawesi Tengah. Peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah, utamanya sektor pangan menuju swasembada dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menjadi tema di tahun ini, menyesuaikan dengan tema Provinsi dan Nasional di tahun 2026. Penataan infrastruktur pendukung ekonomi seperti pasar, kawasan perdagangan, dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan UMKM go Digital dan ekonomi kreatif, menjadi prioritas, di samping

pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur pendukung ekonomi dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

**Tahap Kedua** (Tahun 2027) adalah tahapan Akselerasi Gerbang Timur, yaitu proses percepatan atau peningkatan capaian di tahap pertama tahun 2026. Peningkatan kualitas SDM melalui layanan digitalisasi pendidikan, kesehatan, dan perluasan perlindungan sosial adaptif menjadi prioritas utama pada tahap kedua ini, di barengi dengan penuntasan prasarana dasar untuk percepatan penurunan kemiskinan.

**Tahap Ketiga** (Tahun 2028) adalah tahapan pemantapan Gerbang Timur, yaitu pemantapan dari seluruh tahapan sebelumnya terkait dengan upaya menciptakan sumberdaya manusia unggul dan berdaya saing, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, infrastruktur/sarana prasarana dasar dan konektivitas wilayah yang di dukung oleh pengelolaan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan, peemართან pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang keseluruhannya di dukung oleh Tata kelola Pemerintahan yang baik dan inovatif.

**Tahap Empat** (Tahun 2029-2030) adalah tahapan perwujudan Gerbang Timur Sulawesi Tengah, sekaligus sebagai masa transisi ke pemerintahan baru tahun 2030.

**Gambar 3.8**  
**Tahapan Implementasi RPJMD Kabupaten Banggai**  
**Tahun 2025-2029**



Periode RPJMD Kabupaten Banggai yang disusun ini adalah 2025-2029, namun tahapan arah kebijakan yang dipergunakan terhitung sejak tahun 2026 hingga tahun 2030, dengan dasar asumsi bahwa di tahun 2030, merupakan masa transisi antara periode pembangunan, sehingga tetap bisa memedomani arah kebijakan yang termuat di dalam dokumen ini. Rincian arah kebijakan yang selaras dengan strategi pembangunan Daerah Kabupaten Banggai di tahun 2026-2030, di gambarkan sebagaimana tabel 3.14 berikut :

**Tabel 3.14**  
**Tahapan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2026-2030**

Strategi	Arah Kebijakan	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui Gerbang Sehat	1. Penguatan pelaksanaan integrasi layanan primer					
	2. Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan gizi ibu, anak, usia dewasa dan lansia serta dukungan program Makan Bergizi Gratis.					
	3. Pemenuhan sarana prasarana sesuai standar, obat, vaksin dan BMHP di fasilitas pelayanan Kesehatan primer dan laboratorium Kesehatan.					
	4. Peningkatan Upaya pemberdayaan Masyarakat dalam pembudayaan hidup sehat, pengendalian faktor resiko PTM dan peningkatan literasi Kesehatan Masyarakat.					
	5. Pengendalian penyakit menular dan penuntasan TBC					
	6. Penguatan surveilens, pengendalian KLB/Wabah dan penanganan bencana.					
	7. Peningkatan Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional.					
	8. Peningkatan status Puskesmas menjadi Rumah Sakit Tipe D atau Tipe C.					

Strategi	Arah Kebijakan	2026	2027	2028	2029	2030
	9. Peningkatan sarana dan prasarana serta kualitas layanan RSUD Luwuk sebagai Rumah Sakit Rujukan.					
	10. Penyediaan tenaga kesehatan dengan distribusi yang merata hingga ke wilayah terpencil dan sulit akses.					
	11. Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi					
Meningkatkan akses dan kualitas layanan Pendidikan melalui Gerbang Cerdas	1. Penuntasan Program pendidikan wajar 9 tahun menuju wajib belajar 13 tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah dan 12 tahun Pendidikan dasar dan menengah).					
	2. Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) dan Penanganan Dewasa Tidak Sekolah (DTS).					
	3. Penyaluran bantuan Pendidikan yang tepat sasaran melalui penerapan DOS (Dana Operasional Sekolah).					
	4. Perluasan dan Penguatan Kualitas Layanan PAUD 1 Tahun Pendidikan pra sekolah.					
	5. Percepatan Pelaksanaan PAUD Holistik Integratif, Kelas Parenting, Penguatan UKS dan Sanitasi Sekolah, untuk pencegahan stunting					
	6. Peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan non formal.					
	7. Peningkatan kualitas Pendidikan agama, budaya dan budi pekerti/karakter serta pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan Teknologi Digital di sekolah.					

Strategi	Arah Kebijakan	2026	2027	2028	2029	2030
	8. Pelestarian dan pemajuan budaya, Bahasa dan sastra serta pengarusutamaanya dalam Pendidikan.					
	9. Peningkatan kualitas, kuantitas dan kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan, serta sebaran yang merata pada semua satuan Pendidikan dasar.					
	10. Peningkatan cakupan pelayanan perpustakaan melalui Gerakan literasi masyarakat.					
Gerbang produktif melalui pengembangan Diklat Vokasional dan Kewirausahaan	1. Peningkatan Pelatihan kerja dan Penyelenggaraan Diklat Vokasional.					
	2. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja.					
	3. Peningkatan layanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan kesempatan kerja.					
	4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial yang harmonis serta penciptaan iklim ketenagakerjaan yang baik.					
	5. Fasilitasi Perkembangan usaha rintisan (Start up Company) dan pelatihan vokasi digital.					
	6. Fasilitasi Wirausaha Pemuda, Santri, Wirausaha Sosial dan Komunitas.					
Penanggulangan kemiskinan daerah secara terpadu dan lintas sektor, menuju Banggai Sejahtera	1. Validasi Data Penduduk Miskin, rentan miskin serta data penerima penerima bantuan sesuai skema Bansos Adaftif.					
	2. Sinkronisasi program lintas Perangkat Daerah dalam penanggulangan kemiskinan, melalui Inovasi “Tumis Ikan					

Strategi	Arah Kebijakan	2026	2027	2028	2029	2030
	Teri” (Tuntaskan Kemiskinan melalui kegiatan Terintegrasi).					
	3. Penyelenggaraan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UGD Kemiskinan)					
	4. Meningkatkan Kapasitas PSKS dan Kelembagaan Kesos dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.					
	5. Peningkatan Upaya Pemberdayaan, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Bagi PPKS.					
	6. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana (alam dan sosial) pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.					
Pengarusutamaan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pelayanan Keluarga Berencana guna mewujudkan Keluarga Sejahtera.	1. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi.					
	2. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan serta Peningkatan pemenuhan hak perempuan dalam ketenagakerjaan.					
	3. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG).					
	4. Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan.					
	5. Peningkatan Kualitas Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.					
	6. Perwujudan Kabupaten Layak Anak dan Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk Pemenuhan Hak Anak (PHA).					

Strategi	Arah Kebijakan	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan Pemajuan dan pelestarian Kebudayaan Banggai, Balantak, Saluan dan Andio.	1. Revitalisasi dan reaktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal Babasalan.					
	2. Pengembangan seni dan budaya Babasalan					
	3. Pemanfaatan kekayaan Budaya Babasalan untuk kesejahteraan rakyat banggai melalui pengembangan Pariwisata Budaya.					
	4. Pelestarian serta pengelolaan Cagar Budaya dan Museum Daerah.					
Pengarusutamaan Moderasi Beragama (Wasathiyah) sebagai karakter beragama masyarakat Kabupaten Banggai.	1. Peningkatan wawasan kebangsaan dan pembinaan ideologi Pancasila di tengah masyarakat.					
	2. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama					
Meningkatkannya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1. Optimalisasi penegakan Peraturan Daerah					
	2. Peningkatan penanganan Gangguan Ketrentaman dan Ketertiban Masyarakat					
	3. Peningkatan Perlindungan Masyarakat					
Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan daerah serta pengembangan olah raga.	1. Peningkatan Kapasitas dan daya saing Kepemudaaan agar dapat berpartisipasi Aktif dalam pembangunan daerah (Sosial, Politik dan Ekonomi), melalui Fasilitasi Ruang Kreasi positif bagi pemuda termasuk membangun wirausaha muda kreatif.					
	2. Pencegahan perilaku beresiko pada pemuda (bahaya kekerasan, penyalahgunaan NAPZA, Miras dan HIV/AIDS).					
	3. Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan, Karang Taruna dan Pramuka.					

Strategi	Arah Kebijakan	2026	2027	2028	2029	2030
	4. Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan melalui pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan, olah raga prestasi, olah raga rekreasi dan organisasi olah raga.					
	5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olah raga.					
Fasilitasi Koperasi Generasi Baru yang Maju, Modern serta UMKM Naik Kelas dan Go Digital	1. Pengembangan Koperasi dan UMKM berbasis kewirausahaan dengan pendekatan kelompok, komunitas dan kluster sesuai sentra komoditas dan wilayah.					
	2. Pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan Koperasi dan UMKM secara lintas sektor dan mengedepankan kemitraan.					
	3. Modernisasi dan penerapan Inovasi Teknologi pada produk dan jasa Koperasi dan UMKM.					
	4. Iklim Usaha UMKM yang kondusif					
	5. Digitalisasi pemasaran UMKM dan koperasi.					
Memperkuat pertumbuhan ekonomi di sektor industri dan perdagangan	1. Peningkatan tertib usaha perdagangan melalui peningkatan jumlah pasar yang tertib, bersih, indah dan nyaman serta berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.					
	2. Peningkatan stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.					
	3. Peningkatan nilai ekspor daerah.					
	4. Peningkatan perlindungan konsumen melalui penerapan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang bertanda tera sah.					
	5. Peningkatan jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang					

Strategi	Arah Kebijakan	2026	2027	2028	2029	2030
	berkembang dan mampu mengakses pasar.					
Meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing.	1. Peningkatan peluang dan potensi serta promosi investasi/penanaman modal di daerah, berbasis potensi lokal.					
	2. Peningkatan kualitas layanan Penanaman modal/ pelayanan perizinan berusaha melalui optimalisasi sistem OSS.					
	3. Peningkatan iklim penanaman modal yang berdaya saing.					
	4. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah daerah dan dunia usaha/swasta.					
	5. Peningkatan kemitraan antara PMA dan PMD dengan UKM Lokal.					
Meningkatkan Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah	1. Pengembangan destinasi pariwisata prioritas 2. Pengembangan pemasaran pariwisata berbasis digital. 3. Peningkatan kapasitas tenaga kerja pariwisata melalui pelatihan Vokasi dan peningkatan kompetensi digital pelaku pariwisata. 4. Pengembangan kelembagaan pariwisata dan masyarakat sadar wisata. 5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan ( <i>event</i> ) dan <i>Meetings, incentives, Conferences, Exhibitions (MICE)</i> . 6. Pelibatan Masyarakat lokal dalam mendukung produktivitas pariwisata					
Pengembangan dan pemanfaatan Potensi pertambangan (Mineral, Minyak dan Gas) untuk	1. Pengembangan sistem pola Kerjasama antara pemerintah dan perusahaan industri minyak dan gas, melalui pembentukan/revitalisasi dan pemberdayaan BUMD.					

Strategi	Arah Kebijakan	2026	2027	2028	2029	2030
peningkatan Pendapatan Asli Daerah	2. Percepatan pembangunan usaha industri minyak dan gas daerah dengan melakukan Kerjasama antara pemerintah dan perusahaan industri minyak dan gas.					
	3. Peningkatan Kerjasama Pendidikan antara pemerintah dan perusahaan industri minyak dan gas untuk meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Banggai yang dapat diserap menjadi tenaga kerja industri minyak dan gas					
	4. Re-negosiasi antara pemerintah dan perusahaan industri minyak dan gas untuk meningkatkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih menguntungkan bagi masyarakat Kabupaten Banggai					
	5. Percepatan pembangunan Jaringan Gas (City Gas) melalui Kerjasama antara pemerintah dan perusahaan industri minyak dan gas.					
Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan (LCP2B).					
	2. Penyediaan benih yang memenuhi prinsip 5T (tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat harga).					
	3. Peningkatan Penyediaan prasarana dan pemanfaatan teknologi pertanian.					
	4. Penyediaan akses terhadap informasi pasar, sumber permodalan, teknologi, sarana					

Strategi	Arah Kebijakan	2026	2027	2028	2029	2030
	dan prasarana pertanian/perkebunan.					
Meningkatkan penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat khususnya untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai kewenangan Kab. Banggai	1. Peningkatan ketersediaan air baku untuk jaringan irigasi dalam mendukung produksi dan produktivitas tanaman pangan.					
	2. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi.					
Meningkatkan populasi dan produksi peternakan menuju Banggai sejuta ternak	1. Peningkatan ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak.					
	2. Peningkatan populasi dan produktivitas ternak.					
	3. Meningkatkan ketersediaan dan produksi pakan ternak.					
	4. Menjamin produk hewani yang ASUH dan berdaya saing.					
	5. Peningkatan Pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, kesehatan hewan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit hewan.					
Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi hasil perikanan dan pemasarannya dalam rangka memenuhi kebutuhan protein yang berasal dari ikan.	1. Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya melalui pemanfaatan teknologi perikanan, pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.					
	2. Peningkatan infrastruktur perikanan tangkap dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan (air bersih, listrik, BBM, sistem rantai dingin, pelabuhan perikanan).					
	3. Penyediaan Akses nelayan/pembudidaya ikan terhadap permodalan, teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.					

Strategi	Arah Kebijakan	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan Ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman serta terjangkau bagi masyarakat.	1. Peningkatan Infrastruktur pangan, diversifikasi dan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan serta pengawasan keamanan pangan.					
	2. Implementasi Perda Lahan Pangan Berkelanjutan.					
	3. Germas Pemanfaatan Lahan pekarangan					
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kesejahteraan Petani/Peternak dan Nelayan.	1. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pertanian/ perkebunan.					
	2. Peningkatan peran dan fungsi Kelembagaan Peternak					
	3. Peningkatan Pembinaan Kelompok Nelayan dan pembudidaya ikan					
Meningkatkan kualitas layanan Air Minum dan Perumahan layak di perkotaan dan perdesaan untuk kehidupan masyarakat yang lebih layak dan bermartabat.	1. Penataan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten menuju Banggai Tanpa Kekumuhan.					
	2. Penyediaan Akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan korban bencana.					
	3. Penyediaan akses dan peningkatan system penyediaan air minum yang aman melalui jaringan perpipaan di perkotaan maupun perdesaan.					
	4. Peningkatan kualitas layanan Air Minum perkotaan melalui PDAM					
Meningkatkan kualitas layanan sanitasi (air limbah, jambanisasi dan drainase) dan permukiman	1. Peningkatan dan pengembangan sistem jaringan drainase dan sistem air limbah domestik di perkotaan dan perdesaan.					
	2. Eliminasi Praktek Buang Air Besar Sembarangan (BABS)					

Strategi	Arah Kebijakan	2026	2027	2028	2029	2030
perkotaan dan perdesaan.						
Meningkatkan Jaringan jalan, jembatan, sarana dan prasarana transportasi secara merata dan berkualitas untuk konektivitas wilayah	1. Kerjasama penyedia infrastruktur dengan pihak swasta melalui mekanisme KPBU.					
	2. Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan yang berkualitas yang menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Banggai.					
	3. Peningkatan kinerja pelayanan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, utamanya di wilayah terpencil, pedalaman dan daerah rawan bencana.					
	4. Penyediaan sistem angkutan umum publik dalam kota dan perdesaan yang terpadu dan nyaman.					
	5. Penyediaan Fasilitas keselamatan lalu lintas jalan.					
	6. Pengembangan infrastruktur dan layanan angkutan laut/pelayaran untuk mendukung konektivitas dengan Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai Laut dan kepulauan Taliabu					
Meningkatkan tertib pembangunan bangunan Gedung.	1. Peningkatan layanan PBG dan regulasi bangunan gedung					
	2. Penyediaan Fasilitas Pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik.					
Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta ketenagalistrikan sampai ke pelosok desa.	1. Percepatan Implementasi Master Plan pengembangan Teknologi dan Informatika Kabupaten Banggai.					
	2. Pembangunan Infrastruktur TIK dan system jaringan intra Pemerintah Daerah untuk mendukung transformasi digital.					

Strategi	Arah Kebijakan	2026	2027	2028	2029	2030
	3. Peningkatan kompetensi aparatur di bidang Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK).					
	4. Peningkatan keterbukaan informasi public dan Literasi TIK masyarakat ( <i>Digital society</i> ).					
Meningkatkan ketahanan bencana daerah melalui koordinasi/ integrasi pemda dan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Daerah.	1. Integrasi Kajian Resiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana daerah ke dalam perencanaan pembangunan daerah.					
	2. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, melalui penguatan manajemen bencana berbasis masyarakat dan data Bencana terpadu.					
	3. Penguatan system peringatan dini bencana.					
	4. Penguatan system logistik pangan dan jaring pengaman sosial untuk masyarakat terdampak bencana.					
	5. Pengembangan Desa Tangguh Bencana					
	6. Penguatan system penanggulangan bahaya kebakaran melalui penyiapan sarana dan prasarana, pencegahan dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.					
Meningkatkan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup..	1. Penguatan kelembagaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang SDA dan LH.					
	2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.					
	3. Peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.					

Strategi	Arah Kebijakan	2026	2027	2028	2029	2030
	4. Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Keanekaragaman hayati.					
	5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui pembangunan rendah karbon.					
	6. Pengelolaan sampah perkotaan berbasis masyarakat dengan pendekatan <i>Reduce, Reuse</i> dan <i>Recycle</i> .					
Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang Daerah dan pertanahan	1. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 dan rencana rincinya.					
	2. Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah.					
	3. Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.					
	4. Pengurangan jumlah sengketa, konflik dan perkara tata ruang dan pertanahan.					
Meningkatkan realisasi pemekaran Desa, Kecamatan dan Rintisan Pembentukan DOB Baru sesuai yang di rencanakan	1. Penyusunan Desain Besar Pemekaran daerah Kabupaten Banggai					
	2. Kajian pemekaran daerah Kabupaten Banggai					
	3. Rintisan dan persiapan pemekaran Desa, Kecamatan dan Pembentukan DOB Baru					
Meningkatkan Desa Maju dan Mandiri melalui pemenuhan layanan dasar, infrastruktur, kemandirian ekonomi dan pemberdayaan Masyarakat di perdesaan.	1. Peningkatan pembangunan perdesaan berbasis kawasan dan potensi lokal desa, melalui Kerjasama antar desa.					
	2. Revitalisasi BUMDes/BUMDes Bersama melalui kebijakan satu BUMDes 500 Juta.					
	3. Peningkatan Investasi produk unggulan perdesaan/ kawasan perdesaan melalui BUMDes dan koperasi Merah Putih					

Strategi	Arah Kebijakan	2026	2027	2028	2029	2030
	untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis.					
	4. Peningkatan partisipasi Masyarakat Desa					
	5. Pemasaran Pemanfaatan Pekarangan melalui system pertanian terintegrasi di Perdesaan (kelanjutan program satu juta satu pekarangan)					
Mewujudkan Luwuk kota layak huni	1. Penerapan konsep Water Front city dalam penataan Kota Luwuk di sepanjang pesisir Pantai, Sungai jolek dan Sungai Soho, sebagai pusat aktivitas ekonomi, sosial, budaya dan rekreasi.					
	2. Pemenuhan dan optimalisasi fungsi ekologis ruang terbuka hijau publik Kawasan perkotaan Luwuk.					
	3. Fasilitasi/rintisan Luwuk City Gas					
	4. Optimalisasi Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan Luwuk.					
	5. Penataan dan Pembangunan jaringan jalan dalam kota luwuk (ring Road atas dan bawah), sebagai jalan alternatif mengatasi kemacetan kota.					
	6. Penertiban parkir dalam kota luwuk.					
Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK	1. Peningkatan kemudahan perizinan dan investasi serta kemudahan berusaha					
	2. Peningkatan kualitas dan cakupan layanan administrasi kependudukan					
	3. Peningkatan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.					
	4. Modernisasi/Digitalisasi system dan manajemen pelayanan publik.					

Strategi	Arah Kebijakan	2026	2027	2028	2029	2030
	5. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Perangkat Daerah pengampu SPM.					
	6. Peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)					
Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah	1. Banggai Inovatif					
	2. Penguatan Kembali Laboratorium Inovasi Daerah					
Meningkatkan kinerja/kualitas perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.	1. Penerapan Open Data, Satu Data Banggai.					
	2. Pengembangan <i>performance base budgeting</i> melalui integrasi perencanaan dan penganggaran daerah berbasis IT.					
	3. Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi rencana pembangunan.					
	4. Pemanfaatan hasil penelitian pengembangan daerah.					
	5. Peningkatan Partisipasi masyarakat, dunia usaha dan akademisi dalam pembangunan melalui pendekatan PENTAHHELIX.					
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.	1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah					
	2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah					
	3. Peningkatan Kualitas Pengelolaan pendapatan Daerah					
Meningkatkan pengawasan, transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.	1. Peningkatan level Maturitas SPIP					
	2. Peningkatan Level Kapabilitas APIP					
	3. Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).					
	4. Penerapan Rencana Aksi/Komitmen Global Pemerintahan Terbuka ( <i>Open</i>					

Strategi	Arah Kebijakan	2026	2027	2028	2029	2030
	<i>Government Partnership</i> ) Kabupaten Banggai.					
	5. Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan DPRD dan Masyarakat					
Meningkatnya penataan peraturan perundang-undangan daerah dan penegakan Perda	1. Peningkatan kualitas proses dan substansi Peraturan Perundang-undangan daerah.					
	2. Peningkatan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah, sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).					
Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi tepat ukuran.	1. Peningkatan ketepatan ukuran, ketepatan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.					
	2. Pengurangan dan penghapusan tugas dan fungsi yang tumpang tindih antar unit kerja atau antar Perangkat Daerah.					
	3. Peningkatan koordinasi dan pola hubungan kerja antar Perangkat daerah.					
	4. Peralihan Jabatan Fungsional dan penyesuaian terhadap Nomenklatur Program dan kegiatan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019.					
Penataan Tata Laksana Perangkat Daerah, Kecamatan dan Desa serta fungsi Pemerintahan Umum.	1. Penerapan system, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis <i>e-Government</i> .					
	2. Pengembangan <i>e-Government</i> secara terintegrasi.					
	3. Peningkatan kualitas <i>e-procurement</i>					
	4. Peningkatan kualitas pengelolaan arsip daerah.					
	5. Peningkatan Kualitas Persandian Daerah.					
	6. Peningkatan kualitas pelayanan sekretariat dalam					

Strategi	Arah Kebijakan	2026	2027	2028	2029	2030
	pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.					
	7. Peningkatan Fungsi Kesbangpol.					
	8. Peningkatan Kapasitas kelembagaan dan kinerja pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa.					
Peningkatan kompetensi, profesionalitas dan disiplin ASN serta budaya kerja.	1. Penegakan disiplin ASN melalui penerapan <i>reward</i> dan <i>funishment</i> .					
	2. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur pejabat struktural melalui diklat kepemimpinan Tkt IV, III dan II.					
	3. Peningkatan jabatan fungsional.					
	4. Peningkatan budaya dan etos kerja ASN.					
	5. Penerapan system manajemen kinerja individu.					
	6. Pengembangan system informasi manajemen SDM Aparatur yang komprehensif dan terintegrasi.					

Arah kebijakan di atas merupakan arahan indikatif menuju tercapainya Visi Pembangunan RPJMD Kabupaten Banggai di akhir periode perencanaan tahun 2026. Secara teknokratik, arah kebijakan tahunan ini sinergis dengan tema rencana Pembangunan Tahunan (RKPD) setiap tahun berkenaan. Selain itu, arah kebijakan tahunan ini juga disesuaikan dengan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta Tema Pembangunan Tahunan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah. Keselarasan Tema, Fokus dan Arah Kebijakan baik secara vertical maupun horizontal akan menjamin keserasian pembangunan antarlevel maupun antar daerah.

Selain arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana di atas, strategi dan Arah

pengembangan wilayah Kabupaten Banggai di dasarkan pada arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banggai 2012-2032. Adapun strategi dan kebijakan di maksud adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk kebijakan peningkatan keterkaitan ekonomi dan ruang antara Kabupaten Banggai dengan wilayah luar baik di dalam Provinsi Sulawesi Tengah maupun luar wilayah Provinsi dengan pengembangan prasarana transportasi yang meningkatkan aksesibilitas dengan wilayah luar, terdiri atas:
  - a. Mengembangkan sistem prasarana utama wilayah yang terdiri dari jaringan transportasi udara, laut serta jaringan transportasi darat yang terintegrasi untuk meningkatkan aksesibilitas antar kota di kabupaten, lintas wilayah, lintas Provinsi dan lintas pulau;
    - Pengembangan sistem transportasi laut diarahkan dan diprioritaskan pada Pelabuhan Luwuk, Tangkiang (Kecamatan Kintom), Pagimana dan Bunta yang merupakan daerah transit ke wilayah Kabupaten Banggai;
    - Pengembangan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) di Pelabuhan Luwuk dan Pagimana.
    - Pengembangan sistem transportasi udara diarahkan pada pengoptimalan Bandara Syukuran Aminudin Amir untuk meningkatkan akses antara Kota Luwuk dengan wilayah-wilayah luar kabupaten;
      - Optimalisasi Penerbangan Komersial
      - Optimalisasi tingkat pelayanan dan Kelas Bandara
      - Optimalisasi Tingkat Kenyamanan dan Keselamatan Operasi Penerbangan
    - Pengembangan fungsi jaringan jalan, pengembangan sarana angkutan dan pengembangan prasarana jalan.

- b. Meningkatkan peran ibukota kecamatan yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan kabupaten sekitarnya melalui pengembangan infrastruktur.
  2. Strategi untuk kebijakan pengembangan ibukota Kabupaten Banggai di Luwuk dan sebagai pintu masuk-keluar (*multi-gate*) Kabupaten Banggai dalam menciptakan hubungan/keterkaitan ekonomi dan spasial dengan daerah luarnya, terdiri atas:
    - a. Mengembangkan ibukota Kabupaten Banggai di Luwuk sebagai pusat pertumbuhan utama kabupaten; dan
      - Pemantapan pengembangan Kota Luwuk dengan skala pelayanan dan sistem jaringan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Promosi dan Kota Orde I di Sulawesi Tengah.
      - Pengembangan Kota Luwuk sebagai ibukota kabupaten diarahkan sebagai pusat pemerintahan juga sebagai pusat pelayanan skala regional/Provinsi dan pusat koleksi-distribusi barang dan jasa bagi daerah belakangnya.
      - Pengembangan ini juga diarahkan pada kota-kota yang berfungsi sebagai pintu keluar/masuk dari wilayah luar, yaitu Luwuk, Bunta, Pagimana dan Tangkiang-Kintom.
    - b. Mengembangkan prasarana dan sarana kota sesuai dengan fungsi dan peran kota-kota agar terjadi pemerataan pelayanan dan sebagai pendukung fungsi jasa Kota Luwuk.
      - Pengembangan diprioritaskan pada pengembangan prasarana dan sarana dasar kota serta jaringan transportasi yang menghubungkan dengan wilayah pelayanannya.
3. Strategi untuk kebijakan penguatan struktur kegiatan dan implikasi ruangnya bagi kota-kota sebagai pusat pertumbuhan pelayanan, terdiri atas:
  - a. Mengembangkan sistem pusat-pusat kota dan permukiman;
    - Pengembangan sistem kota-kota yang terdiri dari ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan untuk mengarahkan

pengembangan kegiatan fungsional perkotaan sesuai dengan jenis dan skala pelayanannya, pada pusat-pusat yang diharapkan dapat menjalankan dan menyeimbangkan perkembangan kota sesuai dengan struktur tata ruang wilayah kabupaten yang diinginkan.

- Mengembangkan dan mengoptimalkan peran Ibu Kota Kecamatan, baik sebagai PKL maupun PPK.
  - Mengembangkan pusat pelayanan baru yang dapat berfungsi sebagai PKLp.
- b. Mengembangkan prasarana pusat-pusat kota kabupaten;
- c. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi kota kecil dan pedesaan sebagai wilayah belakangnya.
- Kota-kota kecil yang berfungsi sebagai ibukota kecamatan dalam sistem kota-kota perlu ditingkatkan untuk lebih dapat berfungsi sebagai pusat pengembangan. Maka diarahkan agar kota-kota itu juga menjadi atau meningkatkan fungsinya sebagai pusat kegiatan koleksi dan distribusi bagi wilayah belakang (wilayah pedesaan).
  - strategi pengembangan kawasan perkotaan diarahkan melalui pengembangan pusat-pusat jasa, koleksi, dan distribusi produk-produk pedesaan, disesuaikan dengan kondisi dan potensi fungsi masing-masing kota.
  - Mengembangkan sistem pusat pedesaan yang terhirarki dengan baik dan mampu meningkatkan keterhubungan kawasan pedesaan dengan pusat-pusat kawasan perkotaan terdekatnya.
  - strategi pengembangan kawasan pedesaan diarahkan melalui pengembangan fasilitas dan infrastruktur serta permukiman yang dapat menunjang budidaya pedesaan dalam rangka mempertahankan luas lahan pertanian dan peningkatan produksi pertanian.

4. Strategi untuk kebijakan pengembangan aksesibilitas internal antar wilayah dalam kabupaten, terdiri atas:
  - a. Mengembangkan keterkaitan fungsi antar pusat-pusat kegiatan kabupaten; dan
  - b. Meningkatkan sistem jaringan prasarana utama yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan kabupaten dengan wilayah sekitarnya melalui pengembangan sistem jaringan transportasi darat dan laut, utamanya untuk membuka keterisolan kawasan perdesaan terpencil.
5. Strategi untuk kebijakan pengembangan sarana dan prasarana pendukung di wilayah kabupaten untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, terdiri atas:
  - a. Meningkatkan pelayanan dan distribusi sistem jaringan energi;
    - Optimalisasi tingkat pelayanan energy listrik melalui perluasan dan pemerataan jaringan, pengembangan jaringan baru, peningkatan infrastruktur pendukung, serta penambahan dan perbaikan system jaringan.
    - Perluasan jaringan listrik sampai ke pelosok perdesaan, termasuk perdesaan kepulauan di wilayah Kabupaten Banggai.
    - Pengembangan sumber energi listrik terbarukan meliputi energi biomassa, mikro/minihidro dan panas bumi sebagai alternatif sumber energi konvensional.
    - Perencanaan pemanfaatan energi gas bumi bagi kebutuhan industri dan rumah tangga.
  - b. Meningkatkan pelayanan prasarana telekomunikasi untuk menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal serta membuka kawasan-kawasan yang terisolir;
    - Peranan prasarana telekomunikasi akan semakin meningkat terutama dalam proses pengembangan potensi ekonomi lokal serta mendukung kawasan-kawasan yang

sulit dijangkau oleh prasarana perhubungan/transportasi (terisolir/rawan bencana). Sebagai salah satu prasarana komunikasi yang cepat, telepon makin dibutuhkan untuk saat ini dan masa yang akan datang. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan jumlah SST (Satuan Sambungan Telepon) dan ketersediaan prasarana telekomunikasi lainnya.

- Peningkatan jangkauan pelayanan telekomunikasi dan kemudahan mendapatkannya, contohnya melalui penyediaan menara/tower *Base Transceiver Station* (BTS) yang di gunakan secara bersama sehingga menjangkau pelosok perdesaan.
  - Membentuk jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah pertumbuhan dengan Ibu Kota Kabupaten.
- c. Mengembangkan sistem prasarana sumberdaya air untuk menunjang pengembangan usaha pertanian tanaman pangan dan air bersih; dan
- Peningkatan sistem jaringan irigasi yang di arahkan untuk mempertahankan kelangsungan ketersediaan dan distribusi air ke lahan pertanian.
  - Meningkatkan jaringan air baku untuk perumahan dan permukiman di kawasan perkotaan dan perdesaan.
- d. Mengembangkan sistem jaringan prasarana persampahan dan sistem jaringan prasarana air limbah kabupaten.
- Optimalisasi penanganan sampah perkotaan dan perdesaan, melalui peningkatan prasarana pengelolaan sampah, pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah dan penanganan sampah berkelanjutan.
  - Meningkatkan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

- Redesain jaringan drainase perkotaan Luwuk.
6. Strategi untuk kebijakan penguatan potensi kawasan lindung yang mendukung kualitas lingkungan yang berkelanjutan, terdiri atas:
- a. Memantapkan kawasan lindung yang disesuaikan dengan karakteristik biogeofisik wilayah dan keunikan masing-masing;
    - Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah bangsa guna pembangunan berkelanjutan.
    - Memantapkan dan menetapkan kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, saluran irigasi, kawasan sekitar mata air, kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kawasan Suaka Alam, pelestarian alam dan cagar budaya serta Kawasan Rawan bencana Alam, sesuai kriteria teknis yang ditetapkan.
  - b. Mempertahankan kawasan lindung untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup;
    - Dalam upaya mempertahankan fungsi utama kawasan lindung yaitu untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian kehidupan hayati dan perlindungan terhadap sumber daya alam terutama konservasi air, tanah dan udara dalam wilayah pengaruhnya, maka kegiatan budidaya yang telah ada di kawasan lindung tidaklah mengganggu fungsi lindungnya. Adapun areal yang perlu diamankan fungsi lindungnya tersebut adalah kawasan lindung yang telah ditetapkan kriterianya di atas, dan kawasan rawan bencana Alam.
    - Melibatkan masyarakat lokal dalam pengendalian pemanfaatan kawasan lindung.

- c. Mengendalikan dan mengawasi pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya agar tidak terjadi konflik kepentingan antar sektor;
- Dalam upaya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya, maka berlandaskan pada rencana penggunaan tanah yang mengacu pada berbagai peraturan terkait dan yang berhubungan dengan masalah pertanahan telah disusun pedoman penggunaan lahan kawasan budidaya oleh Badan Pertanahan Nasional, sebagai berikut:
    1. Penetapan lokasi kegiatan pembangunan yang memerlukan tanah diarahkan pada tanah-tanah yang kurang produktif atau tanah kosong.
    2. Penetapan lokasi disesuaikan dengan kondisi fisik (kesatuan lahan) dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
    3. Penetapan lokasi disesuaikan melalui rapat-rapat koordinasi dengan instansi terkait, agar tidak terjadi konflik kepentingan.
    4. Tanah-tanah yang mempunyai kemiringan lebih 40% dan terletak pada kawasan budidaya ditetapkan menjadi kawasan lindung.
    5. Lokasi-lokasi yang akan diarahkan untuk pembangunan, diprioritaskan yang dekat dengan sarana pendukung seperti jaringan jalan.
    6. Dalam penyediaan areal untuk investor perlu disediakan areal untuk pengembangan usaha masyarakat.
  - Selain itu, dasar-dasar hukum yang mengatur kemungkinan adanya masalah dalam pengalokasian tanah untuk pengembangan sektor-sektor terkait yang kemungkinan

saling tumpang tindih, tertuang dalam SKB Menteri yang bersangkutan.

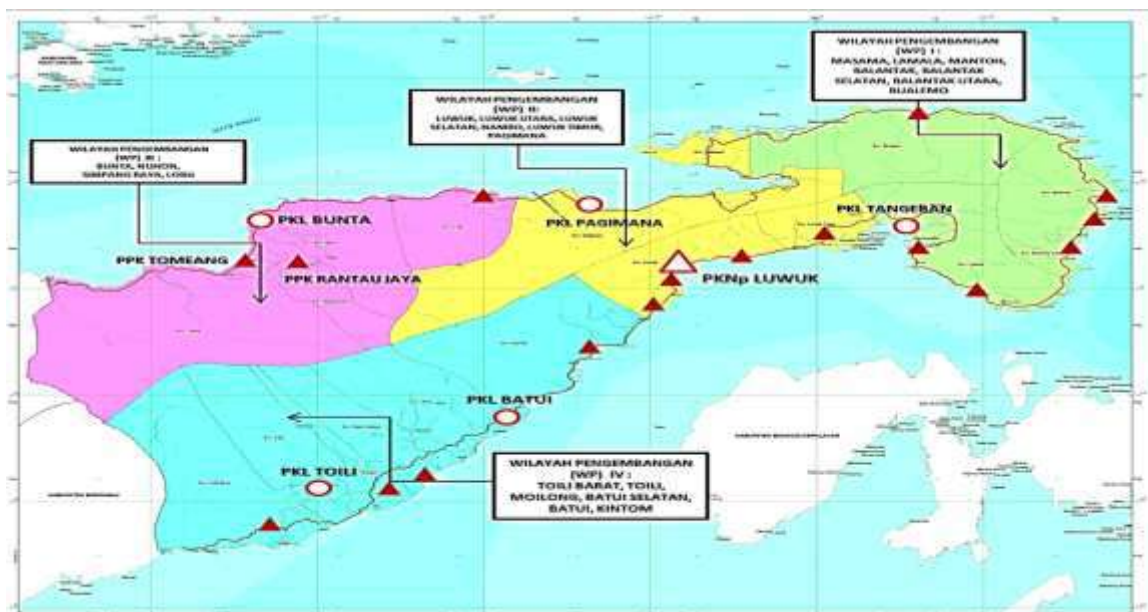
- d. Menjaga kualitas lingkungan di sekitar kawasan pertambangan.
7. Strategi untuk kebijakan peningkatan kualitas sumberdaya lahan pertanian guna pengembangan usaha pertanian, perkebunan dan perikanan darat, terdiri atas:
  - a. Meningkatkan usaha pertanian, perkebunan dan perikanan darat berbasis masyarakat melalui program-program pembangunan guna meningkatkan ketahanan pangan;
  - b. Meningkatkan penggunaan teknologi tepat guna untuk pertanian, perkebunan dan perikanan darat;
  - c. Mengembangkan sentra-sentra produksi dan sentra-sentra pemasaran produk unggulan pertanian dan perkebunan; dan
  - d. Meningkatkan infrastruktur, prasarana, dan sarana pertanian, perkebunan dan perikanan darat.
8. Strategi untuk kebijakan peningkatan pengelolaan sumberdaya kelautan, terdiri atas:
  - a. Mengembangkan budidaya perikanan dan kelautan yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil;
  - b. Meningkatkan kemampuan dan teknologi perikanan budidaya dan perikanan tangkap; dan
  - c. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas kawasan mangrove sebagai pendukung lingkungan pesisir.
9. Strategi untuk kebijakan pengembangan sektor-sektor usaha yang mendukung pembangunan kabupaten di bidang jasa, pertanian, perkebunan, perikanan darat, kelautan serta pengembangan pertambangan, terdiri atas:
  - a. Mengembangkan industri penyediaan jasa, industri pertanian dan industri kelautan yang memiliki keunggulan komparatif dan berorientasi ekspor;

- b. Memperkuat kemitraan antara usaha ekonomi besar dengan usaha perekonomian rakyat;
  - c. Mengelola sumberdaya pertambangan yang telah teridentifikasi guna kesejahteraan masyarakat dengan mengutamakan pasokan bagi kebutuhan daerah;
  - d. Mengembangkan sektor-sektor pertambangan potensial baru guna memacu perekonomian kabupaten; dan
  - e. Mengembangkan sektor minawisata dan sektor agrowisata.
10. Strategi untuk kebijakan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibidang jasa, pertanian, kelautan, pertambangan dan sektor-sektor lainnya yang mendukung tujuan penataan ruang kabupaten, terdiri atas:
- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal dengan menyelenggarakan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi sebagai pusat ilmu pengetahuan guna mendukung pelayanan jasa, pertanian dan kelautan termasuk pendidikan yang mendukung bidang pertambangan;
  - b. Mengembangkan sistem pendidikan non formal yang berkelanjutan guna meningkatkan pengetahuan masyarakat yang dapat menunjang kualitas hasil pertanian dan kelautan;
  - c. Menjamin ketersediaan informasi pertanian dan kelautan;
  - d. Menjamin tersedianya sarana kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat kabupaten; dan
  - e. Mengembangkan dan menjaga potensi budaya daerah dalam pendidikan formal maupun non formal.
11. Strategi untuk kebijakan pengembangan potensi kawasan yang memiliki nilai strategis bagi kabupaten, terdiri atas:
- a. Mendorong terbentuknya kawasan strategis serta meningkatkan kawasan tumbuh cepat yang mengacu pada sentra-sentra produksi dan kawasan unggulan;

- b. Memberikan dukungan penataan ruang pada kawasan-kawasan yang mengakomodasikan kepentingan sektor-sektor strategis;
- Dalam pengembangan kawasan-kawasan tertentu tersebut harus diperhatikan adanya sektor-sektor strategis serta tingkat kepentingan sektor-sektor tersebut terhadap pengembangan wilayah baik dalam hal potensi, kendala dan permasalahan-permasalahannya, serta ketersediaan dan kesiapan investasi untuk mendukungnya. Secara umum kawasan-kawasan tertentu yang perlu mendapat prioritas adalah:
    1. Sentra produksi pertanian tanaman pangan terutama padi dan palawija.
    2. Sentra produksi kehutanan yang tersebar di seluruh kabupaten yang menempati kawasan kehutanan di pedalaman pada kawasan budidaya di bagian tengah sampai perbatasan dengan kawasan lindung.
    3. Sentra produksi perkebunan yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan menempati kawasan budidaya yang merupakan perbukitan.
    4. Sentra produksi perikanan mencakup pola penangkapan pada perairan laut dan maupun budidaya pantai (tambak ikan, rumput laut, udang, ubur-ubur dan lain-lain). Kegiatan budidaya biota laut ini perlu memperhatikan kelestarian lingkungan dan menghindari terjadinya konflik dengan kegiatan lain seperti kegiatan pariwisata, sandar perahu dan industri galangan kapal/perahu.
- c. Menjamin pengelolaan kawasan pertambangan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

- d. Meningkatkan kapasitas ekonomi, sosial, budaya dan prasarana fisik pada kawasan yang relatif tertinggal agar terpacu pertumbuhan dan perkembangannya;
    - Peningkatan kapasitas diharapkan dapat mendukung terjadinya keterkaitan (*linkage*) dengan wilayah lainnya. Dengan demikian diharapkan dapat terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut dan mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar wilayah.
12. Strategi untuk kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara, terdiri atas :
- a. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan;
  - b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
  - c. Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan.

**Gambar 3.9**  
**Wilayah Pengembangan dan Pusat-Pusat Kegiatan**  
**di Kabupaten Banggai**



Sumber : RTRW Kabupaten Banggai 2012-2032

Berdasarkan strategi dan kebijakan penataan ruang/pengembangan wilayah sebagaimana di atas, maka secara perwilayahan Kabupaten Banggai di bagi kedalam 4 (empat) wilayah pengembangan (WP) yaitu :

1. Wilayah Pengembangan Timur (WP 1) : Wilayah pengembangan ini terletak di sebelah timur, yaitu meliputi Kecamatan Bualemo, Kecamatan Balantak, Kecamatan Balantak Selatan, Kecamatan Balantak Utara, Kecamatan Mantoh, Kecamatan Masama, dan Kecamatan Lamala.
2. Wilayah Pengembangan Tengah (WP 2) : Wilayah pengembangan ini terletak dibagian tengah wilayah Kabupaten Banggai yaitu meliputi Kecamatan Pagimana, Kecamatan Luwuk Selatan, Kecamatan Luwuk, Kecamatan Luwuk Timur, Kecamatan Luwuk Utara dan Kecamatan Nambo.
3. Wilayah Pengembangan Utara (WP 3) : Wilayah pengembangan ini terletak dibagian utara yang meliputi Kecamatan Nuhon, Simpang Raya, Bunta dan Lobu.
4. Wilayah Pengembangan Selatan (WP 4) : Wilayah pengembangan ini meliputi Kecamatan Toili Barat, Toili, Moilong, Batui, Batui Selatan dan Kintom.

Selain wilayah pengembangan, strategi pengembangan wilayah Kabupaten Banggai diarahkan berdasarkan Kawasan Strategis yang telah di tetapkan dalam RTRW 2012-2032 yaitu :

1. Kawasan strategis yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:
  - a. KSK-pengembangan Kawasan Koridor Kota Luwuk (ibukota Kabupaten Banggai)-Kota Bonebakal (ibukota Kecamatan Lamala);  
KSK-koridor Kota Luwuk-Bonebakal ini melintasi beberapa kecamatan di wilayah Kepala Burung yaitu Kecamatan Luwuk

Timur, Masama dan Lamala, yang selama ini relatif tertinggal dibanding Kecamatan lainnya. Untuk menggenerate pertumbuhan ekonomi wilayah kawasan tersebut perlu dilakukan upaya pengembangan potensi ekonominya, dengan fokus utama pengembangan teluk Lamala. Teluk lamala di lingkari oleh tiga kecamatan termaksud diatas. Untuk pengelolaan teluk ini, kedepan perlu di susun perencanaan kawasan Teluk Lamala secara lebih komprehensif.

b. KSK-pengembangan Kawasan Koridor Pantai Timur (Balantak dan sekitarnya);

Kawasan strategis ini meliputi kawasan pesisir di bagian timur wilayah Kabupaten Banggai, yang terdiri atas empat Kecamatan yaitu Kecamatan Balantak Utara, Kecamatan Balantak, Kecamatan Balantak Selatan dan Kecamatan Mantoh. Kondisi saat ini wilayah pesisir timur Kabupaten Banggai ini cenderung lebih tertinggal dibanding wilayah di bagian selatan. Pengembangan wilayah timur ini ditujukan untuk mengurangi ketimpangan wilayah tersebut. Strategi pengembangan Koridor Pantai Timur Balantak dan sekitarnya adalah:

- 1) Pengembangan sarana dan prasarana transportasi.
- 2) Pengaturan pemanfaatan ruang.
- 3) Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa.
- 4) Pengembangan Pariwisata Bahari.
- 5) Optimalisasi potensi Perkebunan, perikanan, kelautan dan pertambangan.

c. KSK-pengembangan Kawasan Koridor Pantai Selatan (Batui Selatan-Toili-Moilong dan Toili Barat);

Kawasan ini merupakan kawasan yang sudah relatif maju dibandingkan wilayah lainnya dari sisi pengembangan sektor

pertanian. Kegiatan pada kawasan ini merupakan pertanian: padi sawah, sayur-sayuran, kakao, dan kelapa.

Strategi pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian adalah:

- 1) Pengembangan jaringan infrastruktur pertanian.
- 2) Pengembangan teknologi pertanian.
- 3) Pengembangan fasilitas pertanian, seperti: pergudangan, pengolahan hasil-hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah, pasar hasil-hasil pertanian.
- 4) Pengembangan desa-desa yang menjadi pusat-pusat pertanian,
- 5) Penetapan Kawasan tanaman pangan berkelanjutan.

d. KSK-pengembangan Koridor Kintom-Batui

Koridor Kintom-Batui akan menjadi Koridor yang paling berkembang dari sisi ekonomi kedepan. Pada koridor ini terdapat antara lain :

- 1) Kawasan Industri Tangkiah-Uso
- 2) Pelabuhan Samudra Tangkiah
- 3) Pelabuhan Khusus CPO-Sawit
- 4) Rencana pelabuhan khusus lainnya seperti untuk industri pupuk dan metanol.
- 5) Rencana Pangkalan Danlanal TNI Angkatan Laut

e. KSK-pengembangan Kawasan Kurang Berkembang Bunta, Pagimana, Lobu dan Bualemo)

Kawasan tertinggal di Kabupaten Banggai adalah bagian utara (Daerah belakang Kecamatan Pagimana, Lobu, Bunta, Nuhon dan Simpang Raya) dan bagian timur (Kecamatan Balantak dan sekitarnya serta Kecamatan Bualemo). Ketertinggalan wilayah ini disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana transportasi pada bagian wilayah Utara dan terutama Timur, sehingga aksesibilitas bagi pergerakan barang dan jasa

menjadi rendah. Di samping itu, secara geografis perkembangan berlangsung secara linier mengikuti jalur jalan Nasional dan Strategis Nasional.

Untuk menangani kawasan kurang berkembang/tertinggal sebagaimana di maksud di lakukan strategi pengembangan sebagai berikut:

- 1) Membentuk kesatuan ruang Kabupaten Banggai dengan pembangunan prasarana jalan lintas Utara-Selatan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan beserta prasarana pelabuhan di wilayah bagian Timur.
  - 2) Memperkecil disparitas wilayah dengan pengembangan wilayah-wilayah sekitar kawasan tertinggal yang sudah relatif maju dan membentuk efek penjararan perkembangan (*spreadh effect*).
  - 3) Pembangunan sarana wilayah yang mendorong perekonomian.
  - 4) Identifikasi dan pengembangan sektor dan komoditas unggulan.
2. Kawasan strategis yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu KSK- Kawasan Hutan Lindung Luwuk.

Sesuai Arah Kebijakan Perwilayahan dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2045, yang berbasis kluster perwilayahan sesuai arahan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai berada pada Kluster Industri **Morubang** dan Kluster Wisata Bahari dan Perikanan **Balatoju**. Masing-masing dengan arah Kebijakan Pengembangan Wilayah sebagai berikut :

- III-100**

- e. Pemulihan lahan bekas tambang sebagai kawasan hulu perindustrian tambang.
2. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Klaster Balatoju (sebagian Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai Laut, dan Tojo Una-Una). Arah konsep pengembangan Wilayah Klaster Balatoju adalah sebagai berikut:
- a. Peningkatan kualitas obyek wisata bahari; pengembangan Kepulauan Togean sebagai Kawasan Destinasi Super Prioritas Nasional dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan berbasis pengurangan risiko bencana;
  - b. Pembuatan suatu paket terintegrasi antar wilayah melalui peningkatan jalur pelayaran;
  - c. Penetapan kawasan perlindungan setempat;
  - d. Perlindungan dan pengawasan terhadap potensi ekowisata bahari;
  - e. Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang sebagai upaya pengurangan risiko bencana tsunami; dan
  - f. Peningkatan sarana prasarana pengembangan potensi perikanan dan pengolahannya

Detail dari Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Indonesia Emas 2045 terdiri atas 3 Pilar yang merupakan satu kesatuan dalam pengembangan tiap wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:

- 1. Sulawesi Tengah sebagai Pusat Ekonomi Global KTI
- 2. Sulawesi Tengah sebagai Penunjang Ekonomi IKN dan Industri Berbasis SDA
- 3. Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Indonesia yang Hijau, Ekologis, dan Produktif.

Setiap wilayah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah memiliki kekhususan arah pengembangan wilayahnya dalam mendukung pencapaian 3 pilar Sulawesi Tengah Emas 2045 sebagaimana di atas, yakni sebagaimana tabel 3.15 berikut :

**Tabel 3.15**  
**Pilar Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045**

	 <p style="text-align: center;"><b>KABUPATEN BANGGAI</b> <b>Klaster Industri MORUBANG</b> <b>Klaster Wisata Bahari dan Perikanan BALATOJU</b></p>
<b>PILAR</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN BANGGAI 2025-2045</b>
<p style="text-align: center;"><b>1</b></p>	<p><b>KABUPATEN BANGGAI Mendukung SULAWESI TENGAH sebagai PUSAT EKONOMI GLOBAL KTI (MORUBANG: Industri, Pariwisata, Sekolah Vokasi dan Pendidikan Tinggi Lingkungan; BALATOJU: Perikanan, Kelautan, Pariwisata, Sekolah Vokasi dan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional) • Pengurangan sampai penuntasan kemiskinan Perlindungan Sosial yang Adaptif dan terintegrasi • Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum, Tata Kelola Pemerintahan • Kepemimpinan daerah yang kuat dan mengayomi • Stabilitas keamanan, dan ekonomi makro daerah.</li> </ul> <p><b><u>Pengembangan, Peningkatan, dan Pembangunan</u></b></p> <p>Kawasan industri berkelanjutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hilirisasi hasil tambang • Hilirisasi hasil hutan produksi dan hasil perkebunan</li> <li>• UMKM, Ekonomi Kreatif, Korporasi Masyarakat Lokal • Konektivitas, infrastruktur, sarana prasarana • Layanan kesehatan dan pendidikan taraf internasional • Riset industri, perikanan dan kelautan, dan lingkungan • Sekolah vokasi dan pendidikan tinggi lingkungan, kelautan dan perikanan • Layanan jasa pariwisata MORUBANG-BALATOJU.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>2</b></p>	<p><b>KABUPATEN BANGGAI MENDUKUNG SULAWESI TENGAH SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA</b></p> <p><b><u>Produk</u></b> : Hasil tambang, hasil hutan produksi, hasil perkebunan; produk industri berbasis SDA dan layanan pariwisata terintegrasi pada Klaster MORUBANG-BALATOJU.</p>
<p style="text-align: center;"><b>3</b></p>	<p><b>KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI BAGIAN WILAYAH SULAWESI TENGAH YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan ekonomi hijau dan bioekonomi • Penerapan Mitigasi Bencana berbasis masyarakat dan sekolah • Pengembangan arsitektur lokal yang unik, fungsional, atraktif, berkelanjutan dan menarik wisatawan • Revitalisasi/Restorasi Kawasan Tambang • Pengembangan Kota Hijau di Kawasan Industri dan Kawasan Tambang di Klaster Industri MORUBANG • Pengembangan Kawasan Minapolitan yang Produktif dan Ekologis di Klaster Wisata Bahari dan Perikanan BALATOJU • Penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah • Pengembangan transportasi publik ramah lingkungan untuk pariwisata terintegrasi MORUBANG-BALATOJU • Peningkatan rasio RTH, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan, dan mengembangkan hutan produksi • Pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif yang anti polusi • Peremajaan Pohon Kelapa di Wilayah Pesisir sebagai <i>landmark</i> Sulteng Hijau, Ekologis, Produktif • Menerapkan pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan • Kontribusi pada pengurangan dampak <i>climate change</i> dan ERK.</li> </ul>

### **3.2.2 Program-Program Prioritas Daerah dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029**

Program-Program Prioritas Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 mencakup Prioritas Pembangunan Daerah, Program Prioritas dan Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Banggai dan Program-Program Prioritas sesuai Tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029.

#### **3.2.2.1 Prioritas Pembangunan Daerah**

Prioritas pembangunan daerah merupakan implementasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan sekaligus juga merupakan janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Banggai masa menjabat Tahun 2025-2030, yang akan di wujudkan melalui 6 (enam) prioritas pembangunan daerah, yaitu terdiri dari:

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai yang Berbudaya, Produktif dan Sejahtera.
2. Pertumbuhan Ekonomi Daerah Inklusif dan Berkelanjutan berbasis potensi unggulan Daerah
3. Penyediaan, Pemenuhan dan Pemerataan Sarana Prasarana Dasar, TIK dan Konektivitas
4. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta kelestarian Lingkungan Hidup
5. Pemekaran Wilayah, Pembangunan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan
6. Penguatan Reformasi Birokrasi Berdampak dan Berkelanjutan.

Penjelasan rinci masing-masing prioritas daerah di maksud adalah sebagai berikut :

**a. Prioritas Daerah 1 : Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai yang Berbudaya, Produktif dan Sejahtera.**

Prioritas daerah ini merupakan penjabaran sekaligus sebagai tujuan dari Misi 1 Sumber Daya Manusia Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing. Prioritas daerah ini di lakukan melalui Transformasi pada seluruh siklus hidup manusia Kabupaten Banggai melalui Pendidikan, pelatihan dan penguasaan IPTEK, peningkatan Gizi dan Kesehatan Masyarakat, pengasuhan, keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan Masyarakat inklusif, pemajuan kebudayaan daerah (BABASALAN), beragama maslahat, serta pengurangan kemiskinan dan pengangguran, perlindungan dan bantuan sosial yang adaatif.

**b. Prioritas Daerah 2 : Pertumbuhan Ekonomi Daerah Inklusif dan Berkelanjutan berbasis potensi unggulan Daerah**

Prioritas daerah ini merupakan penjabaran sekaligus sebagai tujuan dari Misi 2 Ekonomi Daerah Tangguh dan Inklusif Berbasis Potensi Unggulan. Prioritas Daerah ini di arahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perikanan dan kelautan, dalam mewujudkan Banggai Swasembada pangan berkelanjutan. Banggai Swasembada Pangan merupakan upaya pemerintah Kabupaten Banggai untuk meningkatkan produksi dan produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas pangan yang beragam, bergizi dan seimbang, dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat.

Melalui Prioritas Daerah ini, hendak di wujudkan ekonomi daerah yang maju dan berkeadilan yang di tunjukan dengan

pertumbuhan sektor ekonomi yang tinggi dan stabil, produktivitas kuat, berdaya saing dan nilai tambah tinggi. Hal ini dilakukan melalui percepatan terwujudnya industri sektor pangan (pertanian dan perikanan/kelautan), pengembangan koperasi dan UMKM, berbasis inovasi teknologi dan transformasi digital. Serta peningkatan peran BUMD dalam pengelolaan potensi Minyak dan Gas Bumi maupun potensi unggulan lainnya.

**c. Prioritas Daerah 3 : Penyediaan, Pemenuhan dan Pemerataan Sarana Prasarana Dasar, TIK dan Konektivitas yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan**

Prioritas daerah ini merupakan penjabaran sekaligus sebagai tujuan dari Misi 3 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Berkualitas, Merata dan Ramah Lingkungan yang di arahkan pada upaya untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana pelayanan dasar dan infrastruktur penunjang ekonomi daerah. merupakan upaya pemerintah Kabupaten Banggai untuk mempercepat pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar yaitu air bersih, rumah layak huni dan sanitasi layak, serta infrastruktur wilayah yaitu jalan, jembatan, infrastruktur perhubungan, telekomunikasi dan ketenagalistrikan.

Sebagai dasar dan pijakan untuk Pembangunan daerah tahap berikutnya, maka percepatan Pemenuhan sarana prasarana dasar, konektivitas dan TIK yang berkualitas, ramah lingkungan, terjangkau dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Banggai, akan di lakukan melalui Misi 3 ini. Misi ini juga memberi arahan pengelolaan lingkungan hidup yang Lestari dan berketahanan, resiliensi bencana dan perubahan iklim.

**d. Prioritas Daerah 4 : Pemekaran Wilayah, Pembangunan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan**

Misi ini di arahkan pada Upaya untuk mengurangi kesenjangan wilayah di Kabupaten Banggai dengan cara antara lain percepatan

pencapaian desa Maju dan Mandiri, persiapan dan percepatan pemekaran wilayah desa, Kecamatan dan DOB, Pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan dan Tambahan Dana Kelurahan serta penciptaan kemandirian ekonomi perdesaan melalui optimalisasi BUMDes dan Koperasi Merah Putih.

**e. Prioritas Daerah 5 : Penguatan Reformasi Birokrasi Berdampak dan Berkelanjutan.**

Guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta berorientasi hasil, di lakukan transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang meliputi antara lain kelembagaan daerah yang efektif, penguatan system merit, manajemen talenta ASN, peningkatan aksesibilitas dan inklusifitas pelayanan public terpadu, serta transformasi layanan pemerintahan berbasis digital.

**3.2.2.2 Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Banggai**

Sebagai percepatan terwujudnya fondasi untuk Banggai Emas 2045 sebagaimana tahapan awal dalam periodisasi RPJPD 2025-2045, dan juga sebagai kelanjutan dari program Bupati dan Wakil Bupati Banggai periode sebelumnya 2021-2024, maka dalam 5 Tahun kedepan pada periode 2025-2029 di tetapkan **9 Program Unggulan Kreatif dan Inovatif, 9 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) dan 9 Program Aksi** yang di sebut sebagai **NAWAITU**.

Sesuai Visi BERGERAK BERSAMA MENUJU GERBANG TIMUR SULAWESI TENGAH (GERakan BANGgai Terdepan, Inovatif, MajU dan sejahteRa), GERBANG diterjemahkankan sebagai GERAKAN BANGGAI atau GERAKAN MEMBANGUN untuk mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai Kabupaten yang Terdepan, Inovatif, Maju dan Sejahtera (TIMUR). Untuk mewujudkan GERBANG di maksud, maka di rumuskan program unggulan kreatif dan inovatif yaitu sebagai berikut :

1. **GERBANG SEHAT**, Gerakan Banggai untuk mewujudkan derajat Kesehatan Masyarakat yang tinggi.
2. **GERBANG CERDAS**, Gerakan Banggai untuk mewujudkan generasi cerdas, berahlak dan berbudi pekerti luhur serta menguasai IPTEK.
3. **GERBANG PRODUKTIF SEJAHTERA**, Gerakan Banggai untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal yang terampil, sesuai dengan tuntutan pasar kerja, pengangguran berkurang, ekonomi produktif, investasi meningkat dan Tanpa miskin ekstrim,
4. **GERBANG BERBUDAYA**, Gerakan Banggai untuk melestarikan nilai-nilai budaya BAbasalan, serta pengembangan pariwisata daerah (alam dan Budaya).
5. **GERBANG DESA**, Gerakan Banggai membangun Desa untuk mencapai Desa Maju dan Mandiri.
6. **GERBANG PANGAN**, Gerakan Banggai untuk meningkatkan nilai tambah potensi pertanian, perikanan dan kelautan, dan peternakan, serta Gerakan Banggai untuk pemasaran pemanfaatan pekarangan oleh rumah tangga di seluruh wilayah Kabupaten Banggai.
7. **GERBANG DIGITAL DAN TERANG**, Gerakan Banggai untuk mempercepat terlaksananya Transformasi Digital di berbagai sektor, serta Gerakan Banggai untuk mewujudkan akses Masyarakat terhadap penerangan Listrik Rumah Tangga maupun penerangan jalan.
8. **GERBANG LAYAK, BERSIH DAN LANCAR**, Gerakan Banggai untuk pemenuhan sarana prasarana dasar (perumahan, air bersih, sanitasi layak), Banggai (Luwuk) Bersih, Lingkungan Hidup Terjaga dan Mitigasi Bencana serta Pemenuhan infrastruktur jalan dan jembatan.

**9. GERBANG AMANAH**, Gerakan Banggai untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Inovatif dan Akuntabel

Jabaran 9 (Sembilan) Program Unggulan Kreatif dan Inovatif kedalam kegiatan prioritas yang kemudian di sandingkan dengan program nomenklatur dan Perangkat Daerah Penanggungjawab adalah sebagaimana tergambar pada tabel 3.16 berikut :

**Tabel 3.16**  
**Jabaran Program Unggulan Kreatif dan Inovatif**  
**(Nawaitu 2025-2029) kedalam kegiatan Prioritas, Program**  
**Nomenklatur dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab**

No.	Nawaitu 2025-2029		
	Program Unggulan Kreatif dan Inovatif	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
<b>1.</b>	<b>Gerbang Cerdas</b>		
	a. Bea Siswa Untuk Siswa dan Mahasiswa Miskin b. Bea Siswa untuk Guru. c. Hibah Pengembangan untuk Perguruan Tinggi Daerah d. Penerapan Dana Operasional Sekolah (DOS) untuk mendukung BOS e. Dukungan pembelajaran berbasis digital f. Pengembangan perpustakaan digital dan perpustakaan daerah g. Pemenuhan dan pemerataan sarana dan prasarana PAUD, SD dan SMP sesuai standar h. Gerakan kembali ke sekolah bagi anak putus sekolah dan dewasa tidak sekolah (ADE kembali sekolah) i. Tanpa pungutan di sekolah	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum 3. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra 4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan. 6. Program Pembinaan Perpustakaan	1. Sekretariat Daerah 2. Dinas Pendidikan 3. Bappeda 4. Dinas Sosial

No.	Nawaitu 2025-2029		
	Program Unggulan Kreatif dan Inovatif	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
2.	<b>Gerbang Sehat</b>		
	a. Kesehatan Gratis melalui Cakupan Kepesertaan BPJS Kesehatan (UHC Prioritas). b. Status BLUD untuk 27 Puskesmas c. Rintisan Rumah Sakit Tipe C atau D di 4 wilayah prioritas. d. Pengembangan Sarana Prasarana dan Peningkatan kualitas layanan RSUD Luwuk sebagai Rumah Sakit Rujukan. e. Dukungan Makan Bergizi Gratis f. Peningkatan sarana prasarana fasilitas kesehatan Tingkat Pertama. g. Penurunan kematian Ibu dan Bayi melalui penguatan pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak, peningkatan cakupan dan kualitas antenatal care, kunjungan neonatal dan nifas sesuai standar, melalui pengembangan Inovasi Ambulance dering Ibu Hamil. h. Penurunan Stunting melalui penanggulangan KEK pada Ibu Hamil, Pemberian makanan tambahan (PMT), suplementasi gizi mikro, pemenuhan ASI eksklusif dan pendampingan pada	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 5. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 6. Program Pengendalian Penduduk	1. Sekretariat Daerah 2. Dinas Kesehatann 3. Bappeda 4. RSUD Luwuk 5. Dinas Sosial 6. P2KBP3A

No.	Nawaitu 2025-2029		
	Program Unggulan Kreatif dan Inovatif	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
	keluarga beresiko stunting serta Pengembangan inovasi Stunting i. Pengembangan Olah Raga Masal untuk pola hidup sehat. j. Pemerataan Tenaga Kesehatan		
<b>3.</b>	<b>Gerbang Produktif Sejahtera</b>		
	a. Peningkatan pelatihan Vokasional/ pelatihan kerja di LLK Luwuk maupun melalui program kemitraan/ pemagangan. b. Pelatihan life skill di PKBM. c. UMKM Naik Kelas d. Pengembangan Industri Kreatif e. PI 10 % melalui BEU f. Fasilitasi Wirausaha Pemuda, Santri, Wirausaha Sosial dan Komunitas. g. Perlindungan sosial melalui pemberian modal usaha, perijinan dan pendampingan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin, kepala keluarga Perempuan miskin dan penyandang disabilitas. h. Pemenuhan dan pengendalian harga bahan pokok murah dan bahan penting lainnya i. Pemberdayaan Perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia. j. Perwujudan Kabupaten Layak Anak, Sekolah	1. Perempuan. 2. Program Perlindungan Perempuan 3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak. 4. Program Pemenuhan Hak Anak. 5. Program Perlindungan Khusus Anak 6. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing	1. Sekretariat Daerah 2. Bappeda 3. Dinas Koperasi dan UMKM 4. Dinas Tenaga Kerja 5. Dinas Sosial 6. P2KBP3A 7. Dinas Perdagangan 8. Dinas PTSP 9. Seluruh PD Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah

No.	Nawaitu 2025-2029		
	Program Unggulan Kreatif dan Inovatif	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
	Ramah Anak untuk pemenuhan Hak Anak. k. Kemudahan perizinan dan investasi serta kemudahan berusaha. l. Inovasi TUMIS IKAN TERI berbasis DTSEN m. UGD Kemiskinan n. Cakupan BPJS Ketenagakerjaan.		
<b>4.</b>	<b>Gerbang Berbudaya</b>		
	a. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan BABASALAN (seni, adat istiadat, bahasa daerah, cagar budaya, museum daerah dan olah raga tradisional) b. Pengembangan 4 destinasi pariwisata prioritas (KM 5, Teluk Lalong, Salodik dan Pulo Dua). c. Pengembangan Kampung /Desa Wisata) d. Moderasi Beragama dan pengembangan wawasan kebangsaan	1. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 2. Program Pengelolaan Permuseuman 3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional. 4. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra. 5. Program Pengembangan Kebudayaan 6. Program Pembinaan Sejarah 7. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 8. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 9. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 10. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Pariwisata 3. Badan Kesbangpol 4. Dinas PMD

No.	Nawaitu 2025-2029		
	Program Unggulan Kreatif dan Inovatif	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
		Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial. 11. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 12. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 13. Program Pemasaran Pariwisata 14. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
<b>5.</b>	<b>Gerbang Desa</b>		
	a. Satu BUMDes 500 Juta b. Dukungan Koperasi Merah Putih c. Desa Maju dan Mandiri d. Desa/Kampung Wisata dan Tematik Lainnya	1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat adat. 2. Program Administrasi Pemerintahan Desa 3. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 4. Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi 5. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian 6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1. Dinas PMD 2. Dinas Pariwisata

No.	Nawaitu 2025-2029		
	Program Unggulan Kreatif dan Inovatif	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
		7. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
<b>6.</b>	<b>Gerbang Pangan dan Pekarangan</b>		
	a. Germas pemanfaatan pekarangan, pengembangan 1 Juta 1 Pekarangan. b. Banggai Sejuta Ternak c. Pengarusutamaan produk unggulan kelapa d. Bantuan Alat Tangkap dan Budidaya ikan. e. Banggai Smart Farming. f. Industrialisasi pangan untuk diversifikasi dan daya saing produk pangan.	1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 3. Program Perizinan Usaha Pertanian 4. Program Penyuluhan Pertanian 5. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan. 6. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 7. Program Penanganan Kerawanan Pangan 8. Program Pengawasan Keamanan Pangan 9. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 10. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 11. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan 12. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 13. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Dinas TPHP 2. Dinas Peternakan 3. Dinas Perikanan 4. Dinas Ketahanan Pangan

No.	Nawaitu 2025-2029		
	Program Unggulan Kreatif dan Inovatif	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
<b>7.</b>	<b>Gerbang Digital dan Terang</b>		
	a. Bebas Gelap (Akses Rumah Tangga ke listrik PLN dan Lampu Jalan). b. Bebas Blank Spot c. KabupatenKota pintar dan Desa pintar. d. Banggai Comand Centre e. Penarapan open Data, Satu Data Banggai. f. Penguatan SDM Digital g. Peningkatan Infrastruktur TIK h. Digitasilisasi Sektor ekonomi (koperasi Modern dan UMKM Go Digital) i. Pengembangan Platform Digital	1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik. 2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika. 3. Program Pengembangan Perumahan. 4. Program Kawasan Permukiman. 5. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). 6. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 7. Program Perekonomian dan Pembangunan	1. Sekretariat Daerah 2. Dinas Kominfo 3. Dinas Koperasi dan UMKM 4. Dinas Perhubungan 5. Dinas Perkimtan
<b>8.</b>	<b>Gerbang Layak, Bersih dan Lancar</b>		
	a. Banggai Tanpa Kekumuhan. b. Rintisan penerapan Smart Water Grid Management (SWGM) atau PDAM pintar. c. Pengelolaan sampah terintegrasi hulu hilir menuju ekonomi sirkular d. Peningkatan kemantapan jalan Kabupaten. e. Penataan Luwuk Water Front City, Green and Clean City dan Luwuk Kota Gas f. Kawasan Perkantoran Halimun g. Penangaan Banjir Kota Luwuk	1. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional. 2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah. 3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1. Sekretariat Daerah 2. Dinas PUPR 3. Dinas LH 4. Dinas Perkimtan

No.	Nawaitu 2025-2029		
	Program Unggulan Kreatif dan Inovatif	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
		5. Program Penanggulangan Bencana. 6. Program Penataan Bangunan Gedung 7. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 8. Program Penyelenggaraan Jalan 9. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ). 10. Program Pengelolaan Pelayaran 11. Program Pengembangan Perumahan. 12. Program Kawasan Permukiman. 13. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh. 14. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	
<b>9.</b>	<b>Gerbang Amanah</b>		
	a. Banggai RB dan SAKIP A. b. Digitalisasi pelayanan publik c. Peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). d. Penguatan kembali Laboratorium Inovasi untuk mewujudkan Banggai Inovatif. e. Kolaborasi pelaku Pembangunan dengan	1. Program Pelayanan Penanaman Modal. 2. Program Pendaftaran Penduduk 3. Program Pencatatan Sipil 4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1. Sekretariat Daerah 2. Bappeda 3. BPKAD 4. Bappenda 5. BRIDA 6. BKPSDM 7. Inspektorat 8. DPMPD 9. Seluruh PD 10. Kecamatan 11. Kelurahan

No.	Nawaitu 2025-2029		
	Program Unggulan Kreatif dan Inovatif	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
	pendekatan PENTAHHELIX. f. Perencanaan dan Penganggaran untuk APBD Sehat. g. Penerapan System merit dan manajemen talenta. h. Peningkatan Fiskal Daerah	6. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 7. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 8. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi 9. Program Penataan Organisasi 10. Program Kepegawaian Daerah 11. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 12. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 13. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 14. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 15. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 16. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 17. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 18. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 19. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	

No.	Nawaitu 2025-2029		
	Program Unggulan Kreatif dan Inovatif	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
		20. Program Penyelenggaraan Pengawasan 21. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 22. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 23. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 24. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. 25. Program Penataan Organisasi 26. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah 27. Program Kesejahteraan Rakyat 28. Program Perekonomian dan Pembangunan 29. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan 30. Program Pengelolaan Arsip 31. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 32. Program Perizinan Penggunaan Arsip 33. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. 34. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.	

No.	Nawaitu 2025-2029		
	Program Unggulan Kreatif dan Inovatif	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
		35. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum. 36. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. 37. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 38. Program Administrasi Pemerintahan Desa. 39. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

Keseluruhan GERBANG di atas di laksanakan secara kolaboratif, melibatkan seluruh stakeholders Pembangunan secara HEXAHELIX yaitu pemerintah, akademisi, komunitas, media masa, swasta pelaku usaha dalam dan luar negeri dan organisasi Non pemerintah, dalam bentuk GERAK BERSAMA.

Selanjutnya untuk menjabarkan lebih lanjut tentang Gerakan Banggai (Gerbang) di atas, di rumuskan 9 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yaitu sebagai berikut:

1. **Kabupaten/Kota Pintar dan Desa Pintar.**
2. **Puskesmas BLUD dan Rumah Sakit tipe D**
3. **Tuntas Wajar 9 Tahun menuju Wajar 13 Tahun**
4. **Germas Pemanfaatan Pekarangan.**
5. **Kecamatan/Kelurahan/Desa Maju dan Mandiri**
6. **PI 10 % melalui BUMD Banggai Energi Utama**
7. **Luwuk Water Front City, Green and Clean City dan Luwuk Kota Gas.**
8. **Pusat Perkantoran Halimun**
9. **Perguruan Tinggi Maju dan Unggul**

9 (sembilan) Program Cepat NAWAITU tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:



Konsep Smart City atau kota cerdas sejatinya berdasar pada hal-hal fundamental, yakni inovasi dan teknologi. Smart City adalah suatu konsep pengembangan kota

yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kualitas hidup warganya. Setidaknya ada enam dimensi yang harus diimplementasikan untuk menjadi kabupaten/Kota cerdas, antara lain; 1) Tata kelola pemerintahan cerdas; 2) Konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi; 3) Kehidupan yang cerdas menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat dalam satu kabupaten/kota; 4) Tata kelola lingkungan dalam pembangunan; 5) Inovasi dalam memasarkan daerahnya dengan memanfaatkan teknologi; dan 6) Mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan era informasi saat ini.

Program ini akan di lakukan melalui pemenuhan Peta Jalan Pembangunan Smart City Kabupaten Banggai, baik jangka pendek maupun jangka menengah, untuk mewujudkan *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society* dan *Smart Environment*.

Sedangkan Smart Vilage atau Desa Cerdas yaitu desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya melalui pemanfaatan teknologi dan layanan digital dalam berbagai aspek Pembangunan desa, sehingga menuju kemandirian Desa.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat yang responsif, terjangkau, merata, professional, transparan dan akuntabel, maka penerapan BLUD bagi Puskesmas adalah alternatif yang tepat. BLUD Puskesmas di



2

PUSKESMAS BLUD DAN RUMAH SAKIT TIPE C

harapkan dapat merespon kebutuhan pelayanan Kesehatan secara lebih cepat dan efektif. Selain itu puskesmas dapat lebih berkembang dan mandiri. Selanjutnya untuk mendukung keberadaan RSUD Luwuk sebagai Rumah sakit Tipe B, beberapa Puskesmas di Kabupaten Banggai dapat di tingkatkan kelasnya menjadi Tipe D, sedangkan Rumah Sakit Pratama Pagimana di percepat untuk menjadi RSUD tipe C.



Berdasarkan data tahun 2023, Rata-Rata Lama Sekolah penduduk Kabupaten Banggai yaitu 8,63 Tahun. Oleh karena itu dalam Upaya percepatan penuntasan wajar Dikdas 9 Tahun,

sebagai fondasi menuju wajar 13 tahun dalam Banggai Emas 2045, penanganan anak putus sekolah dan dewasa tidak sekolah menjadi prioritas, dan akan di tangani secara multi sektor, di samping Upaya untuk membenahi sarana prasarana Pendidikan serta pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan.

Inovasi Satu Juta Satu Pekarangan yang telah kami laksanakan di Periode sebelumnya telah menunjukkan hasil yang menggembirakan yaitu antara lain dapat di klaim sebagai salah



satu penyebab turunnya angka kemiskinan ekstrim menjadi 0 % dan mampu mengendalikan inflasi di daerah. Olehnya itu program pemanfaatan pekarangan ini akan di masifkan secara masal menjadi satu Gerakan Masyarakat (Germas), agar menyentuh seluruh Rumah Tangga di Kabupaten Banggai.



Pelimpahan kewenangan kepada Camat di sertai anggaran yang memadai dan tambahan Dana Kelurahan agar setara dengan Dana Desa Terendah di Kabupaten Banggai akan di lanjutkan lebih efektif, efisien dan

transparan, untuk peningkatan kualitas pelayanan dan pemerataan Pembangunan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan. Sedangkan Desa akan di percepat untuk mencapai kondisi/kategori Desa Maju dan Mandiri serta mengentaskan 2 desa terbelakang yang berada di pegunungan.

Partisipating Interest (PI) merupakan keikutsertaan badan usaha termasuk BUMD dalam pengelolaan Wilayah Kerja Migas melalui PI 10 %. Manfaat bagi daerah yaitu antara lain memberikan keuntungan/ Profit bagi BUMD yang akan



menambah pendapatan daerah. Selain itu memberikan pengetahuan, pengalaman BUMD dalam pengelolaan Blok Migas. Di Tahun 2023 Kabupaten Banggai telah membentuk BUMD Banggai Energi Utama, sebagai pengelola PI. Upaya Pemenuhan persyaratan dan Langkah-Langkah strategis untuk percepatan penrimaan PI telah di lakukan. Hal inilah yang menjadi prioritas dalam 5 tahun kedepan untuk terwujudnya PI 10 % di Kabupaten Banggai.



Sebagai pintu Gerbang Bagian Timur Sulawesi Tengah, Kota Luwuk dalam 5 tahun kedepan akan di tata dengan konsep kota tepian air (*Water Front City*). Akan di wujudkan sebagai kota hijau dan bersih (*green and clean city*), dan juga akan di wujudkan sebagai Kota Gas. Luwuk Kota Gas

di maksudkan adalah kondisi Kota luwuk yang telah tersedia jaringan gas kota sebagai pemenuhan kebutuhan gas untuk rumah tangga dan pelanggan kecil dengan menggunakan infrastruktur pipa gas. Dalam 5 tahun kedepan hal ini di prioritaskan untuk terwujud.

Pemusatan perkantoran Pemerintah Kabupaten Banggai di Kawasan Bukit Halimun di maksudkan untuk mempermudah serta mempercepat koordinasi dan komunikasi di antara sesama perangkat daerah, karena berada dalam satu



**8**

**PUSAT PERKANTORAN  
HALIMUN**

Kawasan. Hal ini di kecualikan untuk unit kerja pelayanan publik. Pemusatan perkantoran di bukit halimun juga merupakan bagian dari Upaya penataan kota Luwuk.



**9**

**PERGURUAN TINGGI MAJU  
DAN UNGGUL**

Kabupaten Banggai memiliki Perguruan Tinggi yang telah berumur kurang lebih 25 Tahun, yaitu Universitas Tompotika Luwuk dan Universitas Muhammadiyah Luwuk, serta satu Pendidikan diploma AMIK Nural

Luwuk. Ketiga PT ini telah melahirkan ribuan sarjana yang tersebar di beberapa wilayah timur Sulawesi, termasuk dari kepulauan Sula. Hal ini merupakan potensi yang dapat di kembangkan oleh Pemda untuk menjadikan Kabupaten Banggai (kota Luwuk) sebagai pusat pelayanan Pendidikan tinggi di Timur Sulawesi Tengah, melalui dukungan sarana prasarana dan tenaga pengajar melalui Hibah.

Selanjutnya Program Unggulan Kreatif dan Inovatif juga di jabarkan kedalam 9 PROGRAM AKSI yang lebih konkrit sebagai berikut:

1. **TANPA PUNGUTAN**, dalam semua bentuk pelayanan Pendidikan, Kesehatan, perizinan, serta layanan pemerintahan dan layanan publik lainnya.
2. **TANPA MISKIN EKSTRIM**, di lakukan melalui inovasi TUMIS IKAN TERI (Tuntaskan Kemiskinan Melalui Kegiatan Terintegrasi), untuk menjaga tumbuhnya miskin ekstrim baru , maupun kemiskinan absolut lainnya.
3. **TANPA KEKUMUHAN**, yaitu mengentaskan Kawasan Kumuh menjadi Kawasan yang layak huni.
4. **TANPA SAMPAH**, sebagai program untuk mewujudkan Luwuk Green and Clean city.
5. **BEBAS GELAP**, sebagai kelanjutan dari BANGGAI Terang, untuk peningkatan akses Masyarakat terhadap Listrik rumah tangga dan penerangan jalan.
6. **TANPA PUTUS SEKOLAH**, sebagai kelanjutan inovasi Anak dan Dewasa Kembali ke sekolah.
7. **AMBULANCE DERING**, sebagai pengembangan dari Inovasi Ambulance Dering Ibu Hamil, yang di perluas kepada seluruh jenis pelayanan Kesehatan, dengan jangkauan yang di perluas.
8. **GERMAS PEMANFAATAN PEKARANGAN**, sebagai pengembangan dari Inovasi 1 Juta 1 Pekarangan, akan di masalkan kepada seluruh Rumah Tangga di perkotaan dan perdesaan menjadi Gerakan Masal/Masyarakat.
9. **UGD KEMISKINAN**, merupakan Unit Gawat Darurat yang bertugas melayani dan menyelesaikan masalah-masalah yang di alami Masyarakat miskin secara cepat, tepat dan responsif.

### 3.2.2.3 Upaya Transformatif Super Prioritas dalam RPJPD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2045

*Game Changer* dapat di artikan sebagai sesuatu hal yang dapat menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap suatu Tindakan atau cara berfikir. Dengan demikian Upaya transformatif super prioritas kabupaten Banggai 2025-2045 dapat di maknai sebagai Tindakan, kegiatan atau transformasi pada bidang tertentu yang super prioritas untuk di laksanakan, karena akan berdampak besar terhadap perwujudan Banggai Emas 2045.

**Gambar 3.11**  
**Upaya Transformatif Super Prioritas (*game changers*)**  
**Banggai Emas 2045**



Upaya Transformatif super prioritas di maksud juga akan mulai di laksanakan dalam periode perencanaan RPJMD 2025-2029 sebagai tahapan pertama yakni sebagai berikut :

1. SDM Unggul dan Berdaya Saing melalui Transformasi Sosial:
  - a. Percepatan wajib belajar 13 Tahun (1 Tahun Pra Sekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah)

- b. Perwujudan *Green Hospital* RSUD Luwuk dan Pembangunan Rumah Sakit Tipe C.
  - c. Penuntasan stunting
  - d. Penuntasan kemiskinan menjadi di bawah 5 %.
  - e. Perguruan Tinggi Daerah maju dan Unggul
2. Ekonomi Daerah Tangguh dan Inklusif melalui Transformasi Ekonomi:
- a. Perwujudan Smart Farming
  - b. Industrialisasi pangan untuk diversifikasi dan daya saing produk pangan
  - c. Banggai Sejuta Ternak
  - d. Percepatan realisasi PI 10 % melalui Banggai Energi Utama (BEU).
  - e. Transformasi Digital Sektor-sektor perekonomian.
  - f. Pengarusutamaan produk unggulan kelapa.
3. Transformasi Tata Kelola untuk Pemerintahan yang Baik dan Inovatif
- a. Percepatan Digitalisasi pemerintahan
  - b. Transformasi perencanaan dan penganggaran
  - c. Banggai Diklat HUB.
4. Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi Sebagai Landasan Transformasi
- a. Penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah
  - b. Pelestarian budaya BABASALAN
5. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkedilan
- a. Percepatan realisasi DOB baru, Provinsi dan kabupaten.
  - b. Perwujudan *Luwuk Waterfront City* gerbang Timur Sulawesi Tengah.
  - c. Percepatan desa mandiri berdasarkan Indeks Desa.

6. Sarana Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
  - a. Percepatan ketuntasan pemenuhan prasarana dasar (Banggai Tanpa Kekumuhan).
  - b. Pemerataan dan penuntasan infrastruktur konektivitas.
  - c. Penerapan *Smart Water Grid Management* di SPAM/PDAM Luwuk.

#### **3.2.2.4 Program-Program Prioritas Daerah**

Program-Program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 di rumuskan sebagaimana tabel 3.17 berikut :

**Tabel 3.17**  
**Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD**  
**Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029**

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
1. SDM Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing	1.1 Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Dinas Kesehatan
		1.1.1 Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi		Usia Harapan Hidup (UHH)		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masarakat	
				Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita		
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat, Kesehatan dan Makanan Minuman	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
			Meningkatnya akreditasi pelayanan kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan	
			Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masarakat Di Rumah Sakit	Angka Kematian Ibu (AKI) Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masarakat	RSUD
		1.1.2 Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata		Hasil Pembelajaran Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
				- Literasi Membaca		
				- Numerasi		
				Harapan Lama Sekolah		
				Rata – Rata Lama Sekolah		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah (APS)	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus (APS)		
			Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Program Pengelolaan Kurikulum	
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru	Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan	
				Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik		
			Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Di Perbarui	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Terlestarikanya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	
			Meningkatnya kualitas perpustakaan dan pustakawan	Persentase Pustakawan yang Memperoleh Sertifikasi Profesi dibidang Perpustakaan	Program Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi Pustakawan	
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	Program Pengelolaan Arsip	
			Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			arsip sesuai NSPK			
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Program Perizinan Penggunaan Arsip	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang kearsipan	Persentase SDM Bidang Kearsipan yang Ditingkatkan kompetensinya	Program Akreditasi dan Sertifikasi	
		1.1.3 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Perluasan Kesempatan Kerja		Tingkat Kemiskinan		
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
				Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
				<p>Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA</p> <p>Persentase Pekerja Sosial / Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar</p> <p>Persentase SDM Kesejahteraan</p>		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan	
				Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial			
				Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial			
			Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		
				Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani			
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas	Program Rehabilitasi Sosial		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
				Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
				Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
				Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
				Kebutuhan Dasarnya		
				Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas		
				Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia		
				Indeks Peranan Sosial		
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/ atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Program Penanganan Bencana	
				Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya		
				Persentase Korban Bencana yang		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
				Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial		
				Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/ atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana		
			Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Kabupaten/ Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalarn Negeri	Program Penempatan Tenaga Kerja	
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah Pekerja Pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Program Hubungan Industrial	
			Terlindunginya hak-hak pekerja	Jumlah tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	
			Meningkatnya pelaksanaan transmigras	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	
			Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	
			Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			pengembangan kawasan transmigrasi			
		1.1.4 Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Gender yang setara		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga)		
				Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		
				Indeks Perlindungan Anak (IPA)		
			Terkendalinya penambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (total Fertility Rate/TFR	Pengendalian Penduduk	DP2KBP3A
				Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)		
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Pangan	Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
		1.1.5 Terwujudnya Kebudayaan Daerah yang Maju dan Masyarakat yang Harmonis dan Toleran		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)		
				Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)		
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan (urusan Kebudayaan)
			Meningkatnya peran serta masyarakat	Persentase Kesenian Tradisional yang	Pengembangan Kesenian Tradisional	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			dalam pengembangan kesenian tradisional	Dilestarikan dan Dikembangkan		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Parrtisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
			Meningkatnya tata Kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan Ke Museum	Pengelolaan Permuseum	
		1.1.6 Meningkatnya daya saing Pemuda dan prestasi olah raga		Indeks Pembangunan Pemuda		
				Indeks Pembangunan Olah Raga		
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda Olahraga
			Meningkatnya Pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepramukaan	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	
<b>Misi 2 :</b> Ekonomi Daerah Tangguh dan Inklusif Berbasis Potensi Unggulan	2.1 Pertumbuhan Ekonomi Daerah Inklusif dan Berkelanjutan berbasis potensi unggulan Daerah	2.1.1 Terwujudnya Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang inklusif secara berkelanjutan.		Pertumbuhan Ekonomi		
				PDRB Perkapita		
				Gini Rasio		
				Angka Inflasi		
				Pertumbuhan Ekonomi		
			Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Urusan Perdagangan)
			Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Pokok dan Barang Penting			
			Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	Nilai Ekspor Barang	Pengembangan Ekspor	
			Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Urusan Perindustrian)
			Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Berusaha	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Pengendalian Izin Usaha Industri	
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi dan UKM
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Meningkatnya Kinerja Pengelolaan	Persentase Koperasi Aktif	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	
			Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	
			Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	
			Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	
				Pertumbuhan Wirausaha		
			Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UMKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Pengembangan UMKM	
			Meningkatnya Legalitas Koperasi	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	Penguatan Badan Hukum Koperasi	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Terhadap Investasi Total Target	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP (urusan Penanaman Modal)
			Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Promosi Penanaman Modal	
			Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Pelayanan Penanaman Modal	
			Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
			Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Penanaman Modal	Persentase Kerja Sama Penanaman Modal yang Ditindak Lanjuti	Kerja Sama Penanaman Modal	
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
		2.1.2 Meningkatkan Produktivitas Pertanian,		Privalensi Ketidacukupan konsumsi Pangan		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
		Perikanan dan Kelautan Menuju Banggai Swasembada Pangan Berkelanjutan untuk Mendukung Perekonomian Daerah		Indeks Ketahanan Pangan		
			Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian	Dinas Ketahanan Pangan
			Meningkatnya Disversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
			Meningkatnya Penanganan Kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan	
			Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Pengawasan Keamanan Pangan	
			Meningkatnya Distribusi dan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Penyediaan dan Pengembangan Saran Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Kualitas Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Holtikultura		Perkebunan (Urusan Pertanian)
				Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan		
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
				Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)		
			Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan	Persentase Penanganan Bencanan Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian		
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	Perizinan Usaha Pertanian	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Penyuluh Pertanian	
				Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi		
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Prasarana Pertanian			
			Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
				Presentse Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)		
			Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
				Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian		
			Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Ditertibkan	Program Perizinan Usaha Pertanian	
				Persentase SDM Penyuluh	Program Penyuluhan Pertanian	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
				Pertanian yang Ditingkatkan		Dinas Perikanan dan Kelautan
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi		
			Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Sebagai Sumber Nilai Tambah Ekonomi Kelautan dan Perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Pengelolaan Perikanan Tangkap	
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Pengelolaan Perikanan Budidaya	
			Meningkatnya Kelestarian Laut dan Keanekaragaman Hayati	Luasan Kawasan Konservasi	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
<b>Misi 3 :</b> Pemenuhan Sarana dan Prasarana Berkualitas, Merata dan Ramah Lingkungan.	3.1 Penyediaan, Pemenuhan dan Pemerataan Sarana Prasarana Dasar, TIK dan Konektivitas			Indeks Kepuasan layanan Infrastruktur		
		3.1.1 Tersedianya Sarana dan Prasarana Dasar yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan.		Persentase pemenuhan akses layanan dasar (Air Bersih, Sanitasi Aman serta Hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan)		
			Terpenuhnya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
				Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni		Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang ditangani	Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap tanah Objek Reformasi Agraria (TARO)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Asentee	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		3.1.2 Tersedianya sarana dan prasarana konektivitas yang Berkualitas dan Merata untuk mendukung Aktivitas Perekonomian dan Penanggulangan Kemiskinan		Jalan Mantap Kabupaten		
				Rasio Konektivitas		
				Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi		
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
				Pemerintah Daerah (Survei)		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas darat	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
				Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal		Dinas Perhubungan
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas laut	Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
			Meningkatnya Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	Persentase Pengendalian KKOP	Pengelolaan Penerbangan	Dinas Perhubungan
	3.2 Resiliensi Terhadap			Indeks Resiko Bencana (IRB)		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
	Bencana dan Perubahan Iklim serta kelestarian Lingkungan Hidup			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
		3.2.1 Meningkatnya Ketahanan Daerah melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana		Indeks Ketahanan Daerah (IKD)		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Meningkatnya Penanganan Bencana pada saat Tanggap Darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana		
			Meningkatnya Penanganan Bencana pada saat Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana		
		3.2.2 Terwujudnya Tata Ruang, lingkungan hidup yang berkualitas, lestari dan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
				Persentasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
				Tingkat Kepatuhan Terhadap Tata Ruang		
			Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
			Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Beracun (Limbah B3)			
			Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan Yang diterbitkan	Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	
			Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Persentase Mha Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup Yang Ditingkatkan Kompetensinya	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan hidup Untuk Masyarakat	
			Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Dan	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup		
			Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya tata Kelola persampahan	Indeks kinerja pengelolaan sampah	Pengelolaan Persampahan	
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Di Daerah Provinsi	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
<b>Misi 4 :</b> Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	4.1 Pemekaran Wilayah, Pembangunan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan	4.1.1 Terwujudnya pemekaran Desa/Kelurahan, Kecamatan dan pembentukan DOB Baru		Realisasi Pemekaran Desa/Kelurahan, Kecamatan dan DOB Baru, sesuai Design besar pemekaran di Kabupaten Banggai.		
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		4.1.2 Meningkatnya Status Desa Maju dan Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) atau Indeks Desa		Persentasi Desa Mandiri Berdasarkan IDM		
				Persentasi BUMDes Sehat.		
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa		
			Meningkatnya kapasitas	Persentase Fasilitasi	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Pemberdayaan Lembaga Kemsyarakatan Desa (LKD). Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
		4.1.3 Meningkatnya Fungsi Kawasan Perkotaan Luwuk		Indeks Kota Layak Huni untuk Kota Luwuk		
			Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST Regional Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layanan dan aman)	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas PUPR (Realisasi Luwuk Clean and Green City)*

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Meningkatnya tata Kelola persampahan	Indeks kinerja pengelolaan sampah	Pengelolaan Persampahan	DLH (Realisasi Luwuk Clean and Green City)*
			Menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	
				Indeks kualitas udara		
<b>Misi 5 :</b> Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif	5.1 Penguatan Reformasi Birokrasi Berdampak dan Berkelanjutan	5.1.1 Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi		Dinas Kependudukan dan catatan sipil
				Indeks Pelayanan Publik		
				Indeks Inovasi Daerah		
			Meningkatkan kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Pendaftaran Penduduk	
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak		
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Ditertibkan bagi yang melaporkan	Pencatatan Sipil	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
				Persentase Akta Kelahiran yang Ditertibkan bagi yang melaporkan		
				Persentase Akta Perkawinan yang Ditertibkan bagi yang melaporkan		
				Persentase Akta Perceraian yang Ditertibkan bagi yang melaporkan		
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DPMPTSP
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Pelayanan Penanaman Modal	
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			penanaman modal			
			Meningkatnya efektivitas kerja sama penanaman modal	Persentase Kerja Sama Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti	Kerja Sama Penanaman Modal	
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Riset Inovasi Daerah
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah		
			Meningkatnya kajian yang	Persentase Kajian Berbasis Bukti		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah		
			Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah		
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam Pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Riset dan Inovasi Daerah	
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Potensi Unggulan Daerah		
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah		
			Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervise terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah		
		5.1.2 Meningkatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem		Nilai SAKIP		
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
		Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel		Indeks SPBE		
				Nilai Survey Penilaian Integritas		
			Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD	Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		
			Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
				Persentase Penurunan SILPA		
			Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu		
			Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi	Persentase PAD terhadap	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			dan Intensifikasi Pendapatan	Pendapatan Daerah		
			Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan		
			Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital		
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas		
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya		
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Aktif	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
			Meningkatnya Ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasiltasi Penanganan Konflik Sosial	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
				Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan		
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
			Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintahan daerah	Indeks Kematangan Organisasi	Penataan Organisasi	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah dan otonomi daerah	Efektivitas kerja sama daerah	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
				Kinerja penyelenggaraan pemerintahan		
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kesejahteraan Rakyat	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan	Perekonomian dan Pembangunan	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			perekonomian dan pembangunan	Perekonomian dan Pembangunan		
			Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematangan UPKBJ	Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	
			Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Kebijakan Administrasi Pembangunan	
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyempingan, yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
			Meningkatnya kualitas Pendampingan dan Asistensi	Manuritas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
				Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		
				Indeks Reformasi Hukum		
				Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah		
			Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasillkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Sekretariat Daerah (Indeks Reformasi Hukum)*
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD Dengan RKPD	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
				Persentase Keselarasan RPJMD Dengan Renstra PD		
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Pembangunan Manusia			
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dsengan Renja PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD Dengan Renja PD Bidang Perekonomian Dan SDA		
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD Dengan RKPD	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBN Tahun N	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
				Persentase Penetapan Ranperda Tahun N		Sekretariat DPRD

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Sekretariat DPRD
		5.1.3 Meningkatkan Efektivitas Kelembagaan Daerah dan Manajemen Sumber Daya Aparatur		Indeks Sistem Merit		
				Indeks Profesionalitas ASN		
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Meningkatnya pengembangan kopetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kopetensinya		
			Meningkatnya tata Kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kopetensinya		
			Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik		
			Meningkatnya layanan pengembangan	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan	Pengembangan sumber daya manusia	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Pogram Prioritas	Keterangan
			kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	kopetensi dasar, manajerial dan fungsional		
			Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan		
			Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi		
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis		



**BerAKHLAK** **#** bangga  
melayani  
bangsa  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



# BAB-IV

## PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

**BAB IV**  
**PROGRAM PERANGKAT DAERAH**  
**DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

**4.1 Program Perangkat Daerah**

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan daerah pada periode 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi pedoman utama bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam merancang dan melaksanakan program-program strategis. RPJMD ini mengarahkan penyusunan program perangkat daerah yang terintegrasi dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional serta kebutuhan masyarakat lokal. Selain itu, RPJMD periode 2025-2029 menekankan pentingnya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai indikator keberhasilan dalam menjalankan program-program tersebut. Dengan pengelolaan yang efektif dan akuntabel, diharapkan capaian pembangunan dapat optimal, sehingga pelayanan publik meningkat dan kesejahteraan masyarakat dapat terus terwujud secara berkelanjutan.

Rencana program perangkat daerah dalam mencapai kinerja Pembangunan daerah tahun 2025-2030 merupakan bagian dari Upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, dimana tahun 2030 merupakan pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030. Kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Banggai RPJMD periode 2025–2029 merinci besaran sejumlah kebutuhan pendanaan yang akan digunakan untuk membiayai sejumlah program pembangunan guna pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai periode 2025–2029. Besaran kebutuhan pendanaan sangat menentukan besaran anggaran untuk membiayai setiap program pembangunan, olehnya proyeksi terhadap kebutuhan pendanaan dihitung dengan mempertimbangkan sejumlah informasi

yang berkaitan dengan dinamika komponen realisasi pada pendapatan dan belanja. Besaran kapasitas riil yang digunakan untuk prioritas pertama; prioritas kedua, dan prioritas ketiga mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Proyeksi besaran kebutuhan pendanaan dan besaran kapasitas riil dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut.

**Tabel 4.1**  
**Program Perangkat Daerah**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14
URUSAN PENDIDIKAN		100%	100%	671.000.000.000	100%	738.100.000.000	100%	811.910.000.000	100%	893.101.000.000	100%	982.411.100.000	DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	446.000.000.000	100%	490.600.000.000	100%	515.130.000.000	100%	566.643.000.000	100%	623.307.300.000	DINAS PENDIDIKAN
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD												DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		100%	100%	224.000.000.000	100%	246.400.000.000	100%	271.040.000.000	100%	298.144.000.000	100%	327.958.400.000	DINAS PENDIDIKAN
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah (APS)												DINAS PENDIDIKAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus (APS)												DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM PENGELOAALAN KURIKULUM		100%	100%	337.000.000	100%	370.700.000	100%	407.770.000	100%	448.547.000	100%	493.401.700	DINAS PENDIDIKAN
Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal												DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIKAN		100%	100%	193.000.000	100%	212.300.000	100%	233.530.000	100%	256.883.000	100%	282.571.300	DINAS PENDIDIKAN
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Indeks Pemerataan Guru												DINAS PENDIDIKAN
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik												DINAS PENDIDIKAN
PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		100%	100%	124.000.000	100%	136.400.000	100%	150.040.000	100%	165.044.000	100%	181.548.400	DINAS PENDIDIKAN
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbaharui												DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM PENGEMBANGAN		100%	100%	346.000.000	100%	380.600.000	100%	418.660.000	100%	460.526.000	100%	506.578.600	DINAS PENDIDIKAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
BAHASA DAN SASTRA													
Terlestarikannya Bahasa dan Sastra Daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra												DINAS PENDIDIKAN
URUSAN KESEHATAN		100%	100%	427.145.000.000	100%	469.859.500.000	100%	516.845.450.000	100%	568.529.995.000	100%	625.382.994.500	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	277.000.000.000	100%	304.700.000.000	100%	335.170.000.000	100%	368.687.000.000	100%	405.555.700.000	DINAS KESEHATAN
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD												DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		100%	100%	149.000.000.000	100%	163.900.000.000	100%	180.290.000.000	100%	198.319.000.000	100%	218.150.900.000	DINAS KESEHATAN
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)												DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Prevalensi Stunting Stunting (Pendek dan Sangat Pendek pada Balita)												DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA		100%	100%	228.000.000	100%	250.800.000	100%	275.880.000	100%	303.468.000	100%	333.814.800	DINAS KESEHATAN
	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan												DINAS KESEHATAN
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		100%	100%	552.000.000	100%	607.200.000	100%	667.920.000	100%	734.712.000	100%	808.183.200	DINAS KESEHATAN
Meningkatnya kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman												DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		100%	100%	255.000.000	100%	280.500.000	100%	308.550.000	100%	339.405.000	100%	373.345.500	DINAS KESEHATAN
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan												DINAS KESEHATAN
PROGRAM AKREDITASI		100%	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	146.410.000	100%	161.051.000	DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PELAYANAN KESEHATAN													
Meningkatnya Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi												DINAS KESEHATAN
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		100%	100%	350.500.000.000	100%	385.550.000.000	100%	424.105.000.000	100%	466.515.500.000	100%	513.167.050.000	DINAS PUPR
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	49.000.000.000	100%	53.900.000.000	100%	59.290.000.000	100%	65.219.000.000	100%	71.740.900.000	DINAS PUPR
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD												DINAS PUPR
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		100%	100%	38.000.000.000	100%	41.800.000.000	100%	45.980.000.000	100%	50.578.000.000	100%	55.635.800.000	DINAS PUPR
Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan												DINAS PUPR

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Masyarakat Terhadap Irigasi	Permukiman Rawan Banjir												
	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir ROB												DINAS PUPR
	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas		-		-		-		-		-		DINAS PUPR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		100%	100%	28.000.000.000	100%	30.800.000.000	100%	33.880.000.000	100%	37.268.000.000	100%	40.994.800.000	DINAS PUPR
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	-	-		-		-		-		-		DINAS PUPR
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	PERSENTASE PENINGKATAN SAMPAH YANG DIKELOLA DI TPA/TPST REGIONAL	100%	100%	2.000.000.000	100%	2.200.000.000	100%	2.420.000.000	100%	2.662.000.000	100%	2.928.200.000	DINAS PUPR
Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	Persentase Peningkatan Sampah yang	-	-		-		-		-		-		DINAS PUPR

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	dikelola di TPA/TPST Regional												
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		92,22%	100%	10.000.000.000	100%	11.000.000.000	100%	12.100.000.000	100%	13.310.000.000	100%	14.641.000.000	DINAS PUPR
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)												DINAS PUPR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		83,79%	100%	23.000.000.000	100%	25.300.000.000	100%	27.830.000.000	100%	30.613.000.000	100%	33.674.300.000	DINAS PUPR
Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik		-		-		-		-		-		DINAS PUPR
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		100%	100%	55.000.000.000	100%	60.500.000.000	100%	66.550.000.000	100%	73.205.000.000	100%	80.525.500.000	DINAS PUPR
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman Dalam Kondisi Baik		-		-		-		-		-		DINAS PUPR
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		100%	100%	65.000.000.000	100%	71.500.000.000	100%	78.650.000.000	100%	86.515.000.000	100%	95.166.500.000	DINAS PUPR

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Dalam Kondisi Baik	-	-		-		-		-		-		DINAS PUPR
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN		100%	100%	2.000.000.000	100%	2.200.000.000	100%	2.420.000.000	100%	2.662.000.000	100%	2.928.200.000	DINAS PUPR
Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	-	-		-		-		-		-		DINAS PUPR
PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN		91,24%	100%	71.000.000.000	100%	78.100.000.000	100%	85.910.000.000	100%	94.501.000.000	100%	103.951.100.000	DINAS PUPR
Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Tingkat Kemantapan Jalan												DINAS PUPR
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		0,60%	100%	1.600.000.000	100%	1.760.000.000	100%	1.936.000.000	100%	2.129.600.000	100%	2.342.560.000	DINAS PUPR
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli												DINAS PUPR
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		100%	100%	5.900.000.000	100%	6.490.000.000	100%	7.139.000.000	100%	7.852.900.000	100%	8.638.190.000	DINAS PUPR
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Di Daerah Provinsi	-	-		-		-		-		-		DINAS PUPR
URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		100%	100%	74.249.000.000	100%	81.673.900.000	100%	89.841.290.000	100%	98.825.419.000	100%	108.707.960.900	DINAS PERKIMTAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	11.994.000.000	100%	13.193.400.000	100%	14.512.740.000	100%	15.964.014.000	100%	17.560.415.400	DINAS PERKIMTAN
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD												DINAS PERKIMTAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		100%	100%	584.000.000	100%	642.400.000	100%	706.640.000	100%	777.304.000	100%	855.034.400	DINAS PERKIMTAN
Meningkatnya Pelaksanaan Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat	Persentase Penyediaan dan Rehabilitas Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	-		-		-		-		-		DINAS PERKIMTAN
	Persentase Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota		-		-		-		-		-		DINAS PERKIMTAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		100%	100%	4.055.000.000	100%	4.460.500.000	100%	4.906.550.000	100%	5.397.205.000	100%	5.936.925.500	DINAS PERKIMTAN
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Kumuh di Bawah 10-15 Ha yang Ditangani	-	-		-		-		-		-		DINAS PERKIMTAN
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)		100%	100%	7.616.000.000	100%	8.377.600.000	100%	9.215.360.000	100%	10.136.896.000	100%	11.150.585.600	DINAS PERKIMTAN
Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persentase Pemukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)												DINAS PERKIMTAN
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100%	100%	50.000.000.000	100%	55.000.000.000	100%	60.500.000.000	100%	66.550.000.000	100%	73.205.000.000	DINAS PERKIMTAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Sertifikasi dan Registrasi Bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah Serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilisas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi Bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah Serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	-	-		-		-		-		-		DINAS PERKIMTAN
URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		100%	100%	19.632.000.000	100%	21.595.200.000	100%	23.754.720.000	100%	26.130.192.000	100%	28.743.211.200	SATPOL-PP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	17.282.000.000	100%	19.010.200.000	100%	20.911.220.000	100%	23.002.342.000	100%	25.302.576.200	SATPOL-PP
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD												SATPOL-PP

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	100%	2.350.000.000	100%	2.585.000.000	100%	2.843.500.000	100%	3.127.850.000	100%	3.440.635.000	SATPOL-PP
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan		-										SATPOL-PP
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas												SATPOL-PP
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan Perlindungan Mas arakat												SATPOL-PP
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya												SATPOL-PP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		100%	100%	14.078.000.000	100%	15.485.800.000	100%	17.034.380.000	100%	18.737.818.000	100%	20.611.599.800	BPBD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	10.054.000.000	100%	11.059.400.000	100%	12.165.340.000	100%	13.381.874.000	100%	14.720.061.400	BPBD

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD												BPBD
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		100%	100%	4.024.000.000	100%	4.426.400.000	100%	4.869.040.000	100%	5.355.944.000	100%	5.891.538.400	BPBD
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		-										BPBD
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana												BPBD
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana												BPBD
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		100%	100%	13.258.000.000	100%	14.583.800.000	100%	16.042.180.000	100%	17.646.398.000	100%	19.411.037.800	DINAS DAMKAR

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	9.546.000.000	100%	10.500.600.000	100%	11.550.660.000	100%	12.705.726.000	100%	13.976.298.600	DINAS DAMKAR
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD												DINAS DAMKAR
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN		80%	100%	3.712.000.000	100%	4.083.200.000	100%	4.491.520.000	100%	4.940.672.000	100%	5.434.739.200	DINAS DAMKAR
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran												DINAS DAMKAR
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran												DINAS DAMKAR
URUSAN SOSIAL		100%	100%	24.586.000.000	100%	27.044.600.000	100%	29.749.060.000	100%	32.723.966.000	100%	35.996.362.600	DINAS SOSIAL

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	9.267.000.000	100%	10.193.700.000	100%	11.213.070.000	100%	12.334.377.000	100%	13.567.814.700	DINAS SOSIAL
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD												DINAS SOSIAL
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		100%	100%	5.074.000.000	100%	5.581.400.000	100%	6.139.540.000	100%	6.753.494.000	100%	7.428.843.400	DINAS SOSIAL
Meningkatnya pemberdayaan sosial	1. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial												DINAS SOSIAL

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	2. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA												DINAS SOSIAL
	3. Persentase Pekerja Sosial / Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar												DINAS SOSIAL
	4. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial												DINAS SOSIAL

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	5. Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial												DINAS SOSIAL
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN													DINAS SOSIAL
Meningkatnya zayanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	1. Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan												DINAS SOSIAL
	2. Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertan ani												DINAS SOSIAL
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		100%	100%	2.412.000.000	100%	2.653.200.000	100%	1.993.942.459	100%	2.193.336.705	100%	2.412.670.376	DINAS SOSIAL
Meningkatnya rehabilitasi sosial	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya												DINAS SOSIAL

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	2. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya												DINAS SOSIAL
	3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya												DINAS SOSIAL
	4. Persentase Gelandang dan Pengemis yang Te enuhi Kebutuhan Dasarnya												DINAS SOSIAL
	5. Persentase Pemef.u Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya												DINAS SOSIAL
	6. Indeks Kesejahateraan Sosial Penyandang Disabilitas												DINAS SOSIAL
	7. Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia												DINAS SOSIAL
	8. Indeks Peranan Sosial												DINAS SOSIAL

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		100%	100%	6.797.000.000	100%	7.476.700.000	100%	5.617.476.231	100%	6.179.223.855	100%	6.797.146.240	DINAS SOSIAL
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	1. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar												DINAS SOSIAL
	2. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi												DINAS SOSIAL
	3. Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar												DINAS SOSIAL
	4. Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi												DINAS SOSIAL
	5. Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan												DINAS SOSIAL
PROGRAM PENANGANAN BENCANA		100%	100%	925.000.000	100%	1.017.500.000	100%	764.509.097	100%	840.960.007	100%	925.056.007	DINAS SOSIAL

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/ atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana												DINAS SOSIAL
	2. Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya												DINAS SOSIAL
	3. Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial												DINAS SOSIAL
PROGRAM TAMAN MAKAM PAHLAWAN		100%	100%	111.000.000	100%	122.100.000	100%	134.310.000	100%	147.741.000	100%	162.515.100	DINAS SOSIAL
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Tarnan Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik												DINAS SOSIAL
URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA		100%	100%	15.287.232.112	100%	16.815.955.323	100%	18.497.550.856	100%	20.347.305.941	100%	22.382.036.535	DINAS NAKERTRANS
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		100%	100%	7.259.000.000	100%	7.984.900.000	100%	8.783.390.000	100%	9.661.729.000	100%	10.627.901.900	DINAS NAKERTRANS

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD												DINAS PERKIMTAN
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	146.410.000	DINAS NAKERTRANS
TERKELOLANYA INFORMASI TENAGA KERJA	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENYUSUN TENAGA KERJA												DINAS NAKERTRANS
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		20%	100%	91.000.000	100%	100.100.000	100%	110.110.000	100%	121.121.000	100%	133.233.100	DINAS NAKERTRANS
MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA DI SEKTOR PRIORITAS YANG MENINGKAT PRODUKTIVITASNYA		-										DINAS NAKERTRANS

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		20,50%	100%	7.000.000	100%	7.700.000	100%	8.470.000	100%	9.317.000	100%	10.248.700	DINAS NAKERTRANS
MENINGKATNYA PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN DI DALAM NEGERI		-										DINAS NAKERTRANS
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		20,50%	100%	7.780.232.112	100%	8.558.255.323	100%	9.414.080.856	100%	10.355.488.941	100%	11.391.037.835	DINAS NAKERTRANS
MENINGKATNYA PEKERJA	JUMLAH PEKERJA PADA PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA DAN DIALOG SOSIAL		-										DINAS NAKERTRANS
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN		100%	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.500.000	100%	66.550.000	100%	73.205.000	DINAS NAKERTRANS
TERLINDUNGNYA HAK-HAK PEKERJA	JUMLAH TENAGA KERJA YANG TERLINDUNGI HAK-HAK DASARNYA												DINAS NAKERTRANS
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		100%	100%	12.505.663.000	100%	13.756.229.300	100%	15.131.852.230	100%	16.645.037.453	100%	18.309.541.198	DINAS P2KBP3A

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	12.201.000.000	100%	13.421.100.000	100%	14.763.210.000	100%	16.239.531.000	100%	17.863.484.100	DINAS P2KBP3A
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD												DINAS PERKIMTAN
PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		100%	100%	120.000.000	100%	132.000.000	100%	145.200.000	100%	159.720.000	100%	175.692.000	DINAS P2KBP3A
MENINGKATNYA KUALITAS DAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN PUG DAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN	1. PERSENTASE ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG)												DINAS P2KBP3A
	2. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) PEREMPUAN												DINAS P2KBP3A
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		2,70%	2,70%	45.000.000	2,70%	49.500.000	2,70%	54.450.000	2,70%	59.895.000	2,70%	65.884.500	DINAS P2KBP3A

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Menurunnya kekerasan terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan Komprehensif.												DINAS P2KBP3A
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA													DINAS P2KBP3A
MENINGKATNYA KUALITAS KELUARGA DALAM Mendukung KESETARAAN GENDER PEMENUHAN HAK, SERTA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) YANG BERPERSPEKTIF GENDER DAN HAK ANAK SESUAI STANDAR		100%	45.000.000	2,70%	49.500.000	2,70%	54.450.000	2,70%	59.895.000	2,70%	65.884.500	DINAS P2KBP3A
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK													DINAS P2KBP3A
Meningkatnya pemanfaatan data Gender dan Anak	Tingkat pemanfaatan data Gender dan Anak												DINAS P2KBP3A
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		NA	701 Point	9.663.000	701 Point	10.629.300	701 Point	11.692.230	701 Point	12.861.453	701 Point	14.147.598	DINAS P2KBP3A
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)												DINAS P2KBP3A

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		50%	50%	85.000.000	50%	93.500.000	50%	102.850.000	50%	113.135.000	50%	124.448.500	DINAS P2KBP3A
Meningkatnya pencegahan dan Penanganan tindak kekerasan eksploitasi ,penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak.	1. persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif												DINAS P2KBP3A
	2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)												DINAS P2KBP3A
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PANGAN		100%	100%	22.665.000.000	100%	24.931.500.000	100%	27.424.650.000	100%	30.167.115.000	100%	33.183.826.500	DINAS KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	18.420.000.000	100%	20.262.000.000	100%	22.288.200.000	100%	24.517.020.000	100%	26.968.722.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD												DINAS KETAHANAN PANGAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		100%	100%	539.000.000	100%	592.900.000	100%	652.190.000	100%	717.409.000	100%	789.149.900	DINAS KETAHANAN PANGAN
MENINGKATNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	PERSENTASE JUMLAH CADANGAN PANGAN		-										DINAS KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		100%	100%	2.617.000.000	100%	2.878.700.000	100%	3.166.570.000	100%	3.483.227.000	100%	3.831.549.700	DINAS KETAHANAN PANGAN
MENINGKATNYA PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	SKOR POLA PANGAN HARAPAN		-										DINAS KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		100%	100%	504.000.000	100%	554.400.000	100%	609.840.000	100%	670.824.000	100%	737.906.400	DINAS KETAHANAN PANGAN
MENINGKATNYA PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PERSENTASE DAERAH TENTANG RAWAN PANGAN		-										DINAS KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		100%	100%	585.000.000	100%	643.500.000	100%	707.850.000	100%	778.635.000	100%	856.498.500	DINAS KETAHANAN PANGAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
MENINGKATNYA PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PERSENTASE PANGAN SEGAR YANG MEMENUHI PERSYARATAN DAN MUTU KEAMANAN PANGAN		-										DINAS KETAHANAN PANGAN
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN		100%	100%	608.845.083	100%	669.729.591	100%	736.702.550	100%	810.372.805	100%	891.410.086	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI		100%	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	146.410.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM		100%	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.500.000	100%	66.550.000	100%	73.205.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
MENINGKATNYA KETERSEDIAAN LAHAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM	PERSENTASE TAHAPAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU												DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		100%	100%	98.301.577	100%	108.131.735	100%	118.944.909	100%	130.839.399	100%	143.923.339	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
MENINGKATNYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	PERSENTASE TERSELESAIKANN YA KASUS TANAH GARAPAN BELUM BERSERTIFIKAT YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIASI		-										DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ASENTTEE		100%	100%	103.945.566	100%	114.340.122	100%	125.774.134	100%	138.351.548	100%	152.186.703	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA)	TERSEDIANYA TANAH OBYEK LANDREFORM (TOL) YANG SIAP DIREDISTRIBUSIK AN YANG BERASAL DARI TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE												DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT		100%	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	146.410.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
MENINGKATNYA TATA KELOLA TANAH ULAYAT	PERSENTASE TANAH ULAYAT YANG DITETAPKAN												DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		100%	100%	72.385.836	100%	79.624.420	100%	87.586.862	100%	96.345.548	100%	105.980.103	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
MENINGKATNYA PENGELOLAAN TANAH KOSONG	PERSENTASE TANAH KOSONG YANG DIKELOLA		-										DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		100%	100%	84.212.104	100%	92.633.314	100%	101.896.646	100%	112.086.310	100%	123.294.941	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
MENINGKATNYA TERTIB PERTANAHAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH	PERSENTASE LUAS LOKASI KONSOLIDASI TANAH		-										DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		100%	100%	30.492.000.000	100%	33.541.200.000	100%	36.895.320.000	100%	40.584.852.000	100%	44.643.337.200	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	15.020.000.000	100%	16.522.000.000	100%	18.174.200.000	100%	19.991.620.000	100%	21.990.782.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD												DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		100%	100%	299.000.000	100%	328.900.000	100%	361.790.000	100%	397.969.000	100%	437.765.900	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KAJIAN LINGKUNGAN UNTUK MEMITIGASI DAMPAK KRP	PERSENTASE REKOMENDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINDAKLANJUTI		-										DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		100%	100%	3.223.000.000	100%	3.545.300.000	100%	3.899.830.000	100%	4.289.813.000	100%	4.718.794.300	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
MENURUNNYA PENCEMARAN DAN/ATAU	1. INDEKS KUALITAS AIR		-										DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2. INDEKS KUALITAS UDARA												DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		100%	100%	1.621.000.000	100%	1.783.100.000	100%	1.961.410.000	100%	2.157.551.000	100%	2.373.306.100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	PERSENTASE RTH		-										DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		100%	100%	282.000.000	100%	310.200.000	100%	341.220.000	100%	375.342.000	100%	412.876.200	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
MENINGKATNYA PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PERSENTASE LIMBAH B3 YANG TERKELOLA		-										DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		100%	100%	288.000.000	100%	316.800.000	100%	348.480.000	100%	383.328.000	100%	421.660.800	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
MENINGKATNYA KEPATUHAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN	KETAATAN PENANGGUNGJA WAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN, IZIN PPLH DAN PUULH												DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		100%	100%	271.000.000	100%	298.100.000	100%	327.910.000	100%	360.701.000	100%	396.771.100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
MENINGKATNYA KAPASITAS MHA DAN KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	PERSENTASE MHA YANG DITINGKATKAN KAPASITASNYA		-										DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGANHIDUP UNTUK MASYARAKAT		100%	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	146.410.000	100%	161.051.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
MENINGKATNYA KAPASITAS SDM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA												DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		100%	100%	745.000.000	100%	819.500.000	100%	901.450.000	100%	991.595.000	100%	1.090.754.500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
MENINGKATNYA KINERJA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		-										DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		100%	100%	21.000.000	100%	23.100.000	100%	25.410.000	100%	27.951.000	100%	30.746.100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
MENINGKATNYA PENYELESAIAN SENGKETA/KASUS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENYELESAIAN SENGKETA/KASUS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP		-										DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		100%	100%	8.612.000.000	100%	9.473.200.000	100%	10.420.520.000	100%	11.462.572.000	100%	12.608.829.200	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
MENINGKATNYA TATA KELOLA PERSAMPAHAN	INDEKS KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH		-										DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		100%	100%	12.967.000.000	100%	14.263.700.000	100%	15.690.070.000	100%	17.259.077.000	100%	18.984.984.700	DINAS DUKCAPIL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	11.004.000.000	100%	12.104.400.000	100%	13.314.840.000	100%	14.646.324.000	100%	16.110.956.400	DINAS DUKCAPIL
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD												DINAS DUKCAPIL
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		100%	100%	1.205.000.000	100%	1.325.500.000	100%	1.458.050.000	100%	1.603.855.000	100%	1.764.240.500	DINAS DUKCAPIL
MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	1. PERSENTASE KEPEMILIKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL		-										DINAS DUKCAPIL
	2. PERSENTASE KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK												

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL		100%	100%	270.000.000	100%	297.000.000	100%	326.700.000	100%	359.370.000	100%	395.307.000	DINAS DUKCAPIL
MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENCATATAN SIPIL	1. PERSENTASE AKTA KEMATIAN YANG DI TERBITKAN BAGI YANG MELAPORKAN												DINAS DUKCAPIL
	2. PERSENTASE AKTA KELAHIRAN YANG DI TERBITKAN BAGI YANG MELAPORKAN		-										DINAS DUKCAPIL
	3. PERSENTASE AKTA PERKAWINAN YANG DI TERBITKAN BAGI YANG MELAPORKAN												DINAS DUKCAPIL
	4. PERSENTASE AKTA PERCERAIAN YANG DI TERBITKAN BAGI YANG MELAPORKAN												DINAS DUKCAPIL
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		100%	100%	290.000.000	100%	319.000.000	100%	350.900.000	100%	385.990.000	100%	424.589.000	DINAS DUKCAPIL
MENINGKATNYA INFORMASI PEMANFAATAN KEPENDUDUKAN	PERSENTASE INFORMASI KEPENDUDUKAN YANG DI MANFAATKAN												DINAS DUKCAPIL

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		100%	100%	198.000.000	100%	217.800.000	100%	239.580.000	100%	263.538.000	100%	289.891.800	DINAS DUKCAPIL
MENINGKATNYA KUALITAS PROFIL KEPENDUDUKAN	CAKUPAN PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		-										DINAS DUKCAPIL
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		100%	100%	14.399.000.000	100%	15.838.900.000	100%	17.422.790.000	100%	19.165.069.000	100%	21.081.575.900	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	8.462.000.000	100%	9.308.200.000	100%	9.309.257.617	100%	10.240.183.378	100%	11.264.201.716	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD												DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM PENATAAN DESA		100%	100%	141.000.000	100%	155.100.000	100%	156.168.529	100%	171.785.382	100%	188.963.920	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
MENINGKATNYA KUALITAS PENATAAN DESA	PERSENTASE FASILITASI PENATAAN DESA												DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		100%	100%	85.000.000	100%	93.500.000	100%	93.592.169	100%	102.951.386	100%	113.246.524	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KERJA SAMA DESA	PERSENTASE FASILITASI KERJA SAMA DESA												DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		100%	100%	3.886.000.000	100%	4.274.600.000	100%	4.275.136.532	100%	4.702.650.186	100%	5.172.915.204	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA
MENINGKATNYA KUALITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1. PERSENTASE APARATUR DESA DAN ANGGOTA BPD YANG DITINGKATKAN KAPASITASNYA												DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA
	2. PERSENTASE FASILITASI TATA KELOLA DESA												DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		100%	100%	1.825.000.000	100%	2.007.500.000	100%	2.007.595.761	100%	2.208.355.337	100%	2.429.190.870	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
MENINGKATNYA KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN	1. PERSENTASE FASILITASI PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD)												DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2. PERSENTASE FASILITASI PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT DESA DAN LEMBAGA MASYARAKAT HUKUM ADAT												DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		100%	100%	12.342.000.000	100%	13.576.200.000	100%	14.933.820.000	100%	16.427.202.000	100%	18.069.922.200	DINAS P2KBP3A
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			100%	359.000.000	100%	394.900.000	100%	434.390.000	100%	477.829.000	100%	525.611.900	DINAS P2KBP3A
TERKENDALINYA PERTAMBAHAN JUMLAH PENDUDUK	1. ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTILITY RATE /TFR)	2,18%	-		-		-		-		-		DINAS P2KBP3A
	2. ANGKA KELAHIRAN REMAJA 15-19 TAHUN (AGE SPECIFIC FERTILITY RATE/ASFR 15-19)												DINAS P2KBP3A

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			100%	9.619.000.000	100%	10.580.900.000	100%	11.638.990.000	100%	12.802.889.000	100%	14.083.177.900	DINAS P2KBP3A
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Angka prevalensi kontrasepsi modern/Modern Contraceptive (mCPR)	68%	-		-		-		-		-		DINAS P2KBP3A
	2. Persentase kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	11,20%											DINAS P2KBP3A
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			100%	2.723.000.000	100%	2.995.300.000	100%	3.294.830.000	100%	3.624.313.000	100%	3.986.744.300	DINAS P2KBP3A
Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	64,67%	-		-		-		-		-		DINAS P2KBP3A
URUSAN PERHUBUNGAN		100%	100%	32.193.000.000	100%	35.412.300.000	100%	38.953.530.000	100%	42.848.883.000	100%	47.133.771.300	DINAS PERHUBUNGA N
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	16.026.000.000	100%	17.628.600.000	100%	19.391.460.000	100%	21.330.606.000	100%	23.463.666.600	DINAS PERHUBUNGA N

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD												DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		100%	100%	14.367.000.000	100%	15.803.700.000	100%	17.384.070.000	100%	19.122.477.000	100%	21.034.724.700	DINAS PERHUBUNGAN
Meningkatnya Kualitas Layanan Transfortasi Darat	1. Konektivitas Darat												DINAS PERHUBUNGAN
	2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal												DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		100%	100%	1.800.000.000	100%	1.980.000.000	100%	2.178.000.000	100%	2.395.800.000	100%	2.635.380.000	DINAS PERHUBUNGAN
Meningkatnya Kualitas Layanan Transfortasi Laut	Konektivitas Laut												DINAS PERHUBUNGAN
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		100%	100%	15.414.000.000	100%	16.955.400.000	100%	18.650.940.000	100%	20.516.034.000	100%	22.567.637.400	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIK DAN PERSANDIAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	13.407.000.000	100%	14.747.700.000	100%	16.222.470.000	100%	17.844.717.000	100%	19.629.188.700	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATI STATISTIK DAN PERSANDIAN
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD												DINAS KOMUNIKASI, INFORMATI STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		100%	100%	1.402.000.000	100%	1.542.200.000	100%	1.696.420.000	100%	1.866.062.000	100%	2.052.668.200	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATI STATISTIK DAN PERSANDIAN
Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei)												DINAS KOMUNIKASI, INFORMATI STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		100%	100%	250.000.000	100%	275.000.000	100%	302.500.000	100%	332.750.000	100%	366.025.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATI STATISTIK DAN PERSANDIAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE												DINAS KOMUNIKASI, INFORMATI STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		32,07%	100%	355.000.000	100%	390.500.000,00	100%	429.550.000,00	100%	472.505.000,00	100%	519.755.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATI STATISTIK DAN PERSANDIAN
Meningkatnya Kualitas Layanan Keamanan Data Dan Informasi Serta Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah												DINAS KOMUNIKASI, INFORMATI STATISTIK DAN PERSANDIAN
URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		100%	100%	18.967.000.000	100%	20.863.700.000	100%	22.950.070.000	100%	25.245.077.000	100%	27.769.584.700	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	13.808.000.000	100%	15.188.800.000	100%	16.707.680.000	100%	18.378.448.000	100%	20.216.292.800	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang												DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD												
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		20,00%	100%	143.000.000	100%	157.300.000,00	100%	173.030.000,00	100%	190.333.000,00	100%	209.366.300,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
MENINGKATNYAN KUALITAS LAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	PERTUMBUHAN VOLUME USAHA KOPERASI												DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		46,68%	100%	192.000.000	100%	211.200.000	100%	232.320.000	100%	255.552.000	100%	281.107.200	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	PERSENTASE PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI												DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		20,00%	100%	98.000.000	100%	107.800.000	100%	118.580.000	100%	130.438.000	100%	143.481.800	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN KOPERASI	PERSENTASE KOPERASI AKTIF												DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		39,68%	100%	484.000.000	100%	532.400.000	100%	585.640.000	100%	644.204.000	100%	708.624.400	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
MENINGKATKAN KUALITAS SDM PERKOPERASIAN	PERSENTASE KOPERASI YANG DIBERIKAN DUKUNGAN FASILTAS PELATIHAN												DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		78,84%	100%	307.000.000	100%	337.700.000	100%	371.470.000	100%	408.617.000	100%	449.478.700	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS KOPERASI	PERSENTASE MENINGKATNYA KOPERASI YANG BERKUALITAS												DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		1,28%	100%	2.735.000.000	100%	3.008.500.000	100%	3.309.350.000	100%	3.640.285.000	100%	4.004.313.500	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
MENINGKATNYA KUALITAS UMKM YANG TANGGUH DAN MANDIRI	1. PERSENTASE USAHA KECIL YANG BERTRANSFORMA SI DARI INFORMASI KE FORMAL												DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.PERTUMBUHAN WIRAUSAHA												DINAS KOPERASI, USAHA KECIL

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
													DAN MENENGAH
PROGRAM PEMBANGUNAN UMKM			100%	400.000.000	100%	440.000.000	100%	484.000.000	100%	532.400.000	100%	585.640.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
MENINGKATNYA DAYA SAING UMKM	PROPORSI UKM MENJALIN KEMITRAAN DAN EKSPOR												DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI			100%	800.000.000	100%	880.000.000	100%	968.000.000	100%	1.064.800.000	100%	1.171.280.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
MENINGKATNYA LEGALITAS KOPERASI	PERSENTASE KOPERASI YANG MEMILIKI IZIN USAHA SIMPAN PINJAM												DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
URUSAN PENANAMAN MODAL		100%	100%	16.877.000.000	100%	18.564.700.000	100%	20.421.170.000	100%	22.463.287.000	100%	24.709.615.700	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	13.228.000.000	100%	14.550.800.000	100%	16.005.880.000	100%	17.606.468.000	100%	19.367.114.800	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD												DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		100%	100%	780.000.000	100%	858.000.000	100%	943.800.000	100%	1.038.180.000	100%	1.141.998.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
MENINGKATNYA KEMUDAHAN BERINVESTASI	REALISASI TOTAL TERHADAP TARGET INVESTASI												DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		100%	100%	763.000.000	100%	839.300.000	100%	923.230.000	100%	1.015.553.000	100%	1.117.108.300	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
MENINGKATNYA JANGKUAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENINGKATAN INVESTOR YANG BERINVESTASI												DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		100%	100%	1.015.000.000	100%	1.116.500.000	100%	1.228.150.000	100%	1.350.965.000	100%	1.486.061.500	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
MENINGKATNYA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO	PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI KETENTUAN												DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		100%	100%	843.000.000	100%	927.300.000	100%	1.020.030.000	100%	1.122.033.000	100%	1.234.236.300	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
TERKENDALINYA PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEMBUKA USAHA												DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		100%	100%	148.000.000	100%	162.800.000	100%	179.080.000	100%	196.988.000	100%	216.686.800	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
MENINGKATNYA PEMANFAATAN DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PEMAFAATAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL												DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL		100%	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	146.410.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KERJA	PERSENTASE KERJA SAMA PENANAMAN												DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		100%	100%	20.638.000.000	100%	22.701.800.000	100%	24.971.980.000	100%	27.469.178.000	100%	30.216.095.800	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	12.149.000.000	100%	13.363.900.000	100%	14.700.290.000	100%	16.170.319.000	100%	17.787.350.900	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD												DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		100%	100%	1.000.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.210.000.000	100%	1.331.000.000	100%	1.464.100.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
MEENINGKATNYA DAYA SAING KEPEMUDAAN	RASIO WIRAUSAHA PEMUDA												DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
													DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		100%	100%	6.750.000.000	100%	7.425.000.000	100%	8.167.500.000	100%	8.984.250.000	100%	9.882.675.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
MENINGKATNYA PEMBUDAYAAN DAN PRESTASI OLAHRAGA	PERSENTASE ATLET YANG MASUK PELATNAS												DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		100%	100%	739.000.000	100%	812.900.000	100%	894.190.000	100%	983.609.000	100%	1.081.969.900	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
MENINGKATNYA KUALITAS KEPRAMUKAAN	TINGKAT PARTISIPASI MASYRAKAT DALAM KEPRAMUKAAN												DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
URUSAN STATISTIK		100%	100%	444.000.000	100%	488.400.000	100%	537.240.000	100%	590.964.000	100%	650.060.400	DKSIP
PROGRAM PENYELANGGARAA N STATISTIK SEKTORAL		100%	100%	444.000.000	100%	488.400.000	100%	537.240.000	100%	590.964.000	100%	650.060.400	DKSIP
Tercapainya Kolaborasi,Integrasi, Dan Standarnisasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)												DKSIP
URUSAN PERSANDIAN		100%	100%	355.000.000	100%	390.500.000	100%	429.550.000	100%	472.505.000	100%	519.755.500	DKSIP
PROGRAM PENYELANGGARAA N PERSANDIAN UNTUK		100%	100%	355.000.000	100%	390.500.000	100%	429.550.000	100%	472.505.000	100%	519.755.500	DKSIP

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PENGAMANANAN INFORMASI													
Meningkatkan Keamanan Siber Dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah												DKSIP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		100%	100%	3.973.000.000		4.370.300.000		4.807.330.000		5.288.063.000		5.816.869.300	DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		100%	100 %	1.652.000.000	100 %	1.817.200.000	100 %	1.998.920.000	100 %	2.198.812.000	100 %	2.418.693.200	DINAS PENDIDIKAN
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan												DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		100%	100%	384.000.000	100%	422.400.000	100%	464.640.000	100%	511.104.000	100%	562.214.400	DINAS PENDIDIKAN
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan												DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		100%	100%	554.000.000	100%	609.400.000	100%	670.340.000	100%	737.374.000	100%	811.111.400	DINAS PENDIDIKAN
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal												DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM PELESTARIAN DAN		100%	100%	307.000.000	100%	337.700.000	100%	371.470.000	100%	408.617.000	100%	449.478.700	DINAS PENDIDIKAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA													
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	1. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan												DINAS PENDIDIKAN
	2. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan												DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		100%	100%	1.076.000.000	100%	1.183.600.000	100%	1.301.960.000	100%	1.432.156.000	100%	1.575.371.600	DINAS PENDIDIKAN
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum												DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM PERFILMAN NASIONAL													DINAS PENDIDIKAN
Meningkatnya dukungan pengembangan perfilman nasional	Persentase Pelaku Industri Perfilman yang Tervalidasi												DINAS PENDIDIKAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		100%	100%	12.786.000.000	100%	14.064.600.000	100%	15.471.060.000	100%	17.018.166.000	100%	18.719.982.600	DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	10.839.000.000	100%	11.922.900.000	100%	13.115.190.000	100%	14.426.709.000	100%	15.869.379.900	DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD												DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		100%	100%	1.435.000.000	100%	1.578.500.000	100%	1.736.350.000	100%	1.909.985.000	100%	2.100.983.500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat												DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		100%	100%	262.000.000	100%	288.200.000	100%	317.020.000	100%	348.722.000	100%	383.594.200	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki		-										DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM AKREDITASI PERPUSTAKAAN DAN SERTIFIKASI PUSTAKAWAN		100%	100%	250.000.000	100%	275.000.000	100%	302.500.000	100%	332.750.000	100%	366.025.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
MenIngkatnya kualitas perpustakaan dan pustakawan	Persentase Pustakawan yang Memperoleh Sertifikasi Profesi												DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	dibidang Perpustakaan												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		100%	100%	1.046.000.000	100%	1.150.600.000	100%	1.265.660.000	100%	1.392.226.000	100%	1.531.448.600	DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		100%	100%	496.000.000		545.600.000		600.160.000		660.176.000		726.193.600	DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip												DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		100%	100%	200.000.000		220.000.000		242.000.000		266.200.000		292.820.000	DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip												DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN
PROGRAM PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP		100%	100%	100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000	DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup												DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN
PROGRAM AKREDITASI DAN SERTIFIKASI		100%	100%	250.000.000		275.000.000		302.500.000		332.750.000		366.025.000	DINAS PERPUSTAKAA

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
													N DAN KEARSIPAN
Meningkatnya kapasitas SDM bidang kearsipan	Persentase SDM Bidang Kearsipan yang Ditingkatkan kompetensinya												DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		100%	100%	22.491.000.000	100%	24.740.100.000	100%	27.214.110.000	100%	29.935.521.000	100%	32.929.073.100	DINAS PERIKANAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	13.215.000.000	100%	14.536.500.000	100%	15.990.150.000	100%	17.589.165.000	100%	19.348.081.500	DINAS PERIKANAN
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD												DINAS PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL													DINAS PERIKANAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB												DINAS PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		25.006 ton		4.118.000.000		4.529.800.000		4.982.780.000		5.481.058.000		6.029.163.800	DINAS PERIKANAN
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap												DINAS PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		5.975 ton		4.169.000.000		4.585.900.000		5.044.490.000		5.548.939.000		6.103.832.900	DINAS PERIKANAN
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya												DINAS PERIKANAN
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN													DINAS PERIKANAN
Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Luasan Kawasan Konservasi												DINAS PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		15.861 ton		989.000.000		1.087.900.000		1.196.690.000		1.316.359.000		1.447.994.900	DINAS PERIKANAN
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan												DINAS PERIKANAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		100%	100%	13.843.000.000	100%	15.227.300.000	100%	16.750.030.000	100%	18.425.033.000	100%	20.267.536.300	DINAS PARIWISATA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	11.000.000.000	100%	12.100.000.000	100%	13.310.000.000	100%	14.641.000.000	100%	16.105.100.000	DINAS PARIWISATA
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD												DINAS PARIWISATA
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		100%	100%	366.000.000	100%	402.600.000	100%	442.860.000	100%	487.146.000	100%	535.860.600	DINAS PARIWISATA
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan												DINAS PARIWISATA
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		100%	100%	1.677.000.000	100%	1.844.700.000	100%	2.029.170.000	100%	2.232.087.000	100%	2.455.295.700	DINAS PARIWISATA
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata												DINAS PARIWISATA

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		100%	100%	462.000.000	100%	508.200.000	100%	559.020.000	100%	614.922.000	100%	676.414.200	DINAS PARIWISATA
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual		-		-		-		-		-		DINAS PARIWISATA
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		100%	100%	338.000.000	100%	371.800.000	100%	408.980.000	100%	449.878.000	100%	494.865.800	DINAS PARIWISATA
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi												DINAS PARIWISATA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		100%	100%	149.470.000.000		164.417.000.000		180.858.700.000		198.944.570.000		218.839.027.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	20.000.000.000	100%	22.000.000.000	100%	24.200.000.000	100%	26.620.000.000	100%	29.282.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD												DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN													DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1.Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	100%	100%	44.400.000.000	100%	48.840.000.000	100%	53.724.000.000	100%	59.096.400.000	100%	65.006.040.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	2.Peningkatan Produksi Hortikultura												DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	6,31%	-	14.694.000.000	-	16.163.400.000	-	17.779.740.000	-	19.557.714.000	-	21.513.485.400	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		100%	100%	685.000.000	100%	753.500.000	100%	828.850.000	100%	911.735.000	100%	1.002.908.500	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B												DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PROGRAM PENGENDALIAAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		17,15%	-	1.445.000.000	-	1.589.500.000	-	1.748.450.000	-	1.923.295.000	-	2.115.624.500	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	1.Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)												DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)												DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROGRAM PENGENDALIAAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAAN		100%	100%	22.928.000.000	100%	25.220.800.000	100%	27.742.880.000	100%	30.517.168.000	100%	33.568.884.800	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	1.Persentase Penanganan Bencana Pertanian												DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	2.Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian												DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		20%	20%	123.000.000	20%	135.300.000	20%	148.830.000	20%	163.713.000	20%	180.084.300	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan												DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		20%	20%	742.000.000	20%	816.200.000	20%	897.820.000	20%	987.602.000	20%	1.086.362.200	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	1.Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan												DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	2.Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi												DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	41.454.000.000	100%	45.599.400.000	100%	50.159.340.000	100%	55.175.274.000	100%	60.692.801.400	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD												DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		100%	100%	2.457.000.000	100%	2.702.700.000	100%	2.972.970.000	100%	3.270.267.000	100%	3.597.293.700	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B												DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		100%	100%	279.000.000	100%	306.900.000	100%	337.590.000	100%	371.349.000	100%	408.483.900	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan												DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		100%	100%	263.000.000	100%	289.300.000	100%	318.230.000	100%	350.053.000	100%	385.058.300	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	1.Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan												DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	2.Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi												DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		25%	25%	152.000.000	25%	167.200.000	25%	183.920.000	25%	202.312.000	25%	222.543.200	DINAS PERINDAG
PROGRAM PENGELOLAAN		25%	25%	152.000.000	25%	167.200.000	25%	183.920.000	25%	202.312.000	25%	222.543.200	DINAS PERINDAG

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
ENERGI BARU TERBARUKAN													
Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	1.Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT												DINAS PERINDAG
	2.Porsi EBT dalam Bauran Energi												DINAS PERINDAG
URUSAN PERDAGANGAN		100%	100%	147.444.000.000	100%	162.188.400.000	100%	178.407.240.000	100%	196.247.964.000	100%	215.872.760.400	DISPERINDAG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	145.283.000.000	100%	159.811.300.000	100%	175.792.430.000	100%	193.371.673.000	100%	212.708.840.300	DISPERINDAG
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD												DISPERINDAG
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		100%	100%	67.000.000	100%	73.700.000	100%	81.070.000	100%	89.177.000	100%	98.094.700	DISPERINDAG
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi												DISPERINDAG

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
pendaftaran Perusahaan													
PENINGKATAN DISTRIBUSI PERDAGANGAN		100%	100%	254.000.000	100%	279.400.000	100%	307.340.000	100%	338.074.000	100%	371.881.400	DISPERINDAG
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi Larang an efisien.	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya												DISPERINDAG
STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		20%	100%	819.000.000	100%	900.900.000	100%	990.990.000	100%	1.090.089.000	100%	1.199.097.900	DISPERINDAG
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga Jarang kebutuhan pokok dan barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting												DISPERINDAG
PENGEMBANGAN EKSPOR		20%	100%	151.000.000	100%	166.100.000	100%	182.710.000	100%	200.981.000	100%	221.079.100	DISPERINDAG
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang												DISPERINDAG
STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		20%	100%	320.000.000	100%	352.000.000	100%	387.200.000	100%	425.920.000	100%	468.512.000	DISPERINDAG
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen												DISPERINDAG

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGRI		100%	100%	550.000.000	100%	605.000.000	100%	665.500.000	100%	732.050.000	100%	805.255.000	DISPERINDAG
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan												DISPERINDAG
URUSAN PERINDUSTRIAN		100%	100%	967.000.000	100%	1.063.700.000	100%	1.170.070.000	100%	1.287.077.000	100%	1.415.784.700	DISPERINDAG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		100%	100%	502.000.000	100%	552.200.000	100%	607.420.000	100%	668.162.000	100%	734.978.200	DISPERINDAG
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Indilstri												DISPERINDAG
PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		100%	100%	371.000.000	100%	408.100.000	100%	448.910.000	100%	493.801.000	100%	543.181.100	DISPERINDAG
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor erindustrian	Izin Usaha Industri yang Diterbitkan												DISPERINDAG
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		20%	100%	94.000.000	100%	103.400.000	100%	113.740.000	100%	125.114.000	100%	137.625.400	DISPERINDAG
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini												DISPERINDAG
URUSAN TRANSMIGRASI		100%	100%	1.395.000.000	100%	1.534.500.000	100%	1.687.950.000	100%	1.856.745.000	100%	2.042.419.500	DINAS NAKERTRANS
PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI		100%	100%	140.000.000	100%	154.000.000	100%	169.400.000	100%	186.340.000	100%	204.974.000	DINAS NAKERTRANS

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan												DINAS NAKERTRANS
PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		100%	100%	1.150.000.000	100%	1.265.000.000	100%	1.391.500.000	100%	1.530.650.000	100%	1.683.715.000	DINAS NAKERTRANS
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang												DINAS NAKERTRANS
PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		100%	100%	105.000.000	100%	115.500.000	100%	127.050.000	100%	139.755.000	100%	153.730.500	DINAS NAKERTRANS
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan												DINAS NAKERTRANS
URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH		100%	100%	192.306.000.000	100%	211.536.600.000	100%	232.690.260.000	100%	255.959.286.000	100%	281.555.214.600	SETDA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	156.985.000.000	100%	172.683.500.000	100%	189.951.850.000	100%	208.947.035.000	100%	229.841.738.500	SETDA

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD												SETDA
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		100%	100%	2.381.000.000	100%	2.619.100.000	100%	2.881.010.000	100%	3.169.111.000	100%	3.486.022.100	SETDA
Meningkatnya lata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi												SETDA
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		100%	100%	2.678.000.000	100%	2.945.800.000	100%	3.240.380.000	100%	3.564.418.000	100%	3.920.859.800	SETDA
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Efektivitas Kerja Sama Daerah												SETDA
	Penyelenggaraan Pemerintahan												SETDA
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		100%	100%	22.229.000.000	100%	24.451.900.000	100%	26.897.090.000	100%	29.586.799.000	100%	32.545.478.900	SETDA
Meningkatnya kualitas kebij akan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan												SETDA

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		100%	100%	2.572.000.000	100%	2.829.200.000	100%	3.112.120.000	100%	3.423.332.000	100%	3.765.665.200	SETDA
Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan												SETDA
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		100%	100%	2.561.000.000	100%	2.817.100.000	100%	3.098.810.000	100%	3.408.691.000	100%	3.749.560.100	SETDA
Meningkatnya kualitas kebij akan pengelolaan perekonomian dan pengembangan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan												SETDA
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		100%	100%	1.650.000.000	100%	1.815.000.000	100%	1.996.500.000	100%	2.196.150.000	100%	2.415.765.000	SETDA
Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ												SETDA
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		100%	100%	1.250.000.000	100%	1.375.000.000	100%	1.512.500.000	100%	1.663.750.000	100%	1.830.125.000	SETDA
Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi emban nan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan												SETDA

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
URUSAN SEKRETARIAT DPRD		100%	100%	61.655.000.000	100%	67.820.500.000	100%	74.602.550.000	100%	82.062.805.000	100%	90.269.085.500	SEKRETARIAT DPRD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	46.348.000.000	100%	50.982.800.000	100%	56.081.080.000	100%	61.689.188.000	100%	67.858.106.800	SEKRETARIAT DPRD
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD												SEKRETARIAT DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		90%	100%	15.307.000.000	100%	16.837.700.000	100%	18.521.470.000	100%	20.373.617.000	100%	22.410.978.700	SEKRETARIAT DPRD
MENINGKATNYA FASILITAS PERSIDANGAN DAN PERUNDANG UNDANGAN	1. KETEPATAN PENETAPAN PERDA APBD TAHUN												SEKRETARIAT DPRD
	2. PERSENTASE PENETAPAN RANPERDA TAHUN												SEKRETARIAT DPRD
MENINGKATNYA FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARA												SEKRETARIAT DPRD

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	AN PEMERINTAHAN												
URUSAN PERENCANAAN		100%	100%	25.636.000.000	100%	28.199.600.000	100%	31.019.560.000	100%	34.121.516.000	100%	37.533.667.600	BAPPEDA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	18.389.000.000	100%	20.227.900.000,00	100%	22.250.690.000,00	100%	24.475.759.000,00	100%	26.923.334.900,00	BAPPEDA
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD												BAPPEDA
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		100%	100%	2.928.000.000	100%	3.220.800.000,00	100%	3.542.880.000,00	100%	3.897.168.000,00	100%	4.286.884.800,00	BAPPEDA
MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. PERSENTASE KESELARASAN RPJMD DENGAN RKPD												BAPPEDA

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	2. PERSENTASE KESELARASAN RPJMD DENGAN RENSTRA PD												BAPPEDA
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		100%	100%	4.319.000.000	100%	4.750.900.000	100%	5.225.990.000	100%	5.748.589.000	100%	6.323.447.900	BAPPEDA
MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	PERSENTASE KESELARASAN RKPD DENGAN RENJA PD BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA												BAPPEDA
MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	PERSENTASE KESELARASAN RKPD DENGAN RENJA PD BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN												BAPPEDA
MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA	PERSENTASE KESELARASAN RKPD DENGAN RENJA PD BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA												BAPPEDA
URUSAN KEUANGAN		100%	100%	698.685.000.000	100%	768.553.500.000	100%	845.408.850.000	100%	929.949.735.000	100%	1.022.944.708.500	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN		100%	100%	36.418.000.000	100%	40.059.800.000	100%	44.065.780.000	100%	48.472.358.000	100%	53.319.593.800	BPKAD

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		100%	100%	624.701.000.000	100%	687.171.100.000,00	100%	755.888.210.000,00	100%	831.477.031.000,00	100%	914.624.734.100,00	BPKAD
MENINGKATNYA TATA KELOLA ANGGARAN	1. PERSENTASE BELANJA PEGAWAI DI LUAR TUNJANGAN GURU YANG DIALOKASIKAN MELALUI TKD												BPKAD
	2. PERSENTASE ALOKASI BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK												BPKAD
MENINGKATNYA TATA KELOLA PERBENDAHARAAN	1. PERSENTASE REALISASI ANGGARAN BELANJA URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR												BPKAD
	2. PERSENTASE PENURUNAN SILPA												BPKAD
MENINGKATNYA TATA KELOLA AKUNTASI DAN PELAPORAN	PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN TEPAT WAKTU												BPKAD
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		100%	100%	4.109.000.000	100%	4.519.900.000,00	100%	4.971.890.000,00	100%	5.469.079.000,00	100%	6.015.986.900,00	BPKAD

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
MENINGKATNYA TATA KELOLA ASET DAERAH	PERSENTASE PENAMBAHAN NILAI ASET TETAP												BPKAD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	26.695.000.000	100%	29.364.500.000,00	100%	32.300.950.000,00	100%	35.531.045.000,00	100%	39.084.149.500,00	BAPPENDA
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD												BAPPENDA
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		100%	100%	302.000.000	100%	332.200.000,00	100%	365.420.000,00	100%	401.962.000,00	100%	442.158.200,00	BAPPENDA
MENINGKATNYA TATA KELOLA ANGGARAN	1. PERSENTASE BELANJA PEGAWAI DI LUAR TUNJANGAN GURU YANG DIALOKASIKAN MELALUI TKD												BAPENDA
	2. PERSENTASE ALOKASI BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK												BAPENDA

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
MENINGKATNYA TATA KELOLA PERBENDAHARAAN	1. PERSENTASE REALISASI ANGGARAN BELANJA URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR												BAPENDA
	2. PERSENTASE PENURUNAN SILPA												BAPENDA
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		100%	100%	6.460.000.000	100%	7.106.000.000,00	100%	7.816.600.000,00	100%	8.598.260.000,00	100%	9.458.086.000,00	BAPENDA
MENINGKATNYA UPAYA EKSISTTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PENDAPATAN	PERSENTASE PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH												BAPENDA
MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN DAN PELAPORAN	CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN PENDAPATAN												BAPENDA
MENINGKATNYA SISTEM INFORMASI KEUANGAN BERBASIS DIGITAL	PERSENTASE PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN BERBASIS DIGITAL												BAPENDA
URUSAN KEPEGAWAIAN		100%	100%	6.851.000.000	100%	7.536.100.000	100%	8.289.710.000	100%	9.118.681.000	100%	10.030.549.100	BKPSDM
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		100%	100%	1.299.000.000	100%	1.428.900.000	100%	1.571.790.000	100%	1.728.969.000	100%	1.901.865.900	BKPSDM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD												BKPSDM
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		100%	86,20%	5.552.000.000	100%	6.107.200.000	100%	6.717.920.000	100%	7.389.712.000	100%	8.128.683.200	BKPSDM
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Presentase Perencanaan Kebutuhan Yang sesuai dengan Formasi												BKPSDM
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Presentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya												BKPSDM
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Presentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya												BKPSDM
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Presentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik												BKPSDM
URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		85%	85%	2.264.000.000	85%	2.490.400.000	85%	2.739.440.000	85%	3.013.384.000	85%	3.314.722.400	BKPSDM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		85%	85%	2.264.000.000	85%	2.490.400.000	85%	2.739.440.000	85%	3.013.384.000	85%	3.314.722.400	BKPSDM
Meningkatnya Layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Presentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional												BKPSDM
Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Presentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan												BKPSDM
Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Presentase ASN yang memiliki Serifikat Kompetensi												BKPSDM
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Presentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan kompetensi Teknis												BKPSDM
URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		100%	100%	19.214.000.000	100%	21.135.400.000	100%	23.248.940.000	100%	25.573.834.000	100%	28.131.217.400	BRIDA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	14.091.000.000	100%	15.500.100.000	100%	17.050.110.000	100%	18.755.121.000	100%	20.630.633.100	BRIDA

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD												BRIDA
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		100%	100%	3.450.000.000	100%	3.795.000.000	100%	4.174.500.000	100%	4.591.950.000	100%	5.051.145.000	BRIDA
Meningktanya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Presentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasu Pembangunan												BRIDA
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Presentase Kebijakan Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daeah												BRIDA

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Presentase Kebijakan Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah												BRIDA
Meningkatnya fasilitas, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Presentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah												BRIDA
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH		100%	100%	1.673.000.000	100%	1.840.300.000	100%	2.024.330.000	100%	2.226.763.000	100%	2.449.439.300	BRIDA
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Presentase produk inovasi yang Dimanfaatkan												BRIDA
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Presentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah												BRIDA

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Presentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah												BRIDA
Meningkatnya fasilitas, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Presentase Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah												BRIDA
URUSAN INSPEKTORAT DAERAH		100%	100%	28.411.000.000	100%	31.252.100.000	100%	34.377.310.000	100%	37.815.041.000	100%	41.596.545.100	INSPEKTORAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	21.480.000.000	100%	23.628.000.000	100%	25.990.800.000	100%	28.589.880.000	100%	31.448.868.000	INSPEKTORAT
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD												INSPEKTORAT

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		100%	100%	6.121.000.000	100%	6.733.100.000	100%	7.406.410.000	100%	8.147.051.000	100%	8.961.756.100	INSPEKTORAT
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1												INSPEKTORAT
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		100%	100%	810.000.000	100%	891.000.000	100%	980.100.000	100%	1.078.110.000	100%	1.185.921.000	INSPEKTORAT
Meningkatnya kualitas pemndampingan dan asistensi	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)												INSPEKTORAT
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)												INSPEKTORAT
URUSAN KECAMATAN ADMINISTRASI		100%	100%	288.483.000.000	100%	317.331.300.000	100%	349.064.430.000	100%	383.970.873.000	100%	422.367.960.300	SELURUH KECAMATAN DAN KELURAHAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	167.000.000.000	100%	183.700.000.000	100%	202.070.000.000	100%	222.277.000.000	100%	244.504.700.000	SELURUH KECAMATAN DAN KELURAHAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD												SELURUH KECAMATAN DAN KELURAHAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	100%	105.000.000.000	100%	115.500.000.000	100%	127.050.000.000	100%	139.755.000.000	100%	153.730.500.000	SELURUH KECAMATAN DAN KELURAHAN
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	Cakupan Kegiatan Yang Dilakukan Pemantauan												SELURUH KECAMATAN DAN KELURAHAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	100%	14.000.000.000	100%	15.400.000.000	100%	16.940.000.000	100%	18.634.000.000	100%	20.497.400.000	SELURUH KECAMATAN DAN KELURAHAN
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Di Wilayah Kecamatan	Presentase Peningkatan Lembaga Masyrakat Desa/Kelurahan Yg Berpartisipasi Dalam Musrenbang Kecamatan												SELURUH KECAMATAN DAN KELURAHAN
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	100%	405.000.000	100%	445.500.000	100%	490.050.000	100%	539.055.000	100%	592.960.500	SELURUH KECAMATAN DAN KELURAHAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan	Persentase Penurunan Kasus Gangguan Trantibum Dan Pelanggaran Perda/Perkada Di Wilayah Kecamatan												SELURUH KECAMATAN DAN KELURAHAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100%	100%	1.970.000.000	100%	2.167.000.000	100%	2.383.700.000	100%	2.622.070.000	100%	2.884.277.000	SELURUH KECAMATAN DAN KELURAHAN
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Yg Terselenggara												SELURUH KECAMATAN DAN KELURAHAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100%	100%	108.000.000	100%	118.800.000	100%	130.680.000	100%	143.748.000	100%	158.122.800	SELURUH KECAMATAN DAN KELURAHAN
Meningkatnya Kinerja Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan Dan Pengawasan	Persentase Desa Berkinerja Baik Dan Akuntabel												SELURUH KECAMATAN DAN KELURAHAN
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		100%	100%	16.707.000.000	100%	18.377.700.000	100%	20.215.470.000	100%	22.237.017.000	100%	24.460.718.700	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	8.200.000.000	100%	9.020.000.000	100%	9.922.000.000	100%	10.914.200.000	100%	12.005.620.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi PD												BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		100%	100%	1.900.000.000	100%	2.090.000.000	100%	2.299.000.000	100%	2.528.900.000	100%	2.781.790.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan												BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN		100%	100%	3.400.000.000	100%	3.740.000.000	100%	4.114.000.000	100%	4.525.400.000	100%	4.977.940.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK													
Meningkatkan etika dan budaya politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik												BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		100%	100%	660.000.000	100%	726.000.000	100%	798.600.000	100%	878.460.000	100%	966.306.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang Aktif												BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		100%	100%	707.000.000	100%	777.700.000	100%	855.470.000	100%	941.017.000	100%	1.035.118.700	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di												BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE DATA 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	daerah yang dilaksanakan												
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		100%	100%	1.840.000.000	100%	2.024.000.000	100%	2.226.400.000	100%	2.449.040.000	100%	2.693.944.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik sosial yang di selesaikan												BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				3.514.381.740.195		3.865.819.914.214		4.252.401.905.636		4.677.642.096.199		5.145.406.305.819	

## **4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

### **4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan Indikator yang menunjukkan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2030. Indikator di maksud sebagaimana tabel 4.2 berikut :

**Tabel 4.2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN						Ket.
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	73,43	73,95	74,51	75,04	75,56	76,09	
2. Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72,36	72,45	72,55	72,64	72,74	72,83	
3. Prevalensi Stunting (SGGI)	%	24,1	20,1	18,1	16,3	14,2	14,0	
4. Hasil Pembelajaran Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:								
a. Literasi Membaca								
▪ SD	Kategori	53,81	56,31	58,81	61,31	63,81	66,31	
▪ SMP	Kategori	64,88	65,98	67,08	68,18	69,28	70,38	
b. Numerasi								
▪ SD	Kategori	48,84	51,74	54,64	57,54	60,44	63,34	
▪ SMP	Kategori	58,66	60,16	61,66	63,16	64,66	66,16	
5. Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,51	13,66	13,82	13,98	14,13	14,28	
6. Rata – Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,96	9,10	9,25	9,39	9,53	9,67	
7. Tingkat Kemiskinan	%	6,27	5,94	5,61	5,28	4,95	4,65	
8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,74	2,59	2,43	2,28	2,12	2,00	
9. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga)	Angka	61,40	62,6	63,7	64,9	66,0	67,2	
10. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,444	0,432	0,419	0,397	0,394	0,391	
11. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	59,51	60,47	62,44	64,50	66,37	68,33	
12. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	29,72	32,27	34,82	37,37	39,92	42,47	
13. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Angka	80,00	81,40	82,80	84,00	85,40	86,80	

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN						Ket.
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
14. Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	65	67	69	72	75	78	
15. Indeks Pembangunan Olahraga	Angka	0,400	0,405	0,425	0,450	0,475	0,500	
16. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,14	4,28	4,43	4,60	4,78	4,90	
17. PDRB Perkapita	Juta Rp.	119,11	129,16	140,30	152,71	166,55	178,20	
18. Indeks Gini	Angka	0,300	0,290	0,280	0,270	0,260	0,250	
19. Tingkat Inflasi	%	3,13	3,03	2,94	2,86	2,78	2,65	
20. Prevalensi Ketidacukupan konsumsi Pangan	%	9,09	8,66	8,23	7,80	7,37	6,94	
21. Indeks Ketahanan Pangan	Angka	85,60	85,78	86,05	86,69	87,33	87,74	
22. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks/ predikat	N/A	75,83 (Kurang Baik)	76,61 (Baik)	77,39 (Baik)	78,17 (Baik)	78,95 (Baik)	
23. Persentase pemenuhan akses layanan dasar (Air Bersih, Sanitasi Aman serta Hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan)	%	N/A	89,34	91,50	93,20	95,00	96,70	
24. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%	40,99	48,99	58,56	69,99	83,66	100	
25. Rasio Konektivitas	%							
26. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka							
27. Indeks Resiko Bencana (IRB)	Angka	147,48	140,43	133,38	126,33	119,28	112,23	
28. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	81,88	82,05	82,73	83,14	83,63	84,02	
29. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Angka	0,39	0,42	0,45	0,48	0,51	0,54	
30. Persentasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO2eq	609.706, 30						

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN						Ket.
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
31. Tingkat Kepatuhan Terhadap Tata Ruang	%	81	83	86	89	92	95	
32. Realisasi Pemekaran Desa/Kelurahan, Kecamatan dan DOB Baru, sesuai Design besar pemekaran di Kabupaten Banggai	%	15	20	25	30	35	40	
33. Persentasi Desa Mandiri Berdasarkan IDM	%	40	50	60	70	80	90	
34. Persentasi BUMDes Sehat	%	50	56	63	69	75	80	
35. Indeks Kota Layak Huni untuk Kota Luwuk	Indeks							
36. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB	BB	BB	BB	A	A	
37. Indeks Pelayanan Publik	Indeks	Kualitas Tinggi	Kualitas Tinggi	Kualitas Tinggi	Kualitas Tinggi	Kualitas Tinggi	Kualitas Tinggi	
38. Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	
39. Nilai SAKIP	Predikat	BB	BB	A	A	A	A	
40. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	3,50	3,53	3,56	3,60	3,63	3,64	
41. Indeks SPBE	Indeks	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
42. Nilai Survey Penilaian Integritas	Nilai	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
43. Indeks Sistem Merit	Indeks/ Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
44. Indeks Profesionalitas ASN	Indeks/ Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	

#### **4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)**

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan ukuran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, di gunakan untuk menilai sejauhmana penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di laksanakan sesuai kewenangan dan perangkat daerah pengampunya. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025-2030 sebagaimana tabel 4.3 berikut :

**Tabel 4.3**  
**Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025-2030**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
A.	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI							
1	Indeks ketahanan Pangan	Angka	85,60	85,78	86,05	86,69	87,33	87,74
2	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	%	9,09	8,66	8,23	7,80	7,37	6,94
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita						
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	40,71	41,20	41,68	42,16	42,64	42,64
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	81,88	82,05	82,73	83,14	83,63	84,02
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	39,78	44,03	48,28	52,53	56,77	56,77
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/orang	0,104	0,180	0,218	0,219	0,418	0,500
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	20,88	36,08	43,68	58,28	83,74	100
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Juta Ton CO2eq	609.706,30					
10	Indeks Risiko Bencana	Angka	147,48	140,43	133,38	126,33	119,28	112,23
11	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,39	0,42	0,45	0,48	0,51	0,54
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,01	0,97	0,95	0,91	0,88	0,85
13	Rasio Penduduk	%	103,58	103,41	103,25	103,09	102,93	102,76
14	Kepadatan Penduduk	Orang/ km²	39,43	39,82	40,19	40,56	40,91	41,26

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
B.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,14	4,28	4,43	4,60	4,78	4,90
2	Tingkat kemiskinan	%	6,27	5,94	5,61	5,28	4,95	4,65
3	PDRB Per Kapita	Juta Rp.	119,11	129,16	140,30	152,71	166,55	178,20
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,74	2,59	2,43	2,28	2,12	2,00
5	Indeks Gini	Angka	0,300	0,290	0,280	0,270	0,260	0,250
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,43	73,95	74,51	75,04	75,56	76,09
7	Usia Harapan Hidup	72,36	72,45	72,55	72,64	72,74	72,83	72,83
8	Indeks Keluarga Sehat	Angka	23,46	23,65	23,97	24,20	24,60	24,80
9	Prevalensi Stunting (SGGI)	%	24,1	20,1	18,1	16,3	14,2	14,0
10	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,96	9,10	9,25	9,39	9,53	9,67
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,51	13,66	13,82	13,98	14,13	14,28
12	Angka Literasi							
	SD	%	57	56,31	58,81	61,31	63,81	66,31
	SMP	%	62,75	65,98	67,08	68,18	69,28	70,38
13	Angka Numerasi							
	SD	%	52,42	52,74	54,64	57,54	60,44	63,34
	SMP	%	57,99	60,16	61,66	63,16	64,66	66,16
14	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	77,28	79,26	80,25	82,28	85,30	95,30
15	Indeks Literasi Digital	Angka						
16	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	10	10,5	12	12,5	13	13,05

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
17	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	80,00	81,40	82,80	84,00	85,40	86,80
18	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	29,72	32,27	34,82	37,37	39,92	42,47
19	Indeks Perlindungan anak	Angka	59.51	60.47	62.44	64.50	66.37	68.33
20	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga)	Angka	61,4	62,6	63,7	64,9	66,0	67,2
21	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0.444	0,432	0,419	0,397	0,394	0,391
22	Indeks Pembangunan Gender	Angka	92	92.10	92.15	92.20	92.25	92.30
23	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	65	67	69	72	75	78
<b>C.</b>	<b>ASPEK DAYA SAING</b>							
1	Angka Ketergantungan	%	45,60	45,79	46,08	46,44	46,80	47,08
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	32,30	32,45	32,65	32,90	33,05	33,20
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%						
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%						
5	Rasio Kewirausahaan	%						
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	72,05	72,31	72,58	72,84	73,10	73,30
7	Indeks Inovasi Daerah	Indeks						
8	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	72,78	74,07	75,26	76,31	77,24	78,28
9	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Angka	41,29	42,42	43,55	44,69	45,82	46,96
10	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%						
11	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka						
12	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Rp.						

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
13	Ekspor Barang dan Jasa	Rp.						
14	Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks/ predikat	N/A	75,83 (Kurang Baik)	76,61 (Baik)	77,39 (Baik)	78,17 (Baik)	78,95 (Baik)
15	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	85,35	84,52	83,7	85,53	85,36	86,21
16	Persentase pemenuhan akses layanan dasar (Air Bersih, Sanitasi Aman serta Hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan)	%	N/A	89,34	91,50	93,20	95,00	96,70
17	Indeks Kota Layak Huni untuk Kota Luwuk	Indeks						
18	Persentase Desa Mandiri Berdasarkan IDM	%	40	50	60	70	80	90
19	Persentase BUMDes Sehat	%	50	56	63	69	75	80
20	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%						
21	Tingkat Inflasi	%	3,13	3,03	2,94	2,86	2,78	2,65
<b>D.</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>							
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	89	90	91	92	95	97
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks/ Predikat	Kualitas Tinggi	Kualitas Tinggi	Kualitas Tinggi	Kualitas Tinggi	Kualitas Tinggi	Kualitas Tinggi
4	Indeks Integritas Nasional	Angka						
5	Persentase Penegakan Perda	%	80	82	84	86	88	90

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Persentase Capaian Aksi HAM	%	100	100	100	100	100	100
7	Indeks Rasa Aman	Angka	0	0	0	0	0	0
8	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	60	65	70	75	80	85
9	Indeks Daya saing Daerah	Angka	3,50	3,60	3,70	3,80	3,90	4,00
10	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks /Predikat	BB	BB	BB	BB	A	A
11	Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
12	Nilai SAKIP	Predikat	BB	BB	A	A	A	A
13	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	3,50	3,53	3,56	3,60	3,63	3,64
14	Nilai Survey Penilaian Integritas	Nilai	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
15	Indeks Sistem Merit	Indeks/ Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
16	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks/ Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	<b>Urusan Pendidikan</b>							
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	98,04					
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	96,25	97,10	98,30	99,20	100	100

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	12,21	13,30	14,20	15,40	16,70	17,30
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Angka	90,88	91,35	91,80	92,35	93	95
5	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	%						
6	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%						
7	Indeks pemerataan guru	%						
8	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik							
9	Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbarui							
10	Persentase pengembangan bahasa dan sastra		100	100	100	100	100	100
<b>Urusan Kesehatan</b>								
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	140	130	120	110	100	90
2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek pada balita)	%	24,1	20,1	18,1	16,3	14,2	14,00

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	%	90	92	95	95	95	100
4	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	%	95	96	97	98	99	100
5	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	%	90	92	93	94	95	95
6	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100
<b>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>								
1	Persentase peningkatan perlindungan kawasan Permukiman rawan banjir	%	29,49	29,71	30,40	31,08	31,76	32,45
2	Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob	%	10,52	13,30	16,86	17,62	18,26	24,38
3	Persentase layanan irigasi multikomoditas	%	62,73	62,73	62,73	62,73	62,74	62,74
4	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota	%						
5	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST regional	%	17,00	19,00	21,00	23,00	25,00	29,00
6	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	%	12,18	12,35	12,53	12,71	12,88	13,06
7	Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	%	66,00	66,50	67,00	67,50	68,00	68,50
9	Persentase penataan bangunan dan	%	15,47	15,65	16,28	16,91	17,53	18,16

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	lingkungan							
10	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten	%	40,99	48,99	58,56	69,99	83,66	100
11	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi terampil	%	100	100	100	100	100	100
13	Tingkat kepatuhan terhadap tata ruang	%	81	83	86	89	92	95
<b>Urusan Perumahan dan Kawaasan Permukiman</b>								
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak Huni	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	-	-	-	-	-	-
3	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	%	62,43	69,95	77,47	84,99	92,51	100
4	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	0	0	40	60	80	100
5	Persentase sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hukum	%	77,49	78,77	80,09	81,44	82,84	84,26
6	Melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>								
1	Persentase Perda dan Perkada yang	%	80	82	84	86	88	90

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ditegakkan							
2	Persentase penyelenggaraan tibumtranmas	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Cakupan Perlindungan masyarakat	%	29,67	29,67	29,67	29,67	29,67	29,67
4	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	%	90	90	90	90	90	90
6	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	90	90	90	90	90	90
7	Persentase penanganan pasca bencana	%	90	90	90	90	90	90
8	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	%	42	52	62	72	82	92
9	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	30	40	50	60	70	80
<b>Urusan Sosial</b>								
1	Persentase pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial	%	33,33	33,33	39,70	41,50	44,30	46,50
2	Persentase Pekerja Sosial/ tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	N/A	35	41	43	46	51

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA							
3	Persentase pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan Penanganan korban bencana kabupaten pada masa tanggap darurat dan Pasca bencana sesuai standar	%	N/A	52,17	54,35	56,81	58,15	60,86
4	Persentase sdm kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	%	N/A	47,62	55,95	60,71	67,86	76,19
5	Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	%	N/A	65,22	69,57	78,26	82,61	86,96
6	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri yang mendapatkan Pelayanan pemulihan	orang	N/A	1	1	1	1	1
7	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	%	N/A	100	100	100	100	100
8	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	N/A	100	100	100	100	100
9	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya	%	N/A	100	100	100	100	100
10	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	N/A	100	100	100	100	100

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
11	Persentase gelandangan dan pengemis yang terenuhi kebutuhan dasarnya	%	N/A	75	75	75	75	75
12	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	N/A	75	75	75	75	75
13	Indeks kesejahteraan sosial penyandang disabilitas	Angka	N/A	65	65	65	65	65
14	Indeks kesejahteraan sosial lanjut usia	Angka	N/A	65	65	65	65	65
15	Indeks peranan sosial	Angka	N/A	65	65	65	65	65
16	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	N/A	73,21	75,15	77,37	79,81	83,14
			N/A	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71
17	Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin peningkatan indeks Kebutuhan dasar		N/A	60	90	100	100	100
18	Peningkatan indeks keberdayaan ekonomi	%	N/A	85	85	85	85	85
19	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	%	N/A	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71
20	Persentase korban bencana alam, sosial dan/ atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
21	Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	%	N/A	65	80	80	90	90
22	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	%	100	100	100	100	100	100
23	Persentase tarnan makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik	%	100	100	100	100	100	100
24	Persentase tarnan makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik	%	100	100	100	100	100	100
<b>Urusan Tenaga Kerja</b>								
1	Persentase kabupaten/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	0	0	3	3	3	3
2	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%						
3	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	%	280	294	308	322	336	350
4	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	3441	3441	3441	3441	3441	3441
5	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	orang	7492	7529	7567	7604	7642	7679
<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>								
1	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	5.00	5.10	5.20	5.30	5.40	5.50
2	Persentase perempuan korban kekerasan	%	56.50	56.92	57.85	58.37	59.10	59.82

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif							
3	Pembelajaran keluarga (puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar		50	50	50	50	50	50
4	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan		1	1	1	1	1	1
5	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Angka	50	60	70	80	90	100
6	Persentase anak memerlukan perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	%	57.01	58.01	59.01	60.01	61.01	62.01
7	Indeks Perlindungan Khusus Anak IPKA	Angka	50	50	50	50	50	50
<b>Urusan Pangan</b>								
1	Persentase jumlah cadangan pangan	%	20	30	40	50	60	70
2	Skor pola pangan harapan	Angka	91,24	91,68	92,12	92,56	93	93,44
3	Persentase daerah rentan Rawan pangan	%	3,2	3	2,97	2,7	2,5	2
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	60	64	66	70	72	90
<b>Urusan Pertanahan</b>								
1	Persentase tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diselesaikan tepat waktu	%						
2	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang	%						

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	dilakukan melalui mediasi							
3	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	%						
4	Tersedianya Tanah Obyek <i>Landreform</i> (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee							
5	Persentase tanah ulayat yang ditetapkan	%						
6	Persentase tanah kosong yaag dikelola	%						
7	Persentase luas lokasi konsolidasi tanah	%						
<b>Urusan Lingkungan Hidup</b>								
1	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	20	35	45	65	85	100
2	Indeks Kualitas Air	Angka	70,30	70,40	70,50	70,60	70,70	70,80
3	Indeks Kualitas Udara	Angka	93,34	93,44	93,54	93,64	93,74	93,84
4	Persentase RTH	%	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034
5	Persentase limbah B3 yang terkelola	%	100	100	100	100	100	100
6	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan		55	60	65	69	72	75
7	Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya	%	-	-	-	-	-	-
8	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	%	100	100	100	100	100	100
9	Persentase partisipasi masyarakat dalam	%	10	15	20	25	30	35

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup							
10	Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100	100
11	Indeks kinerja pengelolaan sampah	Angka	59,90	61,16	61,98	62,85	63,79	63,38
<b>Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>								
1	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	%	6	8	10	12	14	16
2	Persentase kepemilikan kartu identitas anak	%	20	25	30	35	40	45
3	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	91	92	93	94	95	96
4	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	91	92	93	94	95	96
5	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	91	92	93	94	95	96
6	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	91	92	93	94	95	96
7	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	%	50	50	50	75	75	75
8	Cakupan pengelolaan profil Kependudukan	%	99,61	99,62	99,63	99,64	99,65	99,66
<b>Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>								
1	Persentase fasilitasi penataan desa	%	17,18	34,36	51,55	68,73	85,91	100
2	Persentase fasilitasi kerjasama desa	%	16,49	33,33	49,83	66,67	83,16	100
3	Persentase Aparatur Desa dan Anggota	%	36,14	49,29	62,44	75,58	88,73	100

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	BPD Yang Ditingkatkan Kapasitasnya							
4	Persentase fasilitasi tata desa	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Desa (LKD)	%	51,55	60,14	68,73	79,83	89,69	100
6	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat	%	50,55	61,14	67,73	79,38	90,69	100
<b>Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>								
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)	Angka	2.17	2.16	2.15	2.14	2.13	2.11
2	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age specific fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	34.4	32.9	31.4	29.9	28.4	26.9
3	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modem contraceptive (mCPR)	Angka	63.8	64.3	64.7	65.1	65.6	66
4	Persentase Kebutuhan BerKB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	9.17	8.74	8.31	7.80	7.45	7.02
5	Presentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	%	17.6	23.7	29.8	35.9	42.0	46.1
<b>Urusan Perhubungan</b>								
1	Rasio Konektivitas	%						
2	Konektivitas darat	%	65	65	65	65	65	65
3	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	100	100	100	100	100
4	Konektivitas laut	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Persentase Pengendalian KKOP	%	100	100	100	100	100	100
6	Cakupan perlintasan kereta api yang ditangani	%	-	-	-	-	-	-
<b>Urusan Komunikasi dan Informatika</b>								
1	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah survei	%		68,54	78,09	80,00	86,09	90,40
2	Indeks SPBE	Angka	3,20	3,60	3,72	3,85	3,90	4,10
<b>Urusan Koperasi, Usaha dan Menengah</b>								
1	Pertumbuhan volume usaha koperasi	%	33,98	34,96	35,94	36,92	37,90	38,88
2	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	%	50,79	51,70	53,65	55,60	57,56	59,51
3	Persentase koperasi aktif	%	75,14	78,83	78,83	78,83	78,83	78,83
4	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	23,39	36,58	48,78	60,97	73,17	85,36
5	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	81,15	81,60	82,02	82,43	82,81	82,81
6	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	%	5,02	5,07	6,17	6,17	7,06	7,06
7	Pertumbuhan wirausaha	%	2,65	2,76	2,95	3,31	3,47	3,65
8	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor	%	10	11	15	15	15	15
9	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	%	20	20	20	20	20	20

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Urusan Penanaman Modal							
1	Realisasi total terhadap target investasi	%	185	93,66	129,06	164,47	199,87	235,28
2	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapl pelaku usaha dalam membuka usaha	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanarnan modal	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase kerja sama penanaman modal yang ditindaklanjuti	%	0	100	100	100	100	100
	Urusan Kepemudaan dan Olahraga							
1	Rasio wirausaha pemuda	%	1,25	1,76	1,95	2,31	3,27	3,65
2	Persentase atlet yang masuk pelatnas	%	10	13	15	16	17	17
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	%	30	38	42	50	52	55
4	Indeks Pembangunan Olahraga	Angka	0,400	0,405	0,425	0,450	0,475	0,500
	Urusan Statistik							
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Angka	2,65	2,70	2,80	2,90	3,00	3,50
	Urusan Persandian							
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah		27,43	33,53	46,13	58,73	71,33	89,93

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Urusan Kebudayaan							
1	Tingkat partisipasi masyarakat, terhadap pengembangan kebudayaan							
2	Persentase kerennian tradisional yang dnestarikan dan dikembangkan	%						
3	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal							
4	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	%						
5	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	%	62,05	68,25	75,08	82,58	90,84	99,93
6	Persentase kunjungan wisatawan ke museum	%	45	65	75	95	98	100
	Urusan Perpustakaan							
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	62,05	68,25	75,08	82,58	90,84	99,93
2	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki	%	45	65	75	95	98	100
3	Persentase pustakawan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang perpustakaan	%	27	27	27	27	27	27
	Urusan Kearsipan							
1	Tingkat ketersediaan arsip	%	25	35	55	75	85	100
2	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	%	30	40	55	70	85	100
3	Persentase akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	%	20	35	50	70	90	100

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Persentase SDM bidang kearsipan yang didngkatkan kompetensinya	%	20	35	50	75	85	100
<b>Urusan Kelautan dan Perikanan</b>								
1	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	%	3,47	3,53	3,60	3,67	3,74	3,81
2	Jumlah produksi perikanan tangkap	Angka	28.421	28.990	29.569	30.161	30.764	31.379
3	Jumlah produksi perikanan budidaya	Angka	6.572	6.704	6.838	6.974	7.114	7.256
4	Angka konsumsi ikan	Angka	37,81	38,59	39,36	40,14	40,94	41,75
<b>Urusan Pariwisata</b>								
1	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Orang	177.925	186.874	204.267	230.907	281.889	352.361
2	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	%	23,75	23,75	23,75	23,75	23,75	23,75
3	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	%	9,1	18,2	31,8	50	72,7	100
4	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	%	54,4	60	67,5	76,9	87,5	100
<b>Urusan Pertanian</b>								
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	5	5	5	5	5	5
2	Peningkatan produksi hortikultura	%	3	3	3	3	5	3
3	Peningkatan produksi komoditas peternakan	%	8,57	8,78	8,81	8,83	8,86	8,88
4	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	%		0,06	0,43	2,46	7,24	89,81
5	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan	%	100	100	100	100	100	100

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Menular Strategis (PHMS)							
6	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	%	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56
7	Persentase penanganan bencana pertanian	%	100	100	100	100	100	100
8	Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	%	100	100	100	100	100	100
9	Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100
10	Persentase sdm penyuluh pertanian yang ditingkatkan	%	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
11	Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi	%	-	100	100	100	100	100
<b>Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral</b>								
1	Jumlah volume air tanah pada cekungan air tanah di wilayah sungai lintas kabupaten/kota	Angka						
2	Luas zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah di wilayah sungai lintas kabupaten/kota							
3	Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT	Angka						
4	Porsi EBT dalam Bauran Energi	%						
5	Rasio Elektrifikasi	%						

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Urusan Perdagangan							
1	Persentase izin usaha Perdagangan yang difasilitasi	%	10	12	14	16	18	20
2	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	%	5	10	15	20	25	30
3	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	10	15	20	25	30	35
4	Nilai ekspor barang		3	4	5	6	7	8
5	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	4	6	8	10	12	14
6	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	%	2	4	6	8	10	12
	Urusan Perindustrian							
1	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan indilstri	%	5	6	7	8	9	10
2	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	%	3	4	5	6	7	8
3	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini		2	5	7	9	11	13
	Urusan transmigrasi							
1	Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan	%	36,03	12	12	14	16	17
2	Persentase luas kawasan transmigrasi yang berkembang	%	25	30	34	36	38	40
3	Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan	%	21	32	33	35	37	38

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Unsur Sekretariat Daerah							
1	Indeks kematangan organisasi	Angka	26,27	30,00	30,50	30,90	40,50	50,50
2	Efektivitas kerja sama daerah		50	50	50	50	50	50
3	Kinerja penyelenggaraan pemerintahan							
4	Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan	%	81	82,2	83,7	84,8	85,9	86,5
5	Persentase produk hukum yang dihasilkan	%	93	94	96	97	99	99,95
6	Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan							
7	Tingkat Kematangan UKPBJ	Level	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4
8	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan							
	Unsur Sekretariat DPRD							
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	90	91,82	93,64	95,38	96,43	100
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	90,83	91,67	92,86	93,33	97,50	100
	Unsur Perencanaan							
1	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	100	100	100	100	100	100

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100	100	100	100	100
<b>Unsur Keuangan</b>								
1	Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan TKD	%	30	30	30	30	30	30
2	Persentase alokasi belanja Infrastruktur pelayanan publik	%	34,96	40	40	40	40	40
3	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Penurunan SILPA	%	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
5	Persentase laporan keuangan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase penambahan nilai aset tetap	%	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
7	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	8,58	8,39	8,30	8,14	7,99	7,87
8	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	%						
9	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	%	100	100	100	100	100	100

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Unsur Kepegawaian							
1	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	%	50	50	50	50	50	50
3	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik	%	100	100	100	100	100	100
	Unsur Pendidikan dan Pelatihan							
1	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	%	60	60	60	60	60	60
3	Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi	%	70	75	80	85	90	95
4	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	%	70	70	70	70	70	70
	Unsur Penelitian dan Pengembangan							
1	Kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan		100	100	100	100	100	100
2	Persentase kajian berbasis Bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan	%	100	100	100	100	100	100

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	pembangunan daerah							
3	Persentase kajian berbasis Bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait Penelitian, pengembangan, Pengkajian dan penerapan di daerah	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah	%	100	100	100	100	100	100
7	Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah	%	100	100	100	100	100	100
8	Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	%	100	100	100	100	100	100
<b>Unsur Pengawasan</b>								
1	Tindaklanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-I		80,00	80,25	80,50	81,00	81,25	82,00
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		3	3	3	3	3	4
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		3	3	3	3	3	4

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Unsur Pemerintahan Umum							
1	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	15	25	40	55	62	70
2	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	%	10	20	35	45	50	65
3	Persentase organisasi kemasyarakatan an aktif	%	52	52	52	52	52	52
4	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, Fasilitasi kerukunan umat Beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	%	15	30	45	65	65	80
5	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100



**BerAKHLAK** **#** bangga melayani bangsa  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



# BAB-V

# PENUTUP

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2025–2029 merupakan pedoman strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun berdasarkan visi Kepala Daerah terpilih, yaitu “**Bergerak Bersama Berkelanjutan Menuju Gerbang Timur Sulawesi Tengah (GERakan BANGgai Terdepan, Inovatif, MajU dan sejahteRa)**” serta diselaraskan dengan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2045.

RPJMD ini memuat arah kebijakan pembangunan yang diarahkan pada penguatan ekonomi lokal berbasis pertanian dan UMKM, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan dan layanan kesehatan yang merata, serta penguatan tata kelola pemerintahan melalui transformasi digital. Program dan kegiatan dari seluruh perangkat daerah telah dirancang secara terukur dan terintegrasi untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan tersebut. Keberhasilan implementasi RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025–2029 sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan program oleh seluruh perangkat daerah, didukung oleh partisipasi aktif masyarakat, sektor swasta, dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan lainnya. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah juga akan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan RPJMD berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan semangat kolaborasi dan kerja bersama, Pemerintah Kabupaten Banggai berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Semoga dokumen RPJMD Tahun 2025–2029 ini menjadi panduan

yang kuat dalam menjawab tantangan pembangunan dan membawa Kabupaten Banggai menuju masa depan yang lebih baik.

RPJMD merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Banggai serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna pencapaian target-target dalam RPJMD 2025-2029. Dalam rangka implementasi RPJMD Tahun 2025-2029 kaidah-kaidah pelaksanaan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Bupati berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 kepada masyarakat;
- b. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai dan pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program RPJMD Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya mengarah pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
- c. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banggai 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah setiap tahun;
- d. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah;
- e. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 yang berpedoman pada RPJMD

Kabupaten Banggai 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah setiap tahun;

- f. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 maka perlu melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Banggai.
- g. RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 memungkinkan untuk diubah dengan ketentuan:
  - 1) Berdasarkan hasil pengendalian, monitoring, dan evaluasi menunjukkan kondisi yang tidak sesuai dengan kondisi yang berkembang pada saat monitoring dan evaluasi dilaksanakan,
  - 2) Hasil pengendalian, monitoring, dan evaluasi menunjukkan substansi yang dirumuskan tidak lagi sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat dilaksanakan Monitoring dan evaluasi; dan
  - 3) Terjadi perubahan mendasar (bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/atau terjadi kebijakan nasional).
- h. Perubahan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun;
- i. RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Banggai setiap tahun mulai dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2029.
- j. Bila terjadi hal-hal yang berada di luar kendali Pemerintah Kabupaten Banggai yang diperkirakan akan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banggai dan/atau terjadi

perubahan yang mendasar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sehubungan dengan dilaksanakannya Pemilihan Presiden Republik Indonesia pada Tahun 2029, maka strategi, arah kebijakan, dan program yang ada dapat ditinjau kembali dan hasilnya dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Banggai untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya;

- k. Bila dalam pelaksanaannya dinilai perlu untuk melakukan perubahan sasaran pada tahun-tahun tertentu tetapi tidak mengubah sasaran akhir RPJMD untuk program yang bersangkutan, maka atas persetujuan Bupati, penetapan perubahan sasaran tersebut dimuat dalam RKPD tahun yang bersangkutan.

Dengan penyusunan dan penetapan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029, diharapkan visi **“Bergerak Bersama Berkelanjutan Menuju Gerbang Timur Sulawesi Tengah (GERakan BANGgai Terdepan, Inovatif, MajU dan sejahteRa)”** dapat diwujudkan.